



PEMERINTAH ACEH

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2020

Audited

TAHUN 2021



PEMERINTAH ACEH



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, atas rahmat dan karunia Allah S.W.T Pemerintah Aceh dapat melaksanakan program kerja Tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2020 dengan maksimal.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, serta berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah dilakukan Refocusing dan beberapa kali pengeseran, terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2020 maka dengan ini Pemerintah Aceh menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menilai kondisi Kas, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.


Laporan Keuangan Pemerintah Aceh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2020 ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja tahun 2020.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun 2020 yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2020.
4. Laporan Operasional, menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Aceh tahun 2020 yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Aceh.
5. Laporan Perubahan Ekuitas, menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas Pemerintah Aceh yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir 2020.
6. Laporan Arus Kas, memberikan informasi arus kas bersih dari aktivitas operasional, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan, arus kas bersih dari aktivitas non anggaran, sehingga di ketahui kenaikan/penurunan kas selama periode pelaporan, ditambah saldo kas pada bendahara dan saldo kas BLUD.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan, dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, disertai penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Aceh.

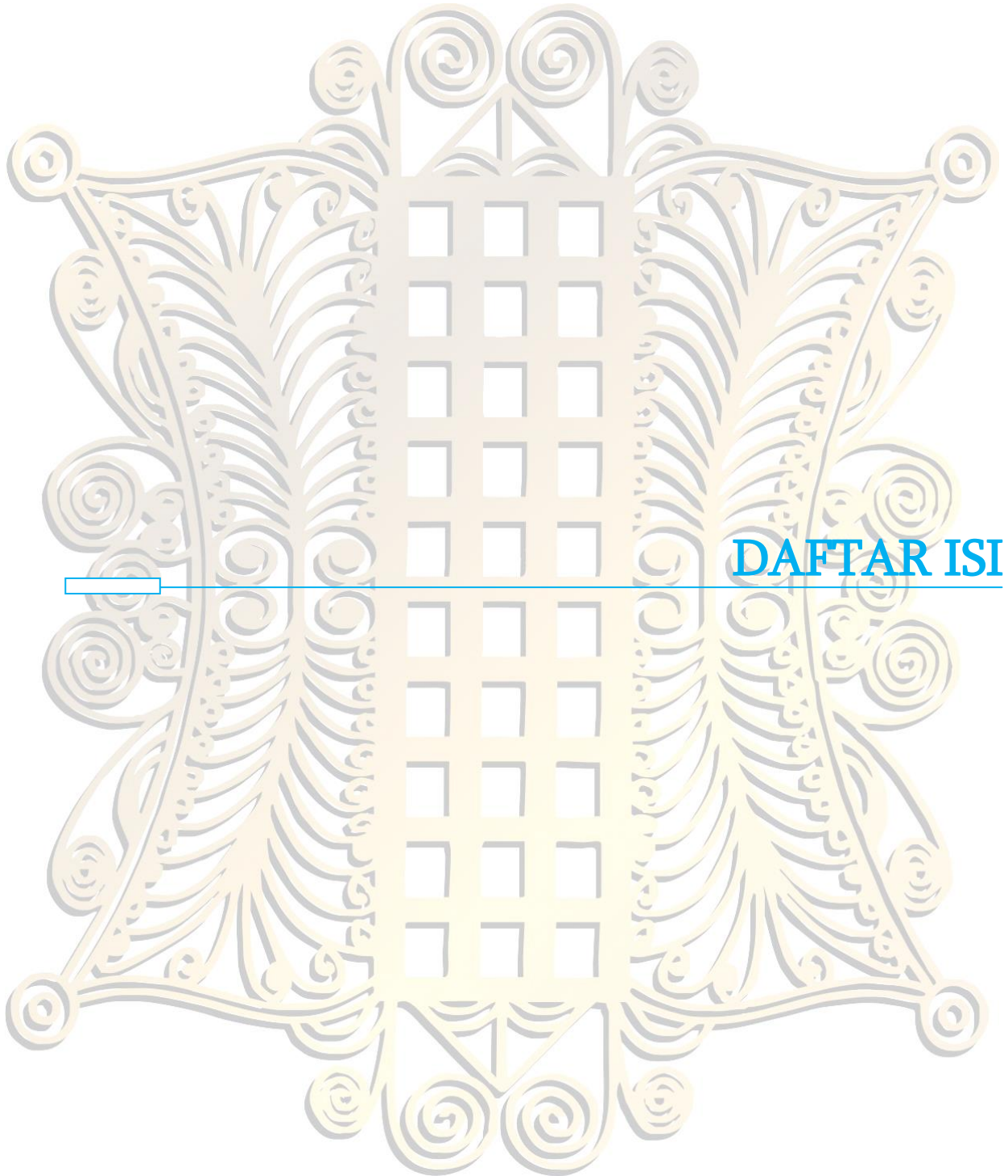
Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, Mei 2021
GUBERNUR ACEH


Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
LAPORAN KEUANGAN POKOK	1
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH	1
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
C. NERACA	4
D. LAPORAN OPERASIONAL	7
E. LAPORAN ARUS KAS	9
F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	14
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA	18
2.1 Ekonomi Makro	18
2.2 Kebijakan Keuangan	27
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBA	30

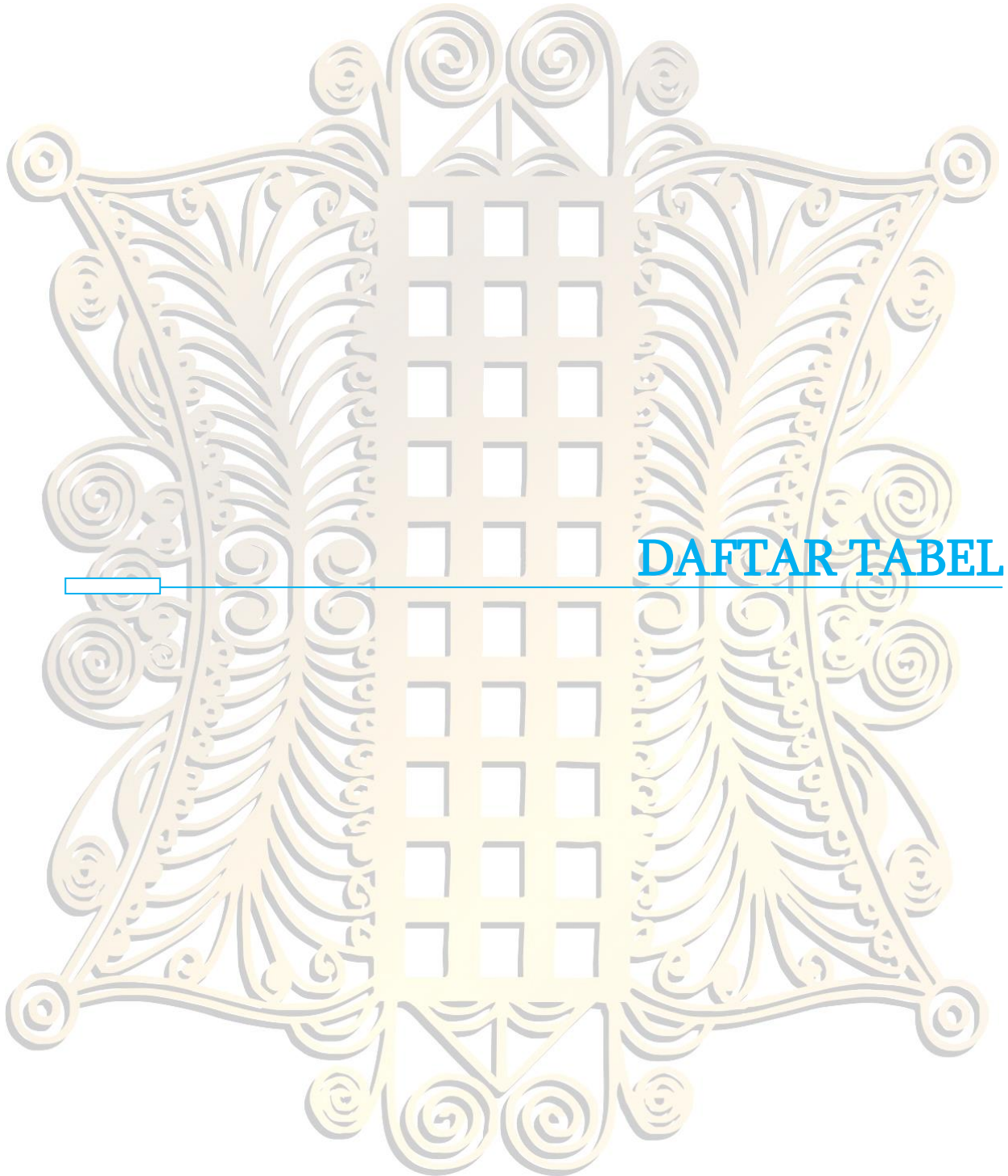
	HALAMAN
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 35
3.1	Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh..... 35
3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Aceh 38
3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Modal 49
3.4	Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 52
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA 57
4.1	Lingkungan Akuntansi Pemerintah Aceh..... 57
4.2	Entitas Pelaporan Keuangan 57
4.3	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 58
4.4	Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 58
4.5	Pengukuran Unsur Laporan Keuangan 60
4.6	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah..... 62
BAB V	PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN 118
5.1	Penjelasan atas Akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)..... 118
5.2	Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)..... 140
5.3	Penjelasan atas Akun dalam Neraca 141
5.4	Penjelasan atas Akun dalam Laporan Operasional (LO).. 194
5.5	Penjelasan atas Akun dalam Laporan Arus Kas (LAK) .. 209
5.6	Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)..... 214
BAB VI	INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN 216
6.1	Penetapan APBA Tahun Anggaran 2020..... 216
6.2	Dana Otonomi Khusus (Otsus) 217
6.3	Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)..... 218
6.4	Aset Helicopter M1-2..... 219
6.5	PD. Genap Mupakat 219

6.6	Penghapusbukuan Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2007 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh	221
6.7	Pencatatan Kas Yang Belum Dipertanggungjawabkan Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh	221
6.8	Tunggakan pembayaran atas paket pengadaan pada Dinas Pendidikan Aceh	222
6.9	Empat Puluh Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang harus dibayarkan.....	222
6.10	Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat.....	223
6.11	Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat.....	223
BAB VII	PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	226
7.1	Gambaran Umum Provinsi Aceh.....	226
7.2	Visi dan Misi Pemerintah Aceh.....	231
BAB VIII	PENUTUP.....	

LAMPIRAN



PEMERINTAH ACEH



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Dampak Covid-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020	26
Tabel 2.2.	APBA TA 2016-2020	28
Tabel 2.3.	Perubahan APBA Akibat Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran 2020	33
Tabel 3.1.	Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2020 Menurut Kelompok Pendapatan.....	35
Tabel 3.2.	Realisasi Pendapatan menurut Objek Penerimaan Tahun Anggaran 2020	37
Tabel 3.3.	Pencapaian Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.....	38
Tabel 3.4.	Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Bidang Kesehatan.	54
Tabel 3.5.	Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Bidang Sosial	55
Tabel 3.6.	Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Bidang Ekonomi...	56
Tabel 4.1.	Klasifikasi Kas dan Setara Kas	63
Tabel 4.2.	Klasifikasi Piutang.....	65
Tabel 4.3.	Perhitungan penyisihan Piutang	67
Tabel 5.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan TA 2019.....	118
Tabel 5.2.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh	118
Tabel 5.3.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak	119
Tabel 5.4.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi.....	119
Tabel 5.5.	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Yang Sah.....	120
Tabel 5.6.	Daftar Rincian Uang Kas dalam Mata Uang Asing pada BLUD UPTD PMRB.....	121
Tabel 5.7.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer	121
Tabel 5.8.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak	122
Tabel 5.9.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.....	122
Tabel 5.10.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus	123
Tabel 5.11.	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah ...	124
Tabel 5.12.	Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.....	124
Tabel 5.13.	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019.....	124
Tabel 5.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	125

Tabel 5.15.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	125
Tabel 5.16.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai untuk Penanganan Covid-19.....	126
Tabel 5.17.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	126
Tabel 5.18.	Realisasi Belanja BLUD.....	127
Tabel 5.19.	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19.....	128
Tabel 5.20.	Anggaran dan Realisasi Hibah Dalam Bentuk Uang.....	129
Tabel 5.21.	Belanja Hibah Keputusan Gubernur Aceh	129
Tabel 5.22.	Anggaran dan Realisasi Hibah untuk Penanganan Covid-19.....	131
Tabel 5.23.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang.....	131
Tabel 5.24.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang.....	131
Tabel 5.25.	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19.....	132
Tabel 5.26.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal.....	132
Tabel 5.27.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah	132
Tabel 5.28.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Penanganan Covid-19.....	133
Tabel 5.29.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	134
Tabel 5.30.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Penanganan Covid-19.....	134
Tabel 5.31.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	135
Tabel 5.32.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Covid-19..	136
Tabel 5.33.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Covid 19	136
Tabel 5.34.	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer	137
Tabel 5.35.	Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah.	137
Tabel 5.36.	Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	138
Tabel 5.37.	Belanja Bantuan Keuangan untuk Penanganan Covid-19..	138
Tabel 5.38.	SiLPA Berdasarkan Sumber Dana	139
Tabel 5.39.	Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal.....	140
Tabel 5.40.	Perhitungan SiLPA	140
Tabel 5.41.	Rincian Aset Lancar.....	141
Tabel 5.42.	Rekonsiliasi Bank.....	142

Tabel 5.43.	Rincian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan.....	143
Tabel 5.44.	Kas Di Bendahara Penerimaan Yang Telah Disetor	143
Tabel 5.45.	Kas di Bendahara Pengeluaran.....	144
Tabel 5.46.	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran	144
Tabel 5.47.	Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	145
Tabel 5.48.	Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2020	146
Tabel 5.49.	Rincian Kas di BLUD	146
Tabel 5.50.	Rekonsiliasi Bank Pada BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin ..	147
Tabel 5.51.	Rekonsiliasi Bank Pada Rumah Sakit Jiwa	147
Tabel 5.52.	Rekonsiliasi Bank Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.....	148
Tabel 5.53.	Rekonsiliasi Bank Pada BLUD Dinas Syariat Islam	148
Tabel 5.54.	Rekonsiliasi Bank pada BLUD Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.....	148
Tabel 5.55.	Rekonsiliasi Bank Pada BLUD Dinas Pertenakan Aceh	149
Tabel 5.56.	Kas Lainnya	149
Tabel 5.57.	Rincian Kas Lainnya	150
Tabel 5.58.	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	151
Tabel 5.59.	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.....	152
Tabel 5.60.	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	152
Tabel 5.61.	Penyisihan Piutang Retribusi.....	155
Tabel 5.62.	Piutang BLUD	155
Tabel 5.63.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah.....	156
Tabel 5.64.	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	157
Tabel 5.65.	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	158
Tabel 5.66.	Sewa Dibayar Di Muka	160
Tabel 5.67.	Asuransi Dibayar Di Muka	161
Tabel 5.68.	Tagihan Penjualan Barang Milik Daerah	163
Tabel 5.69.	Penyisihan Piutang Penjualan Barang Milik Daerah	163
Tabel 5.70.	Persediaan Barang Pakai Habis	164
Tabel 5.71.	Persediaan Bahan Material.....	164
Tabel 5.72.	Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kabupaten/Kota	165
Tabel 5.73.	Dana Bergulir	167
Tabel 5.74.	Rincian Setoran PER.....	167
Tabel 5.75.	Rekening Dana PER.....	168
Tabel 5.76.	Saldo Dana PER.....	168
Tabel 5.77.	Saldo Dana PINBUK	168
Tabel 5.78.	Pengembalian Dana PINBUK	169
Tabel 5.79.	Penyisihan Dana Bergulir.....	170

Tabel 5.80.	Investasi Permanen.....	170
Tabel 5.81.	Penyertaan Modal Bank Aceh	171
Tabel 5.82.	Penyertaan Modal BPR Mustaqim Sukamakmur	171
Tabel 5.83.	Penyertaan Modal PD Pembangunan Aceh.....	172
Tabel 5.84.	Mutasi Aset Tetap	172
Tabel 5.85.	Mutasi Aset Tetap Tanah.....	173
Tabel 5.86.	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	173
Tabel 5.87.	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	174
Tabel 5.88.	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	175
Tabel 5.89.	Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	176
Tabel 5.90.	Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	176
Tabel 5.91.	Akumulasi Penyusutan.....	177
Tabel 5.92.	Rincian Dana Cadangan	179
Tabel 5.93.	Aset Kerjasama Dengan Yayasan Tgk. Fakinah	182
Tabel 5.94.	PT. Pembangunan Aceh (PEMA) - Ladong	182
Tabel 5.95.	PT. Pembangunan Aceh (PEMA) – KEK Arun.....	183
Tabel 5.96.	Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama	184
Tabel 5.97.	Lisensi dan Hak Cipta	184
Tabel 5.98.	Rincian Aset Tak Berwujud Lainnya	185
Tabel 5.99.	Amortisaasi Aset Tak Berwujud.....	186
Tabel 5.100.	Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional.....	188
Tabel 5.101.	Aset Tetap pada KIP, BPKS dan BPKapet	189
Tabel 5.102.	Pendapatan Diterima Di Muka	190
Tabel 5.103.	Rincian Utang Belanja	190
Tabel 5.104.	Rincian Utang Dana Sertifikasi	192
Tabel 5.105.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO	194
Tabel 5.106.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Asli Aceh-LO	194
Tabel 5.107.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Aceh-LO.....	194
Tabel 5.108.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Aceh-LO	195
Tabel 5.109.	Setoran Deviden TA 2020	195
Tabel 5.110.	Kenaikan/Penurunan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO	196
Tabel 5.111.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer-LO	196
Tabel 5.112.	Kenaikan/Penurunan Dana Bagi Hasil Pajak-LO	196
Tabel 5.113.	Kenaikan/Penurunan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	197
Tabel 5.114.	Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus-LO.....	198
Tabel 5.115.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO.....	198

Tabel 5.116.	Kenaikan/Penurunan Lain-Lain Pendapatan yang Sah- LO	199
Tabel 5.117.	Kenaikan/Penurunan Pendapatan Hibah - LO	199
Tabel 5.118.	Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO.....	199
Tabel 5.119.	Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO.....	200
Tabel 5.120.	Kenaikan/Penurunan Beban Persediaan-LO.....	201
Tabel 5.121.	Beban Persediaan dari Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Covid 19	202
Tabel 5.122.	Kenaikan/Penurunan Beban Jasa	202
Tabel 5.123.	Beban Jasa dari Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Covid 19	203
Tabel 5.124.	Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan	204
Tabel 5.125.	Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas	204
Tabel 5.126.	Kenaikan/Penurunan Beban Hibah	205
Tabel 5.127.	Beban Hibah dari Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Covid 19	206
Tabel 5.128.	Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi..	206
Tabel 5.129.	Kenaikan/Penurunan Beban Penyisihan Piutang.....	206
Tabel 5.130.	Kenaikan/Penurunan Beban Transfer	207
Tabel 5.131.	Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019.....	209
Tabel 5.132.	Arus Kas Dari Keluar Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019	210
Tabel 5.133.	Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2020 dan 2019	211
Tabel 5.134.	Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2020 dan 2019	211
Tabel 5.135.	Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran Tahun 2020 dan 2019	212
Tabel 5.136.	Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	214
Tabel 6.1.	Tahapan Penetapan APBA 2020	216
Tabel 6.2.	Penerimaan Dana Otsus Tahun Anggaran 2008-2020.....	217
Tabel 6.3.	Realisasi JKRA Tahun 2010-2020	218
Tabel 6.4.	Komposisi Saham Baru PD. Genap Mupakat	219
Tabel 6.5.	Rekonsiliasi Utang Jangka Panjang.....	223
Tabel 6.6.	Rencana Debt Swap	223
Tabel 6.7.	Realisasi Kegiatan Debt Swap	224
Tabel 6.8.	Hasil Verifikasi Ulang Realisasi Kegiatan Debt Swap.....	224
Tabel 6.9.	Rincian Hasil Verifikasi Pelaksanaan Debt Swap	225
Tabel 7.1.	Susunan Satuan Kerja Pemerintah Aceh	230



PEMERINTAH ACEH



DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 2 Tahun Terakhir	19
Gambar 2.2	Distribusi PDRB Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2020	20
Gambar 2.3	Fluktuasi Tingkat Kemiskinan Selama Lima Tahun Terakhir...	21
Gambar 2.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Di Provinsi Aceh, 2019-2020	23
Gambar 2.5	Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran dan Persentase Provinsi Aceh	23
Gambar 2.6	Peningkatan persentase penduduk yang bekerja	24
Gambar 2.7	Inflasi Aceh (2018 – 2020).....	25
Gambar 2.8	Indeks Pembangunan Manusia 2016-2020.....	27
Gambar 3.1	Anggaran dan Realisasi APBA Tahun Anggaran 2020	35
Gambar 3.2	Kontribusi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2020	36
Gambar 3.3	Profil APBA Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Klasifikasi Fungsi.....	41
Gambar 3.4	Pencapaian Kinerja menurut urusan Pemerintahan Aceh	47
Gambar 3.5	Pencapaian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020	49
Gambar 3.6	Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Tahun Anggaran 2020	53



PEMERINTAH ACEH



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019
- Lampiran 2 Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Hasil Migas Kabupaten/Kota (yang Pendanaannya Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil dan Dana Otonomi Khusus) Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019
- Lampiran 3 Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019
- Lampiran 4 Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019
- Lampiran 5 Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Dana Otonomi Khusus Aceh
- Lampiran 6 Piutang Pajak Air Permukaan
- Lampiran 7 Rincian Piutang BLUD
- Lampiran 8 Rincian Persediaan Barang Habis Pakai Pemerintah Aceh
- Lampiran 9a Rincian Persediaan Bahan/Material Pemerintah Aceh
- Lampiran 9b Daftar Obat Kadaluarsa Tahun 2020
- Lampiran 9c Daftar Bahan Medis Habis Pakai Tahun 2020
- Lampiran 10 Rincian Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Masyarakat/Kabupaten/Kota Pemerintah Aceh
- Lampiran 11 Rekapitulasi Perkembangan Pengembalian Dana LUEP APBA Periode 2020
- Lampiran 11a Resume Penyerahan Pengurusan Piutang LUEP Tahun 2020
- Lampiran 12 Aset Tetap Berdasarkan Kondisi Barang
- Lampiran 13 Extracomtable
- Lampiran 14 Daftar Aset Tak Berwujud
- Lampiran 15 Aset Rusak Berat
- Lampiran 16 Aset Hilang
- Lampiran 17 Aset Hibah
- Lampiran 18 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2020
- Lampiran 19 Utang Belanja
- Lampiran 20 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak
- Lampiran 21 Alokasi Dana Otsus Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Lampiran 22 Paket Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang Masih Harus Dibayarkan



PEMERINTAH ACEH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

*Laporan Keuangan Tahun 2020
Audited*




GUBERNUR ACEH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (3) Neraca, (4) Laporan Operasional (LO), (5) Laporan Arus Kas (LAK), (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, Mei 2021
GUBERNUR ACEH

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH



RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah menjadi jelas. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan luas dengan titik berat otonomi diletakkan pada daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih mandiri, yaitu pengelolaan urusan rumah tangga maupun pengelolaan keuangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menyetujui Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Aceh telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 pasal 100, 101, 102, 103 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh pasal 274, Pemerintah Aceh menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 meliputi :

1. **Laporan Realisasi Anggaran**, menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2020, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

1) Pendapatan	: Rp	14.439.920.557.021,15
2) Belanja dan Transfer	: Rp	13.242.212.801.894,57
Surplus	: Rp	13.242.212.801.894,57
3) Pembiayaan	:	
- Penerimaan	: Rp	2.848.097.021.013,53
- Pengeluaran	: Rp	76.187.421.357,82
- Pembiayaan Netto	: Rp	2.771.909.599.655,71

2. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**, menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2020 dengan periode sebelumnya. Dengan realisasi sebagai berikut:

a) Saldo Anggaran Lebih Awal	: Rp	2.846.141.906.063,38
b) Sisa Lebih Anggaran (SiLPA)	: Rp	3.969.617.354.782,29
c) Saldo Anggaran Akhir	: Rp	3.969.617.354.782,29

3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Aceh mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2020, sebagai berikut:

a) Aset	: Rp	30.293.837.027.323,30
b) Kewajiban	: Rp	3.037.487.998.856,06
c) Ekuitas	: Rp	27.256.349.028.467,20

4. Laporan Operasional, menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan beban selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan-LO	: Rp	14.187.497.367.536,20
b) Beban-LO	: Rp	12.980.594.096.287,58
Surplus dari Operasi LO	: Rp	1.206.903.271.248,72
c) Defisit dari Kegiatan Non Operasional LO	: Rp	(132.361.566.706,83)
d) Surplus LO	: Rp	1.074.541.704.541,89

5. Laporan Arus Kas, menggambarkan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan aktivitas pendanaan dan aktivitas non anggaran.

Nilai arus kas bersih berdasarkan aktivitas selama satu Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a) Nilai kas bersih dari Aktivitas Operasi	: Rp	2.797.082.403.283,53
b) Nilai kas bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan	: Rp	(1.738.315.161.276,39)
c) Nilai kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	: Rp	1.955.114.950,15
d) Nilai kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran	: Rp	-

Saldo kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a) Kenaikan Kas Selama Periode Akuntansi	: Rp	1.060.722.356.957,29
b) Saldo Awal Kas di BUA & Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp	2.830.183.823.590,60
c) Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas Bendahara Pengeluaran	: Rp	3.890.906.180.547,89
d) Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	: Rp	-
e) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp	258.029.046,35
f) Saldo Akhir Kas BLUD	: Rp	77.958.725.389,05
g) Saldo Akhir Kas di BOS	: Rp	494.419.799,00
h) Saldo Akhir Kas	: Rp	3.969.617.354.782,29


6. Laporan Perubahan Ekuitas, menggambarkan pergerakan ekuitas Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a) Ekuitas Awal	: Rp	25.709.483.208.840,60
b) Surplus/Defisit LO	: Rp	1.074.541.704.541,89
c) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	: Rp	472.324.115.084,73
d) Jumlah Ekuitas Akhir	: Rp	27.256.349.028.467,20

7. Catatan atas Laporan Keuangan, menguraikan Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan, Sistematika Penulisan, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA, serta Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan dan Kebijakan Akuntansi. Selain itu dalam rangka pengungkapan yang memadai, CaLK juga menyajikan informasi tentang Penjelasan atas Pos-Pos yang disajikan dalam

Laporan Keuangan, Informasi Penting dan Kewajiban Kontinjensi yang mempengaruhi Laporan Keuangan, serta Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

✓ Banda Aceh, Mei 2021 h
GUBERNUR ACEH

f Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Laporan Keuangan Tahun 2020
Audited*

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



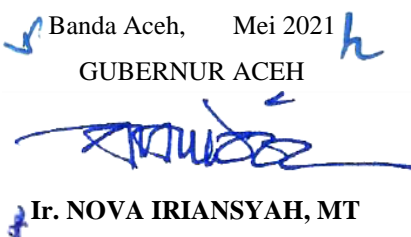
PEMERINTAH ACEH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian (1)	Anggaran TA 2020 (2)	Realisasi TA 2020 (3)	% (4)	Realisasi TA 2019 (5)
PENDAPATAN ACEH				
Pendapatan Asli Aceh	2.184.607.197.048,00	2.570.775.877.183,15	117,68	2.698.912.471.144,15
Pendapatan Pajak Aceh	1.275.366.715.499,00	1.477.991.066.969,65	115,89	1.409.251.915.060,80
Pendapatan Retribusi Aceh	12.133.554.700,00	8.159.969.910,00	67,25	17.087.692.809,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	202.386.465.655,00	181.700.799.036,00	89,78	182.385.550.448,00
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah	694.720.461.194,00	902.924.041.267,50	129,97	1.090.187.312.826,35
Pendapatan Transfer	11.818.700.337.176,00	11.826.017.687.067,00	100,06	13.049.675.124.487,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	4.011.409.904.869,00	3.885.903.189.991,00	96,87	4.279.088.344.765,00
Dana Bagi Hasil Pajak	182.205.538.407,00	127.272.935.167,00	69,85	113.615.982.457,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	24.006.084.462,00	39.867.057.258,00	166,07	98.332.701.261,00
Dana Alokasi Umum	1.961.334.010.000,00	1.956.492.796.000,00	99,75	2.322.266.506.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.843.864.272.000,00	1.762.270.401.566,00	95,57	1.744.873.155.047,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	7.807.290.432.307,00	7.940.114.497.076,00	101,70	8.770.586.779.722,00
Dana Otonomi Khusus	7.555.278.348.000,00	7.555.278.348.000,00	100,00	8.357.471.654.000,00
Dana Penyesuaian	252.012.084.307,00	384.836.149.076,00	152,71	413.115.125.722,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.093.980.000,00	43.126.992.771,00	2.059,57	4.213.306.021,00
Pendapatan Hibah	2.093.980.000,00	43.126.992.771,00	2.059,57	4.213.306.021,00
JUMLAH PENDAPATAN	14.005.401.514.224,00	14.439.920.557.021,15	103,10	15.752.800.901.652,15
BELANJA ACEH				
Belanja Operasi	9.665.729.666.500,00	7.985.982.044.904,10	82,62	9.282.694.398.476,55
Belanja Pegawai	2.886.272.033.465,00	2.483.284.443.746,00	86,04	2.461.315.744.896,00
Belanja Barang dan Jasa	3.907.674.602.124,00	3.702.404.761.736,99	94,75	4.514.524.421.391,64
Belanja Hibah	1.376.016.275.582,00	1.422.789.246.408,91	103,40	1.946.365.153.669,91
Belanja Bantuan Sosial	1.495.766.755.329,00	377.503.593.012,20	25,24	360.489.078.519,00
Belanja Modal	2.094.518.027.289,00	1.755.472.079.286,47	83,81	3.162.088.165.983,04
Belanja Tanah	80.964.879.363,00	71.123.465.326,00	87,84	86.773.892.473,00
Belanja Peralatan dan Mesin	522.067.347.051,00	421.332.296.912,80	80,70	841.812.882.309,00
Belanja Gedung dan Bangunan	622.066.974.213,00	567.190.383.202,63	91,18	820.034.893.478,62
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	847.341.768.197,00	572.579.779.264,78	67,57	1.320.184.310.775,42
Belanja Aset Tetap Lainnya	22.077.058.465,00	123.246.154.580,26	558,25	93.282.186.947,00
Belanja Tidak Terduga	439.760.468.964,00	158.460.075.459,00	36,03	4.838.896.610,92
Belanja Tidak Terduga	439.760.468.964,00	158.460.075.459,00	36,03	4.838.896.610,92
Jumlah Belanja	12.200.008.162.753,00	9.899.914.199.649,57	81,15	12.449.621.461.070,50

Uraian (1)	Anggaran TA 2020 (2)	Realisasi TA 2020 (3)	% (4)	Realisasi TA 2019 (5)
TRANSFER	3.627.701.230.250,00	3.342.298.602.245,00	92,13	3.338.261.924.419,65
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	883.489.947.529,00	802.937.015.414,00	90,88	691.068.684.915,65
Transfer Bagi Hasil Pajak Aceh Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	883.489.947.529,00	802.937.015.414,00	90,88	691.068.684.915,65
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.744.211.282.721,00	2.539.361.586.831,00	92,54	2.647.193.239.504,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	2.744.211.282.721,00	2.539.361.586.831,00	92,54	2.644.482.604.204,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	2.710.635.300,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	15.827.709.393.003,00	13.242.212.801.894,57	83,66	15.787.883.385.490,16
SURPLUS/DEFISIT	(1.822.307.878.779,00)	1.197.707.755.126,58	(65,72)	(35.082.483.838,01)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	1.822.307.878.779,00	2.848.097.021.013,53	156,29	2.956.538.853.603,71
Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.822.307.878.779,00	2.846.141.906.063,38	156,18	2.954.457.964.942,71
Penarikan Dana Bergulir	-	1.955.114.950,15	-	2.080.888.661,00
Pengeluaran Pembiayaan	-	76.187.421.357,82	-	75.314.463.702,32
Pembentukan Dana Cadangan	-	76.187.421.357,82	-	75.314.463.702,32
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Aceh	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	1.822.307.878.779,00	2.771.909.599.655,71	152,11	2.881.224.389.901,39
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	-	3.969.617.354.782,29	-	2.846.141.906.063,38

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, Mei 2021

 GUBERNUR ACEH
 Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

*Laporan Keuangan Tahun 2020
Audited*


B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH ACEH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

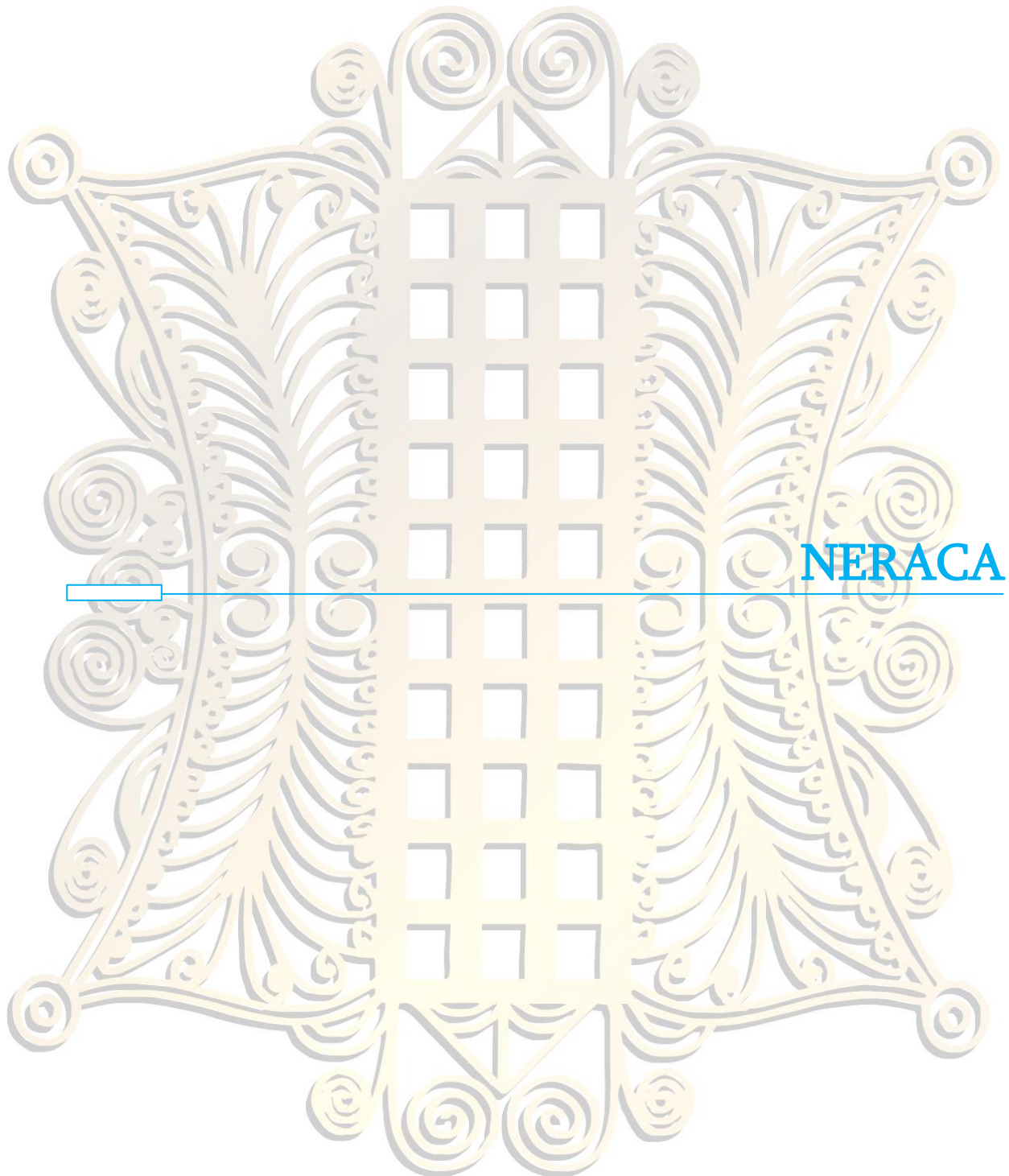
Uraian (1)	(Dalam Rupiah)	
	2020 (2)	2019 (2)
Saldo Anggaran Lebih Awal	2.846.141.906.063,38	2.954.457.964.942,71
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	2.846.141.906.063,38	2.954.457.964.942,71
Subtotal	-	-
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)	3.969.617.354.782,29	2.846.141.906.063,38
Subtotal	3.969.617.354.782,29	2.846.141.906.063,38
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-
Saldo Anggaran Akhir	3.969.617.354.782,29	2.846.141.906.063,38

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, Mei 2021
 GUBERNUR ACEH

 Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH



NERACA

C. NERACA



**PEMERINTAH ACEH
NERACA**
Per 31 Desember 2020 dan 2019

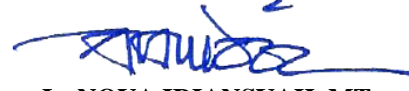
(Dalam Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Aceh	3.890.482.972.914,89	2.804.283.964.778,60
Kas di Bendahara Penerimaan	258.029.046,35	346.880.461,36
Kas di Bendahara Pengeluaran	423.207.633,00	25.899.858.812,00
Kas Lainnya di Bendaharan Pengeluaran	-	538.687.667,00
Kas di BOS	494.419.799,00	-
Kas di Bendahara BLUD	77.958.725.389,05	15.611.202.011,42
Kas Lainnya	3.507.442.717,00	-
JUMLAH KAS	3.973.124.797.499,29	2.846.680.593.730,38
Piutang Pajak	29.259.361.601,00	30.070.365.758,80
Penyisihan Piutang Pajak	(539.560.617,15)	(535.965.624,05)
Piutang Pajak Netto	28.719.800.983,86	29.534.400.134,75
Piutang Retribusi	453.327.000,00	-
Penyisihan Piutang Retribusi	(2.266.635,00)	-
Piutang Retribusi Netto	451.060.365,00	-
Piutang Lain-lain PAA yang Sah	88.951.032.532,00	178.996.176.857,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	(1.465.360.554,63)	(1.413.518.189,26)
Piutang Lain-lain PAA yang Sah Netto	87.485.671.977,38	177.582.658.667,74
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	9.203.679.282,48	8.384.709.060,86
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(1.586.478.764,45)	(1.582.231.531,09)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Netto	7.617.200.518,03	6.802.477.529,77
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	-	69.488.690.176,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	(347.443.450,88)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto	-	69.141.246.725,12
Belanja Dibayar Dimuka	3.440.814.702,92	7.202.705.487,92
Uang Muka	-	13.751.254.848,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	83.165.150,58	81.749.357,83
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(29.339.528,79)	(49.931.474,31)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	53.825.621,79	31.817.883,52
Persediaan	602.280.998.808,15	936.254.444.823,39
JUMLAH ASET LANCAR	4.703.174.170.476,40	4.086.981.599.830,58

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Nonpermanen		
Investasi Dana Bergulir	90.081.023.084,90	92.038.202.935,05
Penyisihan Dana Bergulir	(90.081.023.084,90)	(92.038.202.935,05)
Jumlah Investasi Nonpermanen	-	-
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh	1.592.869.162.510,55	1.588.251.026.918,74
Jumlah Investasi Permanen	1.592.869.162.510,55	1.588.251.026.918,74
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1.592.869.162.510,55	1.588.251.026.918,74
ASET TETAP		
Tanah	2.936.185.931.752,79	2.847.946.851.175,79
Peralatan dan Mesin	4.337.215.141.058,98	3.840.630.661.923,83
Gedung dan Bangunan	6.789.986.126.555,35	6.117.420.114.518,06
Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.459.106.691.222,60	12.932.126.342.817,80
Aset Tetap Lainnya	839.875.057.814,71	1.218.969.898.679,71
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.364.315.528.268,97	1.211.192.597.685,17
Akumulasi Penyusutan	(11.280.179.473.953,50)	(10.960.912.403.890,80)
JUMLAH ASET TETAP	18.446.505.002.719,90	17.207.374.062.909,60
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	1.244.360.989.281,02	1.168.173.567.923,20
JUMLAH DANA CADANGAN	1.244.360.989.281,02	1.168.173.567.923,20
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	717.751,00	4.753.939,50
Tagihan Penjualan Angsuran Netto	717.751,00	4.753.939,50
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	25.601.678.307,43	25.622.178.307,43
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	25.601.678.307,43	25.622.178.307,43
Kerjasama Pemanfaatan	188.012.963.600,00	30.364.856.046,00
Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan	(78.536.124.236,20)	(5.786.466.915,10)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	109.476.839.363,80	24.578.389.130,90
Aset Tak Berwujud	30.397.239.283,00	42.652.221.448,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(26.280.429.623,50)	(26.108.635.680,71)
Aset Tak Berwujud Netto	4.116.809.659,50	16.543.585.767,29
Aset Lain-lain	4.167.731.657.253,69	4.336.972.372.727,68
JUMLAH ASET LAINNYA	4.306.927.702.335,42	4.403.721.279.872,80
JUMLAH ASET	30.293.837.027.323,30	28.454.501.537.454,90
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	337.725.258,00	-
Pendapatan Diterima Dimuka	2.595.633.905.910,65	2.252.806.970.283,07
Utang Belanja	435.662.487.189,41	462.523.551.785,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.853.880.498,00	5.853.880.498,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.037.487.998.856,06	2.721.184.402.566,07

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)
Kewajiban Jangka Panjang		
Utang Dalam Negeri - Setor Perbankan	-	23.833.926.048,22
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	23.833.926.048,22
JUMLAH KEWAJIBAN	3.037.487.998.856,06	2.745.018.328.614,29
EKUITAS		
Ekuitas	27.256.349.028.467,20	25.709.483.208.840,60
JUMLAH EKUITAS	27.256.349.028.467,20	25.709.483.208.840,60
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	30.293.837.027.323,30	28.454.501.537.454,90

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, Mei 2021
 GUBERNUR ACEH

 Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH

LAPORAN OPERASIONAL

*Laporan Keuangan Tahun 2020
Audited*

D. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH ACEH LAPORAN OPERASIONAL

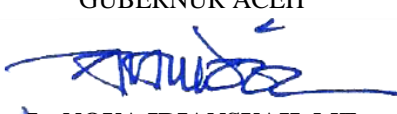
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Kenaikan / Penurunan (4)	(%) (5)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA) - LO				
Pendapatan Pajak Aceh	1.477.180.062.811,65	1.410.261.350.614,60	66.918.712.197,05	4,75
Pendapatan Retribusi Aceh	8.551.442.364,80	17.090.985.530,27	(8.539.543.165,47)	(49,97)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	249.290.944.300,35	313.813.537.045,26	(64.522.592.744,91)	(20,56)
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah	802.764.399.190,10	1.069.838.771.802,20	(267.074.372.612,10)	(24,96)
Jumlah Pendapatan Asli Aceh	2.537.786.848.666,90	2.811.004.644.992,33	(273.217.796.325,43)	(9,72)
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	127.272.935.167,00	136.084.736.864,00	(8.811.801.697,00)	(6,48)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	39.867.057.258,00	102.954.069.723,00	(63.087.012.465,00)	(61,28)
Dana Alokasi Umum	1.956.492.796.000,00	2.322.266.506.000,00	(365.773.710.000,00)	(15,75)
Dana Alokasi Khusus	1.730.846.802.923,64	1.808.564.320.065,74	(77.717.517.142,10)	(4,30)
Jumlah Pendapatan Transfer	3.854.479.591.348,64	4.369.869.632.652,74	(515.390.041.304,10)	(11,79)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus	7.228.523.338.980,66	8.629.976.025.131,11	(1.401.452.686.150,45)	(16,24)
Dana Penyesuaian	374.445.514.076,00	455.513.693.029,00	(81.068.178.953,00)	(17,80)
Jumlah Pendapatan Transfer lainnya	7.602.968.853.056,66	9.085.489.718.160,11	(1.482.520.865.103,45)	(16,32)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	181.871.439.464,00	2.860.424.172.937,69	(2.678.552.733.473,69)	(93,64)
Pendapatan Lainnya	10.390.635.000,00	-	10.390.635.000,00	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	192.262.074.464,00	2.860.424.172.937,69	(2.668.162.098.473,69)	(93,28)
Jumlah Pendapatan	14.187.497.367.536,20	19.126.788.168.742,92	(4.939.352.065.206,67)	(25,82)
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	2.437.166.511.656,00	2.399.935.582.204,00	37.230.929.452,00	1,55
Beban Persediaan	818.172.618.627,15	794.003.319.436,65	24.169.299.190,50	3,04
Beban Jasa	2.837.727.089.270,71	3.250.298.693.210,38	(412.571.603.939,67)	(12,69)
Beban Pemeliharaan	115.090.923.976,51	108.669.115.138,81	6.421.808.837,70	5,91
Beban Perjalanan Dinas	165.634.702.617,00	354.565.581.552,00	(188.930.878.935,00)	(53,29)
Beban Hibah	1.917.738.076.850,38	2.693.334.493.805,10	(775.596.416.954,72)	(28,80)
Beban Bantuan Sosial	17.921.460.000,00	6.961.815.500,00	10.959.644.500,00	157,43
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.321.286.298.304,52	1.170.378.198.548,69	150.908.099.755,83	12,89

Uraian (1)	2020 (2)	2019 (3)	Kenaikan / Penurunan (4)	(%) (5)
Beban Penyisihan Piutang	741.186.030,09	722.960.705,36	18.225.324,73	2,52
Beban Transfer	3.280.202.492.984,00	3.265.950.031.291	14.252.461.693,08	0,44
Beban Lain-lain	68.912.735.971,12	39.492.705.425,03	29.420.030.546,09	74,49
Jumlah Beban Operasi	12.980.594.096.287,58	14.084.312.496.816,98	(1.103.718.400.529,46)	(7,84)
Surplus/Defisit Dari Operasi	1.206.903.271.248,72	5.042.475.671.925,93	(3.835.572.400.677,21)	(76,07)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	30.165.358.990,85	(30.165.358.990,85)	(100,00)
Jumlah Surplus Non Operasioanal	-	30.165.358.990,85	(30.165.358.990,85)	(100,00)
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	132.361.566.706,83	159.320.877.343,65	(26.959.310.636,82)	(16,92)
Jumlah Defisit Non Operasioanal	132.361.566.706,83	159.320.877.343,65	(26.959.310.636,82)	(16,92)
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(132.361.566.706,83)	(129.155.518.352,80)	(3.206.048.354,03)	2,48
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	1.074.541.704.541,89	4.913.320.153.573,13	(3.838.778.449.031,24)	(78,13)
POS LUAR BIASA PENDAPATAN				
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
Jumlah Beban Luar Biasa	-	-	-	-
POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	1.074.541.704.541,89	4.913.320.153.573,13	(3.838.778.449.031,24)	(78,13)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, Mei 2021
 GUBERNUR ACEH

 Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH



LAPORAN ARUS KAS

*Laporan Keuangan Tahun 2020
Audited*

E. LAPORAN ARUS KAS



**PEMERINTAH ACEH
LAPORAN ARUS KAS**

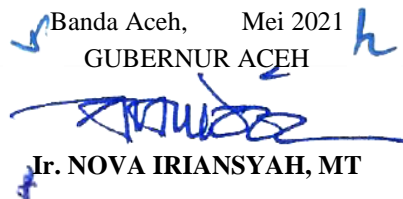
Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian (1)	Tahun 2020 (2)	Tahun 2019 (3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Aceh	1.477.991.066.969,65	1.409.251.915.060,80
Penerimaan Retribusi Aceh	8.271.131.958,92	17.772.544.263,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	181.700.799.036,00	182.385.561.355,60
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	284.885.269.695,06	505.285.571.178,01
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	127.272.935.167,00	113.615.982.457,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	39.867.057.258,00	98.332.701.261,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.956.492.796.000,00	2.322.266.506.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	661.008.601.566,00	1.744.873.155.047,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	7.555.278.348.000,00	8.357.471.654.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	384.836.149.076,00	413.115.125.722,00
Penerimaan Hibah	43.126.992.771,00	4.213.306.021,00
Jumlah Arus Masuk Kas	12.720.731.147.497,63	15.168.584.022.365,43
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	2.419.712.419.221,00	2.423.723.758.055,00
Pembayaran Barang dan Jasa	2.992.920.704.867,99	3.989.110.688.101,50
Pembayaran Hibah	632.753.349.408,91	1.946.365.153.669,91
Pembayaran Bantuan Sosial	377.503.593.012,20	360.489.078.519,00
Pembayaran Tidak Terduga	158.460.075.459,00	4.838.896.610,92
Pembayaran Bantuan Keuangan	2.539.361.586.831,00	2.644.482.604.204,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	802.937.015.414,00	691.068.684.915,65
Pembayaran Bagi Hasil Ke Kabupaten/Kota	-	2.710.635.300,00
Jumlah Arus Keluar Kas	9.923.648.744.214,10	12.062.789.499.376,98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.797.082.403.283,53	3.105.794.522.989,43
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Tanah	-	12.051.700.000,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	385.600.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	-	12.437.300.000,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	76.187.421.357,82	75.314.463.702,32
Perolehan Tanah	71.123.465.326,00	86.773.892.473,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	421.332.296.912,80	841.812.882.309,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	567.190.383.202,63	820.034.893.478,62
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	572.579.779.264,78	1.320.184.310.775,42
Perolehan Aset Tetap Lainnya	29.901.815.212,36	64.781.913.520,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.738.315.161.276,39	3.208.902.356.258,36
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(1.738.315.161.276,39)	(3.196.465.056.258,36)

Uraian (1)	Tahun 2020 (2)	Tahun 2019 (3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Aceh	1.955.114.950,15	2.080.888.661,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.955.114.950,15	2.080.888.661,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Aceh	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan</i>	<i>1.955.114.950,15</i>	<i>2.080.888.661,00</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	610.822.205.136,06	831.483.014.080,09
Jumlah Arus Masuk Kas	610.822.205.136,06	831.483.014.080,09
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	610.822.205.136,06	831.483.014.080,09
Jumlah Arus Keluar Kas	610.822.205.136,06	831.483.014.080,09
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Kenaikan/Penurunan Kas	1.060.722.356.957,29	(88.589.644.607,93)
Saldo Awal Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran	2.830.183.823.590,60	2.918.773.468.198,53
Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran	3.890.906.180.547,89	2.830.183.823.590,60
Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	538.687.667,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	258.029.046,35	346.880.461,36
Saldo Akhir Kas BLUD	77.958.725.389,05	15.611.202.011,42
Saldo Akhir Kas di BOS	494.419.799,00	-
Saldo Akhir Kas	3.969.617.354.782,29	2.846.680.593.730,38

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, Mei 2021

 GUBERNUR ACEH
 Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Laporan Keuangan Tahun 2020
Audited*

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS




PEMERINTAH ACEH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN (1)	2020 (2)	2019 (3)
EKUITAS AWAL	25.709.483.208.840,60	20.692.861.279.778,40
Surplus/Defisit - LO	1.074.541.704.541,89	4.913.320.153.573,13
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR	472.324.115.084,73	103.301.775.489,06
Koreksi Atas Kas	-	(17.887.103,17)
Koreksi Atas Piutang	(69.992.800.220,55)	16.516.375,75
Koreksi Nilai Persediaan	(38.755.472.221,00)	(22.118.495.484,24)
Koreksi Atas Investasi	(845.585.451,00)	2.651.241,00
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	55.621.320.815,67	115.101.982.910,25
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	240.555.245.249,91	664.392.242.497,16
Koreksi Aset Tak Berwujud Baru Ditemukan	(562.456.200,00)	2.372.961.896,00
Koreksi Atas Penyisihan Piutang	3.004.450.049,83	2.500.000,00
Koreksi Aset Lainnya	(16.831.239.537,64)	(731.098.512.377,54)
Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.838.053.434,46	(1.966.439.309,30)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	270.455.312.318,83	(13.736.970.952,85)
Koreksi Utang	23.837.286.846,22	90.351.225.796,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	27.256.349.028.467,20	25.709.483.208.840,60

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Banda Aceh, Mei 2021
 GUBERNUR ACEH

 Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH



CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

*Laporan Keuangan Tahun 2020
Audited*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan *good governance* serta taat azas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

Maksud penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Gubernur Aceh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintah Aceh melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

Pemerintah Aceh selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2020 untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan Pemerintah Aceh yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Aceh atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Aceh serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Aceh, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Aceh, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal tersebut dapat diketahui dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Aceh sebagaimana akan tersaji.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS), dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada,

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagi man telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5572);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - s. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
 - t. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 20), sebagaimana telah dilakukan Refocusing dan beberapa kali pengeseran, terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2020
 - u. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80);

- v. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 101);
- w. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 94 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 95);

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja APBA berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBA, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Bab VI Informasi Penting dan Kewajiban Kontijensi serta Upaya yang Mempengaruhi Laporan Keuangan

Kewajiban kontijensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh yang baru terselesaikan dengan terjadi



atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang.

Bab VII Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, diantaranya domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada; penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya; penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca; penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan; dan kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggung pemerintah.

Bab VIII Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Nasional. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, peningkatan hubungan ekonomi regional dan pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

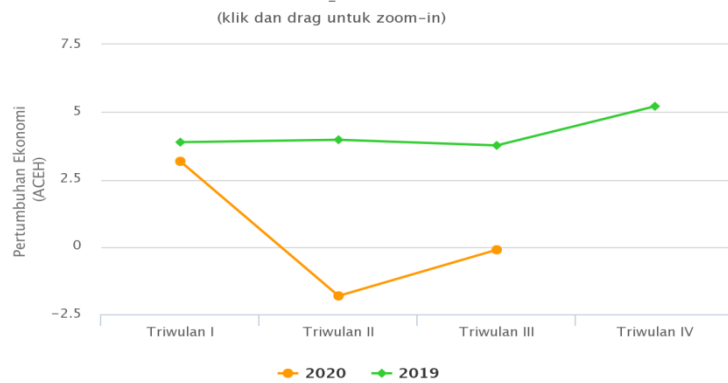
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi setiap penduduknya. Idealnya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berbagai inovasi dan teknologi juga semakin di tingkatkan guna mengintensifkan pemanfaatan berbagai sumber daya tersebut. Penggunaan teknologi dimaksud dengan tetap memperhatikan lingkungan, kearifan lokal dan budaya setempat yang positif dalam melancarkan proses pembangunan.

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perekonomian Aceh yang dicerminkan dalam PDRB Aceh mencapai 42,12 triliun rupiah pada triwulan III 2020 atau naik sebesar 2,06 triliun dari triwulan II 2020 yang sebesar 40,06 triliun rupiah atas dasar harga berlaku. Sedangkan perekonomian Aceh tanpa migas juga mengalami kenaikan sebesar 1,99 triliun dari 38,71 triliun rupiah menjadi 40,70 triliun rupiah di triwulan III

2020. Di bawah ini dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh secara grafik selama 2 (dua) tahun terakhir.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 2 Tahun Terakhir



Sumber : BPS Provinsi Aceh

Pada gambar 2.1 terlihat grafik pertumbuhan ekonomi Aceh selama dua tahun terakhir. Pada triwulan VI-2020 (*c to c*) Ekonomi Aceh Tahun 2020 tumbuh 0,38 persen, melambat dibanding tahun 2019 yang tumbuh sebesar 4,15 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh yang digambarkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dengan migas pada triwulan III 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,71 persen dibandingkan triwulan II 2020 (*q to q*). Pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami kenaikan, yaitu sebesar 4,72 persen.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan nilai PDRB triwulan III 2019 (*y-on-y*), perekonomian Aceh dengan migas turun sebesar 0,11 persen. sedangkan pertumbuhan antar tahun (*y-on-y*) tanpa migas berada pada angka 0,79 persen. Secara kumulatif (*c-to-c*) hingga triwulan III 2020 pertumbuhan ekonomi Aceh mencapai 0,38 persen dengan migas dan turun 0,11 persen tanpa migas.

Laju Pertumbuhan Tahunan (*y-on-y*)

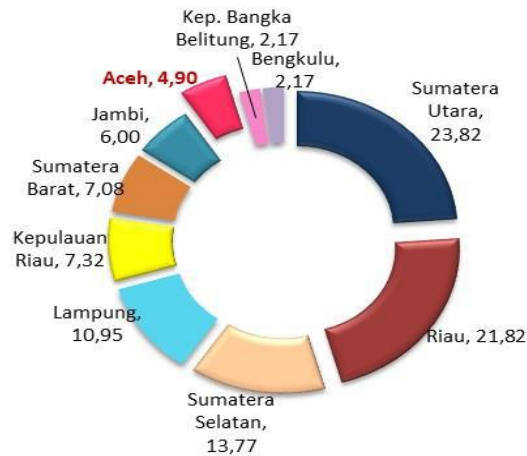
Kinerja perekonomian Aceh secara tahunan *y-on-y*, yaitu triwulan III 2020 dibandingkan dengan triwulan III 2019, menunjukkan penurunan sebesar 0,11 persen dengan migas. Sementara itu, pertumbuhan *y-on-y* tanpa migas turun sebesar 0,79 persen. Penurunan terjadi di 11 (sebelas) lapangan usaha, sedangkan 6 (enam) lapangan usaha lainnya mengalami kenaikan. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami penurunan paling tinggi yaitu sebesar 30,64 persen, diikuti oleh penyediaan akomodasi, makan dan minum sebesar 9,82 persen dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,99 persen. Sementara lapangan usaha lainnya mengalami penurunan masing-masing di bawah 6,95 persen.

Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan baik dengan migas maupun tanpa migas. Demikian juga pada triwulan III 2020, sektor pertanian mendominasi perekonomian dengan peranan sebesar 31,37 persen, diikuti oleh perdagangan dan reparasi mobil dengan peranan sebesar 14,37 persen. Kategori konstruksi menempati urutan ketiga dalam perekonomian Aceh dengan peranan sebesar 10,55 persen,

sedangkan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menempati urutan keempat dengan peranan sebesar 9,90 persen. Industri pengolahan serta transportasi dan pergudangan, pertambangan dan penggalian masing-masing menduduki peringkat kelima, keenam, dan ketujuh dengan memberikan peran sebesar 4,82 persen, 4,55 persen dan 4,50 persen

Jika ditinjau berdasarkan kontribusi dari PDRB masing-masing provinsi di wilayah regional Sumatera terhadap PDRB total se-Sumatera, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 23,82 persen, 21,82 persen, dan 13,77 persen. Ini menunjukkan bahwa hampir 60 persen dari PDRB Regional Sumatera triwulan III tahun 2020 berasal dari Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan. Kontribusi terkecil terhadap PDRB se-Sumatera adalah Provinsi Bangka Belitung dan Bengkulu yaitu berkontribusi sebesar 2,17 persen. PDRB Aceh memiliki kontribusi sebesar 4,90 persen terhadap PDRB Sumatera pada triwulan III 2020.

Gambar 2.2
Distribusi PDRB Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2020

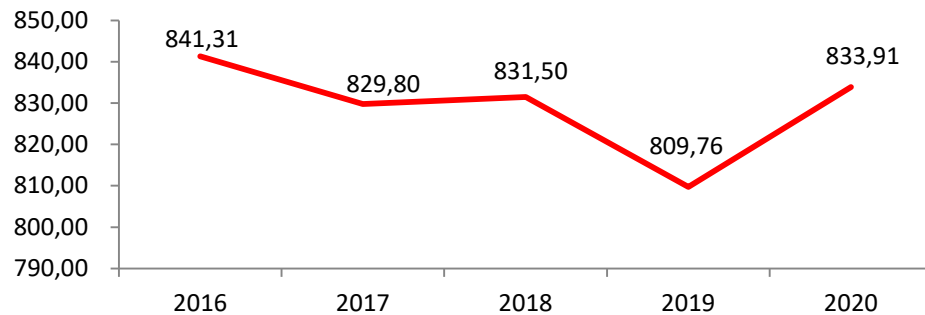


Sumber : BPS Provinsi Aceh

2.1.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2020 masih berada di atas rata-rata nasional. Sehingga diperlukan intervensi khusus terhadap kabupaten/kota tertentu agar jumlah penduduk miskin menurun sebagaimana target RPJMA. Maka penurunan kemiskinan dibarengi pula dengan penurunan ketimpangan pendapatan dan pembangunan wilayah. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 14,99 persen, menurun 0,02 persen poin terhadap September 2019 dan menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 833,91 ribu orang, bertambah 19 ribu orang terhadap September 2019.

Gambar 2.3
Fluktuasi Tingkat Kemiskinan Selama Lima Tahun Terakhir



Sumber : BPS Provinsi Aceh

Selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020 persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan kecenderungan menurun. Pada Maret 2017, persentase penduduk miskin Aceh mencapai 16,89 persen. Angka ini turun menjadi 15,92 persen pada September 2017. Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi pada Maret 2018 yaitu menjadi 15,97. Pada periode September 2018 sampai dengan Maret 2020 persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan penurunan, yaitu dari 15,68 persen (September 2018), 15,32 persen (Maret 2019), 15,01 persen (September 2019), 14,99 persen (Maret 2020) sementara pada September 2020 sebesar 15,43 persen.

Selama Maret 2020 – September 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,40 persen, yaitu dari Rp522.126,00 per kapita per bulan pada Maret 2020 menjadi Rp524.208,00 per kapita per bulan pada September 2020, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2020 komoditi makanan menyumbang sebesar 75,98 persen pada garis kemiskinan.

- Beberapa faktor yang diduga terkait dengan tingkat kemiskinan di Aceh Ekonomi Aceh pada triwulan III-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,10 persen dibanding triwulan III-2019 (y-on-y);
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 (6,59 persen) lebih tinggi dibanding Februari 2020 (5,42 persen);
- Sebanyak 388 ribu penduduk usia kerja (10,01 persen) terdampak *Covid-19* pada Agustus 2020, baik itu menjadi pengangguran, sementara tidak bekerja, pengurangan jam kerja maupun menjadi bukan angkatan kerja (selain bekerja dan pengangguran);
- Bantuan sosial pusat dan daerah relatif berjalan dengan baik, sehingga kemiskinan tidak semakin parah.

Pada Tahun 2020, provinsi yang mempunyai nilai *Gini Ratio* tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,437, sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan *Gini Ratio* sebesar 0,257. Sedangkan Aceh berada pada urutan ke delapan *Gini Ratio* terendah dari seluruh provinsi se-Indonesia.

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan ekonomi yang rumit dan masih menjadi prioritas pemerintah baik secara nasional maupun regional. Empat strategi pemerintah dalam Program Aceh Hebat adalah peningkatan program perlindungan sosial, peningkatan akses rumah tangga pada pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Salah satunya dengan pembangunan akses ke daerah dan konektivitas antar wilayah untuk memudahkan transportasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Aceh sejak tahun 2009 telah meluncurkan Program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) yang bertujuan pemeratakan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan bekerja, menurunkan jumlah penduduk miskin di gampong dan juga bertujuan meningkatkan kemampuan kemasyarakatan lembaga gampong, meningkatkan kemandirian, swadaya masyarakat, dan gotong royong, serta meningkatkan kinerja aparat gampong dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan mengejar keteringgalan pembangunan di wilayah pedesaan/gampong dan program pembangunan rumah duaafa yang dilanjutkan dan menjadi program prioritas pemerintah aceh dalam skema program Aceh Hebat.

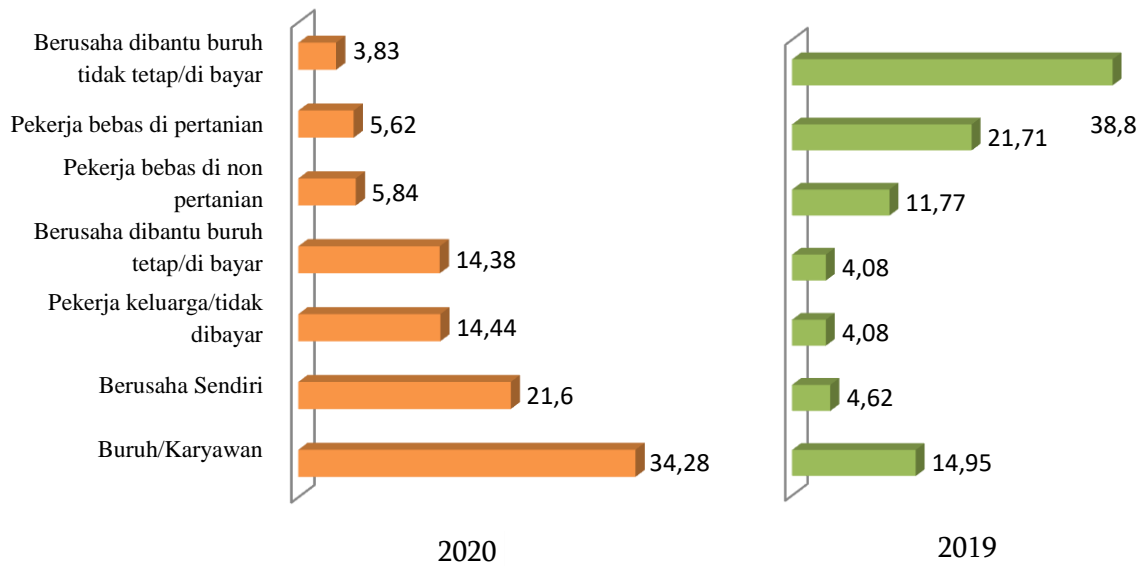
Hasil dan evaluasi yang dilakukan oleh Bank Dunia, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penelitian yang dilakukan oleh Aceh Institute dan DPMG Aceh menunjukkan bahwa program BKPG berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Aceh. Temuan di lapangan menunjukkan kualitas output yang dihasilkan oleh program BKPG secara rata-rata di atas biaya yang tersedia. Tidaklah salah jika program BKPG ini sepatutnya dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan lagi pada masa yang akan datang.

2.1.3 Perkembangan Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Angkatan kerja hanya memasukan pekerja yang aktif mencari kerja. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau orang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jumlah pengangguran diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada didalam angkatan kerja.

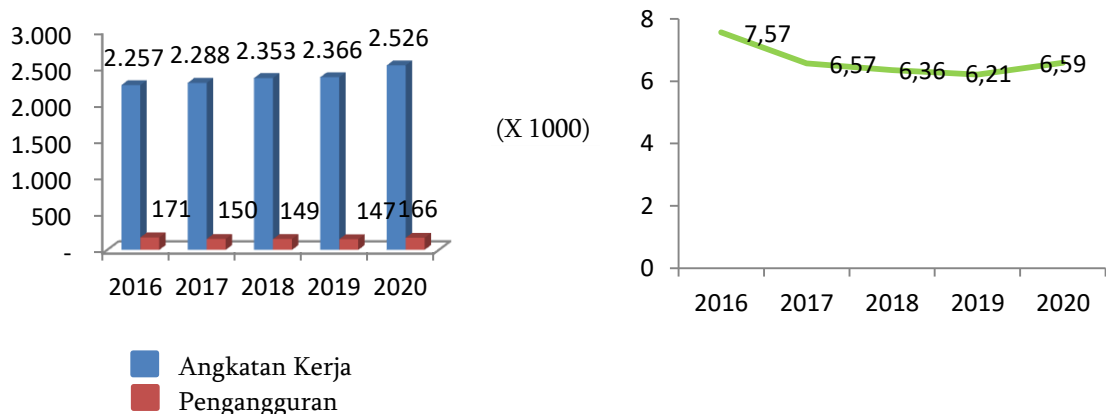
Gambar 2.4
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Di Provinsi Aceh, 2019-2020



Sumber : BPS Provinsi Aceh

Permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran terus menjadi isu strategis yang menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan, berbagai terobosan dan kebijakan terkait hal ini telah dilakukan pemerintah untuk memperkecil tingkat pengangguran dan mengakomodir tenaga kerja potensial. Kualitas tenaga kerja dalam suatu daerah dapat ditentukan dengan melihat tingkat pendidikan daerah tersebut. Sebagian besar tenaga kerja di Aceh, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Masuknya investor diharapkan pula berdampak besar dalam mengurangi angka pengangguran Provinsi Aceh.

Gambar 2.5
Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran dan Persentase Provinsi Aceh

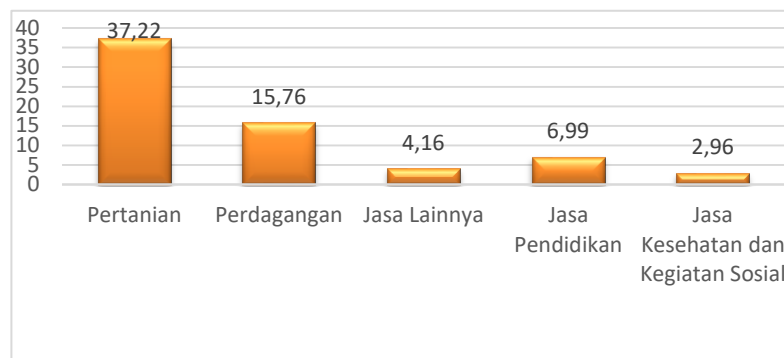


Sumber : BPS Provinsi Aceh

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh tahun 2020 mencapai 2.526 juta orang, bertambah sekitar 122 ribu orang dibanding tahun 2019 sebesar 2.366 juta orang. Penganggur pada tahun 2020 sebanyak 166 ribu mengalami kenaikan sekitar 19 ribu orang dibandingkan keadaan 2019 sebesar 147 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada 2019 mencapai 6,59 persen, lebih tinggi 0,15 persen dari TPT tahun 2019 sebesar 6,21 persen.

Selama periode tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah angkatan kerja yang menurun dan angka pengangguran meningkat disebabkan oleh Pandemi *Covid-19*. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Agustus 2019.

Gambar 2.6
Peningkatan persentase penduduk yang bekerja



Sumber : BPS Provinsi Aceh

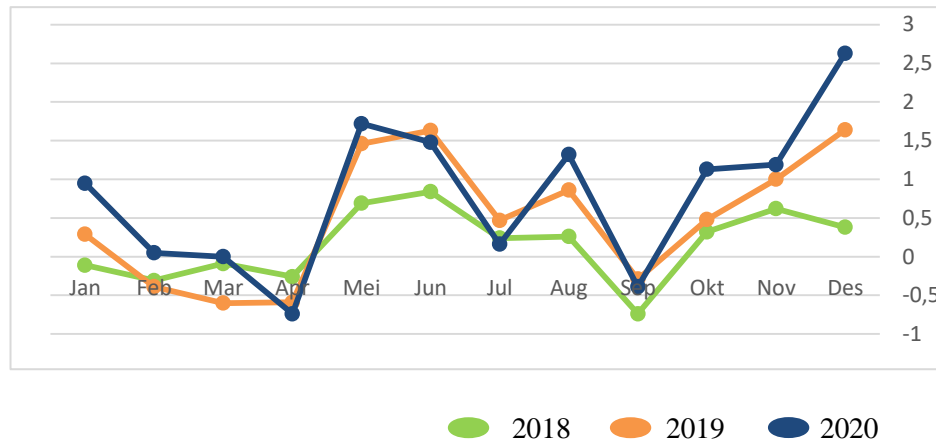
Berdasarkan penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama tahun 2020, sektor pertanian berperan besar dalam menyerap tenaga kerja di Aceh, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk sektor tersebut.

2.1.4 Perkembangan Tingkat Inflasi Aceh

Laju inflasi menjadi tolak ukur kestabilan perekonomian di suatu daerah. selama tahun 2020 Aceh mengalami inflasi sebesar 0,99 persen. Inflasi tahun 2020 ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,50 pada November 2020 menjadi 106,54 pada Desember 2020. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2020 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 3,59 persen.

Perkembangan inflasi tahun 2020 dapat dilihat dari perkembangan inflasi bulan kebulan. Dalam kurun waktu 12 bulan, selama 6 bulan Aceh mengalami inflasi dan 6 bulan mengalami deflasi. Secara agregat tingkat inflasi Provinsi Aceh dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.7
Inflasi Aceh (2018 – 2020)



Sumber : BPS Provinsi Aceh

Selama tahun 2020, terjadi inflasi sebanyak 8 (delapan) bulan yang terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2020 sebesar 0,99 persen dan inflasi terendah terjadi pada bulan November 2020 sebesar 0,19 persen. Sementara itu, pada bulan April, Juni, Juli, dan September 2020 mengalami deflasi.

2.1.5 Pandemi Covid-19

Covid-19 diketahui muncul pertama kali di Wuhan, China, pada Desember 2019. Tanggal 13 Januari 2020, terdapat kasus baru *Covid-19* di luar China untuk pertama kalinya. Sedangkan di Indonesia, kasus pertama yang diumumkan Presiden adalah pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya, *Covid-19* dinyatakan sebagai pandemic oleh WHO pada tanggal 16 Maret 2020. Sejak *Covid-19* dinyatakan sebagai pandemi, Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dengan Mei 2020. Namun setelah itu, perlahan-lahan kegiatan ekonomi dan sosial mulai dibuka kembali pada Juni 2020.

Dengan adanya pandemi *Covid-19*, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada triwulan III tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi *Covid-19*.

Penduduk usia kerja yang terdampak *Covid-19* tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu:

- Penganggur
- Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020
- Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja
- Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja.

Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi *Covid-19* yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi *Covid-19* bagi mereka yang berhenti bekerja.

Dari jumlah penduduk usia kerja yang mencapai 3.881 ribu orang, sebanyak 388,4 ribu orang yang terdampak *Covid-19*. Secara total, jumlah laki-laki yang terdampak *Covid-19* lebih besar dibandingkan perempuan.

Tabel 2.1 Dampak *Covid-19* Terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2020

No	Komponen	Jenis Kelamin		Daerah Tempat Tinggal		Total
		Laki-laki	Perempuan	Perkotaan	Perdesaan	
1	Pengangguran karena <i>Covid-19</i>	9.936	8.024	8.844	9.116	17.960
2	BAK karena <i>Covid-19</i>	983	4.200	2.657	2.526	5.183
3	Sementara Tidak Bekerja karena <i>Covid-19</i>	9.492	11.545	9.131	11.906	21.037
4	Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja (<i>Shorter Hours</i>) karena <i>Covid-19</i>	200.554	143.629	148.876	195.307	344.183
	Total	220.965	167.398	169.508	218.855	388.363

Sumber: BPS Provinsi Aceh

2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

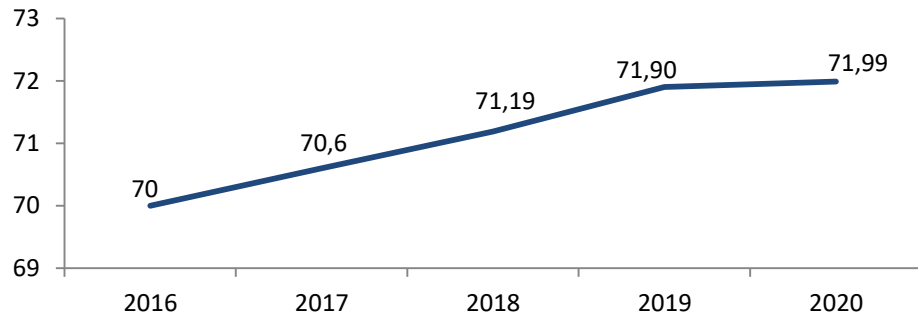
Pembangunan manusia di Provinsi Aceh mengalami perkembangan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada 2020, IPM Provinsi Aceh mencapai 71,99. Angka ini meningkat sebesar 0,09 poin dibandingkan 2019 yang sebesar 71,90. Pada tahun 2016 hingga 2020, pembangunan manusia di Provinsi Aceh sudah masuk status “tinggi”. IPM Provinsi Aceh pada tahun 2020 tumbuh sebesar 0,13 persen dibandingkan tahun 2019.

Selama periode 2019-2020, seluruh komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan kecuali pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak pertengahan Maret hingga Desember 2020. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 69,93 tahun, meningkat 0,06 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,31 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan 2019. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,33 tahun, meningkat 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, pengeluaran per kapita masyarakat mencapai Rp9,492 juta rupiah pada 2020, menurun sebesar Rp111 ribu rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara umum, pembangunan manusia di Provinsi Aceh terus mengalami kemajuan dan peningkatan pada periode 2016 hingga 2020. IPM Provinsi Aceh meningkat dari 70,00 pada tahun 2016 menjadi 71,99 pada 2020. Selama periode tersebut, IPM Provinsi Aceh rata-rata tumbuh sebesar 0,71 persen per tahun. Pada

periode 2019-2020, IPM Provinsi Aceh tumbuh sebesar 0,13 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2018-2019 yang tumbuh sebesar 1,00 persen. Hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi *Covid-19* yang menyebabkan turunnya pengeluaran per kapita masyarakat. Mulai Tahun 2016 hingga 2020, pembangunan manusia Provinsi Aceh dengan nilai rata-rata 71,13 atau lebih, terjadi kenaikan jika dibandingkan periode tahun 2010 – 2015 yang masih berstatus “sedang.”

Gambar 2.8
Indeks Pembangunan Manusia 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Aceh

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pada Pasal 3 menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Aceh merumuskan berbagai kebijakan penting dan strategis dalam berbagai sektor, baik kebijakan di tingkat usaha kecil menengah maupun di tingkat investasi berskala nasional dan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja, menjamin kesehatan rakyat, serta menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Disamping itu pemerintah juga merumuskan kebijakan keuangan terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Kebijakan keuangan Aceh terdiri dari 3 (tiga) kebijakan yang meliputi:

1. Kebijakan pendapatan Aceh (*revenue policy*) diarahkan pada optimalisasi PAA melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pungutan pajak Aceh, redistribusi Aceh dan infaq Aceh serta zakat Aceh.
2. Kebijakan belanja Aceh diarahkan pada peningkatan kualitas belanja (*quality spending*) melalui alokasi belanja yang lebih besar pada program dan kegiatan dengan elastisitas positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta stabilitas harga barang. dalam kebijakan belanja Pemerintah Aceh, anggaran belanja diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan

publik sebagai upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Pemerintah Aceh yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, yang dalam penggunaannya, harus tetap mengutamakan efisiensi dan efektifitas serta sesuai dengan prioritas pembangunan

3. Kebijakan pembiayaan Aceh diarahkan pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) secara efektif dan efisien melalui penyertaan modal pemerintah dan peningkatan kapasitas investasi yang berdasarkan pada kinerja investasi (*performance based*). Artinya penerimaan pembiayaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pengeluaran pembiayaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan keuangan Aceh yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta ditetapkan dengan Qanun Aceh. Kebijakan keuangan Pemerintah Aceh secara umum dapat dilihat dari perkembangan APBA dari tahun ke tahun. Pendapatan Aceh dalam struktur APBA merupakan elemen yang sangat penting perannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan pelayanan bagi masyarakat Aceh.

Gambaran APBA Periode lima tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 APBA TA 2016-2020

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	TA 2016		TA 2017		TA 2018		TA 2019		TA 2020	
	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%
Pendapatan	12.551.166,05	100,00	14.448.900,91	100,00	14.622.475,31	100,00	15.692.348,56	100,00	14.005.401,51	100,00
Pendapatan Asli Daerah	2.057.481,53	16,39	2.247.274,97	15,55	2.324.662,43	15,90	2.589.284,05	16,50	2.184.607,19	15,60
Pajak Aceh	1.219.985,57	9,72	1.299.742,67	9,00	1.371.597,74	9,38	1.453.552,65	9,26	1.275.366,71	9,11
Retribusi Aceh	11.802,50	0,09	11.652,32	0,08	17.799,65	0,12	28.864,42	0,18	12.133,55	0,09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	201.085,95	1,60	226.982,07	1,57	192.982,07	1,32	196.934,99	1,25	202.386,46	1,45
Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah	624.607,51	4,98	708.897,91	4,91	742.282,97	5,08	909.931,99	5,80	694.720,46	4,96
Pendapatan Dana Perimbangan	1.670.711,09	13,31	3.871.303,44	26,79	3.864.634,04	26,43	4.238.307,28	27,01	4.011.409,90	28,64
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	225.938,76	1,80	238.618,10	1,65	208.727,71	1,43	184.977,03	1,18	182.205,53	1,30
Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan Sumber Daya Alam Lain	25.650,84	0,20	11.489,96	0,08	19.239,54	0,13	100.865,15	0,64	24.006,08	0,17
Dana Alokasi Umum	1.263.870,99	10,07	2.060.263,23	14,26	2.060.263,23	14,09	2.126.193,32	13,55	1.961.334,01	14,00
Dana Alokasi Khusus	155.250,50	1,24	1.560.932,15	10,80	1.576.403,56	10,78	1.826.271,78	11,64	1.843.864,28	13,17
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.822.973,43	70,30	8.330.322,50	57,65	8.433.178,84	57,67	8.864.757,23	56,49	7.809.384,40	55,76



Uraian	TA 2016		TA 2017		TA 2018		TA 2019		TA 2020	
	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%
Hibah	8.837,50	0,07	59.057,87	0,41	23.606,64	0,16	26.206,45	0,17	2.093,98	0,01
Dana Penyesuaian	1.106.918,99	8,82	281.026,17	1,94	379.780,60	2,60	481.079,13	3,07	252.012,08	1,80
Dana Otonomi Khusus	7.707.216,94	61,41	7.971.646,30	55,17	8.029.791,60	54,91	8.357.471,65	53,26	7.555.278,34	53,95
Pendapatan Lainnya	-	-	18.592,16	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA ACEH	12.874.631,94	100,00	14.911.632,80	100,00	55.044.003,93	100,00	17.327.727,84	100,00	15.827.709,39	100,00
Belanja Tidak langsung	6.099.499,83	47,38	7.421.501,32	49,77	44.097.425,30	80,11	6.795.949,96	39,22	8.770.594,99	55,41
Belanja Pegawai	951.066,20	7,39	2.413.113,43	16,18	2.393.404,74	4,35	2.540.794,10	14,66	2.829.021,39	17,87
Belanja Hibah	1.182.147,25	9,18	680.891,61	4,57	708.607,99	1,29	805.716,05	4,65	-	-
Belanja Bantuan Sosial	240.930,87	1,87	268.251,07	1,80	236.705,20	0,43	13.017,35	0,08	788.203,46	4,98
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	659.792,10	5,12	588.421,50	3,95	653.458,75	1,19	691.397,38	3,99	1.085.908,44	6,86
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	3.045.563,41	23,66	3.430.680,15	23,01	105.248,62	0,19	2.647.313,01	15,28	883.489,94	5,58
Belanja Tidak Terduga	20.000,00	0,16	40.143,56	0,27	40.000.000,00	72,67	97.712,07	0,56	2.744.211,29	17,34
Belanja Langsung	6.775.132,11	52,62	7.490.131,48	50,23	10.946.578,63	19,89	10.531.777,88	60,78	7.057.114,39	44,59
Belanja Pegawai	455.435,83	3,54	554.672,12	3,72	764.428,43	1,39	762.689,40	4,40	805.372,14	5,09
Belanja Barang dan Jasa	3.741.442,21	29,06	4.460.363,24	29,91	6.880.850,56	12,50	6.098.857,56	35,20	4.157.224,23	26,27
Belanja Modal	2.578.254,07	20,03	2.475.096,12	16,60	3.301.299,64	6,00	3.670.230,92	21,18	2.094.518,02	13,23
PEMBIAYAAN										
Penerimaan Pembiayaan	328.465,89	100,00	462.731,90	100,00	832.354,99	100,00	2.954.457,96	100,00	1.822.307,87	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	328.465,89	100,00	462.731,90	100,00	832.354,99	100,00	2.954.457,96	100,00	1.822.307,87	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	50.000,00	100,00	-	-	65.000,00	100,00	72.000,00	100,00	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	65.000,00	100,00	72.000,00	100,00	-	-

Sumber: APBA TA 2016-2020

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sumber pendapatan dalam struktur APBA adalah dari Pajak Aceh, Retribusi Aceh, Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh, serta Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah dalam kelompok Pendapatan Asli Aceh. Kemudian ada Otonomi Khusus dalam kelompok Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah, dilanjutkan dengan Tambahan Dana Migas dan Dana Alokasi Umum dalam kelompok Pendapatan Dana Perimbangan.

Komposisi pendanaan program dan kegiatan pemerintahan dalam periode tahun anggaran 2016 s.d 2020, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 yaitu pendapatan dari Pajak Aceh dianggarkan rata-rata sebesar 9,11 persen, diikuti oleh Dana Alokasi Umum rata-rata sebesar 14,00 persen, selanjutnya Dana Otonomi Khusus yang masih mendominasi dengan rata-rata sebesar 53,95.

Pada tahun 2019 Pendapatan Asli Aceh atau PAA dianggarkan sebesar 16,50 persen, sementara tahun 2020 PAA dianggarkan sebesar 15,60 persen. Penerimaan Dana Otonomi Khusus cenderung meningkat dari tahun 2018 sebesar 54,91 persen, pada tahun 2019 kembali menurun sebesar 53,26 persen berikutnya berturut-turut, dan selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 53,95 persen. Sementara itu Dana Bagi Hasil cenderung menurun, diakibatkan oleh menurunnya penerimaan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang diperkirakan akan terus menurun pada tahun-tahun mendatang dengan belum adanya sumber-sumber dari ladang minyak dan gas yang baru.

Pendapatan tersebut di atas digunakan untuk mendanai Belanja Langsung sebesar 44,59 persen, serta Belanja Tidak Langsung sebesar 55,41 persen untuk periode tahun 2020. Belanja Langsung dialokasikan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 26,27 persen dan Belanja Modal 13,23 persen, sementara sisanya untuk Belanja Pegawai. Alokasi Belanja Barang dan Jasa sebagiannya masih merupakan belanja barang modal yang akan diserahkan kepada kabupaten/kota berupa bangunan gedung, jalan dan jembatan, peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya yang dianggarkan ke dalam jenis Belanja Barang dan Jasa.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBA

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) merupakan rencana tahunan Pemerintah Aceh yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang dapat dinilai dengan uang. APBA juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, pencapaian visi dan misi pembangunan selama periode tahun 2017-2022, juga didukung oleh 15 unggulan Aceh Hebat yaitu:

- 1) Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang adil, bersih dan melayani : *Acèh Peumulia*
- 2) Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke-Aceh-an dalam kehidupan masyarakat dengan itikad *Ahlulsunnah Wal Jamaah* yang bersumber hukum mazhab Syafiiyah dengan tetap menghormati mazhab lainnya : *Acèh Meudadab*

- 3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan Mou Helsinki : *Acèh Damê*
- 4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional maupun regional : *Acèh Caròng, Acèh Teuga*
- 5) Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi : *Acèh Seujahtra (JKA Plus), Acèh Seuninya*
- 6) Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan : *Aceh Meugoë dan Meulaôt, Acèh Troë*
- 7) Menyediakan sumber listrik yang bersih dan terbarukan : *Acèh Energi*
- 8) Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif : *Acèh Kreatif, Acèh Kaya*
- 9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan : *Acèh SIAT* (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
- 10) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan : *Acèh Green, Acèh Seuninya, Acèh Seumeugot.*

Berdasarkan Prioritas Pembangunan RPJM Aceh Tahun 2018-2022, kesembilan prioritas pembangunan tersebut yaitu :

1. Mutu Pendidikan dan Dinul Islam;
2. Akses dan Kualitas Kesehatan;
3. Infrastruktur Terintegrasi;
4. Ketahanan dan Kemandirian Pangan;
5. Nilai Tambah Sektor Strategis;
6. Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja;
7. Investasi dan Kemandirian Energi;
8. Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan;
9. Perdamaian dan Reformasi Birokrasi.

Mengacu pada beberapa indikator sosial ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah pusat, prioritas pembangunan Aceh diarahkan kepada sektor investasi dan produksi dengan penguatan pada fungsi ekonomi. Maka penetapan prioritas pada pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, reformasi birokrasi dan sistem informasi yang terintegrasi dengan sumber APBN, APBA, APBK, Pendanaan Luar Negeri, dan Investasi merupakan pilihan yang tepat untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Aceh menuju Aceh Hebat.

Disamping prioritas di atas, dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, pemerintah terus memprioritaskan

pembangunan dalam bidang keagamaan, baik program-program penguatan akidah maupun program-program penguatan kapasitas keilmuan syariah. Juga melanjutkan keberlangsungan perdamaian pasca konflik dengan mengimplementasikan amanat MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBA dilandasi pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2020 yang mengacu pada RKPA tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020. RKPA menjadi pedoman bagi Pemerintah Aceh untuk menyusun dan mengevaluasi Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2020.

Keberhasilan program-program pemerintah dapat diukur dengan persentase penyerapan anggaran, meskipun demikian keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan juga menjadi tolok ukur keberhasilan dimaksud. Program kegiatan pemerintah yang berhasil juga dapat dilihat dari *outcome* atau dampak dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.



Tabel 2.3 Perubahan APBA Akibat Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran 2020

Uraian	Jumlah (Rp)					Bertambah / (Berkurang)	
	APBA Murni 2020	Pergesaran I	Pergesaran II	Pergesaran III	Pergesaran IV	(Rp)	%
	Qanun 12 Tahun 2019	No Pergub 38 Thn 2020	No Pergub 59 Thn 2020	No Pergub 67 Thn 2020	No Pergub 68 Thn 2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)-(6)	(8)
PENDAPATAN ACEH							
Pendapatan Asli Aceh	2.624.349.661.274,00	2.184.607.197.048,00	2.184.607.197.048,00	2.184.607.197.048,00	2.184.607.197.048,00	439.742.464.226,00	16,76
Pendapatan Pajak Aceh	1.617.438.860.000,00	1.275.366.715.499,00	1.275.366.715.499,00	1.275.366.715.499,00	1.275.366.715.499,00	342.072.144.501,00	21,15
Pendapatan Retribusi Daerah	33.793.140.000,00	12.133.554.700,00	12.133.554.700,00	12.133.554.700,00	12.133.554.700,00	21.659.585.300,00	64,09
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	202.386.465.655,00	202.386.465.655,00	202.386.465.655,00	202.386.465.655,00	202.386.465.655,00	-	-
Lain-lain PAA Yang Sah	770.731.195.619,00	694.720.461.194,00	694.720.461.194,00	694.720.461.194,00	694.720.461.194,00	76.010.734.425,00	9,86
Pendapatan Transfer	12.832.870.800.700,00	11.791.207.337.176,00	11.820.794.317.176,00	11.820.794.317.176,00	11.820.794.317.176,00	1.012.076.483.524,00	7,89
Dana Perimbangan	3.994.320.016.700,00	3.981.948.904.869,00	4.011.409.904.869,00	4.011.409.904.869,00	4.011.409.904.869,00	(17.089.888.169,00)	(0,43)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	211.048.613.700,00	206.211.622.869,00	206.211.622.869,00	206.211.622.869,00	206.211.622.869,00	4.836.990.831,00	2,29
Dana Alokasi Umum	2.126.193.327.000,00	1.961.334.010.000,00	1.961.334.010.000,00	1.961.334.010.000,00	1.961.334.010.000,00	164.859.317.000,00	7,75
Dana Alokasi Khusus	1.657.078.076.000,00	1.814.403.272.000,00	1.843.864.272.000,00	1.843.864.272.000,00	1.843.864.272.000,00	(186.786.196.000,00)	(11,27)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.838.550.784.000,00	7.809.258.432.307,00	7.809.384.412.307,00	7.809.384.412.307,00	7.809.384.412.307,00	1.029.166.371.693,00	11,64
Pendapatan Hibah	-	1.968.000.000,00	2.093.980.000,00	2.093.980.000,00	2.093.980.000,00	(2.093.980.000,00)	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.838.550.784.000,00	7.807.290.432.307,00	7.807.290.432.307,00	7.807.290.432.307,00	7.807.290.432.307,00	1.031.260.351.693,00	11,67
JUMLAH PENDAPATAN	15.457.220.461.974,00	13.975.814.534.224,00	14.005.401.514.224,00	14.005.401.514.224,00	14.005.401.514.224,00	2.480.985.319.443,00	16,05
BELANJA ACEH							
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.563.418.756.923,00	9.210.742.435.770,00	9.210.742.435.770,00	8.770.594.990.770,00	8.770.594.990.770,00	(1.207.176.233.847,00)	(15,96)
Belanja Pegawai	2.823.244.637.477,00	2.823.244.637.477,00	2.823.244.637.477,00	2.829.021.380.732,00	2.829.021.380.732,00	(5.776.743.255,00)	(0,20)
Belanja Hibah	712.362.675.022,00	788.203.468.878,00	788.203.468.878,00	788.203.468.878,00	788.203.468.878,00	(75.840.793.856,00)	(10,65)
Belanja Bantuan Sosial	15.818.350.000,00	1.526.055.886.946,00	1.526.055.886.946,00	1.085.908.441.946,00	1.085.908.441.946,00	(1.070.090.091.946,00)	(6,764,87)

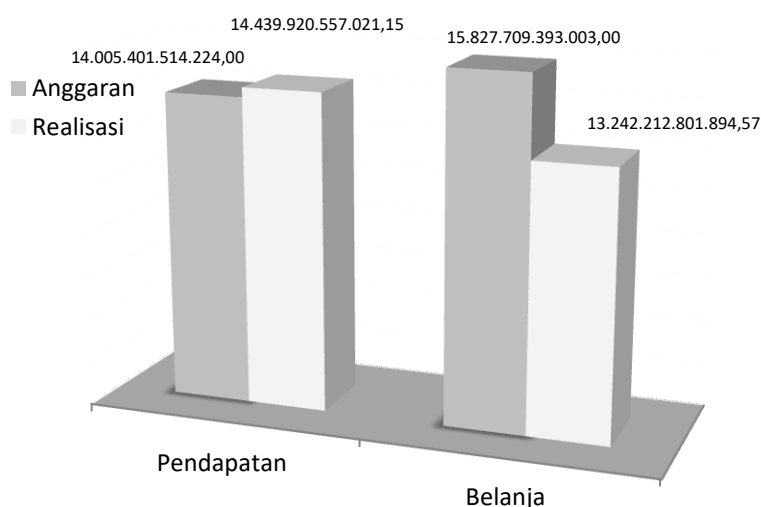


Uraian	Jumlah (Rp)					Bertambah / (Berkurang)	
	APBA Murni 2020	Pergesaran I	Pergesaran II	Pergesaran III	Pergesaran IV	(Rp)	%
	Qanun 12 Tahun 2019	No Pergub 38 Thn 2020	No Pergub 59 Thn 2020	No Pergub 67 Thn 2020	No Pergub 68 Thn 2020		
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	912.951.642.027,00	883.489.947.529,00	883.489.947.529,00	883.489.947.529,00	883.489.947.529,00	29.461.694.498,00	3,23
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	2.980.215.904.489,00	2.744.211.282.721,00	2.744.211.282.721,00	2.744.211.282.721,00	2.744.211.282.721,00	236.004.621.768,00	7,92
Belanja Tidak Terduga	118.825.547.908,00	445.537.212.219,00	445.537.212.219,00	439.760.468.964,00	439.760.468.964,00	(320.934.921.056,00)	(270,09)
BELANJA LANGSUNG	9.716.109.583.830,00	6.587.379.977.233,00	6.616.966.957.233,00	7.057.114.402.233,00	7.057.114.402.233,00	2.658.995.181.597,00	27,37
Belanja Pegawai	1.270.770.604.879,00	805.359.144.612,00	805.372.144.612,00	805.372.144.612,00	805.372.144.612,00	465.398.460.267,00	36,62
Belanja Barang dan Jasa	5.719.711.520.446,00	3.714.632.381.740,00	3.716.581.799.700,00	4.157.224.230.332,00	4.157.224.230.332,00	1.562.487.290.114,00	27,32
Belanja Modal	2.725.627.458.505,00	2.067.388.450.881,00	2.095.013.012.921,00	2.094.518.027.289,00	2.094.518.027.289,00	631.109.431.216,00	23,15
Jumlah Belanja	17.279.528.340.753,00	15.798.122.413.003,00	15.827.709.393.003,00	15.827.709.393.003,00	15.827.709.393.003,00	1.451.818.947.750,00	8,40
SURPLUS/DEFISIT	(1.822.307.878.779,00)	(1.822.307.878.779,00)	(1.822.307.878.779,00)	(1.822.307.878.779,00)	(1.822.307.878.779,00)	1.029.166.371.693,00	(56,48)
PEMBIAYAAN							
Penerimaan Pembiayaan	1.822.307.878.779,00	1.822.307.878.779,00	1.822.307.878.779,00	1.822.307.878.779,00	1.822.307.878.779,00	-	-
Penggunaan SILPA	1.822.307.878.779,00	1.822.307.878.779,00	1.822.307.878.779,00	1.822.307.878.779,00	1.822.307.878.779,00	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	1.822.307.878.779,00	1.822.307.878.779,00	1.822.307.878.779,00	1.822.307.878.779,00	1.822.307.878.779,00	-	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-	-	1.029.166.371.693,00	-

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Aceh pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu sisi kinerja pencapaian Pendapatan Aceh dan sisi kinerja Belanja Aceh baik dari pelaksanaan non program maupun program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBA Tahun Anggaran 2020. Gambar 3.1 di bawah ini menggambarkan pelaksanaan APBA 2020 dengan membandingkan anggaran dan realisasi yang dicapai.

Gambar 3.1
Anggaran dan Realisasi APBA Tahun Anggaran 2020



Sumber: LRA TA 2020 (audited)

Dari Gambar 3.1 di atas kita ketahui bahwa realisasi Pendapatan lebih besar dari pada pendanaan untuk belanja sehingga terjadi surplus sebesar Rp1.197.707.755.126,58. Bila dibandingkan realisasi Pendapatan tahun lalu, maka Tahun 2020 terjadi penurunan perolehan Pendapatan sebesar 9,09%, sedangkan realisasi Belanja terjadi penurunan sebesar 19,22%.

3.1. Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh

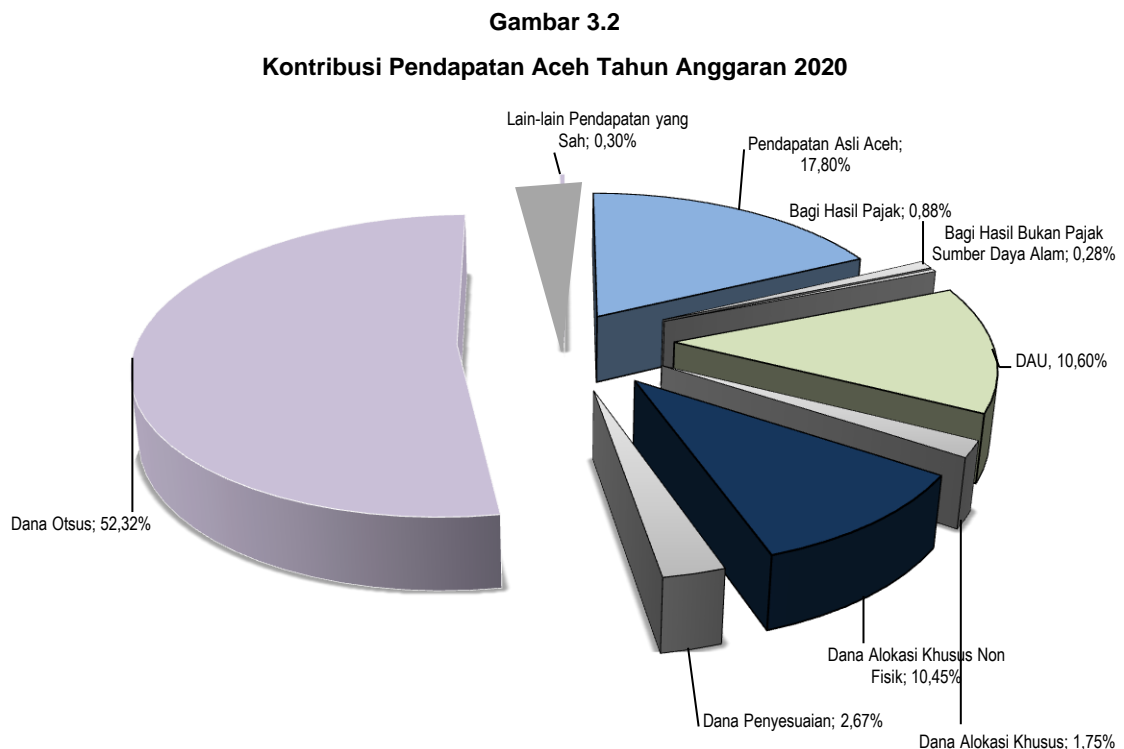
Pencapaian realisasi menurut kelompok Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2020 Menurut Kelompok Pendapatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Pendapatan Asli Aceh	2.184.607.197.048,00	2.570.775.877.183,15	2.698.912.471.144,15	117,68
2	Pendapatan Transfer	11.818.700.337.176,00	11.826.017.687.067,00	13.049.675.124.487,00	100,06
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	2.093.980.000,00	43.126.992.771,00	4.213.306.021,00	2059,57
Jumlah Pendapatan		14.005.401.514.224,00	14.439.920.557.021,15	15.752.800.901.652,15	103,10

Total Realisasi Pendapatan Aceh tahun 2020 sebesar Rp14.439.920.557.021,15 atau 103,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.005.401.514.224,00, terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Aceh Rp2.570.775.877.183,15 atau 117,68%; Pendapatan Transfer Rp11.826.017.687.067,00 atau 100,06%; dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp43.126.992.771,00 atau 2.059,57% dari anggaran yang ditetapkan.

Sedangkan kontribusi yang diberikan bagi Pendapatan Aceh pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat sebagaimana Gambar 3.2 di bawah ini.



Sumber: LRA TA 2020 (audited)

Dari Gambar 3.2 di atas, tampak bahwa Dana Otonomi Khusus memberikan kontribusi yang terbesar dibandingkan pendapatan lainnya yaitu 52,32% dari total keseluruhan pendapatan, sebagaimana tercermin pada struktur Pendapatan Aceh, sebaliknya kontribusi Pendapatan Asli Aceh dalam kurun waktu yang sama terhadap Pendapatan Aceh masih tergolong sangat kecil hanya mencapai 17,80%. Ini menggambarkan bahwa Pemerintah Aceh masih sangat tergantung pada penerimaan Dana Otonomi Khusus dalam membiayai pembangunan, dan kondisi ini tidak baik terhadap kemandirian fiskal Aceh. Terlebih lagi pendapatan dari Dana Otonomi Khusus tersebut merupakan jenis pendapatan yang tidak terjamin kesinambungannya.

Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Aceh jika dibandingkan dengan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan dan Otonomi Khusus) mencerminkan bahwa belum optimalnya upaya perolehan pendapatan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Selama ini sumber Pendapatan Asli Aceh masih didominasi oleh pajak daerah terutama Pajak Kendaraan Bermotor, padahal sumber pendapatan tersebut bersifat *closed list* dan pertumbuhannya memiliki keterbatasan serta rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, ke depan perlu segera dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif.



Secara detail realisasi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2020 berdasarkan objek penerimaan disajikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 - Realisasi Pendapatan menurut Objek Penerimaan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
PENDAPATAN ACEH	14.005.401.514.224,00	14.439.920.557.021,15	103,10
PENDAPATAN ASLI ACEH	2.184.607.197.048,00	2.570.775.877.183,15	117,68
PAJAK ACEH	1.275.366.715.499,00	1.477.991.066.969,65	115,89
Pajak Kendaraan Bermotor	433.680.500.000,00	484.694.888.039,50	111,76
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	277.507.310.499,00	290.706.133.250,00	104,76
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	286.623.385.000,00	319.325.065.709,00	111,41
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.577.020.000,00	1.897.658.782,15	120,33
Pajak Rokok	275.978.500.000,00	381.367.321.189,00	138,19
RETRIBUSI ACEH	12.133.554.700,00	8.159.969.910,00	67,25
Retribusi Jasa Umum	1.069.280.200,00	930.267.000,00	87,00
Retribusi Jasa Usaha	10.318.624.500,00	6.571.399.910,00	63,68
Retribusi Perizinan Tertentu	745.650.000,00	658.303.000,00	88,29
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN ACEH YANG DIPISAHKAN	202.386.465.655,00	181.700.799.036,00	89,78
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Bank Aceh Syariah	202.386.465.655,00	181.700.799.036,00	89,78
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI ACEH YG SAH	694.720.461.194,00	902.924.041.267,50	129,97
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.577.020.000,00	-	-
Penerimaan Jasa Giro	9.000.000.000,00	85.238.348.370,02	947,09
Pendapatan Bunga	64.293.579.800,00	76.187.421.357,82	118,50
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.632.776.800,00	518.570.811,47	6,79
Pendapatan Denda Pajak	11.200.000.000,00	7.417.052.203,24	66,22
Pendapatan Dari Pengembalian	157.702.000,00	12.699.069.370,74	8.052,57
Pendapatan dari Angsuran/cicilan Penjualan Pemanfaatan/Pendayagunaan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan	7.648.547.000,00	5.877.681.263,60	76,85
Pendapatan Zakat	50.248.000.000,00	82.538.693.511,08	164,26
Pendapatan BLUD	542.962.835.594,00	618.016.370.938,53	113,82
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	14.427.521.237,00	-
DANA PERIMBANGAN	4.011.409.904.869,00	3.885.903.189.991,00	96,87
DANA BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	206.211.622.869,00	167.139.992.425,00	81,05
Bagi Hasil Pajak	182.205.538.407,00	127.272.935.167,00	69,85
Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	24.006.084.462,00	39.867.057.258,00	166,07
DANA ALOKASI UMUM	1.961.334.010.000,00	1.956.492.796.000,00	99,75
Dana Alokasi Umum	1.961.334.010.000,00	1.956.492.796.000,00	99,75
DANA ALOKASI KHUSUS	318.205.887.000,00	252.931.846.782,00	79,49
Dana Alokasi Khusus	318.205.887.000,00	252.931.846.782,00	79,49
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.525.658.385.000,00	1.509.338.554.784,00	98,93
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.525.658.385.000,00	1.509.338.554.784,00	98,93
DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.807.290.432.307,00	7.940.114.497.076,00	101,70
Dana Otonomi Khusus	7.555.278.348.000,00	7.555.278.348.000,00	100,00
Dana Penyesuaian	252.012.084.307,00	384.836.149.076,00	152,71
LAIN-LAIN PENDAPATAN ACEH YANG SAH	2.093.980.000,00	43.126.992.771,00	2.059,57
PENDAPATAN HIBAH	2.093.980.000,00	43.126.992.771,00	2.059,57
Pendapatan Hibah dari Kementerian Keuangan	125.980.000,00	41.322.992.771,00	32.801,23
Pendapatan Hibah dari Jasa Raharja	1.968.000.000,00	1.804.000.000,00	91,67



3.2. Pencapaian Realisasi Belanja

Pencapaian kinerja keuangan menurut urusan Pemerintah Aceh, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program-program kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan oleh SKPA sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.3 - Pencapaian Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja	Realisasi	
			BTL	BL
1	URUSAN WAJIB	8.117.897.018.600,00	1.868.879.841.609,00	5.497.047.571.240,27
1,01,	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	6.945.682.882.479,00	1.658.919.879.018,00	4.669.129.380.939,09
1,01,01,	PENDIDIKAN	2.809.836.840.704,00	1.291.200.235.232,00	1.422.728.530.765,50
1,01,01,01,	Dinas Pendidikan Aceh	2.809.836.840.704,00	1.291.200.235.232,00	1.422.728.530.765,50
1,01,02,	KESEHATAN	2.092.594.805.857,00	237.225.226.489,00	1.748.331.763.836,01
1,01,02,01,	Dinas Kesehatan Aceh	1.189.706.141.947,00	41.692.991.960,00	1.049.310.542.506,20
1,01,02,02,	Blud Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	724.004.042.257,00	126.498.991.218,00	609.016.097.814,00
1,01,02,03,	Blud Rumah Sakit Jiwa	88.221.553.249,00	37.798.998.981,00	44.154.110.799,81
1,01,02,04,	Blud Rumah Sakit Ibu Dan Anak	90.663.068.404,00	31.234.244.330,00	45.851.012.716,00
1,01,03,	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.098.915.269.790,00	75.481.796.675,00	701.765.910.502,09
1,01,03,01,	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh	721.897.365.524,00	44.737.376.112,00	401.649.361.617,01
1,01,03,02,	Dinas Pengairan Aceh	377.017.904.266,00	30.744.420.563,00	300.116.548.885,08
1,01,04,	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	750.284.475.716,00	19.131.460.259,00	661.472.078.115,13
1,01,04,01,	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	750.284.475.716,00	19.131.460.259,00	661.472.078.115,13
1,01,05,	KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	71.523.192.554,00	16.596.243.169,00	47.974.957.252,00
1,01,05,01,	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh	38.711.833.681,00	10.308.345.332,00	26.400.365.818,00
1,01,05,02,	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	32.811.358.873,00	6.287.897.837,00	21.574.591.434,00
1,01,06,	SOSIAL	122.528.297.858,00	19.284.917.194,00	86.856.140.468,36
1,01,06,01,	Dinas Sosial Aceh	122.528.297.858,00	19.284.917.194,00	86.856.140.468,36
102	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	665.731.378.570,00	167.035.163.109,00	395.361.079.381,12
1,02,01,	TENAGA KERJA	81.657.999.451,00	24.314.172.057,00	44.474.389.440,51
1,02,01,01,	Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh	81.657.999.451,00	24.314.172.057,00	44.474.389.440,51
1,02,02,	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.917.467.550,00	6.877.902.299,00	6.155.554.847,55
1,02,02,01,	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh	14.917.467.550,00	6.877.902.299,00	6.155.554.847,55
1,02,03,	PANGAN	32.641.512.241,00	10.159.060.498,00	19.420.650.953,13
1,02,03,01,	Dinas Pangan Aceh	32.641.512.241,00	10.159.060.498,00	19.420.650.953,13
1,02,04,	PERTANAHAN	11.101.912.809,00	5.571.849.968,00	4.335.069.674,00
1,02,04,01,	Dinas Pertanahan Aceh	11.101.912.809,00	5.571.849.968,00	4.335.069.674,00



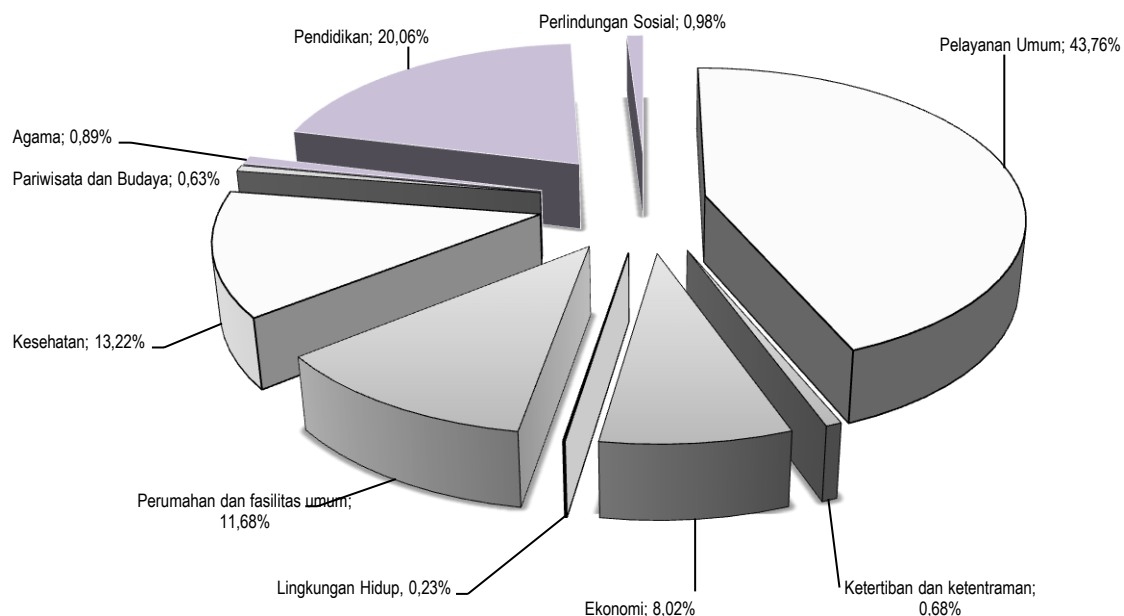
Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja	Realisasi	
			BTL	BL
1,02,06,	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.998.926.144,00	5.981.605.513,00	10.038.527.073,23
1,02,06,01,	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	17.998.926.144,00	5.981.605.513,00	10.038.527.073,23
1,02,07,	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	36.614.367.464,00	9.135.080.620,00	21.673.882.910,00
1,02,07,01,	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh	36.614.367.464,00	9.135.080.620,00	21.673.882.910,00
1,02,09,	PERHUBUNGAN	192.011.536.820,00	17.806.757.983,00	152.521.136.350,13
1,02,09,01,	Dinas Perhubungan Aceh	192.011.536.820,00	17.806.757.983,00	152.521.136.350,13
1,02,10,	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	41.770.244.531,00	12.051.153.709,00	25.688.913.609,00
1,02,10,01,	Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Aceh	41.770.244.531,00	12.051.153.709,00	25.688.913.609,00
1,02,11,	KOPERSI USAHA KECIL DAN MENENGAH	35.836.199.678,00	11.204.427.936,00	18.126.890.462,00
1,02,11,01,	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Aceh	35.836.199.678,00	11.204.427.936,00	18.126.890.462,00
1,02,12,	PENANAMAN MODAL	39.977.687.024,00	15.590.974.136,00	10.694.013.423,00
1,02,12,01,	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	39.977.687.024,00	15.590.974.136,00	10.694.013.423,00
1,02,13,	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	49.620.426.753,00	13.501.942.479,00	22.333.553.461,00
1,02,13,01,	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh	49.620.426.753,00	13.501.942.479,00	22.333.553.461,00
1,02,16,	KEBUDAYAAN	68.395.383.222,00	19.349.087.659,00	39.992.034.078,57
1,02,16,01,	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh	68.395.383.222,00	19.349.087.659,00	39.992.034.078,57
1,02,18,	KEARSIPAN	43.187.714.883,00	15.491.148.252,00	19.906.463.099,00
1,02,18,01,	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh	43.187.714.883,00	15.491.148.252,00	19.906.463.099,00
103	URUSAN KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH	506.482.757.551,00	42.924.799.482,00	432.557.110.920,06
1,03,01,	PENDIDIKAN	316.194.046.880,00	10.504.663.920,00	295.522.609.171,51
1,03,01,01,	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	307.397.188.626,00	7.718.575.030,00	291.687.136.817,51
1,03,01,02,	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	8.796.858.254,00	2.786.088.890,00	3.835.472.354,00
1,03,02,	KEBUDAYAAN	30.792.567.474,00	8.594.949.213,00	18.815.032.292,00
1,03,02,01,	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	22.329.942.895	4.976.166.494,00	15.021.487.159,00
1,03,02,02,	Sekretariat Majelis Adat Aceh	8.462.624.579,00	3.618.782.719,00	3.793.545.133,00
1,03,03,	KEAGAMAAN	140.364.115.751,00	19.860.584.153,00	104.880.127.618,55
1,03,03,01,	Dinas Syariat Islam Aceh	40.202.673.376,00	10.318.291.019,00	26.566.345.456,55
1,03,03,02,	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	16.481.747.283,00	5.329.725.702,00	9.382.653.277,00
1,03,03,03,	Sekretariat Baitul Mal Aceh	83.679.695.092,00	4.212.567.432,00	68.931.128.885,00
1,03,04,	KESATUAN DAN PERDAMAIAN	19.132.027.446,00	3.964.602.196,00	13.339.341.838,00
1,03,04,01,	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	19.132.027.446,00	3.964.602.196,00	13.339.341.838,00
2	URUSAN PILIHAN	851.347.538.117,00	231.900.835.815,00	487.561.990.745,74
2,00,01,	KELAUTAN DAN PERIKANAN	132.029.875.256,00	25.308.675.497,00	90.081.130.699,43



Kode	Urusan Pemerintah Daerah	Anggaran Belanja	Realisasi	
			BTL	BL
2,00,01,01,	Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh	132.029.875.256,00	25.308.675.497,00	90.081.130.699,43
2,00,03,	PERTANIAN	403.159.385.375,00	98.077.466.756,00	231.318.323.842,37
2,00,03,01,	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	327.377.311.809,00	76.433.941.350,00	194.496.989.097,37
2,00,03,02,	Dinas Peternakan Aceh	75.782.073.566,00	21.643.525.406,00	36.821.334.745,00
2,00,04,	KEHUTANAN	196.610.290.951,00	79.658.461.080,00	92.434.376.792,53
2,00,04,01,	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	196.610.290.951,00	79.658.461.080,00	92.434.376.792,53
2,00,05,	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44.788.285.599,00	14.934.792.957,00	24.275.158.486,35
2,00,05,01,	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh	44.788.285.599,00	14.934.792.957,00	24.275.158.486,35
2,00,07,	PERINDUSTRIAN	74.759.700.936,00	13.921.439.525,00	49.453.000.925,06
2,00,07,01,	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh	74.759.700.936,00	13.921.439.525,00	49.453.000.925,06
3	PENUNJANG URUSAN	6.411.654.103.261,00	4.529.591.908.522,00	238.605.319.162,40
3,00,01,	INSPEKTORAT	40.890.899.553,00	19.774.125.645,00	13.844.073.816,00
3,00,01,01,	Inspektorat Aceh	40.890.899.553,00	19.774.125.645,00	13.844.073.816,00
3,00,02,	PERENCANAAN	59.649.914.390,00	25.036.591.725,00	23.723.994.327,00
3,00,02,01,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	59.649.914.390,00	25.036.591.725,00	23.723.994.327,00
3,00,03,	KEUANGAN	6.165.664.728.399,00	4.450.578.328.341,00	106.413.274.330,40
3,00,03,01,	PPKA	5.941.573.610.038,00	4.374.953.476.072,00	-
3,00,03,01,	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	224.091.118.361,00	75.624.852.269,00	106.413.274.330,40
3,00,04,	KEPEGAWAIAN	25.590.849.480,00	12.581.724.007,00	8.799.424.206,00
3,00,04,01,	Badan Kepegawaian Aceh	25.590.849.480,00	12.581.724.007,00	8.799.424.206,00
3,00,05,	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	99.180.208.498,00	15.420.420.840,00	73.485.999.232,00
3,00,05,01,	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	99.180.208.498,00	15.420.420.840,00	73.485.999.232,00
3,00,07,	PENUNJANG LAINNYA	20.677.502.941,00	6.200.717.964,00	12.338.553.251,00
3,00,07,01,	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	20.677.502.941,00	6.200.717.964,00	12.338.553.251,00
4	PENDUKUNG	429.769.275.186,00	147.592.839.594,00	226.752.444.266,16
4,00,01,	SEKRETARIAT DAERAH	270.346.381.582,00	77.116.011.720,00	147.327.866.105,16
4,00,01,01,	Sekretariat Daerah Aceh	266.164.051.098,00	74.660.760.702,00	147.327.866.105,16
4,00,01,02,	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	4.182.330.484,00	2.455.251.018,00	-
4,00,02,	SEKRETARIAT DPRA	159.422.893.604,00	70.476.827.874,00	79.424.578.161,00
4,00,02,01,	Sekretariat DPRA	151.203.375.529,00	62.787.412.427,00	79.424.578.161,00
4,00,02,02,	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	8.219.518.075,00	7.689.415.447,00	-
5	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.041.457.839,00	6.857.823.337,00	7.422.227.603,00
5,00,01,	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17.041.457.839,00	6.857.823.337,00	7.422.227.603,00
5,00,01,01,	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh	17.041.457.839,00	6.857.823.337,00	7.422.227.603,00
TOTAL		15.827.709.393.003,00	6.784.823.248.877,00	6.457.389.553.017,57

Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi fungsi, maka profil APBA Tahun Anggaran 2020 dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.3
Profil APBA Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Klasifikasi Fungsi



Dari Gambar 3.3 tersebut diatas, alokasi anggaran terbesar pada fungsi perumahan dan fasilitas umum sebesar 11,68% dan terkecil pada fungsi lingkungan hidup sebesar 0,23%.

Pelaksanaan belanja berdasarkan kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada SKPA, baik urusan wajib maupun pilihan adalah sebagai berikut :

3.2.1. Urusan Wajib

3.2.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp2.809.836.840.704,00, direalisasikan sebesar Rp2.713.928.765.997,50, yaitu 47,58% untuk Belanja Tidak Langsung dan 52,42% untuk Belanja Langsung;
- Bidang Kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Aceh, BLUD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin, BLUD Rumah Sakit Jiwa dan BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak. Dari total anggaran sebesar Rp2.092.594.805.857,00, direalisasikan sebesar Rp1.985.556.990.325,01,

yaitu 11,95% untuk Belanja Tidak Langsung dan 88,05% untuk Belanja Langsung;

- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Aceh, dan Dinas Pengairan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp1.098.915.269.790,00, direalisasikan sebesar Rp777.247.707.177,09, yaitu 9,71% untuk Belanja Tidak Langsung dan 90,29% untuk Belanja Langsung;
- d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp750.284.475.716,00, direalisasikan sebesar Rp680.603.538.374,13, yaitu 2,81% untuk Belanja Tidak Langsung dan 97,19% untuk Belanja Langsung;
- e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp71.523.192.554,00 direalisasikan sebesar Rp64.571.200.421,00 yaitu 25,70% untuk Belanja Tidak Langsung dan 74,30% untuk Belanja Langsung;
- f. Bidang Sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp122.528.297.858,00, direalisasikan sebesar Rp106.141.057.662,36, yaitu 18,17% untuk Belanja Tidak Langsung dan 81,83% untuk Belanja Langsung;

3.2.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- a. Bidang Tenaga Kerja, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp81.657.999.451,00, direalisasikan sebesar Rp68.788.561.497,51, yaitu 35,35% untuk Belanja Tidak Langsung dan 64,65% untuk Belanja Langsung;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp14.917.467.550,00, direalisasikan sebesar Rp13.033.457.146,55, yaitu 52,77% untuk Belanja Tidak Langsung dan 47,23% untuk Belanja Langsung;



- c. Bidang Pangan, dilaksanakan oleh Dinas Pangan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp32.641.512.241,00, direalisasikan sebesar Rp29.579.711.451,13, yaitu 34,34% untuk Belanja Tidak Langsung dan 65,66% untuk Belanja Langsung;
- d. Bidang Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp11.101.912.809,00 direalisasikan sebesar Rp9.906.919.642,00, yaitu 56,24% untuk Belanja Tidak Langsung dan 43,76% untuk Belanja Langsung;
- e. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilaksanakan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp17.998.926.144,00, direalisasikan sebesar Rp16.020.132.586,23, yaitu 37,34% untuk Belanja Tidak Langsung dan 62,66% untuk Belanja Langsung;
- f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp36.614.367.464,00, direalisasikan sebesar Rp30.808.963.530,00, yaitu 29,65% untuk Belanja Tidak Langsung dan 70,35% untuk Belanja Langsung;
- g. Bidang Perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp192.011.536.820,00, direalisasikan sebesar Rp170.327.894.333,13, yaitu 10,45% untuk Belanja Tidak Langsung dan 89,55% untuk Belanja Langsung;
- h. Bidang Komunikasi dan Informasi, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp41.770.244.531,00, direalisasikan sebesar Rp37.740.067.318,00, yaitu 31,93% untuk Belanja Tidak Langsung dan 68,07% untuk Belanja Langsung;
- i. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp35.836.199.678,00, direalisasikan sebesar Rp29.331.318.398,00, yaitu 38,20% untuk Belanja Tidak Langsung dan 61,80% untuk Belanja Langsung;



- j. Bidang Penanaman Modal, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp39.977.687.024,00, direalisasikan sebesar Rp26.284.987.559,00 yaitu 59,32% untuk Belanja Tidak Langsung dan 40,68% untuk Belanja Langsung;
- k. Bidang Pemuda dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan OlahRaga Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp49.620.426.753,00, direalisasikan sebesar Rp35.835.495.940,00, yaitu 37,68% untuk Belanja Tidak Langsung dan 62,32% untuk Belanja Langsung;
- l. Bidang Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp68.395.383.222,00, direalisasikan sebesar Rp59.341.121.737,57, yaitu 32,61% untuk Belanja Tidak Langsung dan 67,39% untuk Belanja Langsung;
- m. Bidang Kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp43.187.714.883,00, direalisasikan sebesar Rp35.397.611.351,00 yaitu 43,76% untuk Belanja Tidak Langsung dan 56,24% untuk Belanja Langsung;

3.2.1.3. Urusan Keistimewaan Dan Kekhususan Aceh

- a. Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp316.194.046.880,00, direalisasikan sebesar Rp306.027.273.091,51 yaitu 3,43% untuk Belanja Tidak Langsung dan 96,57% untuk Belanja Langsung;
- b. Bidang Kebudayaan, dilaksanakan oleh Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, dan Sekretariat Majelis Adat Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp30.792.567.474,00, direalisasikan sebesar Rp27.409.981.505,00 yaitu 31,36% untuk Belanja Tidak Langsung dan 68,64% untuk Belanja Langsung;
- c. Bidang Keagamaan, dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp140.364.115.751,00 direalisasikan sebesar Rp124.740.711.771,55 yaitu 15,92% untuk Belanja Tidak Langsung dan 84,08% untuk Belanja Langsung;



- d. Bidang Kesatuan dan Perdamaian, dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp19.132.027.446,00 direalisasikan sebesar Rp17.303.944.034,00 yaitu 22,91% untuk Belanja Tidak Langsung dan 77,09% untuk Belanja Langsung;

3.2.2. Urusan Pilihan

- a. Bidang Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp132.029.875.256,00, direalisasikan sebesar Rp115.389.806.196,43, yaitu 21,93% untuk Belanja Tidak Langsung dan 78,07% untuk Belanja Langsung;
- b. Bidang Pertanian, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh, dan Dinas Peternakan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp403.159.385.375,00, direalisasikan sebesar Rp329.395.790.598,37, yaitu 29,77% untuk Belanja Tidak Langsung dan 70,23% untuk Belanja Langsung;
- c. Bidang Kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp196.610.290.951,00, direalisasikan sebesar Rp172.092.837.872,53, yaitu 46,29% untuk Belanja Tidak Langsung dan 53,71% untuk Belanja Langsung;
- d. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, dilaksanakan oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp44.788.285.599,00, direalisasikan sebesar Rp39.209.951.443,35, yaitu 38,09% untuk Belanja Tidak Langsung dan 61,91% untuk Belanja Langsung;
- e. Bidang Perindustrian, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp74.759.700.936,00, direalisasikan sebesar Rp63.374.440.450,06, yaitu 21,97% untuk Belanja Tidak Langsung dan 78,03% untuk Belanja Langsung.

3.2.3. Penunjang Urusan

- a. Bidang Inspektorat, dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp40.890.899.553,00, direalisasikan sebesar Rp33.618.199.461,00, yaitu 58,82% untuk Belanja Tidak Langsung dan 41,18% untuk Belanja Langsung;



- b. Bidang Perencanaan, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp59.649.914.390,00, direalisasikan sebesar Rp48.760.586.052,00, yaitu 51,35% untuk Belanja Tidak Langsung dan 48,65% untuk Belanja Langsung;
- c. Bidang Keuangan, dilaksanakan oleh PPKA, dan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp6.165.664.728.399,00, direalisasikan sebesar Rp 4.556.991.602.671,40, yaitu 97,66% untuk Belanja Tidak Langsung dan 2,34% untuk Belanja Langsung;
- d. Bidang Kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp25.590.849.480,00, direalisasikan sebesar Rp21.381.148.213,00, yaitu 58,84% untuk Belanja Tidak Langsung dan 41,16% untuk Belanja Langsung;
- e. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan, dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp99.180.208.498,00, direalisasikan sebesar Rp88.906.420.072,00, yaitu 17,34% untuk Belanja Tidak Langsung dan 82,66% untuk Belanja Langsung;
- f. Bidang Penunjang Lainnya, dilaksanakan oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp20.677.502.941,00, direalisasikan sebesar Rp18.539.271.215,00, yaitu 33,45% untuk Belanja Tidak Langsung dan 66,55% untuk Belanja Langsung;

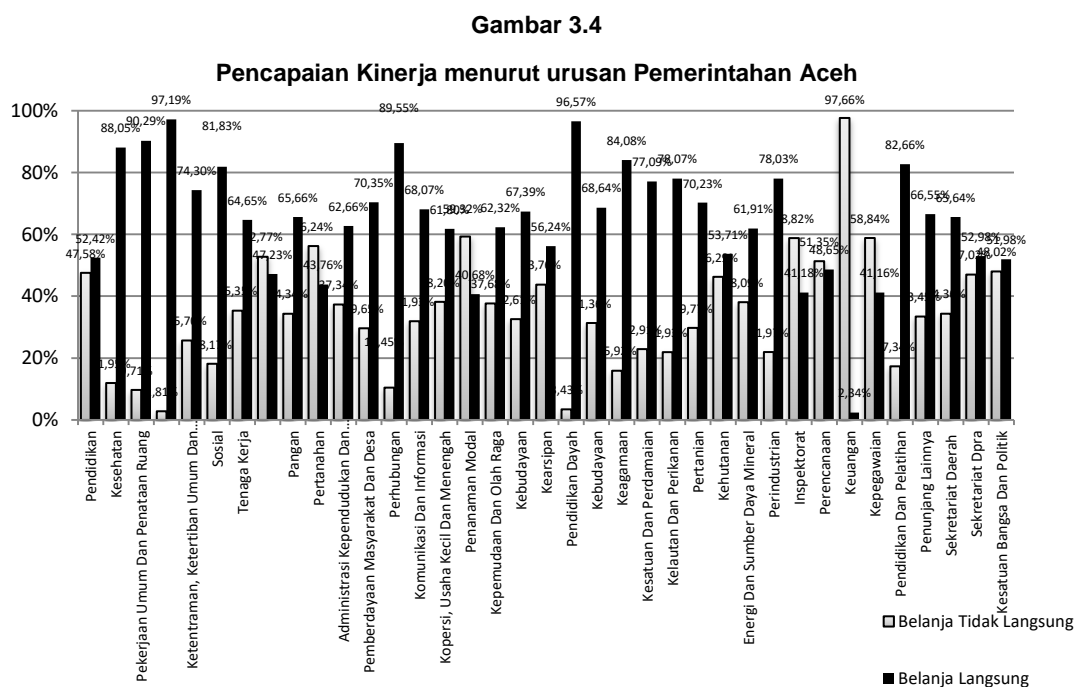
3.2.4. Pendukung

- a. Bidang Sekretariat Daerah, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Aceh, dan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Dari total anggaran sebesar Rp270.346.381.582,00, direalisasikan sebesar Rp224.443.877.825,16, yaitu 34,36% untuk Belanja Tidak Langsung dan 65,64% untuk Belanja Langsung;
- b. Bidang Sekretariat DPRA, dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp159.422.893.604,00, direalisasikan sebesar Rp149.901.406.035,00, yaitu 47,02% untuk Belanja Tidak Langsung dan 52,98% untuk Belanja Langsung;

3.2.5. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh. Dari total anggaran sebesar Rp17.041.457.839,00, direalisasikan sebesar Rp14.280.050.940,00, yaitu 48,02% untuk Belanja Tidak Langsung dan 51,98% untuk Belanja Langsung;

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan pencapaian kinerja keseluruhan belanja yang telah ditargetkan dalam APBA 2020 baik non program maupun di dalam program dan kegiatan. Pencapaian kinerja program dan kegiatan tersebut telah didukung dengan program dan kegiatan penunjang yang dilaksanakan oleh seluruh SKPA yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, dan program peningkatan sumber daya aparatur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.4 di bawah ini :



Dari Gambar 3.4 di atas, tampak bahwa Belanja Langsung dialokasikan lebih besar dari Belanja Tidak Langsung pada semua bidang dan urusan Pemerintahan Aceh, kecuali pada Bidang Keuangan, belanja tidak langsung sebesar 97,66% jauh lebih besar dari pada belanja langsung yang hanya sebesar 2,34% dari total realisasi belanja di bidang tersebut. Hal ini

disebabkan karena terdapat belanja tidak langsung PPKA yaitu belanja hibah dan bantuan sosial.

Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa *input* (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan *ouput* yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan pada masing-masing SKPA.

Belanja Tidak Langsung yaitu merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung digunakan secara periodik (umumnya bulanan) dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang bersifat umum. Belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (*common cost*) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan pada masing-masing SKPA.

Alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dianggarkan secara proporsional guna menunjang kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan kepentingan publik. Namun demikian pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang tentunya menjadi catatan yang harus dicari jalan keluarnya. Hal tersebut akan menjadi pengalaman dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan terarah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

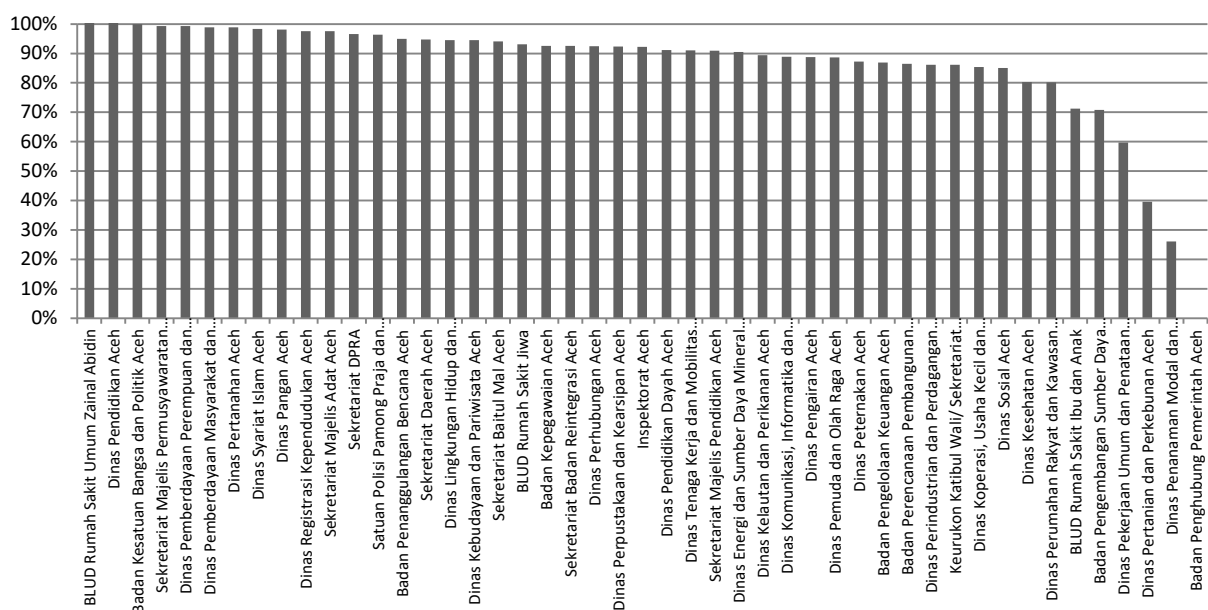
3.3. Pencapaian Realisasi Belanja Modal

Pencapaian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada

Gambar 3.5 dibawah ini:

Gambar 3.5

Pencapaian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020



Pelaksanaan Belanja Modal pada SKPA adalah sebagai berikut :

- BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dari anggaran sebesar Rp78.587.947.657,00 direalisasikan sebesar Rp82.151.471.144,00, yaitu 104,53%;
- Dinas Pendidikan Aceh dari anggaran sebesar Rp566.313.458.204,00 direalisasikan sebesar Rp591.560.007.251,00 yaitu 104,46%;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dari anggaran sebesar Rp9.614.800,00 direalisasikan sebesar Rp9.614.000,00 yaitu 99,99%;
- Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dari anggaran sebesar Rp634.507.855,00 direalisasikan sebesar Rp629.973.924,00, yaitu 99,29%;
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dari anggaran sebesar Rp94.503.286,00 direalisasikan sebesar Rp93.803.284,00 yaitu 99,26%;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dari anggaran sebesar Rp971.978.115,00 direalisasikan sebesar Rp961.348.500,00 yaitu 98,91%;



- g. Dinas Pertanahan Aceh dari anggaran sebesar Rp141.752.956,00 direalisasikan sebesar Rp140.100.000,00 yaitu 98,83%;
- h. Dinas Syariat Islam Aceh dari anggaran sebesar Rp2.186.697.948,00 direalisasikan sebesar Rp2.150.304.087,96 yaitu 98,34%.
- i. Dinas Pangan Aceh dari anggaran sebesar Rp421.695.596,00 direalisasikan sebesar Rp413.773.353,13 yaitu 98,12%;
- j. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dari anggaran sebesar Rp2.866.535.391,00 direalisasikan sebesar Rp2.797.911.224,74 yaitu 97,61%;
- k. Sekretariat Majelis Adat Aceh dari anggaran sebesar Rp816.280.400,00 direalisasikan sebesar Rp796.018.000,00 yaitu 97,52%;
- l. Sekretariat DPRA dari anggaran sebesar Rp13.042.622.176,00 hanya terealisasi sebesar Rp12.602.885.081,00 yaitu 96,63%;
- m. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dari anggaran sebesar Rp650.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp626.200.000,00 yaitu 96,34%;
- n. Badan Penanggulangan Bencana Aceh dari anggaran sebesar Rp2.859.117.712,00 direalisasikan sebesar Rp2.714.360.123,00 yaitu 94,94%;
- o. Sekretariat Daerah Aceh dari anggaran sebesar Rp21.879.840.696,00 direalisasikan sebesar Rp20.723.864.195,16 yaitu 94,72%;
- p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh dari anggaran sebesar Rp14.327.311.423,00 direalisasikan sebesar Rp13.549.899.951,27 yaitu 94,57%;
- q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dari anggaran sebesar Rp13.588.309.853,00 direalisasikan sebesar Rp12.848.074.562,77 yaitu 94,55%;
- r. Sekretariat Baitul Mal Aceh dari anggaran sebesar Rp571.766.242,00 direalisasikan sebesar Rp537.930.200,00 yaitu 94,08%;
- s. BLUD Rumah Sakit Jiwa dari anggaran sebesar Rp3.466.556.679,00 direalisasikan sebesar Rp3.227.906.561,90, yaitu 93,12%;
- t. Badan Kepegawaian Aceh dari anggaran sebesar Rp1.930.816.532,00 direalisasikan sebesar Rp1.787.052.200,00 yaitu 92,55%;
- u. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dari anggaran sebesar Rp108.216.000,00 direalisasikan sebesar Rp100.124.500,00, yaitu 92,52%;
- v. Dinas Perhubungan Aceh dari anggaran sebesar Rp121.290.234.153,00 direalisasikan sebesar Rp112.144.152.064,13 yaitu 92,46%;



- w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dari anggaran sebesar Rp3.644.105.205,00 direalisasikan sebesar Rp3.364.989.065,00 yaitu 92,34%;
- x. Inspektorat Aceh dari anggaran sebesar Rp3.762.186.554,00 direalisasikan sebesar Rp3.470.987.408,00 yaitu 92,26%;
- y. Dinas Pendidikan Dayah Aceh dari anggaran sebesar Rp14.400.879.852,00 direalisasikan sebesar Rp13.123.381.301,10 yaitu 91,13%;
- z. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dari anggaran sebesar Rp3.482.664.204,00 direalisasikan sebesar Rp3.168.849.202,00 yaitu 90,99%;
- aa. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dari anggaran sebesar Rp12.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp10.909.000,00 yaitu 90,91%;
- bb. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dari anggaran sebesar Rp18.583.715.074,00 direalisasikan sebesar Rp16.813.705.510,35 yaitu 90,48%;
- cc. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dari anggaran sebesar Rp26.635.935.359,00 direalisasikan sebesar Rp23.817.270.689,13 yaitu 89,42%;
- dd. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dari anggaran sebesar Rp5.588.925.128,00 direalisasikan sebesar Rp4.965.429.768,00 yaitu 88,84%;
- ee. Dinas Pengairan Aceh dari anggaran sebesar Rp262.052.885.719,00 direalisasikan sebesar Rp232.587.081.168,08, yaitu 88,76%;
- ff. Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh dari anggaran sebesar Rp2.812.780.940,00 direalisasikan sebesar Rp2.494.785.500,00 yaitu 88,69%;
- gg. Dinas Peternakan Aceh dari anggaran sebesar Rp4.461.348.974,00 direalisasikan sebesar Rp3.890.913.686,00 yaitu 87,21%;
- hh. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dari anggaran sebesar Rp49.327.173.347,00 direalisasikan sebesar Rp42.870.249.142,00, yaitu 86,91%;
- ii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dari anggaran sebesar Rp518.580.272,00 direalisasikan sebesar Rp448.510.000,00 yaitu 86,49%;
- jj. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dari anggaran sebesar Rp21.849.913.341,00 direalisasikan sebesar Rp18.830.908.925,81 yaitu 86,18%;

- kk. Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dari anggaran sebesar Rp482.795.007,00 direalisasikan sebesar Rp415.738.153,00 yaitu 86,11%;
- ll. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh dari anggaran sebesar Rp983.042.563,00 direalisasikan sebesar Rp839.194.700,00, yaitu 85,37%;
- mm. Dinas Sosial Aceh dari anggaran sebesar Rp6.510.643.505,00 direalisasikan sebesar Rp5.536.408.161,34 yaitu 85,04%;
- nn. Dinas Kesehatan Aceh dari anggaran sebesar Rp138.453.868.697,00 direalisasikan sebesar Rp111.183.245.911,20 yaitu 80,30%;
- oo. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh dari anggaran sebesar Rp10.861.446.650,00 direalisasikan sebesar Rp8.708.738.400,00 yaitu 80,18%;
- pp. BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak dari anggaran sebesar Rp9.298.349.588,00 direalisasikan sebesar Rp6.622.524.735,00 yaitu 71,22%;
- qq. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dari anggaran sebesar Rp7.213.333.086,00 direalisasikan sebesar Rp5.108.642.566,00 yaitu 70,82%;
- rr. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dari anggaran sebesar Rp629.296.990.289,00 direalisasikan sebesar Rp375.776.410.032,01 yaitu 59,71%;
- ss. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dari anggaran sebesar Rp13.652.411.563,00 direalisasikan sebesar Rp5.395.577.054,37 yaitu 39,52%;
- tt. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dari anggaran sebesar Rp13.867.928.238,00 direalisasikan sebesar Rp3.622.309.000,00 yaitu 26,12%;
- uu. Badan Penghubung Pemerintah Aceh dari anggaran sebesar Rp4.360.460,00 direalisasikan sebesar Rp0,00, yaitu 0,00%;

3.4. Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19

Realisasi Belanja covid adalah pengeluaran yang digunakan dalam masa pandemi untuk penanganan wabah Covid, Belanja Covid-19 terdiri dari Belanja Bidang Kesehatan, Belanja Penyediaan Jaring Pengaman Sosial dan Belanja Bidang Ekonomi. Realisasi Belanja Covid Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp631.240.431.752,00 atau 34,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.850.863.098.114,00.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1/2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan Corona Virus Disease (Covid -19) dilingkungan Pemerintah Daerah, antara lain. Dengan melakukan percepatan pengutamaan penggunaan Alokasi Anggaran Kegiatan tertentu (Refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas dalam Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.6 dibawah ini:



3.4.1. Belanja Penanganan Kesehatan

Belanja Covid-19 Penanganan Kesehatan digunakan antara lain untuk penyediaan pemberian sarana dan prasarana kesehatan kepada Masyarakat, peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel melalui penyediaan *mobile biosafety level 2*, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan baik dari sisi SDM maupun Sarana dan Prasarana, penyiapan fasilitas yang menunjang protokol kesehatan, pemantauan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan protokol



kesehatan guna menjaga kepatuhan dan disiplin masyarakat serta penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19. dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4 - Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Penanganan Kesehatan

No	SKPA	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan Aceh	54.561.524.504,00	47.292.674.550,00	86,68
2	Dinas Kesehatan Aceh	25.824.726.550,00	11.560.490.683,00	44,77
3	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	9.811.744.980,00	9.425.345.880,00	96,06
4	BLUD Rumah Sakit Jiwa	953.139.162,00	829.537.844,00	87,03
5	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	2.964.425.431,00	1.689.066.329,00	56,98
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	227.971.000,00	46.822.500,00	20,54
7	Dinas Pengairan Aceh	572.465.625,00	558.360.700,00	97,54
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	491.337.709,00	353.225.220,00	71,89
9	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	1.045.121.290,00	972.955.690,00	93,10
10	Dinas Sosial Aceh	554.052.068,00	478.927.740,00	86,44
11	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	219.145.335,00	183.805.000,00	83,87
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	242.105.380,00	238.910.880,00	98,68
13	Dinas Pangan Aceh	72.754.000,00	71.795.000,00	98,68
14	Dinas Pertanahan Aceh	125.475.600,00	124.103.000,00	98,91
15	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	61.089.602,00	55.424.000,00	90,73
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	649.497.121,00	642.142.490,00	98,87
17	Dinas Perhubungan Aceh	3.941.060.956,00	3.180.415.345,00	80,70
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	470.506.400,00	451.726.798,00	96,01
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	51.600.000,00	50.637.000,00	98,13
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	21.036.278,00	12.830.000,00	60,99
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	164.493.900,00	133.350.000,00	81,07
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	270.150.000,00	269.981.200,00	99,94
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	222.230.000,00	213.677.280,00	96,15
24	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	221.107.899,00	210.811.700,00	95,34
25	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	80.688.300,00	56.925.910,00	70,55
26	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	15.986.639,00	15.420.000,00	96,46
27	Sekretariat Majelis Adat Aceh	26.278.730,00	26.278.730,00	100,00
28	Dinas Syariah Islam Aceh	372.121.310,00	347.589.100,00	93,41
29	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	20.350.000,00	20.350.000,00	100,00
30	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	128.324.783,00	128.094.356,00	99,82
31	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	951.148.000,00	574.676.960,00	60,42
32	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	26.210.000,00	26.136.000,00	99,72
33	Dinas Peternakan Aceh	395.571.580,00	369.143.500,00	93,32
34	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	498.507.373,00	296.139.804,00	59,41
35	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	102.451.650,00	94.210.000,00	91,96
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	107.750.887,00	99.072.000,00	91,95
37	Inspektorat Aceh	179.455.128,00	178.196.000,00	99,30

No	SKPA	Anggaran	Realisasi	%
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	55.964.399,00	39.590.000,00	70,74
39	PPKA	494.369.397.878,00	386.455.610.882,00	78,17
40	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1.599.977.294,00	1.229.837.700,00	76,87
41	Badan Kepegawaian Aceh	30.964.763,00	29.449.100,00	95,11
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	4.537.658.078,00	3.029.618.500,00	66,77
43	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	244.730.000,00	244.530.000,00	99,92
44	Sekretariat Daerah Aceh	2.847.714.749,00	2.801.621.590,00	98,38
45	Sekretariat DPRA	530.464.000,00	432.949.000,00	81,62
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	38.646.389,00	38.646.389,00	100,00
Jumlah		610.899.122.720,00	475.581.102.350,00	77,85

3.4.2. Belanja Penyediaan Jaring Pengaman Sosial

Belanja Covid-19 Bidang Sosial digunakan antara lain untuk verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan sosial dan/atau hibah, percepatan penyaluran pemberian hibah/ bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai kepada antara lain individu atau masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/ harian dan individu/ masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak pandemi Covid-19. dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini:

Tabel 3.5 - Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Penyediaan Jaring Pengaman Sosial

No	SKPA	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan Aceh	3.993.199.936,00	2.612.288.414,00	65,42
2	Dinas Sosial Aceh	2.008.230.186,00	1.151.427.835,00	57,34
3	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	132.825.907,00	130.313.755,00	98,11
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	747.000.000,00	743.218.000,00	99,49
5	Sekretariat Baitul Mal Aceh	3.542.000.000,00	3.508.145.000,00	99,04
6	PPKA	943.656.731.000,00	74.934.877.455,00	7,94
7	Sekretariat Daerah Aceh	1.016.694.545,00	940.160.122,00	92,47
Jumlah		955.096.681.574,00	84.020.430.581,00	8,80

3.4.3. Belanja Penanganan Dampak Ekonomi

Belanja Covid-19 Penanganan Dampak Ekonomi digunakan antara lain untuk pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga barang, program padat karya dengan mengutamakan sumberdaya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam



rangka percepatan pemulihan ekonomi. Pemberian subsidi kepada pelaku UMKM dan Koperasi berupa pemberian bantuan modal kerja, penguatan modal usaha dan pembukaan akses terhadap lembaga keuangan serta perluasan target atau sasaran kegiatan kelompok usaha bersama, promosi investasi domestik maupun internasional. dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6 - Pencapaian Realisasi Belanja Covid-19 Penanganan Dampak Ekonomi

No	SKPA	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan Aceh	500.000.000,00	480.965.000,00	96,19
2	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	6.564.000,00	4.600.000,00	70,08
3	Dinas Pangan Aceh	8.100.000.000,00	8.100.000.000,00	100,00
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	239.850.300,00	80.448.000,00	33,54
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	670.301.610,00	601.250.000,00	89,70
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	1.999.999.991,00	1.986.699.000,00	99,33
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	42.576.316.673,00	34.534.946.021,00	81,11
8	Dinas Peternakan Aceh	10.008.937.500,00	7.864.554.000,00	78,58
9	PPKA	220.704.886.946,00	17.925.000.000,00	8,12
10	Sekretariat Daerah Aceh	60.436.800,00	60.436.800,00	100,00
	Jumlah	284.867.293.820,00	71.638.898.821,00	25,15

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Aceh dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan wajib berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Aceh meliputi Kebijakan Konseptual, Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan, Kebijakan Akuntansi Akun, Kebijakan Akuntansi BLUD, serta Bagan Akun Standar dan konversi.

4.1. Lingkungan Akuntansi Pemerintah Aceh

Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Aceh berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

- a. bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
- b. sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
- c. pengaruh proses politik; dan
- d. hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah Aceh.

Ciri keuangan Pemerintah Aceh yang penting bagi pengendalian:

- a. anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
- b. investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
- c. kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
- d. penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.

4.2. Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh memberi wewenang kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh (SKPKA) selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA) untuk mengelola administrasi keuangan Pemerintah Aceh beserta pelaporan keuangannya.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, perubahan ekuitas, neraca, arus kas, dan kinerja keuangan selama periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut merupakan kompilasi dari seluruh laporan keuangan SKPA, yang tidak hanya mencakup aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi, baik Badan, Dinas, Kantor dan Biro, namun juga dilengkapi data dari unit-unit yang terkait.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.4. Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah

uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Aceh, maupun kas telah diterima di rekening Bendahara Penerimaan.

Pengakuan Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengakuan Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Pengakuan Investasi diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

4.5. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Keandalan Pengukuran, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang

Pengukuran Aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

Pengukuran Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Aceh karena Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non Pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya

tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Pengukuran investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.6. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Kas dan Setara Kas

Definisi:

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi:

- Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Klasifikasi Kas dan Setara Kas

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.1.1	Kas dan Setara Kas			
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah	-	√
		Potongan Pajak dan Lainnya	-	√
		Kas Transitoris	-	√
		Kas Lainnya	-	√
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Aceh	√	-
		Uang Titipan	√	-
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU	√	-
		Pajak di SKPA yang Belum Disetor	√	-
		Uang Titipan	√	-
1.1.1.04	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD	√	-
		Kas di Bank BLUD	√	-
		Pajak yang Belum Disetor BLUD	√	-
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD	√	-
		Uang Titipan BLUD	√	-
1.1.1.05	Kas Lainnya	Kas Lainnya	√	-
1.1.1.06	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	√	√
		Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	-	√

- Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:
 - a. Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUA.

Pengakuan:

- Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca
- Kas SKPA terdiri atas 2 (dua) yaitu Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran.
- Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun yang digunakan untuk menampung pendapatan/penerimaan SKPA
- Kas di Bendahara Penerimaan bersumber dari pendapatan/penerimaan aktivitas operasional dan aktivitas transitoris/non anggaran
- Saldo kas di kas daerah dan setara kas akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke Rekening Kas Umum Aceh

- Saldo kas di kas daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari Rekening Kas Umum Aceh
- Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Aceh, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang di transfer ke Rekening Kas Umum Aceh
- Pendapatan yang diterima entitas lain di luar pemerintah atas nama BUA dan pendapatan terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Aceh. Pada kondisi ini, entitas lain tersebut diijinkan secara resmi oleh BUA untuk menerima pendapatan tetapi karena sesuatu hal, pendapatan tersebut terlambat disetor ke Rekening Kas Umum Aceh
- Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada bendahara pengeluaran dianggap belum sebagai pengurang kas di bendahara pengeluaran
- Kas di Bendahara Pengeluaran mencerminkan saldo Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran dan normalnya bersaldo nol pada akhir periode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengukuran:

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Kas dan Setara Kas adalah: Rincian kas dan setara kas, Kebijakan manajemen setara kas; dan Informasi lainnya yang dianggap penting

Akuntansi Piutang

Definisi:

- Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi:

- Piutang diklasifikasi sebagai berikut :

Table 4.2. Klasifikasi Piutang

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.1.3	Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Aceh	√*	√
		Piutang Retribusi	√	-
		Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	√	-
		Piutang Lain-lain PAA yang Sah	√	-
		Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	√
		Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	-	√
		Piutang Transfer Pemerintah Aceh Lainnya		
		Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah		
1.1.4	Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	√
		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	√*	√
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	√
		Piutang Lain-lain		
1.1.5	Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Pendapatan	√	-
		Penyisihan Piutang Lainnya	√	-
1.1.6	Beban Dibayar dimuka	Beban Pegawai Dibayar dimuka	√	-
		Beban Barang Dibayar dimuka	√	-
		Beban Jasa Dibayar dimuka	√	-
		Beban Pemeliharaan Dibayar dimuka	√	-
		Beban Lainnya	√	-

- Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Aceh;
- 2) Piutang Retribusi Aceh;
- 3) Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;
- 3) Kemitraan;
- 4) Pemberian fasilitas;
- 5) Transaksi Dibayar Dimuka.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.

e. Transaksi Dibayar Dimuka

Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

Pengakuan:

- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.
- Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran:

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP), disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

Tabel 4.3. Perhitungan penyisihan Piutang

No.	Jenis Piutang	Kualitas/Umur Piutang			
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	Piutang Pajak (<i>self assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
2	Piutang Pajak (<i>official assessment</i>)	< 1 Thn	≥ 1 s.d 2 Thn	> 2 s.d 5 Thn	> 5 Thn
3	Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi	< 1bulan	≥ 1 s.d 3 bulan	> 3 s.d 12 bulan	> 12 bulan
4	Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi	Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo	1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama	1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua	1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga

- Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang.

- Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara *ekstracomptabel*.
- Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Akuntansi Penyisihan Piutang

Definisi:

- Persediaan Penyisihan Piutang Adalah Estimasi Yang Dilakukan Untuk Piutang Tidak Tertagih Pada Akhir Setiap Periode Yang Dibentuk Sebesar Persentase Tertentu Dari Akun Piutang Berdasarkan Penggolongan Kualitas Piutang
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain
- Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal penetapan sampai dengan tanggal pelaporan
- Nilai realisasi bersih (*Net Realizable Value*) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Piutang disajikan dalam laporan sebesar nilai realisasi bersih

Kriteria Kualitas Piutang:

- Penentuan Besaran Penyisihan Dana Bergulir
- Pencatatan Akuntansi : Pencatatan penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir, Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir, Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*brutto*).
- Pelaporan : Beban penyisihan dana bergulir dan Penyisihan dana bergulir tidak tertagih
- Penghapusan Dana Bergulir : Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup *ekstracomptabel* dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

Akuntansi Persediaan

Definisi:

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah

Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dapat diperoleh melalui:
 - a. Pembelian/Pengadaan
 - b. Donasi/Hibah

Klasifikasi:

- Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.1.7	Persediaan			
1.1.7.01	Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Barang ATK	√	-
		Persediaan Dokumen/Adm. Tender	√	-
		Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	√	-
		Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	√	-
		Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	√	-
		Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	√	-
		Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	√	-
		Persediaan Isi Tabung Gas	√	-
		Dst...	√	-
1.1.7.02	Persediaan Barang/ Material	Persediaan Bahan Baku Bangunan.	√	-
		Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	√	-
		Persediaan Bibit Ternak	√	-
		Persediaan bahan obat-obatan	√	-
		Persediaan bahan kimia	√	-
		Persediaan bahan makanan pokok.	√	-
		Dst...	√	-
1.1.7.03	Persediaan Barang Lainnya	Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga	√	-
		Dst...	√	-

- Suatu aset dapat diklasifikasi sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Aceh.
 - b. Bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Aceh.
- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

- Dalam hal Pemerintah Aceh memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
- Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
- Persediaan dapat terdiri dari:
 - a. Barang konsumsi;
 - b. Amunisi;
 - c. Bahan untuk pemeliharaan;
 - d. Suku cadang;
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
 - f. Pita cukai dan leges;
 - g. Bahan baku;
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat;
 - j. Peralatan mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat ; dan
 - k. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan:

- Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
- Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Beban Persediaan:

- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

- Terdapat dua pendekatan Pengakuan Beban Persediaan, yaitu:
 - a. Pendekatan aset
Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.
 - b. Pendekatan beban.
Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Selisih Persediaan:

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran:

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan 3 alternatif metode penilaian, yaitu:

- a. Metode First In First Out/FIFO atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP);
 - b. Rata-rata Tertimbang; dan
 - c. Harga Pembelian Terakhir.
- Perbedaan jumlah unit persediaan digunakan sebagai dasar penyesuaian nilai persediaan dan diakui sebagai beban, serta sebab perbedaan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh : jumlah unit persediaan tidak sama dengan hasil perhitungan fisik (Berita Acara Stock Opname/BASO) maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (BASO)

Penyajian dan Pengungkapan:

Pencatatan atas pemakaian persediaan tergantung pada metode pencatatan persediaan. Metode pencatatan persediaan terdiri atas 2 (dua) metode yaitu:

- Metode Perpetual, dalam metode ini setiap transaksi yang mengakibatkan bertambah atau berkurang persediaan, dicatat dengan dengan mendebit persediaan (bertambah) dan dicatat dengan mengkredit persediaan (berkurang) sehingga saldo persediaan menunjukkan nilai terkini.
- Metode Periodik, dalam metode ini pencatatan atas transaksi persediaan hanya dilakukan untuk transaksi bertambah persediaan dan pencatatan dilakukan pada akhir periode periode pelaporan. Dalam metode periodik ini, transaksi pemakaian persediaan tidak dicatat.
- Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Akuntansi Dana Bergulir

Definisi:

- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi:

a. Investasi Dana Bergulir

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
1.2.1.04	Dana Bergulir	Dana Bergulir ...	√	√

b. Piutang Pendapatan akibat Investasi Dana Bergulir.

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	SKPKA
1.1.3	Piutang Pendapatan			
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD yang sah	Piutang Hasil dari Pengelolaan Dana Bergulir	√	√

c. Pendapatan Hasil Dana Bergulir.

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
4.1.4	8.1.4	Lain-Lain PAD yang Sah	√	√
4.1.4.04	8.1.4.04	Pendapatan Bunga	√	√

- Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
- Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.

Pengakuan:

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.
- Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan nomenklatur “Dana Bergulir”, namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Dana Bergulir.
- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.
- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.

- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

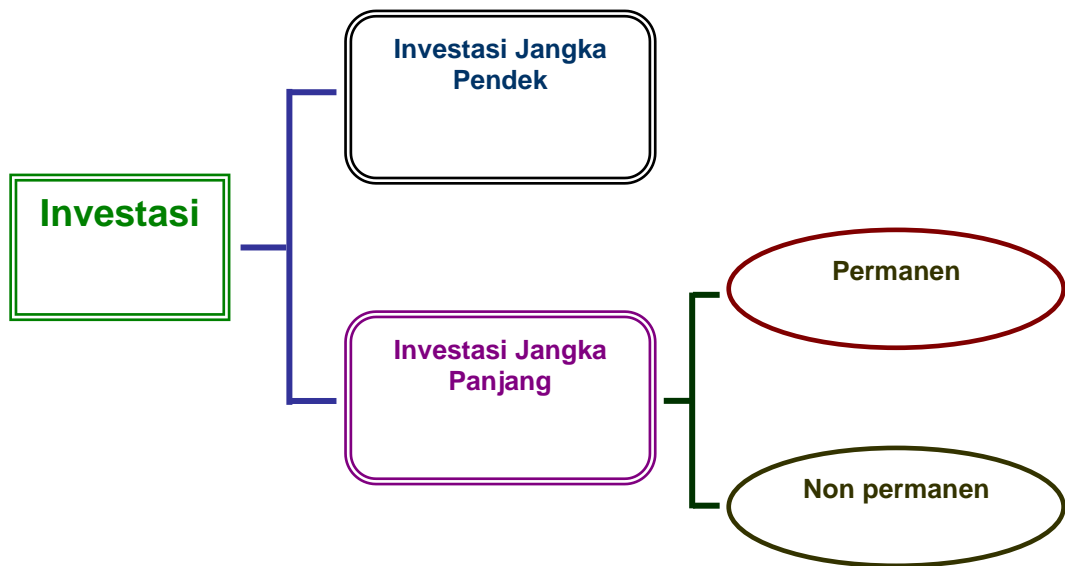
Pengukuran:

- Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
- Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
- Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir
- Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA.
- Pengungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: Dasar penilaian dana bergulir, Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, Besarnya suku bunga yang dikenakan, Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir, Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir, dan Informasi lain yang dianggap perlu

Akuntansi Investasi



Definisi:

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi:

- Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	-	√
		Investasi dalam Deposito	-	√
		Investasi dalam SUN	-	√
		Investasi dalam SBI	-	√
		Investasi dalam SPN	-	√
		Investasi Jangka Pendek BLUD	-	√
		Investasi Jangka Pendek Lainnya	-	√
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	√
		Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi dalam Obligasi	-	√
		Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	√
		Dana Bergulir	-	√
		Deposito Jangka Panjang	-	√

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN	-	√
		Penyertaan Modal Kepada BUMA	-	√
		Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	√
		Investasi Permanen Lainnya	-	√

- Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan:

- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Pengukuran:

- Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.
- Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi non permanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.
- Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, Jenis-jenis investasi, Investasi Permanen dan Nonpermanen, Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut, Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, Perubahan pos investasi.

Akuntansi Aset Tetap

Definisi:

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Aset tetap dapat diperoleh melalui:
 - a. Pembelian/Pengadaan
 - b. Donasi/Hibah/Wakaf/Sumbangan
 - c. Pembangunan
 - d. Pertukaran

Klasifikasi:

- Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun		Kewenangan	
			SKPA	PPKA
1.3.1	Tanah	Tanah Persil	√	-
		Tanah Non Persis	√	-
		Lapangan	√	-
1.3.2	Peralatan dan mesin	Alat Besar	√	-
		Alat Angkutan	√	-
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	√	-
		Dst...	√	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung	√	-
		Monumen	√	-
		Bangunan Menara	√	-
		Dst...	√	-
1.3.4	Jalan, Jaringan dan	Jalan dan Jembatan	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
	Irigasi	Bangunan Air Irigasi	√	-
		Instalasi	√	-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	√	-
		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	√	-
		Hewan	√	-
		Dst...	√	-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√	-
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	√	-
		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	√	-
		Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	√	-
		Dst...	√	-

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.
- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Pengakuan:

- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
 - f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Batasan Minimal Kapitalisasi
1.3.1	Tanah	unit	Rp. 1,-
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:		
1.3.2.01	Alat-alat Besar		
	- Alat Besar Darat	unit	Rp 20.000.000,00
	- Alat Besar Apung	unit	Rp 20.000.000,00
	- Alat Bantu	unit	Rp 500.000,00
1.3.2.02	Alat-alat Angkutan		
	- Kendaraan roda enam/lebih	unit	Rp 30.000.000,00
	- Kendaraan roda empat	Unit	Rp 15.000.000,00
	- Kendaraan roda dua	unit	Rp 3.000.000,00
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.04	Alat Pertanian	unit	Rp 1.000.000,00

No.	Uraian	Satuan	Batasan Minimal Kapitalisasi
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	unit	Rp 300.000,00
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Alat Pemancar	Unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.10	Komputer	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.11	Alat eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.12	Alat Pengeboran	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	unit	Rp 500.000,00
1.3.2.16	Alat Praga	unit	Rp 500.000,00
1.3.2.17	Alat Proses/Produksi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.18	Rambu-rambu	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.2.19	Peralatan Olahraga	unit	Rp 500.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	unit	
1.3.3.01	Bangunan Gedung	unit	Rp 25.000.000,00
1.3.3.02	Bangunan Monumen	unit	Rp 25.000.000,00
1.3.3.03	Bangunan Menara	unit	Rp 5.000.000,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	unit	Rp 5.000.000,00
1.3.4	Jalan, jaringan dan irigasi, yg terdiri atas:		
1.3.4.01	Jalan dan Jembatan	unit	Rp 50.000.000,00
1.3.4.02	Bangunan Air	unit	Rp 100.000.000,00
1.3.4.03	Instalasi	unit	Rp 1.000.000,00
1.3.4.04	Jaringan	unit	Rp 50.000.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:		
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	-	Tidak dikapitalisasi
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	-	Tidak dikapitalisasi
1.3.5.03	Hewan		Tidak dikapitalisasi
1.3.5.04	Biota Perairan		Tidak dikapitalisasi
1.3.5.05	Tanaman		Tidak dikapitalisasi
1.3.5.06	Barang Koleksi Non Budaya		Tidak dikapitalisasi

- Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi di atas dicatat sebagai aset *extra comptable*, tidak disajikan dalam neraca namun diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Hasil dari perkembangbiakan hewan, ikan dan tanaman tidak disajikan di neraca tetapi dicatat sebagai aset *extra comptable*. Apabila hasil dari perkembangbiakan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat, pencatatan atas hasil perkembangbiakan tersebut diakui sebagai persediaan.
- Catatan dalam *extra comptable* berfungsi sebagai media pengendali.

Tanah:

- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Peralatan dan Mesin:

- Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Gedung dan Bangunan:

- Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.
- Gedung bertingkat terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin *air conditioning*), dan komponen penunjang yang lain berupa saluran air dan telpon. *Air conditioning* dimaksudkan disini adalah berupa bangunan yang didalamnya berisi peralatan-peralatan *central air conditioning*.

Jalan, Jaringan dan Irigasi:

- Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Jalan, Jaringan dan Irigasi diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya:

- Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap
 - b. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a) di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan
 - c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a) dan b) di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

Pengukuran:

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai wajar pada saat perolehan yang bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya
- Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.• Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
Peralatan dan Mesin	Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
Aset Tetap Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak.• Biaya Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.

Tanah:

- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
- Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
- Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Peralatan dan Mesin:

- Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka

digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (*appraisal*) dengan memperhitungkan faktor penyusutan. Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

Gedung dan Bangunan:

- Pengukuran Gedung dan bangunan berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Serta memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

Jalan, Jaringan dan Irigasi:

- Pengukuran Jalan, jaringan dan irigasi berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Jalan, jaringan dan irigasi dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Jalan, jaringan dan irigasi didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Serta memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi.

Aset Tetap Lainnya:

- Pengukuran Aset Tetap Lainnya berdasarkan harga perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap Lainnya dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap Lainnya didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan serta memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

Konstruksi Dalam Pengerjaan:

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Perolehan Secara Gabungan:

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset:

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang

serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

- Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi:

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan:

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
- Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.
- Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset

Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal:

- Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan:

penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (*straight line method*).
- Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.
- Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.
- Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- Aset Tetap yang sudah disusutkan seluruh nilainya dapat dihapuskan jika telah mendapat izin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang. Apabila dikemudian hari aset tetap tersebut akan dilelang untuk memberi pemasukan kepada Pemerintah Aceh, maka rencana pelelangan dicantumkan dalam anggaran dan realisasinya dicatat sebagai Pendapatan Aceh
- Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (*idle asset*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap
- Dokumen yang digunakan : Bukti Memorial, Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyusutan dan amortisasi aset tetap/aset tidak berwujud.

- Perkiraan masa manfaat untuk setiap Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Besar	
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	5
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	07		Alat Kodekteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4



Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografis	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	5
1	3	2	13	02	Produksi	5
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	01	Alat Bantu Produksi	5
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	4
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	4
1	3	2	15	03	Alat SAR	4
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	4
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	4
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses Produksi	5
1	3	2	18		Rambu-rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	2
1	3	2	18	02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	2
1	3	2	18	03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	2
1	3	2	19		Peralatan Olahraga	
1	3	2	19	01	Peralatan Olahraga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Tugu Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air	30

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat
					Tanah	
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation):

- Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku.

Aset Bersejarah:

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Aceh untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca. namun aset misalnya diungkapkan jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan:

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- Nilai pelepasan aset tetap dicatat sebagai lain-lain PAA yang sah
- Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan Surat Keputusan Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Aceh, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal Pemerintah Aceh dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal Pemerintah Aceh dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal)

Akuntansi Reklasifikasi Aset Tetap

- Reklasifikasi aset tetap terdiri atas:
 - a. Reklasifikasi Aset Tetap ke *Extracomptable*
 - b. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya – Usulan Penghapusan dan Penjualan
 - c. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
 - d. Reklasifikasi KDP ke Aset Lain-lain – Mangkrak
 - e. Reklasifikasi KDP-Biaya Perencanaan X-1 ke Aset Lain-lain

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
 - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Barang Dan Belanja Modal/Aset Tetap:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Definisi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Klasifikasi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	SKPKA	
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tanah Dalam Pengerjaan	√	-
		Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	√	-
		Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	√	-
		Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	√	-
		Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	√	-

- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan:

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Pengukuran:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Retensi.
 - f. Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Akuntansi Dana Cadangan

Definisi:

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Klasifikasi:

- Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Dana Cadangan

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
1.4.1.01	Dana Cadangan		
	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan	-	√
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung	-	√
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk	-	√
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada	-	√
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan	-	√

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
	Olahraga Nasional (PON)		
	Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan	-	√
	Dst		

b. Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

Kode Rekening		Uraian Akun		Kewenangan	
LRA	LO			SKPA	PPKA
4.1.4.03	8.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro	Penerimaan Jasa Giro Dana Cadangan....	√	√
4.1.4.04	8.1.4.04	Pendapatan Bunga	Pendapatan Bagi Hasil Deposito	√	√

Pengakuan:

- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:
 - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.

Pengukuran:

- Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset, Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK

- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah- jasa giro/bunga dana cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan - LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-jasa giro/bunga dana cadangan.
- dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan: (1) dasar hukum (Qanun) pembentukan dana cadangan, (2) Tujuan pembentukan dana cadangan, (3)Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, (4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan,(5)Sumber dana cadangan, (6)Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

Akuntansi Aset Lainnya

Definisi:

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi:

- Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan		
		SKPA	PPKA	
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran	√	√
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	√	√
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa	√	√
		Kerjasama Pemanfaatan	√	√
		BGS/BSG	√	√
		Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)	√	√
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	Goodwill	√	-
		Lisensi dan Frenchise	√	-
		Hak Cipta	√	-
		Paten	√	-
		Aset Tidak Berwujud Lainnya	√	-
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	-
1.5.4	Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain	√	√

Pengakuan:

- Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.

3) Bangun Guna Serah

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Aceh oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Aceh setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Aceh oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Aceh untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut

4) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset Tetap yang pemanfaatannya dalam bentuk KSPI harus direklasifikasikan ke Aset Lain-lain - Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Aceh akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Aceh. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

- 6) Hasil Kajian/Penelitian yang Memberikan Manfaat Jangka Panjang
 - 7) Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
- d. Aset Lain-Lain
- Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran:

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - a. Sewa
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - b. Kerja sama Pemanfaatan (KSP)
Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)
BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Aceh kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
 - d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)
BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Aceh ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut
- Aset Tidak Berwujud
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi

yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.

- Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
 - d. Informasi lainnya yang penting.
- Pelepasan/Penghentian Aset Tetap

Aktivitas pelepasan/penghentian aset tetap terdiri atas:

- a. Penjualan
- b. Pemusnahan
- c. Hibah
- d. Penyertaan Modal

Akuntansi Kewajiban

Definisi:

- Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Aceh mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah

Aceh juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Aceh, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari peraturan perundang-undangan atau kontrak yang mengikat.

Klasifikasi:

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	PPKA
2.1	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	√	-
2.1.2	Utang Bunga	√	√
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	√	√
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	√	-
2.1.5	Utang Belanja	√	√
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	√	√
2.2	Kewajiban Jangka Panjang		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	√
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	√

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan:

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Aceh

memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketetapan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketetapan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pengukuran:

- Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
 - 1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Aceh menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Aceh mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
 - 2) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
 - b. Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Aceh untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
 - 2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

- e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - f. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- Pengukuran kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Aceh dijabarkan dalam 2 (dua) karakteristik sebagai berikut:
 - a. Utang yang tidak diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)
 - b. Utang yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)
 - Perubahan Valuta Asing
 - Tunggakan

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.
- Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Akuntansi Pendapatan

Definisi:

- Pendapatan-LRA dicatat saat adanya pendapatan secara tunai dan non tunai. Pendapatan-LO pada umumnya terjadi karena adanya penerimaan pendapatan secara tunai dan non tunai, adanya tunggakan pungutan pendapatan, pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintah Aceh
- Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Aceh meliputi rencana pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Aceh dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Klasifikasi:

- Pendapatan Asli Aceh (PAA)

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.1	Pendapatan Asli Aceh-LRA	√	-
4.1.1	Pajak Aceh-LRA	√	-
4.1.2	Retribusi Aceh-LRA	√	-

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan-LRA	√	-
4.1.4	Lain-lain PAA yang Sah-LRA	√	-

- Pendapatan Transfer

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.2	Pendapatan Transfer-LRA	-	√
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	-	√
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	-	√
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	-	√

- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

Kode Rekening	Uraian Akun	Kewenangan	
		SKPA	SKPKA
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	-	√
4.3.1	Pendapatan Hibah-LRA	-	√
4.3.2	Dana Darurat-LRA	-	√
4.3.3	Pendapatan Lainnya-LRA	-	√

Pengakuan:

- Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - a. Diterima pada Rekening Kas Umum Aceh
 - b. Diterima oleh SKPA
 - c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Aceh atas nama Bendahara Umum Aceh Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- Pengakuan pendapatan mencakup hal-hal sebagai berikut
 - a. Pendapatan kas yang telah diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
 - b. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan Aceh dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Aceh, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Aceh.
 - c. Pendapatan kas yang diterima SKPA dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Aceh, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Aceh untuk diakui sebagai pendapatan Pemerintah Aceh.
 - d. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Aceh untuk diakui sebagai pendapatan Aceh.

- e. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Aceh berdasarkan otoritas yang diberikan oleh Bendahara Umum Aceh, dan Bendahara Umum Aceh mengakuinya sebagai pendapatan.
 - Pengakuan pendapatan diakui berdasarkan bukti dokumen sumber yang sah
 - Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA
 - Koreksi kesalahan pencatatan pendapatan ditinjau dari waktu diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:
 - a. Koreksi kesalahan pendapatan pada periode berjalan; dan
 - b. Koreksi kesalahan pendapatan pada periode sebelumnya.
- Jika terjadi pengembalian pendapatan yang sifatnya normal dan berulang yang terjadi baik pada periode terjadinya penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai *pengurang pendapatan*.
- Koreksi kesalahan pencatatan pendapatan ditinjau dari sifatnya diklasifikasikan atas 2 (dua), yaitu:
 - a. Koreksi kesalahan pendapatan bersifat normal dan berulang; dan
 - b. Koreksi kesalahan pendapatan yang bersifat tidak normal dan tidak berulang
 - Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah pada SKPA terkait
 - Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, SKPKA akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan
 - Pengakuan pendapatan transfer-LRA dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Aceh
 - Pendapatan transfer yang terkait dengan kurang salur dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi
 - Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut. Anggaran pendapatan yang belum ditetapkan akan diusulkan pada APBA Perubahan, namun apabila tidak dilakukan perubahan, realisasi tetap diakui sebagai pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan.
 - Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain

Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh Lainnya pada SKPKA.

- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran:

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
- Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia
- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

Akuntansi Belanja

Definisi:

- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.

Klasifikasi:

- Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
5.1	-	Belanja Operasi		
5.1.1	-	Belanja Pegawai	√	-
5.1.2	-	Belanja Barang	√	-
5.1.3	-	Bunga	-	√
5.1.4	-	Subsidi	-	√
5.1.5	-	Hibah (berupa uang)	-	√
5.1.5	-	Hibah (berupa barang dan jasa)	√	√

Kode Rekening		Uraian Akun	Kewenangan	
LRA	LO		SKPA	SKPKA
5.1.6	-	Bantuan Sosial (berupa uang)	-	√
5.1.6	-	Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa)	√	√
5.2	-	Belanja Modal		
5.2.1	-	Belanja Tanah	√	-
5.2.2	-	Belanja Peralatan dan Mesin	√	-
5.2.3	-	Belanja Gedung dan Bangunan	√	-
5.2.4	-	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	√	-
5.2.5	-	Belanja Aset tetap lainnya	√	-
5.3	-	Belanja Tak Terduga		
5.3.1		Belanja Tak Terduga	-	√

Pengakuan:

- Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.
 - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran:

- Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

Akuntansi Transfer

Definisi:

- Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Klasifikasi
Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Klasifikasi
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Beban Transfer
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya
Beban Transfer Keuangan Lainnya
Transfer/Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya
Bantuan Keuangan Lainnya

Pengakuan:

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

Pengukuran:

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
 - a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - b. Transfer masuk dalam bentuk hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.
- Transfer masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) disajikan dalam kelompok pendapatan transfer.
- Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi.
- Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.

Akuntansi Pembiayaan

Definisi:

- Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
- Rekening Kas Umum Aceh adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan oleh Gubernur Aceh untuk menampung seluruh penerimaan Pemerintah Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Aceh pada bank yang ditetapkan.
- Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan

Klasifikasi:

Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan
 - a. Pencairan Dana Cadangan
 - b. Hasil Penjualan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan
 - c. Pinjaman Dalam Negeri
 - d. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen
- Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembentukan Dana Cadangan
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Aceh
 - c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
 - d. Investasi Non Permanen

Pengakuan:

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.

- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran:

- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan adalah: Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran(2), Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal/ investasi Pemerintah Aceh,(3) Informasi lainnya yang dianggap perlu

Akuntansi Pendapatan-LO

Definisi:

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Klasifikasi:

- Pendapatan Asli Aceh (PAA)
- Pendapatan Transfer
- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

Pengakuan:

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).
- Pengakuan Pendapatan Pajak-LO menyesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 2 (dua) metode yang

digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*

- Untuk dapat mencatat Pendapatan Pajak-LO, Pemerintah Aceh memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan
- Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, pengakuan pendapatan LO sebesar yang telah menjadi hak entitas secara proposional
- Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas
- Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan
- Pendapatan Bantuan Keuangan-LO baik bantuan keuangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, diakui berdasarkan nilai definitif menurut Surat Keputusan Gubernur Aceh yang menjadi hak Pemerintah Aceh selaku penerima
- Pendapatan hibah-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Naskah perjanjian hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut
- Pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak sering atau tidak rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Aceh, dicatat sebagai pendapatan luar biasa LO

Pengukuran:

- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud
- Pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima Pemerintah Aceh
- Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi

Penyajian dan Pengungkapan:

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah, (1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, (2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Aceh, (4) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan perubahannya, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Beban

Definisi:

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Klasifikasi:

Beban diklasifikasi sebagai berikut:

- Beban Operasi-Lo
- Beban Transfer
- Beban Non Operasional
- Beban Luar Biasa

Pengakuan:

- Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh.
 - b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu
- Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu engeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
 - a. Metode pendekatan Beban
 - b. Metode pendekatan Aset
- Beban Pegawai Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Aceh yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

- Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani
- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan
- Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Aceh untuk memberikan subsidi telah timbul
- Beban Hibah diakui pada saat NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah
- Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial
- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun
- Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Aceh kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Pengukuran:

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga
- Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*)
- Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebesar nilai buku
- Pengukuran Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga
- Beban lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya dan telah mendapatkan persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku
- Beban transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer
- Beban Penyusutan dan Amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban secara sistematis setiap tahun dengan metode penyusutan garis lurus

- Beban bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Besaran beban bunga biasanya diukur sebagai besaran persentase tertentu atas pokok utang serta periode pembayaran bunga utang serta hal lain jika ada, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pemberian utang yang telah disepakati sebelumnya. Pada prinsipnya metode pengukuran besaran pengenaan bunga biasanya tercakup pada pasal dalam naskah perjanjian pemberian pinjaman untuk mencegah *dispute* atau (perselisihan) dikemudian hari
- Beban Luar biasa diukur berdasarkan jumlah tagihan/kas yang dikeluarkan dari anggaran belanja tidak terduga

Penyajian dan Pengungkapan:

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (*line item*)
- Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban
- Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Akuntansi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

Definisi:

- Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Perusahaan Daerah Aceh, Masyarakat, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan.
- Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Aceh kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Bantuan Keuangan adalah Pemberian uang dari Pemerintah Aceh kepada pemerintah daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta kepada partai politik

Klasifikasi:

- Jenis belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dari sisi bentuknya terdiri dari
 - a. Dalam bentuk uang
 - b. Dalam bentuk barang

- Belanja hibah, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima hibah
 - a. Pemerintah
 - b. Pemerintah daerah
 - c. Perusahaan daerah Aceh
 - d. Masyarakat
 - e. Organisasi kemasyarakatan
- Belanja bantuan sosial, diklasifikasikan menurut pihak yang menerima bantuan sosial
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu
 - b. Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non pemerintahan
- Seluruh Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan bersifat terencana. Belanja yang direncanakan telah melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang di dalam APBA dan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBA

Pengakuan:

- Pengakuan pendapatan hibah terjadi pada saat hak Pemerintah Aceh timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun berjalan serta tidak perlu dibayar kembali
- Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional
- Hibah dalam bentuk uang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional sejumlah nominal yang diterima
- Hibah dalam bentuk barang dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran sebesar nilai yang tertuang pada berita acara apabila termasuk dalam hibah terencana dan telah dianggarkan dalam APBA
- Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan *statutory report*. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima SKPA dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh SKPA penerima
- Hibah dari aset yang tidak ada nilainya, cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) jenis dan jumlah barang yang dihibahkan
- Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Bantuan Keuangan adalah beban Pemerintah Aceh dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat

Pengukuran:

- Belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah

Penyajian dan Pengungkapan:

- Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi bank sentral pada tanggal transaksi. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam

Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

- Pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional
- Jenis informasi atas transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
 - b. Penjelasan pencapaian transaksi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan terhadap target yang ditetapkan dalam qanun daerah tentang APBA, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan
 - c. Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
 - d. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan
 - e. Jenis hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga

Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Definisi:

- Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengakuan:

- Pendapatan BLUD - LO diakui dengan kriteria
 - a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
 - b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan.
 - d. Pada saat realisasi pendapatan BLUD yang secara hak telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan

- Pendapatan BLUD – LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan Pendapatan BLUD oleh fungsi BUA
- Piutang BLUD diakui dengan kriteria
 - a. Telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut.
 - b. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan
- Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain-kepada Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas BLUD. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja BLUD-LRA diakui setelah dilakukannya pengesahan atas belanja operasional BLUD oleh fungsi BUA
- Kas Uang Muka Pelayanan BLUD dan Pendapatan Diterima Di Muka diakui pada saat uang diterima di BLUD
- Potongan/Penyesuaian Klaim Pendapatan diakui pada saat dokumen hasil verifikasi diterbitkan oleh pihak ketiga
- Kas transitoris pendapatan-BLUD diakui pada saat uang diterima di BLUD atas jasa layanan yang telah diberikan dan belum dilakukan pengesahan pendapatan
- Kas transitoris belanja-BLUD diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari dana BLUD dan belum dilakukan pengesahan belanja

Pengukuran:

- Pengukuran pendapatan BLUD, Uang Muka Pelayanan BLUD, Pendapatan Diterima Di Muka diidentifikasi sebesar jumlah nominal yang tertera pada dokumen sumber transaksional pendapatan BLUD atau yang dipersamakan
- Pengukuran Piutang Jasa Layanan BLUD dicatat sebesar nilai nominal atas dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir periode

Penyajian dan Pengungkapan:

- Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

- Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan
- Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun
- Laporan Keuangan BLUD disajikan berupa : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.
- Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan atas Akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan Aceh merupakan hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan TA 2020 mencapai Rp14.439.920.557.021,15 atau 103,10% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.005.401.514.224,00 dan TA 2019 sebesar Rp15.752.800.901.652,15. Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan TA 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Tahun 2020	Tahun 2019	%
1	Pendapatan Asli Aceh	2.184.607.197.048,00	2.570.775.877.183,15	2.698.912.471.144,15	117,68
2	Pendapatan Transfer	11.818.700.337.176,00	11.826.017.687.067,00	13.049.675.124.487,00	100,06
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	2.093.980.000,00	43.126.992.771,00	4.213.306.021,00	2059,57
Jumlah Pendapatan		14.005.401.514.224,00	14.439.920.557.021,15	15.752.800.901.652,15	103,10

5.1.1.1. Pendapatan Asli Aceh

Pendapatan Asli Aceh merupakan Pendapatan Aceh yang bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada daerah dalam menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Aceh TA 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp2.570.775.877.183,15 atau 117,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.184.607.197.048,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		
			Tahun 2020	Tahun 2019	%
1	Pajak Aceh	1.275.366.715.499,00	1.477.991.066.969,65	1.409.251.915.060,80	115,89
2	Retribusi Aceh	12.133.554.700,00	8.159.969.910,00	17.087.692.809,00	67,25
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal	202.386.465.655,00	181.700.799.036,00	182.385.550.448,00	89,78
4	Lain-lain PAA yang Sah	694.720.461.194,00	902.924.041.267,50	1.090.187.312.826,35	129,97
Jumlah Pendapatan Asli Aceh		2.184.607.197.048,00	2.570.775.877.183,15	2.698.912.471.144,15	117,68

5.1.1.1.1. Pajak Aceh

Pajak Aceh merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Aceh tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh, mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman bagi pungutan pajak agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, aman, serta dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal.

Pajak Aceh TA 2020 sebesar Rp1.477.991.066.969,65 atau 115,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.275.366.715.499,00 dan TA 2019 sebesar Rp1.409.251.915.060,80, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	433.680.500.000,00	484.694.888.039,50	445.991.339.667,00	111,76
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	277.507.310.499,00	290.706.133.250,00	326.820.065.362,00	104,76
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	286.623.385.000,00	319.325.065.709,00	334.359.516.954,00	111,41
4.	Pajak Air Permukaan	1.577.020.000,00	1.897.658.782,15	1.480.444.046,80	120,33
5.	Pajak Rokok	275.978.500.000,00	381.367.321.189,00	300.600.549.031,00	138,19
Jumlah		1.275.366.715.499,00	1.477.991.066.969,65	1.409.251.915.060,80	115,89

5.1.1.1.2. Retribusi Aceh

Retribusi Aceh merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi Aceh TA 2020 sebesar Rp8.159.969.910,00 atau 67,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp12.133.554.700,00 dan TA 2019 sebesar Rp17.087.692.809,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi

Uraian	Anggaran	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan	804.280.200,00	930.267.000,00	986.256.000,00	115,66
Retribusi Pelayanan Pendidikan	265.000.000,00	-	5.064.570.000,00	-
Jumlah	1.069.280.200,00	930.267.000,00	6.050.826.000,00	87,00
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	827.900.000,00	466.813.000,00	1.424.311.500,00	56,39
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.472.824.500,00	1.756.239.880,00	2.649.402.959,00	27,13
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	240.000.000,00	832.394.030,00	876.307.380,00	346,83
Retribusi Terminal - LRA	209.900.000,00	2.500.000,00	-	1,19
Retribusi Tempat Khusus Parkir	35.500.000,00	32.000,00	889.000,00	0,09
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	523.000.000,00	352.000.000,00	-
Retribusi Tempat Pelelangan	150.000.000,00	-	-	-
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	386.000.000,00	225.650.000,00	377.504.000,00	58,46
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	1.829.000.000,00	285.792.000,00	1.556.058.000,00	15,63
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	167.500.000,00	2.478.979.000,00	3.181.207.970,00	1.479,99
Jumlah	10.318.624.500,00	6.571.399.910,00	10.417.680.809,00	63,68

Uraian	Anggaran	Tahun 2020	Tahun 2019	%
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Trayek	30.350.000,00	45.828.000,00	42.461.000,00	151,00
Retribusi Izin Perikanan	439.300.000,00	612.475.000,00	576.725.000,00	139,42
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	276.000.000,00	-	-	-
Jumlah	745.650.000,00	658.303.000,00	619.186.000,00	88,29
Total	12.133.554.700,00	8.159.969.910,00	17.087.692.809,00	67,25

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal

Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal TA 2020 sebesar Rp181.700.799.036,00 atau 89,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp202.386.465.655,00 dan TA 2019 sebesar Rp182.385.550.448,00.

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Aceh (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdiri dari setoran dividen tahun 2020 Bank Aceh sebesar Rp158.284.954.748,00, dan setoran pemindahbukuan laba Bank Aceh sebesar Rp23.415.844.288,00.

5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah TA 2020 sebesar Rp902.924.041.267,50 atau 129,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp694.720.461.194,00 dan TA 2019 sebesar Rp1.090.187.312.826,35, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli yang Sah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.577.020.000,00	-	12.437.300.000,00	-
2	Penerimaan Jasa Giro	9.000.000.000,00	85.238.348.370,02	95.044.824.790,56	947,09
3	Pendapatan Bunga	64.293.579.800,00	76.187.421.357,82	75.314.463.702,32	118,50
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	7.632.776.800,00	518.570.811,47	852.486.989,09	6,79
5	Pendapatan Denda Pajak	11.200.000.000,00	7.417.052.203,24	13.946.793.880,20	66,22
6	Pendapatan Dari Pengembalian	157.702.000,00	12.699.069.370,74	52.903.158.597,92	8.052,57
7	Pendapatan dari Angsuran/cicilan Penjualan	-	3.312.204,00	16.807.340,00	-
8	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	7.648.547.000,00	5.877.681.263,60	18.259.684.878,00	76,85
9	Pendapatan Zakat	50.248.000.000,00	82.538.693.511,08	248.893.222.882,63	164,26
10	Pendapatan BLUD	542.962.835.594,00	618.016.370.938,53	572.493.569.765,63	113,82
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	14.427.521.237,00	25.000.000,00	-
	Jumlah	694.720.461.194,00	902.924.041.267,50	1.090.187.312.826,35	129,97

Selain itu terdapat Pendapatan BLUD pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman berupa Kas Tunai dalam bentuk Mata Uang Asing setara dengan Rp683.752,14 terdiri dari:

Tabel 5.6. Daftar Rincian Uang Kas dalam Mata Uang Asing pada BLUD UPTD PMRB

No	Jenis Mata Uang	Hasil Pemeriksaan Kas	Jumlah	Kurs Tengah BI per 31 Desember 2020 (Rp)	Nilai (Rp)
1	Uang Logam Malaysia	6 keping @ 50 sen	3 RM	3.491,78	10.475,34
		13 keping @ 20 sen	2 RM 60 sen		9.078,63
		26 keping @ 10 sen	2 RM 60 sen		9.078,63
		6 keping @ 5 sen	30 sen		1.047,53
2	Uang Logam Arab	1 keping @ 50 sen	50 sen riyal	3.758,63	1.879,32
3	Uang Kertas Malaysia	1 lbr @ 5 RM	5 RM	3.491,78	17.458,90
		22 lbr @ 1 RM	22 RM		76.819,16
4	Uang Kertas Srilanka	5 lbr @ 1000 rupee	5000 rupee	75,36	376.800,00
5	Uang Kertas Mesir	1 lbr @ 200 pound	200 pound	886,78	177.356,00
6	Uang Kertas Arab	1 lbr @ 1 Riyal	1 riyal	3.758,63	3.758,63
TOTAL					683.752,14

Perhitungan konversi Mata Uang Asing tersebut menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2020 kecuali untuk mata uang Srilanka dan Mesir yang tidak terdapat kurs tengah Bank Indonesia. Atas pendapatan tersebut belum dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer TA 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp11.826.017.687.067,00 atau 100,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.818.700.337.176,00 dan TA 2019 sebesar Rp13.049.675.124.487,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan					
1	Bagi Hasil Pajak	182.205.538.407,00	127.272.935.167,00	113.615.982.457,00	69,85
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	24.006.084.462,00	39.867.057.258,00	98.332.701.261,00	166,07
3	Dana Alokasi Umum	1.961.334.010.000,00	1.956.492.796.000,00	2.322.266.506.000,00	99,75
4	Dana Alokasi Khusus	1.843.864.272.000,00	1.762.270.401.566,00	1.744.873.155.047,00	95,57
Jumlah		4.011.409.904.869,00	3.885.903.189.991,00	4.279.088.344.765,00	96,87
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
1	Dana Otonomi Khusus	7.555.278.348.000,00	7.555.278.348.000,00	8.357.471.654.000,00	100,00
2	Dana Penyesuaian	252.012.084.307,00	384.836.149.076,00	413.115.125.722,00	152,71
Jumlah		7.807.290.432.307,00	7.940.114.497.076,00	8.770.586.779.722,00	101,70
Jumlah Pendapatan Transfer		11.818.700.337.176,00	11.826.017.687.067,00	13.049.675.124.487,00	100,06

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar Rp3.885.903.189.991,00 atau

sebesar 96,87% dari target yang direncanakan sebesar Rp4.011.409.904.869,00 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Realisasi penerimaan tersebut lebih kecil dari target disebabkan karena adanya kurang bayar transfer Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak Sumber Daya Alam sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

No	Rincian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	49.587.447.759,00	42.169.041.997,00	46.382.537.965,00	85,04
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA	6.536.598.134,00	2.111.495.600,00	4.026.237.346,00	-
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA	147.123.810,00	236.774.264,00	178.630.606,00	-
4	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	117.909.764.247,00	75.568.737.953,00	55.145.292.593,00	64,09
5	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	5.583.731.000,00	5.299.261.920,00	7.883.283.947,00	94,91
6	Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LRA	2.440.873.457,00	1.887.623.433	-	77,33
Jumlah		182.205.538.407,00	127.272.935.167,00	113.615.982.457,00	69,85

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

No	Rincian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	119.256.039,00	63.472.400,00	6.939.973.700,00	53,22
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (<i>Land-Rent</i>)	915.528.477,00	574.359.133,00	-	62,74
3	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (<i>Royalty</i>)	6.119.064.234,00	7.322.401.024,00	-	119,67
4	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	8.993.000.698,00	12.854.831.090,00	68.915.267.114,00	142,94
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	7.628.647.014,00	18.752.796.558,00	22.454.111.947,00	245,82
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	230.588.000,00	299.197.053,00	23.348.500,00	129,75
Jumlah		24.006.084.462,00	39.867.057.258,00	98.332.701.261,00	166,07

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2020 sebesar Rp1.956.492.796.000,00 atau 99,75% dari target yang direncanakan sebesar Rp1.961.334.010.000,00 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2020 sebesar Rp1.762.270.401.566,00 atau 95,57% dari target yang direncanakan sebesar Rp1.843.864.272.000,00 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus

No	Rincian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
Dana Alokasi Khusus Fisik					
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	27.951.000.000,00	-	60.468.173.300,00	-
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA	-	-	4.952.506.000,00	-
3	DAK Bidang Kehutanan - LRA	-	-	6.100.076.247,00	-
4	DAK Bidang Kesehatan - LRA	20.098.584.000,00	17.474.306.088,00	34.859.427.118,00	86,94
5	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	-	-	6.186.150.000,00	-
6	DAK Bidang Pertanian - LRA	3.619.392.000,00	1.019.669.000,00	11.722.856.722,00	28,17
7	DAK Bidang Pendidikan -LRA	266.536.911.000,00	234.437.871.694,00	190.677.591.940,00	87,96
Jumlah		318.205.887.000,00	252.931.846.782,00	314.966.781.327,00	79,49
Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	BOS Satuan Pendidikan Provinsi	1.122.566.470.000,00	1.101.261.800.000,00	1.053.451.330.000,00	98,10
2	Tunjangan Profesi Guru PNSD	370.669.169.000,00	370.669.169.000,00	352.458.253.301,00	100,00
3	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.806.407.000,00	2.806.407.000,00	2.991.600.000,00	100,00
4	Tunjangan Khusus Guru	10.967.941.000,00	10.967.941.000,00	6.106.819.000,00	100,00
5	Bantuan Operasional Kesehatan	10.748.157.000,00	16.902.983.545,00	3.583.745.545,00	157,26
6	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.300.000.000,00	2.109.572.116,00	4.511.063.600,00	91,72
7	Pelayanan Administrasi Kependudukan	503.841.000,00	214.647.894,00	1.876.562.274,00	42,60
8	DAK Non Fisik Bidang Pariwisata	5.096.400.000,00	4.406.034.229,00	4.927.000.000,00	86,45
Jumlah		1.525.658.385.000,00	1.509.338.554.784,00	1.429.906.373.720,00	98,93
Total		1.843.864.272.000,00	1.762.270.401.566,00	1.744.873.155.047,00	95,57

Begitu juga dengan realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2020 sebesar Rp7.555.278.348.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp802.193.306.000,00 atau 9,60% dari TA 2019 sebesar Rp8.357.471.654.000,00. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2020 sebesar Rp384.836.149.076,00 atau 152,71% dari penerimaan yang ditargetkan sebesar Rp252.012.084.307,00.

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp43.126.992.771,00 atau 2.059,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.093.980.000,00 dan TA 2019 sebesar Rp4.213.306.021,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	125.980.000,00	41.322.992.771,00	2.603.306.021,00	32.801,23
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	1.968.000.000,00	1.804.000.000,00	1.610.000.000,00	91,67
Jumlah Pendapatan Transfer		2.093.980.000,00	43.126.992.771,00	4.213.306.021,00	2.059,57

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12. Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri

No	Uraian	Tahun 2020
Pendapatan Hibah dari Pemerintah		
1	Belanja Hibah IPDMIP-ADB	7.380.900.139,00
2	Belanja Hibah IPDMIP-AIF	1.476.534.326,00
3	Belanja Hibah IPDMIP-IFAD	321.555.000,00
4	Belanja Hibah Rehab Rekon Pasca Bencana	125.980.000,00
5	Hibah KFW (DLHK)	31.494.249.058,00
6	Hibah IPDMIP	523.774.248,00
Jumlah I		41.322.992.771,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri		
1	Asuransi Jasa Raharja	1.804.000.000,00
Jumlah II		1.804.000.000,00
Jumlah I + II		43.126.992.771,00

5.1.2. Belanja dan Transfer

Realisasi belanja TA 2020 mencapai Rp13.242.212.801.894,57 atau 83,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.827.709.393.003,00 dan TA 2019 sebesar Rp15.787.883.385.490,16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Belanja Operasi	9.665.729.666.500,00	7.985.982.044.904,10	9.282.694.398.476,55	82,62
2	Belanja Modal	2.094.518.027.289,00	1.755.472.079.286,47	3.162.088.165.983,04	83,81
3	Belanja Tidak Terduga	439.760.468.964,00	158.460.075.459,00	4.838.896.610,92	36,03
4	Belanja Transfer	3.627.701.230.250,00	3.342.298.602.245,00	3.338.261.924.419,65	92,13
Jumlah Belanja		15.827.709.393.003,00	13.242.212.801.894,57	15.787.883.385.490,16	83,66

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar Pemerintah Aceh yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan. Belanja Operasi TA 2020 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang direalisasikan sebesar Rp7.985.982.044.904,10 atau 82,62% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.665.729.666.500,00 dan TA 2019 sebesar Rp9.282.694.398.476,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Belanja Pegawai	2.886.272.033.465,00	2.483.284.443.746,00	2.461.315.744.896,00	86,04
2	Belanja Barang dan Jasa	3.907.674.602.124,00	3.702.404.761.736,99	4.514.524.421.391,64	94,75
3	Belanja Hibah	1.376.016.275.582,00	1.422.789.246.408,91	1.946.365.153.669,91	103,40
4	Belanja Bantuan Sosial	1.495.766.755.329,00	377.503.593.012,20	360.489.078.519,00	25,24
Jumlah Belanja Operasi		9.665.729.666.500,00	7.985.982.044.904,10	9.282.694.398.476,55	82,62

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRA serta gaji tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mencapai Rp2.483.284.443.746,00 atau 86,04% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.886.272.033.465,00 dan TA 2019 sebesar Rp2.461.315.744.896,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Rincian	Anggaran	Tahun 2020	Tahun 2019	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.126.453.884.282,12	1.849.689.045.177,00	1.854.943.788.946,00	86,98
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	640.777.076.560,88	509.636.409.221,00	506.768.565.987,00	79,53
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	22.157.306.484,00	20.571.952.638,00	18.423.972.000,00	92,85
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	37.724.550.000,00	29.934.335.769,00	32.598.546.596,00	79,35
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.908.563.405,00	38.030.000,00	388.540.000,00	1,99
6	Honorarium PNS, Non PNS dan Lembur	11.694.322.733,00	9.649.869.916,00	10.443.544.526,00	82,52
7	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	172.800.000,00	172.800.000,00	156.800.000,00	100,00
8	Belanja Pegawai BOS	-	20.985.402.625,00	-	-
9	Belanja Pegawai BLUD	45.383.530.000,00	42.606.598.400,00	37.591.986.841,00	93,88
Jumlah		2.886.272.033.465,00	2.483.284.443.746,00	2.461.315.744.896,00	86,04

Tambahan Penghasilan PNS TA 2020 direalisasikan sebesar Rp509.636.409.221,00 merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada setiap PNS berupa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, Pertimbangan Objektif Lainnya dan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) yang dinilai dengan tingkat eselonering, tingkat kedisiplinan dan kinerja sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 840/269/2008 tanggal 03 Juli 2008.

Belanja Pegawai terkait penanganan *Covid-19* pada Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, dan Bidang Ekonomi TA 2020 direalisasikan sebesar Rp782.004.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp889.410.000,00, dengan rincian berikut.

Tabel 5.16. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai untuk Penanganan Covid-19

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Penanganan Kesehatan			
1	Honorarium PNS	377.035.000,00	361.060.000,00	95,76
2	Honorarium Non PNS	242.750.000,00	205.800.000,00	84,78
3	Uang Lembur	14.775.000,00	14.504.000,00	98,17
	Jumlah	634.560.000,00	581.364.000,00	91,62
B	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial			
1	Honorarium PNS	10.350.000,00	10.350.000,00	100,00
2	Honorarium Non PNS	179.400.000,00	179.400.000,00	100,00
3	Uang Lembur	11.000.000,00	10.890.000,00	99,00
	Jumlah	200.750.000,00	200.640.000,00	99,95
C	Penanganan Dampak Ekonomi			
1	Honorarium PNS	24.100.000,00	-	-
2	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	-	-
	Jumlah	54.100.000,00	-	-
	Total	889.410.000,00	782.004.000,00	87,92

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu Tahun Anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 mencapai Rp3.702.404.761.736,99 atau 94,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.907.674.602.124,00, dan TA 2019 sebesar Rp4.514.524.421.391,64. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Rincian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Belanja Bahan Habis Pakai	48.424.296.021,00	41.323.098.256,40	57.232.593.940,00	85,34
2	Belanja Bahan/Material	331.635.943.338,00	284.834.941.131,00	488.065.031.200,45	85,89
3	Belanja Jasa Kantor	267.153.796.254,00	213.583.542.455,73	344.665.781.231,49	79,95
4	Belanja Premi Asuransi	920.067.747.578,00	879.272.835.091,00	808.697.145.265,00	95,57
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.244.747.043,00	42.995.411.685,00	40.144.526.930,00	73,82
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.376.201.532,00	22.964.845.890,00	47.452.712.228,00	73,19
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	61.799.497.817,00	35.535.416.506,00	136.424.187.449,00	57,50
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.420.442.643,00	10.844.938.677,00	19.781.408.288,00	70,33
9	Belanja Sewa Alat Berat	-	-	198.946.000,00	-
10	Belanja Sewa dan Perlengkapan Peralatan Kantor	2.146.520.000,00	1.496.736.000,00	11.233.392.400,00	69,73
11	Belanja Makan dan Minum	94.348.922.786,00	66.372.029.801,00	106.064.871.511,00	70,35
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.816.808.849,00	8.537.157.307,00	9.442.940.790,00	86,96

No	Rincian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
13	Belanja Pakaian Kerja	3.909.010.153,00	3.271.556.528,00	4.317.597.000,00	83,69
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.466.376.046,00	4.160.573.000,00	8.574.426.050,00	76,11
15	Belanja Perjalanan Dinas	221.968.364.384,00	159.262.589.187,00	341.265.601.043,00	71,75
16	Belanja Pemeliharaan	75.285.977.501,00	66.528.061.108,36	87.887.690.311,35	88,37
17	Belanja Jasa Konsultansi	94.213.695.374,00	79.774.801.949,00	78.673.893.643,00	84,67
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.013.350.000,00	3.442.097.464,00	3.513.890.039,00	85,77
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7.033.036.000,00	2.675.125.776,00	45.721.596.757,00	38,04
20	Belanja Beasiswa Anak Yatim Piatu (OTSUS)	221.294.400.000,00	215.488.800.000,00	218.434.200.000,00	97,38
21	Honorarium PNS	189.288.173.280,00	169.422.278.603,50	167.891.838.091,00	89,50
22	Honorarium Non PNS	558.833.318.599,00	507.679.635.944,00	488.431.224.724,87	90,85
23	Belanja Zakat yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq	70.250.190.000,00	62.792.935.769,00	47.252.969.560,34	89,38
24	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	70.600.654.539,00	61.737.064.342,00	104.368.412.102,00	87,45
25	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti	53.676.501.000,00	32.943.541.150,00	97.399.168.618,00	61,37
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	475.038.448.007,00	493.513.447.898,00	525.413.733.290,14	103,89
27	Jasa Pelayanan <i>Medical Check Up</i>	232.183.380,00	222.239.000,00	107.374.200,00	95,72
28	Belanja Barang Dana BOS	16.136.000.000,00	231.729.061.218,00	225.867.268.729,00	1436,10
Jumlah		3.907.674.602.124,00	3.702.404.761.736,99	4.514.524.421.391,64	94,75

Dari total Belanja Barang dan Jasa, terdapat Barang Jasa BLUD TA 2020 sebesar Rp493.576.661.398,00 atau 103,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp475.038.448.007,00 dan TA 2019 sebesar Rp525.413.733.290,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18. Realisasi Belanja BLUD

No	Rincian	Realisasi	
		Tahun 2020	Tahun 2019
1	Belanja Bahan Pakan Ayam Ras Petelur	2.157.557.800,00	-
2	Belanja Bahan Habis Pakai	142.746.038.367,00	148.364.994.240,00
3	Belanja Bahan/Material	121.599.576.898,00	97.698.156.914,00
4	Belanja Jasa Kantor	178.366.727.006,00	215.245.151.231,14
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	10.317.821.688,00	-
6	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	381.290.012,00	124.612.250,00
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.427.304.710,00	6.015.291.370,00
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.042.500,00	73.888.750,00
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.471.437.040,00	4.618.746.150,00
10	Belanja Sewa Alat Berat	-	7.000.000,00
11	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	163.020.000,00	91.450.000,00
12	Belanja Makanan dan Minuman	15.629.036.920,00	20.893.587.848,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	35.150.000,00
14	Belanja Pakaian Kerja	35.242.000,00	45.320.000,00
15	Belanja Pakaian Dinas	-	203.433.000,00
16	Belanja Perjalanan Dinas	2.807.528.101,00	5.389.261.666,00
17	Belanja Pemeliharaan	10.790.719.455,00	7.693.779.486,00

No	Rincian	Realisasi	Realisasi
		Tahun 2020	Tahun 2019
18	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	829.798.900,00	2.437.865.533,00
19	Belanja Jasa Konsultansi	-	298.337.600,00
20	Belanja Jasa Layanan BLUD	-	15.161.026.252,00
21	Belanja Pakaian Olah Raga	-	61.880.000,00
22	Belanja Bansos kepada organisasi masyarakat	20.000.000,00	-
23	Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Peneliti	742.506.501,00	954.801.000,00
24	Honorarium PNS	16.800.000,00	-
25	Honorarium Non PNS	7.000.000,00	-
Jumlah		493.513.447.898,00	525.413.733.290,14

Belanja Barang dan Jasa untuk penanganan *Covid-19* TA 2020 direalisasikan sebesar Rp82.430.078.732,00 atau 79,08% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp104.230.916.768,00, dengan rincian berikut:

Tabel 5.19. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk Penanganan *Covid-19*

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Penanganan Kesehatan			
1	Belanja Bahan Pakai Habis	3.008.202.768,00	2.120.396.580,00	70,49
2	Belanja Bahan/Material	16.511.759.953,00	10.351.299.590,00	62,69
3	Belanja Jasa Kantor	3.416.234.050,00	3.166.566.233,00	92,69
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	89.388.201,00	88.193.600,00	98,66
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	488.527.754,00	429.178.600,00	87,85
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.860.000,00	-	-
7	Belanja Makanan dan Minuman	1.626.150.000,00	1.047.563.000,00	64,42
8	Belanja Pakaian Kerja	811.112.390,00	735.382.500,00	90,66
9	Belanja Perjalanan Dinas	1.817.916.500,00	1.465.750.853,00	80,63
10	Belanja Pemeliharaan	2.025.062.542,00	1.037.878.989,00	51,25
	Jumlah	29.796.214.158,00	20.442.209.945,00	68,61
B	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial			
1	Belanja Bahan Pakai Habis	23.853.845,00	22.352.622,00	93,71
2	Belanja Bahan/Material	414.576.407,00	402.175.255,00	97,01
3	Belanja Jasa Kantor	2.450.993.224,00	1.050.190.959,00	42,85
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.046.273,00	857.500,00	41,91
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.700.000,00	51.700.000,00	100,00
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	63.557.000,00	54.482.000,00	85,72
7	Belanja Makanan dan Minuman	712.778.988,00	226.225.000,00	31,74
8	Belanja Perjalanan Dinas	195.086.000,00	181.904.930,00	93,24
9	Belanja Pemeliharaan	1.834.191.099,00	1.661.809.500,00	90,60
10	Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	597.600.000,00	595.312.000,00	99,62
11	Belanja Zakat yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq	3.542.000.000,00	3.508.145.000,00	99,04
12	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara	700.200.000,00	641.700.000,00	91,65
	Jumlah	10.588.582.836,00	8.396.854.766,00	79,30
C	Penanganan Dampak Ekonomi			
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5.123.932,00	5.119.100,00	99,91
2	Belanja Bahan/Material	49.927.826.932,00	42.266.612.000,00	84,66

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3	Belanja Jasa Kantor	12.820.523.610,00	11.223.138.921,00	87,54
4	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.564.000,00	4.600.000,00	70,08
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	-	-
6	Belanja Makanan dan Minuman	14.449.300,00	-	-
7	Belanja Perjalanan Dinas	615.812.000,00	81.544.000,00	13,24
8	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara	435.820.000,00	10.000.000,00	2,29
	Jumlah	63.846.119.774,00	53.591.014.021,00	83,94
	Total	104.230.916.768,00	82.430.078.732,00	79,08

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Aceh kepada Badan/Lembaga/Organisasi dan kelompok/anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan sifatnya tidak mengikat secara terus menerus. Realisasi Belanja Hibah TA 2020 mencapai Rp1.422.789.246.408,91 atau 103,40% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.376.016.275.582,00 dan TA 2019 sebesar Rp1.946.365.153.669,91. Belanja Hibah dalam bentuk uang Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp856.293.338.368,00.

Adapun rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan hibah dalam bentuk uang yang dilaksanakan PPKA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20. Anggaran dan Realisasi Hibah Dalam Bentuk Uang

No	SKPA	Anggaran	Tahun 2020	Tahun 2019	%
1	Dinas Pendidikan	635.665.800.000,00	790.035.897.000,00	763.522.400.000,00	124,28
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	18.822.506.000,00	12.806.120.400,00	2.215.200.557,00	68,04
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	44.075.412.878,00	44.066.720.968,00	22.487.320.360,00	99,98
4	Dinas Sosial Aceh	8.619.750.000,00	8.364.600.000,00	8.414.300.000,00	97,04
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	1.386.035.474,00	100,00
6	Belanja Hibah Kepada Pemerintah	80.000.000.000,00	-	-	-
	Jumlah	788.203.468.878,00	856.293.338.368,00	798.025.256.391,00	108,64

Rincian dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.21. Belanja Hibah Keputusan Gubernur Aceh

No	SKPA	Uraian	Keputusan
1	Dinas Pendidikan Aceh	Belanja Hibah ke Satuan Pendidikan Dasar (SD/SDLB/SMP/SMPLB) dan Satuan Pendidikan menengah Swasta (SMA/ SMALB/SMK) Kab/Kota.	-
2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Hibah Kepada KIP Aceh	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 518/1142/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 518/967/2020 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang dari Pemerintah Aceh Kepada

No	SKPA	Uraian	Keputusan
			Komisi Independen Pemilihan Aceh TA 2020
		Hibah Kepada OKP dan Ormas, dan Hibah kepada Parpol	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 210/782/2020 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal Tingkat Provinsi Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2020
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	Hibah Kepada PMI Kota Banda Aceh	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1504/2020 tentang Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh Dalam Rangka Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019
		Hibah Kepada PRAMUKA	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/1023/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Bantuan Hibah Kegiatan Pembinaan Badan/Lembaga/Organisasi TA 2020
		Hibah Kepada KONI	
		Hibah Kepada KNPI	
4	Dinas Sosial Aceh	Hibah Permakanan Panti Lansia	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 460/833/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Permakanan Panti Anak dan Panti Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten/Kota Se-Aceh TA 2020.
		Hibah Permakanan Panti Asuhan	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 460/835/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Dalam Bentuk Bantuan Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar dan Bantuan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat di Kabupaten/Kota Se-Aceh TA 2020
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	Bantuan Hibah kepada Komisi Penyiaran dan Informasi Aceh (KPIA)	Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/1087/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/909/2020 tentang Penetapan Hibah Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh Tahun 2020.

Selain hibah dalam bentuk uang, Pemerintah Aceh melaksanakan hibah dalam bentuk barang yang dilaksanakan oleh SKPA dalam program kegiatan di rekening belanja barang dan jasa. Pelaksanaan hibah dalam bentuk barang yang dilaksanakan oleh SKPA terdiri dari Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp511.494.969.562,93 dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 1**, dan Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada Kabupaten/Kota (yang pendanaannya bersumber dari tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus) sebesar Rp55.000.938.477,98 dengan rincian sebagaimana terdapat pada **Lampiran 2**.

Belanja Hibah untuk penanganan *Covid-19* pada Penanganan Kesehatan TA 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp15.717.412.878,00 atau 15,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp101.575.412.878,00.

Tabel 5.22. Anggaran dan Realisasi Hibah untuk Penanganan Covid-19

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	80.000.000.000,00	-	-
2	Belanja Hibah kepada Organisasi Masyarakat	21.575.412.878,00	15.717.412.878,00	72,85
Jumlah		101.575.412.878,00	15.717.412.878,00	15,47

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 mencapai Rp377.503.593.012,20 atau 25,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.495.766.755.329,00 dan TA 2019 sebesar Rp360.489.078.519,00. Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada kelompok masyarakat dan anggota masyarakat antara lain anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak yatim korban kebakaran rumah. Pelaksanaan bantuan sosial dalam bentuk uang yang dilaksanakan SKPA teknis, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

No	SKPA	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	-	-	440.000.000,00	-
2	Dinas Sosial Aceh	-	-	2.098.800.000,00	-
3	Biro Umum	1.085.908.441.946,00	17.901.460.000,00	4.423.015.500,00	0,41
Jumlah		1.085.908.441.946,00	17.901.460.000,00	6.961.815.500,00	0,41

Selain itu, Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat Tahun 2020 sebesar Rp359.602.133.012,20 dan TA 2019 sebesar Rp353.527.263.019,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang

No	SKPA	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	409.123.168.383,00	358.884.133.012,20	349.480.993.329,00	87,72
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	705.145.000,00	688.202.000,00	525.000.000,00	97,60
3	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	-	-	2.473.224.690,00	-
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	-	-	1.048.045.000,00	-
5	Dinas Sosial Aceh	30.000.000,00	29.798.000,00	-	99,33
Jumlah		409.858.313.383,00	359.602.133.012,20	353.527.263.019,00	87,74

Belanja Bantuan Sosial untuk penanganan Covid-19 pada TA 2020 direalisasikan sebesar Rp5.138.000.000,00 atau 0,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.070.090.091.946,00, dengan rincian berikut:

Tabel 5.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial			
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	867.310.205.000,00	5.138.000.000,00	0,59
	Jumlah	867.310.205.000,00	5.138.000.000,00	0,59
B	Dampak Ekonomi			
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	202.779.886.946,00	-	-
	Jumlah	202.779.886.946,00	-	-
	Total	1.070.090.091.946,00	5.138.000.000,00	0,48

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran Pemerintah Aceh yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal TA 2020 terealisasi sebesar Rp1.755.472.079.286,47 atau 83,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.094.518.027.289,00 dan TA 2019 sebesar Rp3.162.088.165.983,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Belanja Tanah	80.964.879.363,00	71.123.465.326,00	86.773.892.473,00	87,84
2	Belanja Peralatan dan Mesin	522.067.347.051,00	421.332.296.912,80	841.812.882.309,00	80,70
3	Belanja Gedung dan Bangunan	622.066.974.213,00	567.190.383.202,63	820.034.893.478,62	91,18
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	847.341.768.197,00	572.579.779.264,78	1.320.184.310.775,42	67,57
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	22.077.058.465,00	123.246.154.580,26	93.282.186.947,00	558,25
	Jumlah Belanja Modal	2.094.518.027.289,00	1.755.472.079.286,47	3.162.088.165.983,04	83,81

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi Belanja Tanah TA 2020 sebesar Rp71.123.465.326,00 atau 87,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp80.964.879.363,00 dan TA 2019 sebesar Rp86.773.892.473,00. Belanja Tanah TA 2020 digunakan untuk pengadaan tanah kantor, sarana umum, pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku, dan sarana jalan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	80.251,00	-	599.542.371,00	-
2	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	80.825.799.112,00	70.984.637.566,00	86.174.350.102,00	87,82

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
3	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	139.000.000,00	138.827.760,00	-	99,88
	Jumlah	80.964.879.363,00	71.123.465.326,00	86.773.892.473,00	87,84

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2020 mencapai Rp421.332.296.912,80 atau mempunyai porsi sebesar 80,70% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp522.067.347.051,00 dan TA 2019 sebesar Rp841.812.882.309,00, dengan rincian sebagaimana terdapat pada *Lampiran 3*.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk penanganan *Covid-19* TA 2020 direalisasikan sebesar Rp21.372.685.943,00 atau 60,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.091.786.388,00, dengan rincian berikut:

Tabel 5.28. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Penanganan Covid-19

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Penanganan Kesehatan			
1	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	92.788.148,00	92.495.000,00	99,68
2	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.400.000.000,00	7.970.544.000,00	43,32
3	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	90.747.567,00	85.827.500,00	94,58
4	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	8.250.000,00	8.100.000,00	98,18
5	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	386.202.709,00	303.522.000,00	78,59
6	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	359.809.277,00	349.407.400,00	97,11
7	Belanja modal Pengadaan Komputer	592.253.750,00	587.928.000,00	99,27
8	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.290.000,00	31.290.000,00	100,00
9	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	402.216.029,00	398.645.240,00	99,11
10	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	69.416.975,00	65.215.700,00	93,95
11	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	10.596.986.066,00	10.129.170.977,00	95,59
12	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	2.387.688.316,00	295.040.816,00	12,36
13	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	508.120.413,00	195.776.850,00	38,53
14	Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	3.300.000,00	-	-
15	Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	249.912.300,00	248.779.300,00	99,55
	Jumlah	34.178.981.550,00	20.761.742.783,00	60,74
B	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial			
1	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	-	-
2	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	535.617.738,00	488.058.360,00	91,12

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	Penanganan Kesehatan			
3	Belanja modal Pengadaan Komputer	100.000.000,00	-	-
	Jumlah	650.617.738,00	488.058.360,00	75,01
C	Penanganan Dampak Ekonomi			
1	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	24.037.000,00	24.037.000,00	100,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	18.399.800,00	18.399.800,00	100,00
3	Belanja modal Pengadaan Komputer	137.940.000,00	-	-
4	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	81.810.300,00	80.448.000,00	98,33
	Jumlah	262.187.100,00	122.884.800,00	46,87
	Total	35.091.786.388,00	21.372.685.943,00	60,91

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2020 mencapai Rp567.190.383.202,63 atau 91,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp622.066.974.213,00 dan TA 2019 sebesar Rp820.034.893.478,62, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	588.875.711.290,00	535.543.635.473,55	765.319.718.951,60	90,94
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23.022.340.430,00	21.846.317.538,56	14.227.162.098,52	94,89
3	Belanja modal Pengadaan Monumen Bangunan Bersejarah	-	-	3.889.862.583,50	-
4	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	10.168.922.493,00	9.800.430.190,52	36.598.149.845,00	96,38
	Jumlah	622.066.974.213,00	567.190.383.202,63	820.034.893.478,62	91,18

Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk penanganan *Covid-19* pada Penanganan Kesehatan TA 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp47.324.674.740,00 atau 91,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp51.904.269.134,00, dengan rincian berikut:

Tabel 5.30. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Penanganan *Covid-19*

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.814.269.134,00	47.235.354.740,00	91,16
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	90.000.000,00	89.320.000,00	99,24
	Jumlah	51.904.269.134,00	47.324.674.740,00	91,18

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 mencapai Rp572.579.779.264,78 atau 67,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp847.341.768.197,00 dan TA 2019 sebesar Rp1.320.184.310.775,42, yang digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan, konstruksi jaringan air, dan jaringan instalasi listrik, dan jaringan instalasi telepon, dengan rincian sebagaimana terdapat pada *Lampiran 4*.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2020 mencapai Rp123.246.154.580,26 atau 558,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.077.058.465,00 dan TA 2019 sebesar Rp93.282.186.947,00, yang meliputi barang seni dan budaya, buku perpustakaan, dan tanaman, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Belanja modal Pengadaan Buku	1.835.613.220,00	1.771.748.065,00	10.636.543.841,00	96,52
2	Belanja modal Pengadaan Terbitan	-	-	19.138.000,00	-
3	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	891.435.000,00	802.036.082,36	933.667.500,00	89,97
4	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	1.886.225.984,00	1.574.871.000,00	5.082.697.880,00	83,49
5	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	438.877.358,00	184.200.000,00	12.000.000,00	41,97
6	Belanja modal Pengadaan Hewan	117.244.660,00	117.210.000,00	-	99,97
7	Belanja modal Pengadaan Tanaman	-	-	284.320.686,00	-
8	Belanja Modal Dana BOS	-	99.247.288.170,00	47.813.545.613,00	-
9	Belanja Modal BLUD	16.907.662.243,00	19.548.801.262,90	28.500.273.427,00	116,58
	Jumlah	22.077.058.465,00	123.246.154.580,26	93.282.186.947,00	558,99

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk penanganan *Covid-19* pada Bidang Kesehatan TA 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp15.500.000,00 atau 98,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.700.000,00 untuk Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan.

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja penanganan *Covid-19* dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga dan Program Kegiatan pada masing-masing SKPA. Anggaran Belanja *Covid-19* pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp187.065.511.000,00 dengan realisasi sebesar Rp158.460.075.459,00 yang dilaksanakan pada PPKA dan 8 (delapan) SKPA terdiri dari:

Tabel 5.32. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Covid-19

No	SKPA	Anggaran	Realisasi	%
1	PPKA	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00	100,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	56.702.742.600,00	45.340.719.798,00	79,96
3	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	62.061.242.400,00	51.367.478.206,00	82,77
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	7.207.340.000,00	5.469.542.731,00	75,89
5	Dinas Sosial Aceh	21.893.700.000,00	20.091.860.724,00	91,77
6	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	2.041.280.000,00	1.339.895.000,00	65,64
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.655.000.000,00	2.149.000.000,00	80,94
8	Dinas Koperasi dan UKM Aceh	1.505.000.000,00	1.505.000.000,00	100,00
9	Dinas Perhubungan Aceh	2.499.206.000,00	696.579.000,00	27,87
Jumlah		187.065.511.000,00	158.460.075.459,00	81,73

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada PPKA merupakan Belanja Penanganan *Covid 19* yang dilaksanakan oleh 4 (empat) instansi vertikal dengan anggaran sebesar Rp30.500.000.000,00 dan terealisasi 100% yaitu oleh LANUD Sultan Iskandar Muda sebesar Rp500.000.000,00, Polda Aceh sebesar Rp10.000.000.000,00, Kodam Iskandar Muda sebesar Rp10.000.000.000,00 serta Kejaksaan Tinggi Aceh sebesar Rp10.000.000.000,00.

Pembayaran Bantuan Hibah kepada Kepolisian Daerah Aceh, Kodam Iskandar Muda, Komando Pangkalan Udara Iskandar Muda dan Kejaksaan Tinggi Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1134/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang dibebankan pada Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) DPA-PPKA TA 2020.

Berdasarkan bidangnya, Belanja Tidak Terduga untuk penanganan *Covid 19* sebagai berikut:

Tabel 5.33. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Covid 19

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Penanganan Kesehatan	118.763.985.000,00	96.708.198.004,00	81,43
2	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial	66.796.526.000,00	60.246.877.455,00	90,19
3	Penanganan Dampak Ekonomi	1.505.000.000,00	1.505.000.000,00	100,00
Jumlah		187.065.511.000,00	158.460.075.459,00	84,71

5.1.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Belanja Transfer TA 2020 sebesar Rp3.342.298.602.245,00 atau 92,13% dari anggaran sebesar Rp3.627.701.230.250,00 dan TA 2019 sebesar Rp3.338.261.924.419,65, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	883.489.947.529,00	802.937.015.414,00	691.068.684.915,65	90,88
2	Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	2.744.211.282.721,00	2.539.361.586.831,00	2.644.482.604.204,00	92,54
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	2.710.635.300,00	-
Jumlah		3.627.701.230.250,00	3.342.298.602.245,00	3.338.261.924.419,65	92,13

5.1.2.4.1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp802.937.015.414,00 atau 90,88% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp883.489.947.529,00 dan TA 2019 sebesar Rp691.068.684.915,65 merupakan transfer Pemerintah Aceh kepada Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35. Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi		%
			Tahun 2020	Tahun 2019	
1	Kabupaten Aceh Selatan	40.040.540.974,00	36.339.198.618,00	32.083.915.290,99	90,76
2	Kabupaten Aceh Tenggara	38.203.805.973,00	34.624.379.245,00	29.891.490.093,06	90,63
3	Kabupaten Aceh Timur	55.525.887.613,00	50.958.851.523,00	47.756.935.018,97	91,77
4	Kabupaten Tengah	39.554.030.148,00	35.802.166.982,00	30.279.272.492,54	90,51
5	Kabupaten Aceh Barat	41.027.462.123,00	37.337.990.754,00	31.370.849.769,05	91,01
6	Kabupaten Aceh Besar	52.685.268.043,00	47.994.421.047,00	43.824.753.466,16	91,10
7	Kabupaten Pidie	51.016.766.235,00	46.932.133.521,00	43.099.652.386,87	91,99
8	Kabupaten Aceh Utara	60.278.070.650,00	55.720.833.568,00	53.540.408.747,09	92,44
9	Kabupaten Simeulue	28.052.462.266,00	25.233.078.092,00	19.789.533.592,52	89,95
10	Kabupaten Aceh Singkil	30.518.393.307,00	27.566.803.419,00	21.908.704.941,69	90,33
11	Kabupaten Bireuen	51.629.602.228,00	47.395.819.220,00	44.330.640.496,23	91,80
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	30.931.893.893,00	27.993.917.223,00	22.781.423.816,58	90,50
13	Kabupaten Gayo Lues	34.390.314.306,00	30.792.926.101,00	24.470.428.763,79	89,54
14	Kabupaten Aceh Jaya	31.817.609.934,00	28.599.318.691,00	22.534.556.110,02	89,89
15	Kabupaten Nagan Raya	35.827.255.103,00	32.432.076.903,00	26.285.544.950,68	90,52
16	Kabupaten Aceh Tamiang	40.999.485.973,00	37.565.670.620,00	33.912.563.175,28	91,62
17	Kabupaten Bener Meriah	30.923.903.514,00	28.027.625.854,00	22.501.394.524,08	90,63
18	Kabupaten Pidie Jaya	30.741.508.480,00	27.981.071.725,00	22.897.614.846,81	91,02
19	Kota Banda Aceh	43.686.836.280,00	39.183.527.017,00	33.697.507.240,58	89,69
20	Kota Sabang	22.290.273.575,00	19.952.260.407,00	14.164.979.168,15	89,51
21	Kota Lhokseumawe	34.307.851.092,00	31.220.106.455,00	26.716.783.647,69	91,00
22	Kota Langsa	31.996.178.112,00	28.991.428.763,00	24.343.520.889,45	90,61
23	Kota Subulussalam	27.044.547.707,00	24.291.409.666,00	18.886.211.487,37	89,82
Jumlah		883.489.947.529,00	802.937.015.414,00	691.068.684.915,65	90,88

5.1.2.4.2. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya TA 2020 sebesar Rp2.539.361.586.831,00 atau 92,54% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.744.211.282.721,00 dan TA 2019 sebesar Rp2.644.482.604.204,00. Penyaluran Bantuan Keuangan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36. Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2020	%
1	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh Untuk Antisipasi dan Pananganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 TA 2020	300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	100,00
2	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh TA 2020	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00
3	Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembagian dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Dana Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh TA 2020	2.244.211.282.721,00	2.039.361.586.831,00	90,87
Jumlah		2.744.211.282.721,00	2.539.361.586.831,00	92,54

Belanja Bantuan Keuangan untuk Penanganan Covid-19 direalisasikan pada 3 (tiga) bidang yaitu:

Tabel 5.37. Belanja Bantuan Keuangan untuk Penanganan Covid-19

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Penanganan Kesehatan	274.030.000.000,00	274.030.000.000,00	100,00
2	Penyediaan Jaring Pengaman Sosial	9.550.000.000,00	9.550.000.000,00	100,00
3	Penanganan Dampak Ekonomi	16.420.000.000,00	16.420.000.000,00	100,00
Jumlah		300.000.000.000,00	300.000.000.000,00	100,00

Rincian Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Dana Otonomi Khusus Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh TA 2020 dapat dilihat pada *Lampiran 5*.

5.1.2.4.3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2020 sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 dan TA 2019 sebesar Rp2.710.635.300,00 merupakan transfer Pemerintah Aceh kepada Partai Politik. Pada TA 2020, bantuan keuangan kepada partai politik telah dianggarkan pada Belanja Hibah.

5.1.3. Surplus/Defisit

Berdasarkan realisasi Pendapatan TA 2020 sebesar Rp14.439.920.557.021,15 dan realisasi Belanja dan Transfer TA 2020 sebesar Rp13.242.212.801.894,57, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh mengalami Surplus sebesar Rp1.197.707.755.126,58 dan TA 2019 mengalami Defisit sebesar Rp35.082.483.838,01.

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Realisasi Pembiayaan Netto per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.771.909.599.655,71 atau 152,11% dari anggaran sebesar Rp1.822.307.878.779,00 berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp2.846.141.906.063,38, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp1.955.114.950,15 dan Pengeluaran Pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp76.187.421.357,82. Realisasi Pembiayaan Netto per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.881.224.389.901,39.

5.1.5. Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih antara Surplus/Defisit dibandingkan dengan Pembiayaan Netto. SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp3.969.617.354.782,29 merupakan Kas di Kas Daerah sebesar Rp3.890.482.972.914,89, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp423.207.633,00, Kas di BOS sebesar Rp494.419.799,00, Kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp258.029.046,35, dan Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp77.958.725.389,05 dan SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp2.846.141.906.063,38.

Rincian SiLPA sebesar Rp3.969.617.354.782,29 berdasarkan sumber dana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.38. SiLPA Berdasarkan Sumber Dana

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dana Otonomi Khusus	2.561.628.971.555,23	2.234.873.962.535,89
2	Dana Alokasi Khusus	51.212.252.312,74	49.013.548.354,38
3	Dana Migas	309.234.087.709,91	84.971.052.800,37
4	Pendapatan Asli Aceh	712.525.417.115,99	205.183.409.354,03
5	Zakat dan Infak	257.057.900.699,37	256.488.731.007,29
6	Kas BLUD	77.958.725.389,05	15.611.202.011,42
Jumlah		3.969.617.354.782,29	2.846.141.906.063,38

5.2. Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, SiLPA/SiKPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain dan SAL Akhir.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal Pemerintah Aceh sebesar Rp2.846.141.906.063,38 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 yang terdiri dari:

Tabel 5.39. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Kas di Kas Daerah	2.804.283.964.778,60	2.918.262.403.033,57
2	Kas di Bendahara Penerimaan	346.880.461,36	1.060.870.940,25
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	25.899.858.812,00	511.065.164,96
4	Kas di Bendahara BLUD	15.611.202.011,42	34.623.625.803,93
Jumlah		2.846.141.906.063,38	2.954.457.964.942,71

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp2.846.141.906.063,38 merupakan penggunaan SiLPA Tahun 2020. Nilai SiLPA Tahun 2020 tidak seluruhnya digunakan sebagai pembiayaan tahun berjalan dikarenakan terdapat penyesuaian saldo awal Nihil.

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.969.964.391.032,29 didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.40. Perhitungan SiLPA

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Pendapatan	14.439.920.557.021,15	15.752.800.901.652,10
2	Belanja	(9.899.914.199.649,57)	(12.449.621.461.070,50)
3	Transfer	(3.342.298.602.245,00)	(3.338.261.924.419,65)
4	Penerimaan Pembiayaan	2.848.097.021.013,53	2.956.538.853.603,71
5	Pengeluaran Pembiayaan	(76.187.421.357,82)	(75.314.463.702,32)
Jumlah		3.969.617.354.782,29	2.846.141.906.063,38

5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.969.617.354.782,29.

5.3. Penjelasan atas Akun dalam Neraca

5.3.1. Aset Lancar

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu TA.

Aset Lancar Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 terdiri dari :

Tabel 5.41. Rincian Aset Lancar

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Kas di Kas Daerah	3.890.482.972.914,89	2.804.283.964.778,60
Kas di Bendahara Penerimaan	258.029.046,35	346.880.461,36
Kas di Bendahara Pengeluaran	423.207.633,00	25.899.858.812,00
Kas Lainnya di Bendaharan Pengeluaran	-	538.687.667,00
Kas di BOS	494.419.799,00	-
Kas di Bendahara BLUD	77.958.725.389,05	15.611.202.011,42
Kas Lainnya	3.507.442.717,00	-
Piutang Pajak	29.259.361.601,00	30.070.365.758,80
Penyisihan Piutang Pajak	(539.560.617,15)	(535.965.624,05)
Piutang Retribusi	453.327.000,00	-
Penyisihan Piutang Retribusi	(2.266.635,00)	-
Piutang Lain-lain PAA yang Sah	88.951.032.532,00	178.996.176.857,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah	(1.465.360.554,62)	(1.413.518.189,26)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	9.203.679.282,48	8.384.709.060,86
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(1.586.478.764,44)	(1.582.231.531,09)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	-	69.488.690.176,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	(347.443.450,88)
Belanja Dibayar Di Muka	3.440.814.702,92	7.202.705.487,92
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	83.165.150,58	13.833.004.205,83
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(29.339.528,79)	(49.931.474,31)
Persediaan	602.280.998.808,15	936.254.444.823,39
Total Aset Lancar	4.703.174.170.476,42	4.086.981.599.830,59

5.3.1.1. Kas di Kas Daerah

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019.	3.890.482.972.914,89	2.804.283.964.778,60

Kas Daerah merupakan saldo kas yang terdapat pada Bank Umum yang digunakan atas nama rekening Kas Umum Aceh. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/878/2020 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Aceh dan Rekening Giro Pemerintah Aceh yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Aceh;

sebagaimana telah diubah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/1293/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/878/2020 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Aceh dan Rekening Giro Pemerintah Aceh yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Aceh; sebagaimana telah diubah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/1475/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/878/2020 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Aceh dan Rekening Giro Pemerintah Aceh yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Aceh; sebagaimana telah diubah Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/1673/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/878/2020 tentang Penetapan Rekening Kas Umum Aceh dan Rekening Giro Pemerintah Aceh yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Aceh. Rekonsiliasi dilakukan dengan melakukan koreksi saldo Buku dan Saldo Bank dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi Saldo Bank
 - a. SP2D OC TA. 2020 sebesar Rp0,00.
 - b. Retur SP2D 2020 sebesar (Rp147.587.957,00).
 - c. Kurang Kredit Pengembalian retur 2019 sebesar Rp0,00

Sehingga diperoleh saldo Kas Daerah setelah rekonsiliasi sebesar Rp3.890.482.972.914,81 Rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum dengan saldo Kas dan Bank adalah sebagai berikut:

Tabel 5.42. Rekonsiliasi Bank

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian (Rp)	Total (Rp)
a. Saldo Buku Kas Umum per 31 Desember 2020			
1) Saldo Awal		2.804.283.964.778,60	
2) Penerimaan		12.699.250.146.244,10	
3) Pengeluaran		<u>(11.613.051.138.107,90)</u>	
Saldo Buku Kas Umum			<u>3.890.482.972.914,89</u>
b. Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2020			
Bank Aceh (Pemerintah Aceh)	01.02.610030.3	3.522.649.013.015,00	
Bank Aceh (PAD)	01.02.120003.4	2.538.229.757,58	
Bank Aceh (Zakat)	01.02.121285.2	62.571.295.532,51	
Bank Aceh (RKU)	01.02.121020.8	-	
Bank Aceh (INFAK)		214.402.885.899,24	
Rekening Retur		602.238.741,04	
Bank BNI	57141571	18.586.441,00	
Bank Syariah Mandiri	100104664	70.856.759.366,88	
Bank BRI	000015.30.9	53.322.308,93	
Bank Bukopin	1002211137	16.938.229.809,71	
Saldo Kas dan Bank			<u>3.890.630.560.871,89</u>
Koreksi Saldo BKU :			
Kurang Kredit Pengembalian retur 2019		-	
Jumlah koreksi BKU			<u>-</u>
Saldo BKU setelah koreksi			<u>3.890.482.972.914,89</u>
Koreksi Saldo Kas dan Bank :			
SP2D OC TA. 2020		-	
Retur SP2D 2020		(147.587.957,00)	
Kurang Kredit Pengembalian retur 2019		-	
Jumlah koreksi kas dan bank			<u>(147.587.957,00)</u>
Saldo Kas dan Bank Setelah Koreksi			<u>3.890.482.972.914,89</u>
			-

5.3.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo kas tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Pendapatan Yang Belum Disetor adalah kas di bendahara penerimaan baik berupa kas tunai maupun kas di bank yang merupakan pendapatan Pemerintah Aceh yang belum disetor ke Rekening Umum Kas Aceh.

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 2019.	258.029.046,35	346.880.461,36

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo Kas pada Bendahara Penerimaan TA 2020 sebesar Rp258.029.046,35, yang terdiri dari:

Tabel 5.43. Rincian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	10.679.501,08	-
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3.873.000,00	-
3	Dinas Pangan Aceh	-	19.545.454,00
4	Sekretariat Baitul Mal Aceh	238.136.545,27	183.838.755,61
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	5.340.000,00	21.925.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	-	44.569.550,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	1.701,75
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	-	77.000.000,00
Jumlah		258.029.046,35	346.880.461,36

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan telah disetor ke kasda sebesar Rp258.029.046,35 melalui rekening PAD (01.02.120003-4) pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.44. Kas Di Bendahara Penerimaan Yang Telah Disetor

Kas di Bendahara Penerimaan	Jumlah	Keterangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	3.873.000,00	Setoran Retribusi Tiket Museum Tsunami Tanggal 23 Februari 2021
Sekretariat Baitul Mal Aceh	2.107.883,85	Sisa Zakat di Rekening Bank Aceh
	132.822.630,00	Sisa Zakat di Rekening Bank BSM
	9.562.663,19	Sisa Zakat di Rekening Bank BRI Syariah
	2.161.100,00	Sisa Zakat di Rekening Bank Muamalat
	54.779.941,23	Sisa Zakat di Rekening Bank Aceh Syariah
	36.702.327,00	Sisa Zakat di Rekening BNI Syariah
Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	940.000,00	Setoran Retribusi Jasa Tanbat Labuh Bulan Desember 2021 UPTD PPS Kumaja Tanggal 8 Januari 2021
	4.400.000,00	Setoran Retribusi Jasa Kepelabuhanan dari Phas Masuk di UPTD Pelabuhan Perikanan di DKP Aceh Bulan Desember Tanggal 6 Januari 2021

Kas di Bendahara Penerimaan	Jumlah	Keterangan
	3.000.000,00	Setoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh dari Sewa Kuliner di UPTD Pelabuhan Perikanan Idi Aceh Timur Tanggal 6 Januari 2021
	2.100.000,00	Setoran Retribusi Pemakaian dari Sewa Kuliner di UPTD Pelabuhan Perikanan Idi- Aceh Timur 6 Januari 2021
	3.200.000,00	Setoran Retribusi Sewa Kios Nelayan an. Samsul Bahri terhitung 2 Jan-31 Des 2020 UPTD PPS Kutaraja DKP Aceh Tanggal 18 Februari 2021
	4.050.000,00	Setoran Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh dari Sewa Kuliner di UPTD Pelabuhan Perikanan Idi Aceh Timur Tanggal 16 Februari 2021
Dinas Pendidikan Aceh	10.679.501,08	Jasa Giro Rekening Bendahara BOS
Jumlah	258.029.046,35	

5.3.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran berupa kas tunai (*cash on hand*), kas di bank maupun uang panjar yang belum disetor ke Rekening Umum Kas Aceh, meliputi sisa uang dari pencairan UP/GU/TU dan LS. Potongan PFK di Bendahara Pengeluaran terdiri dari potongan Pajak dan Non Pajak yang masih tersimpan di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Negara/pihak ketiga. Jasa Giro di SKPA yang Belum Disetor adalah kas yang bersumber dari jasa giro atas penempatan uang persediaan di rekening bank bendahara pengeluaran. Uang Titipan di Bendahara Pengeluaran adalah uang titipan dari pihak ketiga, baik berupa uang tunai maupun uang di bank di bendahara pengeluaran.

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019.	423.207.633,00	25.899.858.812,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran TA 2020 sebesar Rp423.207.633,00, yang terdiri dari:

Tabel 5.45. Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	25.899.858.812,00
2	PPKA	105.735.382,00	-
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	317.472.251,00	-
Jumlah		423.207.633,00	25.899.858.812,00

Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari :

Tabel 5.46. Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	Jumlah	Keterangan
PPKA	105.735.382,00	Sisa BTT TU V Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin yang disetor tanggal 18 Januari 2021
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Aceh	317.472.251,00	Sisa UP yang disetor tanggal 5 Januari 2021
Jumlah	423.207.633,00	

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.899.858.812,00 merupakan Kas di Bendahara BOS yang telah direalisasikan pada Tahun 2020. Selain itu terdapat selisih lebih Kas sebesar Rp19.886.526,00 yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp16.555.429,00 yang telah disetor pada tanggal 3 Februari 2021 dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp3.331.097,00 yang telah disetor pada tanggal 8 Januari 2021.

5.3.1.4. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019.	-	538.687.667,00

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2019 sebesar Rp538.687.667,00 terdiri dari:

Tabel 5.47. Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	124.779.108,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	-	169.717.459,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	-	244.191.100,00
Jumlah		-	538.687.667,00

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Aceh Sebesar Rp169.717.459,00 telah direklasifikasikan ke akun Kas Lainnya. Sedangkan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp124.779.108,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin sebesar Rp244.191.100,00 telah disalurkan pada Tahun 2020.

5.3.1.5. Kas di BOS

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Kas di BOS per 31 Desember 2020 dan 2019.	494.419.799,00	-

Kas di BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp494.419.799,00 adalah sisa dana BOS Tahun 2020 merupakan kas pada Dinas Pendidikan Aceh yang terdiri dari:

Tabel 5.48. Rincian Sisa Dana BOS Tahun 2020

No	Nama Sekolah	Nilai	Keterangan
1	SMA 4 Wira Bangsa	90.000,00	Afirmasi
2	SDLB Negeri Meulaboh	84.000.000,00	Reguler
3	SMA Negeri 2 Kaway Xvi	100.000,00	Reguler
4	SMA Negeri Modal Bangsa	41.772.547,00	Reguler
5	SMAN 1 Labuhan Haji Barat	900.000,00	Reguler
6	SMAN 2 Bendahara	9.900.000,00	Reguler
7	SMAN 1 Bendahara	36.966.500,00	Reguler
8	SMAN 2 Kejuruan Muda	50.254.052,00	Reguler
9	SMKN 3 Karang Baru	400.000,00	Reguler
10	SMKN 3 Takengon	20.000.000,00	Reguler
11	SMKN 1 Takengon	223.900,00	Reguler
12	SMA Negeri 2 Kuta Makmur	2.250.000,00	Reguler
13	SMK Negeri 1 Nisam	1.620.000,00	Reguler
14	SMA Negeri 2 Peusangan	101.050.000,00	Reguler
15	SMAN 1 Simpang Tiga	22.400.000,00	Reguler
16	SMA Negeri 2 Bandar Dua	10.000.000,00	Reguler
17	SMAN 1 Trienggadeng	51.959.900,00	Reguler
18	SMAN 2 Simeulue Tengah	26.250.000,00	Reguler
19	SMKN 1 Teupah Tengah	2.346.900,00	Reguler
20	SMA N 3 Langsa	31.906.000,00	Reguler
21	SMKN 3 Lhokseumawe	30.000,00	Reguler
Total		494.419.799,00	

5.3.1.6. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019.	77.958.725.389,05	15.611.202.011,42

Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp77.958.725.389,05 merupakan kas pada Bendahara BLUD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49. Rincian Kas di BLUD

No	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
1	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	64.100.607.662,95	7.315.539.149,71
2	Rumah Sakit Jiwa	4.056.106.982,08	777.848.826,84
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak	497.339.869,89	1.236.560.534,87
4	Dinas Syariat Islam	412.938.278,72	-
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	7.611.392.685,41	6.281.253.500
6	Dinas Peternakan Aceh	1.280.339.910,00	-
Jumlah		77.958.725.389,05	15.611.202.011,42

Rekonsiliasi Saldo Buku Kas BLUD dengan Saldo Kas dan Bank pada masing-masing BLUD adalah sebagai berikut:

5.3.1.6.1. BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin

Tabel 5.50. Rekonsiliasi Bank Pada BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian	Total
a. Saldo Buku Per 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020			
1) Saldo Awal		7.315.539.149,71	
2) Penerimaan		557.540.343.266,24	
3) Pengeluaran		(500.755.274.753,00)	
Saldo Buku			64.100.607.662,95
Koreksi Saldo Buku			
Jumlah Koreksi Saldo Buku			-
Saldo Buku setelah koreksi			64.100.607.662,95
b. Saldo Bank Per 31 Desember 2020			
Bank BRI (RSUD dr. Zainoel Abidin)	1055001959	13.810.494.375,50	
Bank BSM (RSUD dr. Zainoel Abidin)	7070557074	3.196.179.319,86	
Bank Aceh (RSUD dr. Zainoel Abidin)	010.01.02.630044-4	10.050.609.227,59	
BNI Syariah (RSUD dr. Zainoel Abidin)	0991961997	32.771.270.719,00	
BNI Syariah (RSUD dr. Zainoel Abidin Eksekutif)	2810196837	4.186.543.329,00	
Bank BTN Syariah (BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin)	7521001043	76.548.255,00	
Saldo Kas dan Bank sebelum koreksi			64.091.645.225,95
Koreksi saldo kas dan bank :			
Tambah			
Kas dan Bank di Bendahara Pengeluaran (BNI Syariah)	0991961205	8.962.437,00	
Jumlah koreksi kas dan bank			8.962.437,00
Saldo Kas dan Bank setelah koreksi			64.100.607.662,95
Selisih antara Saldo buku dengan saldo kas dan bank			-

5.3.1.6.2. BLUD Rumah Sakit Jiwa

Tabel 5.51. Rekonsiliasi Bank Pada Rumah Sakit Jiwa

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian	Total
a. Saldo Buku Per 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020			
1) Saldo Awal		777.848.826,84	
2) Penerimaan		29.303.169.132,14	
3) Pengeluaran		(26.024.910.976,90)	
Surplus/Defisit BLUD			3.278.258.155,24
Saldo Buku			4.056.106.982,08
Koreksi Saldo Buku			
Saldo Koreksi			-
Saldo Setelah Koreksi			4.056.106.982,08
Rekening Kas Per 31 Desember 2020			
Bank Mandiri Syariah	7140008243 (Rek. BLUD)	4.056.051.594,91	
Bank Mandiri Syariah	158.000164349.3 (Rek. IPWL)	-	
Tunai (Pengeluaran BLUD)		55.387,17	
Saldo Rekening Kas			4.056.106.982,08
Selisih Saldo Kas			-

5.3.1.6.3. BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak

Tabel 5.52. Rekonsiliasi Bank Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian	Total
a. Saldo Buku Per 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020			
1) Saldo Awal		1.236.560.534,87	
2) Penerimaan		23.695.265.826,02	
3) Pengeluaran		(24.434.486.491,00)	
Surplus/Defisit BLUD			(739.220.664,98)
Saldo Buku			497.339.869,89
b. Saldo Bank Per 01 Januari 2020 - 31 Desember 2020			
Bank Aceh Syariah	013-01.88.000123-6	494.701.081,89	
Bank Aceh Syariah Pengeluaran	013-01.02.000003-3	-	
Kas Bendahara Penerimaan		2.638.788,00	
Total Saldo			497.339.869,89
Selisih Saldo			-

5.3.1.6.4. BLUD UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturahman (Dinas Syariat Islam)

Tabel 5.53. Rekonsiliasi Bank Pada BLUD Dinas Syariat Islam

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian	Total
a. Saldo menurut Buku Kas Umum (BKU) per 31Des 2020			
Saldo Awal			
1) Penerimaan		1.912.860.818,72	
2) Pengeluaran		(1.499.922.540,00)	
Saldo Buku Kas Umum			412.938.278,72
b. Saldo Bank per 31 Des 2020			
Bank Syariah Mandiri	7921221279	387.554.407,86	
Kas Tunai Di Bendahara Pengeluaran		1.532.960,00	
Kas Tunai Di Bendahara Penerimaan		22.963.100,00	
Saldo Kas dan Bank sebelum koreksi			412.050.467,86
Koreksi saldo kas dan bank :			
Biaya Adm Jan s. d Des		400.000,00	
Biaya Materai Jan s. d Des		72.000,00	
Pajak Jan s. d Des		415.810,86	
Jumlah koreksi kas dan bank			887.810,86
Saldo Kas dan Bank setelah koreksi			412.938.278,72
Selisih antara Saldo buku dengan saldo kas dan bank			-

5.3.1.6.5. BLUD UPTD Mekanisasi Alat Pertanian (Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh)

Tabel 5.54. Rekonsiliasi Bank pada BLUD Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian	Total
a. Saldo Buku Per 31 Desember 2020			
1) Saldo Awal		6.281.253.500,00	
2) Realisasi Pendapatan BLUD		1.330.139.185,41	
3) Realisasi Belanja BLUD		-	
Saldo Buku			7.611.392.685,41

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian	Total
b. Saldo Bank Per 31 Desember 2020			
Bank Aceh Syariah	514.01.88.000004-6	7.369.742.685,41	
Bank Aceh Syariah	514.01.02.000004-6	241.650.000,00	
Saldo Bank			7.611.392.685,41
Koreksi Saldo Kas dan Bank			
Jumlah Koreksi			-
Saldo Kas Bank setelah Koreksi			7.611.392.685,41
Selisih Saldo BKU dan Bank			-

5.3.1.6.6. BLUD Balai Ternak Non Ruminansia (Dinas Peternakan Aceh)

Tabel 5.55. Rekonsiliasi Bank Pada BLUD Dinas Peternakan Aceh

Nama Bank	Nomor Rekening	Jumlah Rincian (Rp)	Total (Rp)
a. Saldo Buku Per 31 Desember 2020			
1) Saldo Awal		-	
2) Penerimaan		4.234.592.710,00	
3) Pengeluaran		(2.954.252.800,00)	
Saldo Buku			1.280.339.910,00
b. Saldo Bank Per 31 Desember 2020			
Bank Aceh (BLUD UPTD BTNR)	010.01.02.000029-3	1.280.339.910,00	
Saldo Bank			1.280.339.910,00
Koreksi Saldo Kas dan Bank			
Jumlah Koreksi			-
Saldo Kas Bank setelah Koreksi			1.280.339.910,00
Selisih Saldo BKU dan Bank			-

5.3.1.7. Kas Lainnya

Kas Lainnya adalah kas yang bukan termasuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka tiga bulan, potongan pajak dan potongan PFK lainnya serta kas transitoris.

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019.	3.507.442.717,00	-

Kas Lainnya sebesar Rp3.507.442.717,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56. Kas Lainnya

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	310.839.653,00	-
2	Dinas Kesehatan Aceh	169.717.459,00	-
3	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	3.000.000.000,00	-
4	Dinas Syariat Islam	26.885.605,00	-
Jumlah		3.507.442.717,00	-

Adapun rincian Kas Lainnya yang terdiri dari :

Tabel 5.57. Rincian Kas Lainnya

Kas Lainnya	Jumlah	Keterangan
Dinas Pendidikan Aceh	310.839.653,00	Potongan Pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran BOS yang belum disetor ke rekening kas negara
Dinas Kesehatan Aceh	169.717.459,00	Gaji Yg Tidak Dibayarkan Akibat Tindakan Tidak Disiplin PNS Mulai 2015 s.d 2018 telah disetor ke rekening Gubernur Provinsi NAD tanggal 20 April 2021
Badan Penanggulangan Bencana Aceh	3.000.000.000,00	Dana Siap pakai Penanggulangan Penanganan Covid-19 di Aceh dari BNPB telah disetor tanggal 9 Maret 2021 ke rekening Kas Negara
Dinas Syariat Islam	26.885.605,00	Pajak, infak dan zakat yang belum disetor ke rekening kasda namun telah disetorkan seluruhnya pada tahun 2021.
Jumlah	3.507.442.717,00	

5.3.1.8. Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran Pajak dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019.	29.259.361.601,00	30.070.365.758,80

Piutang Pajak sebesar Rp29.259.361.601,00 merupakan piutang pajak pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.8.1. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diakui pada saat telah diterbitkan surat pemberitahuan pajak daerah dan/atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar.

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2020 dan 2019.	27.981.873.463,00	28.814.225.139,80

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp27.981.873.463,00, terdiri dari:

Tabel 5.58. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

No	Wajib Pajak	Masa Pajak Terutang	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
			(Rp)	(Rp)
1	PT. Pertamina (Persero)	Desember-2020	25.999.572.109,00	27.320.093.789,00
2	PT. AKR. Corporindo Tbk	Desember-2020	3.053.600,00	2.078.572,80
3	PT. Pertamina Patra Niaga	Desember-2020	131.310.184,00	174.273.929,00
4	PT. Sumatera petro niaga	Desember-2020	852.078,00	1.991.410,00
5	PT. Elnusa Petrofin	Desember-2020	52.364.998,00	60.746.062,00
6	PT. Prima Wiraguna Parama	Desember-2020	1.789.912.184,00	1.255.041.377,00
7	PT. Petro Andalan Nusantara	Desember-2020	4.808.310,00	-
Jumlah			27.981.873.463,00	28.814.225.139,80

5.3.1.8.2. Piutang Pajak Air Permukaan

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2020 dan 2019.	1.277.488.138,00	1.256.140.619,00

Piutang Pajak Air Permukaan sebesar Rp1.277.488.138,00 terdiri dari: Pajak Air Permukaan Tahun 2012 sebesar Rp176.814.075,00, Tahun 2014 sebesar Rp557.715.625,00, Tahun 2017 sebesar Rp224.494.590,00, Tahun 2018 sebesar Rp67.775.752,00, Tahun 2019 sebesar Rp20.062.370,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp230.625.726,00. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 6*.

5.3.1.9. Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang Pajak tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019.	(539.560.617,15)	(535.965.624,05)

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2020 sebesar (Rp539.560.617,15) terdiri dari:

5.3.1.9.1. Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan Saldo Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2020 dan 2019.	(139.909.367,32)	(144.071.125,70)

Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar (Rp139.909.367,32), terdiri dari:

Tabel 5.59. Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Pajak	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang	%	Penyisihan
					Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	PT. Pertamina (Persero)	25.999.572.109,00	Lancar	0,5%	(129.997.860,55)
2	PT. AKR. Corporindo Tbk	3.053.600,00	Lancar	0,5%	(15.268,00)
3	PT. Pertamina Patra Niaga	131.310.184,00	Lancar	0,5%	(656.550,92)
4	PT. Sumatera petro niaga	852.078,00	Lancar	0,5%	(4.260,39)
5	PT. Elnusa Petrofin	52.364.998,00	Lancar	0,5%	(261.824,99)
6	PT. Prima Wiraguna Parama	1.789.912.184,00	Lancar	0,5%	(8.949.560,92)
7	PT. Petro Andalan Nusantara	4.808.310,00	Lancar	0,5%	(24.041,55)
	Jumlah I	27.981.873.463,00			(139.909.367,32)

5.3.1.9.2. Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan Saldo Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2020 dan 2019.	(399.651.249,83)	(391.894.498,36)

Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan sebesar (Rp399.651.249,83) terdiri dari:

Tabel 5.60. Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan

No.	Jenis Pajak	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang	%	Penyisihan
					Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	PT. Energi Alam Raya Semesta	2.646.000,00	Kurang Lancar	10%	(264.600,00)
2	Bahari Dwi Kencana Lestari	9.090.360,00	Kurang Lancar	10%	(909.036,00)
3	Lafarge Cement Indonesia	3.714.120,00	Lancar	0,5%	(18.570,60)
4	PDAM Tirta Montala	4.726.530,00	Lancar	0,5%	(23.632,65)
5	PDAM Tirta Mon Pasee	557.715.625,00	di ragukan	50%	(278.857.812,50)
6	PDAM Tirta Mon Pasee	3.003.830,00	Lancar	0,5%	(15.019,15)
7	PDAM Tirta Meulaboh	176.814.075,00	di ragukan	50%	(88.407.037,50)
8	PDAM Tirta Meulaboh	650.820,00	Lancar	0,5%	(3.254,10)
9	PDAM Tirta Peusada	93.563.030,00	Kurang Lancar	10%	(9.356.303,00)
10	PDAM Tirta Peusada	2.185.440,00	Lancar	0,5%	(10.927,20)
11	PDAM Tirta Keumuneung	121.841.200,00	Kurang Lancar	10%	(12.184.120,00)
12	PDAM Tirta Keumuneung	10.019.020,00	Kurang Lancar	10%	(1.001.902,00)
13	PDAM Tirta Keumuneung	2.593.050,00	Lancar	0,5%	(12.965,25)
14	PDAM Tirta Keumuneung	2.733.750,00	Lancar	0,5%	(13.668,75)
15	PT. PIM	32.511.060,00	Lancar	0,5%	(162.555,30)
16	PT. PIM	31.839.600,00	Lancar	0,5%	(159.198,00)
17	PT. Pertamina EP Field Rantau	13.182.000,00	Kurang Lancar	10%	(1.318.200,00)
18	PT. Pertamina EP Field Rantau	6.426.480,00	Lancar	0,5%	(32.132,40)

No.	Jenis Pajak	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang	%	Penyisihan
					Per 31 Desember 2020
					(Rp)
19	PT. Pertamina EP Field Rantau	2.178.480,00	Lancar	0,5%	(10.892,40)
20	PT. Perta Arun Gas	14.994.540,00	Kurang Lancar	10%	(1.499.454,00)
21	PT. Perta Arun Gas	18.100.020,00	Lancar	0,5%	(90.500,10)
22	PT. Perkebunan Lembah Bhakti I	3.358.452,00	Kurang Lancar	10%	(335.845,20)
23	PT. Perkebunan Lembah Bhakti I	481.920,00	Lancar	0,5%	(2.409,60)
24	PT. Perkebunan Lembah Bhakti II	2.878.620,00	Lancar	0,5%	(14.393,10)
25	PT. Nafasindo	162.060,00	Lancar	0,5%	(810,30)
26	PDAM Tirta Mon Mata Aceh Jaya	12.957.880,00	Kurang Lancar	10%	(1.295.788,00)
27	PDAM Tirta Mon Mata Aceh Jaya	10.329.130,00	Kurang Lancar	10%	(1.032.913,00)
28	PDAM Tirta Daroy	11.208.410,00	Lancar	0,5%	(56.042,05)
29	PT. Ika Bina Agro Wisesa	1.172.700,00	Lancar	0,5%	(5.863,50)
30	PT.Global Sawit Semesta	2.001.000,00	Lancar	0,5%	(10.005,00)
31	PT. Pertamina EP Hulu Migas	370.010,00	Kurang Lancar	10%	(37.001,00)
32	PDAM Tirta Krueng Meuredue	10.019.460,00	Kurang Lancar	10%	(1.001.946,00)
33	PDAM Tirta Krueng Meuredue	9.363.230,00	Kurang Lancar	10%	(936.323,00)
34	PDAM Tirta Krueng Meuredue	7.832.090,00	Lancar	0,5%	(39.160,45)
35	PDAM Tirta Mon Krueng Baro	1.076.850,00	Lancar	0,5%	(5.384,25)
36	PDAM Tirta Agara	12.728.500,00	Lancar	0,5%	(63.642,50)
37	PDAM Tirta Agara	393.750,00	Lancar	0,5%	(1.968,75)
38	PTPN-I Kb. Cot Girek	1.168.980,00	Lancar	0,5%	(5.844,90)
39	PDAM Tirta Peusangan	4.086.600,00	Lancar	0,5%	(20.433,00)
40	PT. PP Pati Sari	1.492.200,00	Lancar	0,5%	(7.461,00)
41	Socfin Sei Liput	347.820,00	Lancar	0,5%	(1.739,10)
42	PT. Sp. Kiri Plant Indonesia	319.410,00	Lancar	0,5%	(1.597,05)
43	PT. Parasawita	1.423.080,00	Lancar	0,5%	(7.115,40)
44	PT. Parasawita	360.300,00	Lancar	0,5%	(1.801,50)
45	PT. Tri Agro Palma Tamiang	283.800,00	Lancar	0,5%	(1.419,00)
46	PTPN- I Kb. Aceh Tamiang	1.709.100,00	Lancar	0,5%	(8.545,50)
47	PTPN- I Kb. Aceh Tamiang	1.936.800,00	Lancar	0,5%	(9.684,00)
48	PDAM Tirta Tamiang	14.335.920,00	Lancar	0,5%	(71.679,60)
49	Sisirau	374.760,00	Lancar	0,5%	(1.873,80)
50	PT. Bumi Sama Ganda	567.420,00	Lancar	0,5%	(2.837,10)
51	PLTA Peusangan I & II	115.560,00	Lancar	0,5%	(577,80)
52	PDAM Tirta Tawar	1.098.270,00	Lancar	0,5%	(5.491,35)
53	PT. Ensem Lestari Jaya	729.780,00	Lancar	0,5%	(3.648,90)
54	PT. Surya Panen Subur	1.019.820,00	Lancar	0,5%	(5.099,10)
55	PT. Kalista Alam	855.840,00	Lancar	0,5%	(4.279,20)
56	PT. Beurata Subur Persada	760.740,00	Lancar	0,5%	(3.803,70)
57	PT. Seunagan Energi	31.193.936,00	Lancar	0,5%	(155.969,68)
58	Socfin Seunagan	442.480,00	Lancar	0,5%	(2.212,40)
59	PT. Fajar Baizuri & Brothers	948.480,00	Lancar	0,5%	(4.742,40)
60	PT. Ujong Neubok Dalam	230.820,00	Lancar	0,5%	(1.154,10)
61	PT. Sawit Nagan Raya Makmur	877.980,00	Lancar	0,5%	(4.389,90)
62	PT. Raja Marga	649.860,00	Lancar	0,5%	(3.249,30)
63	PT. Kharisma Iskandar Muda	1.087.680,00	Lancar	0,5%	(5.438,40)
64	PDAM Tirta Naga Tapaktuan	439.880,00	Lancar	0,5%	(2.199,40)

No.	Jenis Pajak	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang	%	Penyisihan
					Per 31 Desember 2020
					(Rp)
65	PDAM Tirta Naga (Unit KK Pasie Raja)	29.380,00	Lancar	0,5%	(146,90)
66	PT. Bangun Sempurna Lestari	780.030,00	Lancar	0,5%	(3.900,15)
67	PT. Samudera Sawit Nabati	423.360,00	Lancar	0,5%	(2.116,80)
68	Koperasi Prima Jasa	642.420,00	Lancar	0,5%	(3.212,10)
69	PT. Perkasa Subur Sakti	986.400,00	Lancar	0,5%	(4.932,00)
70	PT. Anugerah Fajar Rezeki	79.380,00	Lancar	0,5%	(396,90)
71	PT. Runding Putra Persada	873.960,00	Lancar	0,5%	(4.369,80)
72	PT. Delima Makmur	956.340,00	Lancar	0,5%	(4.781,70)
73	PDAM Tirta Aneuk Laot	1.408.550,00	Lancar	0,5%	(7.042,75)
74	PT. Karya Tanah Subur	885.360,00	Lancar	0,5%	(4.426,80)
75	PT. Agro Energi Nusantara	824.460,00	Lancar	0,5%	(4.122,30)
76	PDAM Tirta Sejuk	2.410.030,00	Lancar	0,5%	(12.050,15)
77	PDAM Tirta Fulawan	866.760,00	Lancar	0,5%	(4.333,80)
78	Socfin Seumanyam	598.400,00	Kurang Lancar	10%	(59.840,00)
79	PT. PLN	2.900,00	Lancar	0,5%	(14,50)
Jumlah		1.277.488.138,00			(399.651.249,83)

Sehingga nilai Piutang Pajak Netto sebesar Rp28.719.800.983,86 yang diperoleh dari nilai Piutang sebesar Rp29.259.361.601,00 dikurangi dengan nilai penyisihan sebesar (Rp539.560.617,15).

5.3.1.10. Piutang Retribusi

Piutang retribusi diakui pada saat dikeluarkannya surat ketetapan retribusi dan jasa layanannya telah digunakan oleh wajib retribusi.

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019.	453.327.000,00	-

Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp453.327.000,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh berupa Retribusi Sampah Kota Banda Aceh sebesar Rp297.999.000,00 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berupa Penyewaan Kios Nelayan Idi di Aceh Timur dan Kios Nelayan di PPS Kuta Raja sebesar Rp155.328.000,00.

5.3.1.11. Penyisihan Piutang Retribusi

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019.	(2.266.635,00)	-

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.266.635,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61. Penyisihan Piutang Retribusi

Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2020
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh				
Retribusi Sampah Kota Banda Aceh	297.999.000,00	Lancar	0,5%	(1.489.995,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh				
Penyewaan Kios Nelayan Idi di Aceh Timur dan Kios Nelayan di PPS Kuta Raja	155.328.000,00	Lancar	0,5%	(776.640,00)
Jumlah	453.327.000,00			(2.266.635,00)

Sehingga nilai Piutang Retribusi Netto sebesar Rp451.060.365,00 yang diperoleh dari nilai Piutang Retribusi sebesar Rp453.327.000,00 dikurangi dengan nilai penyisihan sebesar (Rp2.266.635,00).

5.3.1.12. Piutang Lain-lain PAA yang Sah

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Lain-lain PAA yang Sah per 31 Desember 2020 dan 2019.	88.951.032.532,00	178.996.176.857,00

Piutang lain-lain PAA Yang Sah timbul akibat adanya pendapatan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Saldo piutang lain-lain PAA yang sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp88.951.032.532,00 menurun sebesar Rp90.045.144.325,00 atau 50,31% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp178.996.176.857,00 terdiri dari:

- a. Piutang pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh per 31 Desember 2020 sebesar Rp675.270.000,00 yaitu denda keterlambatan pembayaran kontribusi tetap Hotel Amazing Kutaradja dengan nilai denda yang timbul di tahun 2015 sebesar Rp225.090.000,00 dan di tahun 2016 sebesar Rp225.090.000,00 dan di tahun 2017 sebesar Rp225.090.000,00. Saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp675.270.000,00.
- b. Piutang BLUD merupakan piutang pasien dan piutang jasa pelayanan BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp88.275.762.532,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62. Piutang BLUD

No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Rumah Sakit Umum DR. Zainoel Abidin	82.936.520.375,00	167.131.200.911,00
2	Rumah Sakit Jiwa	3.564.429.425,00	5.649.727.405,00
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak	1.774.812.732,00	5.539.978.541,00
	Jumlah	88.275.762.532,00	178.320.906.857,00

Rincian Piutang BLUD dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

5.3.1.13. Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah per 31 Desember 2020 dan 2019.	(1.465.360.554,63)	(1.413.518.189,26)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.465.360.554,63) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63. Penyisihan Piutang Lain-lain PAA yang Sah

Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2020
I. Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja:				
Masa denda 2015	225.090.000,00	Diragukan	50%	(112.545.000,00)
Masa denda 2016	225.090.000,00	Kurang Lancar	10%	(22.509.000,00)
Masa denda 2017	225.090.000,00	Lancar	0,5%	(1.125.450,00)
Jumlah I	675.270.000,00			(136.179.450,00)
II. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh				
Sewa Kantin	3.000.000,00	Lancar	0,5%	(15.000,00)
Jumlah II	3.000.000,00			(15.000,00)
III. Piutang BLUD				
BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin				
Piutang Tahun 2019	5.085.656.329,00	Kurang Lancar	10%	(508.565.632,90)
Piutang BPJS Kesehatan 2020 per 31 des 2020	39.685.309.753,00	Lancar	0,5%	(198.426.548,77)
Piutang Jasa Raharja 2020 per 31 des 2020	705.901.227,00	Lancar	0,5%	(3.529.506,14)
Piutang Dinas Kesehatan Aceh 2020 per 31 Des 2020	326.777.366,00	Lancar	0,5%	(1.633.886,83)
Piutang BPJS Ketenagakerjaan 2020 per 31 Des 2020	42.280.887,00	Lancar	0,5%	(211.404,44)
Piutang MIFA 2020 per 31 Des 2020	6.642.222,00	Lancar	0,5%	(33.211,11)
Piutang Nayaka 2020 per 31 Des 2020	20.362.496,00	Lancar	0,5%	(101.812,48)
Piutang Kesdam 2020 per 31 Des 2020	680.000,00	Lancar	0,5%	(3.400,00)
Piutang Telkom 2020 per 31 Des 2020	2.116.808,00	Lancar	0,5%	(10.584,04)
Piutang Medika Plaza 2020 per 31 Des 2020	5.060.621,00	Lancar	0,5%	(25.303,11)
Piutang PT. PLN 2020 per 31 Des 2020	236.606.170,00	Lancar	0,5%	(1.183.030,85)
Piutang Polda 2020 per 31 Des 2020	4.585.000,00	Lancar	0,5%	(22.925,00)
Piutang LPSK 2020 per 31 Des 2020	6.285.000,00	Lancar	0,5%	(31.425,00)
Piutang Tak Tertagih Pasien Umum 2020 Per 31 Des 2020	767.560.202,00	Lancar	0,5%	(3.837.801,01)
Piutang BRI Life 2020 per 31 Des 2020	32.728.804,00	Lancar	0,5%	(163.644,02)
Piutang Angkasa Pura 2020 per 31 Des 2020	2.141.140,00	Lancar	0,5%	(10.705,70)
Piutang YKKBI ADMEDIKA 2020 per 31 Des 2020	7.685.479,00	Lancar	0,5%	(38.427,40)
Piutang Mandiri Inhealth 2020 Per 31 Des 2020	30.872.971,00	Lancar	0,5%	(154.364,86)
Piutang KEMENKES 2020 Per 31 Des 2020	35.967.267.900,00	Lancar	0,5%	(179.836.339,50)
BLUD Rumah Sakit Jiwa				
Piutang BRA (2008)	12.487.000,00	Kurang Lancar	10%	(1.248.700,00)
Piutang Pasien Umum (2010)	4.744.000,00	Macet	100%	(4.744.000,00)
Piutang Pasien Umum (2011)	8.925.000,00	Macet	100%	(8.925.000,00)
Piutang Pasien Umum (2012)	26.048.000,00	Macet	100%	(26.048.000,00)
Piutang Pasien Umum (2013)	31.741.500,00	Macet	100%	(31.741.500,00)
Piutang Pasien Umum (2014)	18.927.500,00	Macet	100%	(18.927.500,00)
Piutang Pasien Umum (2015)	3.030.000,00	Macet	100%	(3.030.000,00)

Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2020
Piutang Pasien Umum (2016)	14.126.747,00	Macet	100%	(14.126.747,00)
Piutang Pasien Umum (2017)	138.250.822,00	Macet	100%	(138.250.822,00)
Piutang Pasien Umum (2018)	82.656.248,00	Macet	100%	(82.656.248,00)
Piutang Pasien Umum (2019)	9.303.982,00	Macet	100%	(9.303.982,00)
Piutang Pasien Umum (2020)	224.684.026,00	Lancar	0,5%	(1.123.420,13)
Piutang Pasien Umum (2020)	63.600.826,00	Kurang Lancar	10%	(6.360.082,60)
Piutang Pasien Umum (2020)	10.770.997,00	Diragukan	50%	(5.385.498,50)
Piutang Pasien Umum (2020)	56.306.456,00	Macet	100%	(56.306.456,00)
IPWL Juni (2019)	131.248.856,00	Lancar	0,5%	(656.244,28)
IPWL Juli (2019)	143.746.056,00	Lancar	0,5%	(718.730,28)
IPWL Agustus (2019)	157.265.486,00	Lancar	0,5%	(786.327,43)
IPWL September (2019)	145.443.023,00	Lancar	0,5%	(727.215,12)
IPWL Oktober (2019)	152.310.770,00	Lancar	0,5%	(761.553,85)
IPWL Juli (2020)	154.686.636,00	Lancar	0,5%	(773.433,18)
IPWL Agustus (2020)	157.224.402,00	Lancar	0,5%	(786.122,01)
IPWL September (2020)	197.628.601,00	Lancar	0,5%	(988.143,01)
IPWL Oktober (2020)	130.685.278,00	Lancar	0,5%	(653.426,39)
Susulan BPJS Agustus 2020	4.496.700,00	Lancar	0,5%	(22.483,50)
Susulan BPJS September 2020	63.363.900,00	Lancar	0,5%	(316.819,50)
Susulan BPJS Oktober 2020	114.830.800,00	Lancar	0,5%	(574.154,00)
Obat Penyakit Kronis November 2020	2.666.886,00	Lancar	0,5%	(13.334,43)
Susulan BPJS Desember 2020	1.012.696.300,00	Lancar	0,5%	(5.063.481,50)
Obat Penyakit Kronis Desember 2020	130.354.996,00	Lancar	0,5%	(651.774,98)
Pending Obat Penyakit Kronis Desember 2020	3.364.976,00	Lancar	0,5%	(16.824,88)
IPWL Desember 2020	156.812.655,00	Lancar	0,5%	(784.063,28)
BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak				
BPJS	1.708.411.800,00	Lancar	0,5%	(8.542.059,00)
Jasa Raharja	18.116.600,00	Lancar	0,5%	(90.583,00)
Ambulance	15.946.000,00	Lancar	0,5%	(79.730,00)
Obat Kemo dan Kronis	32.338.332,00	Lancar	0,5%	(161.691,66)
Jumlah III	88.275.762.532,00			(1.329.166.104,62)
Total	88.951.032.532,00			(1.465.360.554,63)

Sehingga nilai Piutang Lain-lain PAA yang Sah Netto sebesar Rp87.485.671.977,38 dan yang diperoleh dari nilai Piutang Lain-lain PAA yang Sah sebesar Rp88.951.032.532,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang sebesar (Rp1.465.360.554,62)

5.3.1.14. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019.	9.203.679.282,48	8.384.709.060,86

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.203.679.282,48 terdiri dari:

Tabel 5.64. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang Tahun 2020
I.	BPKA (Kerja Sama Pemanfaatan):	
	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2015	2.501.000.000,00
	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2016	2.501.000.000,00
	Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2017	2.501.000.000,00
	Biaya Penyusutan Perolehan atas Gedung Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2017	690.898.610,86
	Jumlah	8.193.898.610,86

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang Tahun 2020
II.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh :	
	Sewa Rumah Dinas an. Safriani S.SOS	6.674.000,00
	Jumlah	6.674.000,00
III.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	
	Kerjasama Pemanfaatan dengan PT. MIFA Bersaudara untuk Triwulan II dan Triwulan III	684.874.607,00
	Jumlah	684.874.607,00
IV.	PPKA	
	Kerjasama Pemanfaatan dengan Rumah Sakit Fakinah	165.232.064,62
	Jumlah	165.232.064,62
V.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
	Sewa Kantin	3.000.000,00
	Jumlah	3.000.000,00
VI.	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	
	Sewa Lahan Parkir	150.000.000,00
	Jumlah	150.000.000,00
	Total	9.203.679.282,48

5.3.1.15. Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Penyisihan Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah per 31 Desember 2020 dan 2019.	(1.586.478.764,45)	(1.582.231.531,09)

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.586.478.764,45) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65. Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Jenis Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2020 (Rp)
I. BPKA (Kerja Sama Pemanfaatan)				
Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2015	2.501.000.000,00	Kurang Lancar	50%	(1.250.500.000,00)
Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2016	2.501.000.000,00	Lancar	10%	(250.100.000,00)
Kontribusi Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2017	2.501.000.000,00	Lancar	0,5%	(12.505.000,00)
Biaya Penyusutan Perolehan atas Gedung Hotel Amazing Koetaradja Tahun 2017	690.898.610,86	Lancar	10%	(69.089.861,09)
Jumlah I	8.193.898.610,86			(1.582.194.861,09)
II. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh				
Sewa Rumah Dinas an. Safriani S.SOS	6.674.000,00	Lancar	0,5%	(33.370,00)
Jumlah II	6.674.000,00			(33.370,00)
III. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh				
Kerjasama Pemanfaatan dengan PT. MIFA Bersaudara untuk Triwulan II dan Triwulan III	684.874.607,00	Lancar	0,5%	(3.424.373,04)
Jumlah III	684.874.607,00			(3.424.373,04)

Jenis Piutang	Jumlah Piutang (Rp)	Kualitas Piutang	%	Penyisihan per 31 Desember 2020 (Rp)
IV. PPKA				
Kerjasama Pemanfaatan dengan Rumah Sakit Fakinah	165.232.064,62	Lancar	0,5%	(826.160,32)
Jumlah IV	165.232.064,62			(826.160,32)
V. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh				
Sewa Kantin	3.000.000,00	-	-	-
Jumlah V	3.000.000,00			-
VI. BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin				
Sewa	150.000.000,00	-	-	-
Jumlah VI	150.000.000,00			-
Total	9.203.679.282,48			(1.586.478.764,45)

Sehingga nilai Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Netto sebesar Rp7.617.200.518,03 yang diperoleh dari nilai Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp9.203.679.282,48 dikurangi dengan Penyisihan Piutang sebesar (Rp1.586.478.764,45).

5.3.1.16. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 dan 2019.	-	69.488.690.176,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019 sebesar Rp69.488.690.176,00 terdiri dari: Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar Rp22.468.754.407,00, Piutang Bagi Hasil bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp4.621.368.462,00 dan Piutang Transfer Pemerintah Lain-lain (Dana Penyesuaian-DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Dalam Rangka OTSUS) sebesar Rp42.398.567.307,00. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil TA 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kemudian PMK Nomor 36/PMK.07/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020. Maka dengan terbitnya PMK tersebut Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp69.488.690.176,00 dikoreksi menjadi sebesar Rp0,00.

5.3.1.17. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 dan 2019.	-	(347.443.450,88)

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019 sebesar (Rp347.443.450,88) terdiri dari: Piutang Bagi Hasil Pajak sebesar (Rp112.343.772,04), Piutang Bagi Hasil bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar (Rp23.106.842,31) dan Piutang Transfer Pemerintah Lain-lain (Dana Penyesuaian-DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Dalam Rangka OTSUS) sebesar (Rp211.992.836,54). Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 sebesar Rp0,00 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020.

5.3.1.18. Belanja Dibayar Di Muka

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019.	3.440.814.702,92	7.202.705.487,92

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.440.814.702,92 terdiri dari:

5.3.1.18.1. Sewa Dibayar Dimuka

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019	2.688.703.606,41	6.565.146.397,70

Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.688.703.606,41 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66. Sewa Dibayar Di Muka

Uraian	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Prestasi yang telah dinikmati	Prestasi yang belum dinikmati
Sewa Dibayar Dimuka				
I. Dinas Pendidikan Aceh				
Sewa Menyewa Rumah Toko Berlantai 2 Aceh Timur	009/SPS.GDG/L.1/ATIM/2020	70.000.000,00	17.643.835,62	52.356.164,38
Sewa Menyewa Rumah Toko Berlantai 3 Bener Meriah	911/O.1/074/2020	50.000.000,00	25.274.725,27	24.725.274,73
Jumlah I		120.000.000,00	42.918.560,89	77.081.439,11
II. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh				
Sewa Menyewa Toko Penyimpanan Bahan Pustaka dan Inventaris Kantor	900/1366/2020	135.000.000,00	55.849.315,07	79.150.684,93
Jumlah II		135.000.000,00	55.849.315,07	79.150.684,93
III. Dinas Pangan Aceh				
Sewa Toko Tani Indonesia Center	050/520/04/2020	80.000.000,00	60.273.972,60	19.726.027,40
Jumlah III		80.000.000,00	60.273.972,60	19.726.027,40
IV. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh				
Sewa Gedung Untuk Kebutuhan Samsat	602.1/SP/19.4/05/PPTK/2017	112.000.000,00	102.647.501,71	9.352.498,29
Sewa Kantor Samsat Pidie Jaya	-	41.070.000,00	34.154.383,56	6.915.616,44
Sewa Kantor Samsat Subulussalam	602./330/SPK/2020	60.000.000,00	11.835.616,44	48.164.383,56
Jumlah IV		213.070.000,00	148.637.501,71	64.432.498,29

Uraian	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Prestasi yang telah dinikmati	Prestasi yang belum dinikmati
V. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh				
Penyediaan Collocation Server Pemerintah Aceh	20/SPK/TIK/VII/2020	197.505.000,00	84.413.095,89	113.091.904,11
Jasa Penyediaan Bandwidth Pemerintah Aceh	23/SPK/TIK/VIII/2020	2.279.344.800,00	849.290.117,26	1.430.054.682,74
Jasa Penyediaan Metro-E Kebutuhan E-Government Pemerintah Aceh	24/SPK/TIK/VIII/2020	799.788.310,00	298.003.315,51	501.784.994,49
Pembayaran Jasa Penyediaan VPN-IP Integrasi Layanan Kesehatan dan Kependudukan	25/SPK/TIK/VIII/2020	125.740.000,00	46.851.068,49	78.888.931,51
Penyediaan Metro-E untuk Pemerintah Aceh di Jakarta Backup Link P to P DC ke DRC	27/SPK/TIK/X/2020	105.666.000,00	22.580.679,45	83.085.320,55
Jumlah V		3.508.044.110,00	1.301.138.276,60	2.206.905.833,40
VI. Badan Penghubung Pemerintah Aceh				
Sewa Akses Internet Dedicated Fiber Optik Indramayu	585/035/SPK/PL/2020	84.000.000,00	3.912.328,77	80.087.671,23
Sewa Akses Internet Dedicated Fiber Optik Mess Aceh	585/034/SPK/PL/2020	169.200.000,00	7.880.547,95	161.319.452,05
Jumlah VI		253.200.000,00	11.792.876,71	241.407.123,29
Total		4.309.314.110,00	1.620.610.503,59	2.688.703.606,41

5.3.1.18.2. Asuransi Dibayar Dimuka

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019.	752.111.096,51	637.559.090,22

Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp752.111.096,51 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67. Asuransi Dibayar Di Muka

Uraian	Nomor Polis Periode Asuransi/Presentasi	Nilai Presentasi	Prestasi yang telah dinikmati	Prestasi yang belum dinikmati
Asuransi Dibayar Dimuka				
I. Sekretariat DPRA				
Asuransi Kendaraan Pool Operasional	027/111/XII/KPA.01/2020	295.500.000,00	9.715.068,49	285.784.931,51
Asuransi Mobil Jabatan	027/103/XII/KPA.01/2020	34.166.250,00	1.123.273,97	33.042.976,03
Jumlah I		329.666.250,00	10.838.342,47	318.827.907,53
II. Sekretariat Daerah				
Belanja Premi Mobil Dinas Gub/Wagub	1831/SPK/2020	199.998.180,00	100.273.060,11	99.725.119,89
Belanja Premi Mobil Dinas VIP SETDA	1891/SPK/2020	199.761.250,00	96.870.523,97	102.890.726,03
Belanja Premi Mobil Dinas Perwakilan Medan (Toyota Fortuner BK 1664 K dan Pajero Sport BL 204 JB)	024/110/2020	13.908.631,00	6.020.722,46	7.887.908,54
Belanja Premi Mobil Dinas Perwakilan Medan (Pajero Sport)	024/045/2020	12.223.740,00	9.176.177,42	3.047.562,58
Jumlah II		425.891.801,00	212.340.483,97	213.551.317,03

Uraian	Nomor Polis Periode Asuransi/Presentasi	Nilai Presentasi	Prestasi yang telah dinikmati	Prestasi yang belum dinikmati
III. Badan Penghubung Pemerintah Aceh				
Gedung Mess Aceh	585/032/SPK/PL/2020	144.996.158,00	17.081.739,16	127.914.418,84
Gedung Kantor	585/033/SPK/PL/2020	104.078.790,00	12.261.336,90	91.817.453,10
Jumlah III		249.074.948,00	29.343.076,07	219.731.871,94
Jumlah I + II + III		1.004.632.999,00	252.521.902,50	752.111.096,51

5.3.1.19. Uang Muka

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Uang Muka per 31 Desember 2020 dan 2019.	-	13.751.254.848,00

Saldo Uang Muka pengadaan barang/jasa TA 2020 adalah Rp0,00 dan TA 2019 sebesar Rp13.751.254.848,00. Saldo Tahun 2019 tersebut telah disetor oleh BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dan Dinas PUPR dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangunan Gedung Oncology Centre Multi Year Contract (MYC) di RSUD ZA sebesar Rp13.751.254.848,00 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 027/12079/02.A/2019 tanggal 30 Desember 2019. Jumlah tersebut merupakan uang muka yang diterima penyedia jasa sebesar Rp11.837.045.455,00 serta PPh dan PPN yang telah dipungut dan disetor sebesar Rp1.595.454.545,00. Pada Tahun 2020 kontrak pekerjaan dibatalkan dan pihak penyedia jasa telah mengembalikan uang muka sebesar Rp11.837.045.455,00 pada 27 Januari 2020 serta PPh dan PPN sebesar Rp1.595.454.545,00 pada 19 Juni 2020; dan
- b. Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Selatan - Kuala Baru - Singkil - Telaga Bakti Kab. Aceh Singkil (Otsus Aceh) di Dinas PUPR sebesar Rp318.754.848,00 yang merupakan PPh dan PPN yang telah dipungut dan disetor kembali pada rekening Kas Daerah tanggal 28 Desember 2020.

5.3.1.20. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan 2019.	83.165.150,58	81.749.357,83

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp83.165.150,58 merupakan bagian lancar dari sisa tagihan ganti rugi rumah dan tanah milik Pemerintah Aceh yang timbul akibat penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68. Tagihan Penjualan Barang Milik Daerah

No	Nama	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Fahri	1.853.556,50	2.231.971,00
2	Suriani	17.320.000,00	15.570.000,00
3	T.BahromUmri	20.206.526,93	20.041.526,93
4	Syamsuddin Ibrahim	3.638.700,00	4.758.300,00
5	Ummi Kalsum	15.696.015,15	15.696.015,15
6	Suwarno Amin	4.561.062,00	3.562.254,75
7	SirtuHadi	19.889.290,00	19.889.290,00
Jumlah		83.165.150,58	81.749.357,83

5.3.1.21. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan 2019.	(29.339.528,79)	(49.931.474,31)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 sebesar (Rp29.339.528,79) terdiri dari:

Tabel 5.69. Penyisihan Piutang Penjualan Barang Milik Daerah

No	Nama	Nilai (Rp)	Kualitas piutang (%)	Jumlah (Rp)
1	Fahri	1.853.556,50	50%	(926.778,25)
2	Suriani	17.320.000,00	0,5%	(86.600,00)
3	T.Bahrom Umri	20.206.526,93	50%	(10.103.263,46)
4	Syamsuddin Ibrahim	3.638.700,00	100%	(3.638.700,00)
5	Ummi Kalsum	15.696.015,15	0,5%	(78.480,08)
6	Suwarno Amin	4.561.062,00	100%	(4.561.062,00)
7	SirtuHadi	19.889.290,00	50%	(9.944.645,00)
Jumlah		83.165.150,58		(29.339.528,79)

Sehingga nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto sebesar Rp53.825.621,79 yang diperoleh dari nilai Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp83.165.150,58 dikurangi dengan nilai Penyisihan Bagian Lancar sebesar (Rp29.339.528,79).

5.3.1.22. Persediaan

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019.	602.280.998.808,15	936.254.444.823,39

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional serta barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan terdiri dari persediaan bahan, suku cadang, alat/bahan untuk

kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan barang untuk dijual/diserahkan, serta persediaan natura dan pakan. Persediaan Pemerintah Aceh sebesar Rp602.280.998.808,15 merupakan persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2020, terdiri dari barang pakai habis sebesar Rp39.682.637.547,06, persediaan bahan/material sebesar Rp108.579.858.908,20 dan barang persediaan yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kabupaten/kota sebesar Rp454.018.502.352,89 dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.22.1. Persediaan Barang Pakai Habis

Tabel 5.70. Persediaan Barang Pakai Habis

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	3.044.356.494,04	2.947.875.789,00
2	Persediaan Peralatan Listrik/Elektronik (lampu pijar, battery kering)	517.353.577,21	470.261.381,00
3	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	10.815.000,00	5.385.000,00
4	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.204.965.508,50	1.115.686.669,00
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	508.119.194,90	474.252.165,90
6	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	471.849.026,00	391.768.200,00
7	Persediaan Isi tabung gas	10.489.800,00	6.210.000,00
8	Persediaan Bahan Cetakan	2.552.308.873,00	2.222.931.768,00
9	Persediaan Peralatan Olah Raga	4.107.080.082,00	7.402.815.550,00
10	Persediaan Perlengkapan Medis	27.189.339.126,41	1.350.533.799,24
11	Persediaan Perlengkapan Pakaian/Perlengkapan Pasien	65.960.865,00	178.375.755,00
Jumlah		39.682.637.547,06	16.566.096.077,14

Rincian persediaan barang habis pakai pada masing-masing SKPA dapat dilihat pada *Lampiran 8*.

5.3.1.22.2. Persediaan Bahan/Material

Tabel 5.71. Persediaan Bahan Material

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Persediaan Bahan Baku Bangunan	32.994.021,67	95.947.130,00
2	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	746.368.774,00	398.628.880,00
3	Persediaan Bahan/Bibit Ternak	5.655.785.506,00	6.020.745.864,00
4	Persediaan Bahan Obat-obatan	44.452.179.550,42	53.976.197.937,71
5	Persediaan Bahan Kimia	85.901.000,00	86.473.705,00
6	Persediaan Tas Kegiatan/ Perlengkapan Peserta	77.803.890,00	42.614.890,00
7	Persediaan Bahan Logistik Rumah Tangga	1.843.069.601,00	3.327.878.867,00
8	Persediaan Bahan Pakan Ternak	6.007.757.424,00	4.294.384.060,00
9	Persediaan Bahan Publikasi	337.225.700,00	743.485.179,50
10	Persediaan Bahan Alat-alat Kesehatan	4.365.422.626,00	4.778.131.985,00
11	Persediaan Bahan Pangan	3.944.903.189,95	2.395.082.189,95
12	Persediaan Bahan Kelengkapan Lapangan	10.422.265.488,00	10.665.121.170,00
13	Persediaan Bahan Klinik	26.785.866.680,60	24.576.096.105,00
14	Persediaan Bahan Laboratorium	3.295.189.801,00	5.499.074.802,00

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
15	Persediaan Bahan Jaringan Air	23.553.979,56	31.132.449,56
16	Persediaan Peralatan Rumah Tangga	503.571.676,00	11.962.802.102,02
17	Persediaan Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan	-	153.366.900,00
18	Persediaan Bahan Perpustakaan	-	362.275.760,00
Jumlah		108.579.858.908,20	129.409.439.976,74

Rincian persediaan bahan/material pada masing-masing SKPA dapat dilihat pada *Lampiran 9a*.

Saldo persediaan di atas tidak termasuk bahan habis pakai yang telah kadaluarsa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin.

Obat yang kadaluarsa sebesar Rp 5.009.147.146, terdapat pada Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp4.653.576.593,00 Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar Rp140.531.662,11, Rumah Sakit Jiwa sebesar Rp4.842.923,74 dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin sebesar Rp210.195.968,00. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 9b*.

Bahan medis habis pakai sebesar Rp71.424.318,35 terdapat pada Rumah Sakit Ibu dan Anak sebesar Rp55.697.165,35 dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin sebesar Rp15.727.153,00. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 9c*.

5.3.1.22.3. Persediaan Barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/ kabupaten/kota.

Tabel 5.72. Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Kabupaten/Kota

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Persediaan Pihak Ketiga Tanah	10.760.823.300,00	10.760.823.300,00
2	Persediaan Pihak Ketiga Alat-alat Angkutan	627.000.000,00	1.021.182.600,00
3	Persediaan Pihak Ketiga Pertanian/Peternakan	305.520.000,00	7.275.837.500,00
4	Persediaan Pihak Ketiga Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	31.975.696.628,00	44.288.371.759,00
5	Persediaan Pihak Ketiga Studio dan Komunikasi	8.903.461.500,00	9.022.675.100,00
6	Persediaan Pihak Ketiga Alat-alat Kedokteran	4.172.361.900,00	3.109.142.331,00
7	Persediaan Pihak Ketiga Alat-alat Laboratorium	7.635.009.090,00	11.658.170.090,00
8	Persediaan Pihak Ketiga Alat-alat Keamanan	-	2.640.000.000,00
9	Persediaan Pihak Ketiga Bangunan Gedung	254.831.354.440,89	455.882.856.969,72
10	Persediaan Pihak Ketiga Jalan dan Jembatan	96.994.823.432,00	141.746.635.793,00

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
11	Persediaan Pihak Ketiga Bangunan dan Air/Irigasi	26.474.350.817,00	45.197.751.555,00
12	Persediaan Pihak Ketiga Instalasi	-	33.869.790.838,91
13	Persediaan Pihak Ketiga Jaringan	-	9.361.031.690,88
14	Persediaan Pihak Ketiga Buku Perpustakaan	9.862.206.050,00	12.982.904.484,00
15	Persediaan Pihak Ketiga Barang Bercorak	1.300.281.195,00	1.461.734.758,00
16	Persediaan Pihak Ketiga Bahan Makanan	175.614.000,00	-
Jumlah		454.018.502.352,89	790.278.908.769,51

Rincian persediaan Barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kabupaten/kota pada masing-masing SKPA dapat dilihat pada *Lampiran 10*.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang yaitu investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri dari:

5.3.2.1. Investasi Non Permanen

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 dan 2019.	90.081.023.084,90	92.038.202.935,05

Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2020 sebesar Rp90.081.023.084,90 merupakan Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Bagian dari investasi jangka panjang non permanen Pemerintah Aceh adalah Dana Bergulir yang disisihkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

5.3.2.1.1. Investasi Dana Bergulir

Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut diatas, dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat di realisasikan diperoleh dari saldo dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Perhitungan nilai bersih dana bergulir sebagai berikut:

Tabel 5.73. Dana Bergulir

No	Keterangan	Saldo Awal	Pengurangan	Saldo Akhir
1	Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	42.251.461.000,00	-	42.251.461.000,00
2	Investasi Dana Bergulir PER	38.454.743.104,05	1.755.558.087,15	36.699.185.016,90
3	Investasi Dana Bergulir PINBUK	554.000.000,00	-	554.000.000,00
4	Investasi Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP)	10.777.998.831,00	201.621.763,00	10.576.377.068,00
Jumlah		92.038.202.935,05	1.957.179.850,15	90.081.023.084,90

- a. Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan bantuan untuk koperasi/usaha kecil menengah dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat yang disalurkan pada tahun 2007 s.d 2009. Dana bergulir tersebut disisihkan sebesar 100% dengan kualitas macet disebabkan karena beberapa hal diantaranya penerima dana tidak diketahui keberadaannya, penerima dana mengalami kesulitan bangkrut, meninggal dunia dan beberapa mengalami musibah (*Force Majeure*).
- b. Dana Bergulir PER merupakan program Pemerintah Aceh yang dimulai pada tahun 2001 hingga tahun 2003 yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan pemberdayaan ekonomi rakyat berupa penyaluran kredit untuk Usaha Kecil dan Rumah Tangga serta Koperasi melalui beberapa Bank Umum, Perusahaan Daerah serta Koperasi. Pengelolaan dana PER pada lembaga-lembaga ekonomi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 518/368/2001 tentang Penunjukan Bank dan Kopkaga untuk Penyaluran Dana Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Perbankan dan Kopkaga. Tahun 2019 terjadi pengurangan sebesar Rp2.080.888.661,00 dari setoran BPR Bank Mustaqim Suka Makmur tanggal 30 Desember 2019 sesuai dengan surat Gubernur Aceh Nomor 518/22061 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pengembalian Dana PER. Tahun 2020 terjadi pengurangan sebesar Rp1.755.558.087,15 terdiri dari:

Tabel 5.74 Rincian Setoran PER

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Setoran Nasabah Bank BRI	3.000.000,00	Disetor pada tanggal 30 Maret 2020
2	Setoran dari PT Bank BRI Aceh	505.401.963,00	Disetor pada tanggal 10 Agustus 2020 sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor 580/10921 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pengembalian Dana PER dan
3	Setoran PT Bank Aceh	1.247.156.124,15	Disetor pada tanggal 30 November 2020 sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Nomor 518/16814 tanggal 25 November 2020 tentang Pengembalian Dana PER
Jumlah		1.755.558.087,15	

Tabel 5.75. Rekening Dana PER

No.	Nama Rekening	Nomor
	PT. Bank BRI	
1.	Giro Khusus Penempatan Dana Pemerintah Aceh	0037.01.000192.30.5
2.	Giro Penampungan Jasa/Fee Pemerintah Aceh	0037.01.000200.30.2
3.	Giro Penampungan Fee Tim Teknis PMUKRT	0037.01.000202.30.4
	PT. Bank Aceh	
1.	Dana PER Aceh Barat	01.02.801001.1
2.	Dana PER Aceh Jaya	01.02.801002.0
3.	Dana PER Nagan Raya	01.02.801003.7
4.	Titipan Dana PER NAD	010.202.03.15
5.	Set. Bunga Kredit PER Provinsi	010.202.03.09
6.	Set. Pokok Kredit PER Propinsi	010.201.03.08
7.	Tim Teknis PMUKRTK	010.01.02.570779.2
8.	Rekening Khusus	01.02.121.200.0
	PT. BUKOPIN	
1.	PKPMUKRT & KOP	1002000136
2.	PKPMUKRT & KOP	1001999130

Saldo Dana PER yang belum dikembalikan terdapat pada Bank penyalur sebagai berikut:

Tabel 5.76. Saldo Dana PER

No	Lembaga Bank Penyalur	Saldo Awal	Pengurangan	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020
1	PT. Bank BRI	7.000.000.000,00	505.401.963,00	6.494.598.037,00
2	PT. Bank Aceh	16.141.664.189,05	1.247.156.124,15	14.894.508.064,90
3	PT. Bank Bukopin	6.169.000.000,00	-	6.169.000.000,00
4	KPRI Kopkaga	1.538.034.847,00	-	1.538.034.847,00
5	PT BPR Mustaqim	7.606.044.068,00	-	7.606.044.068,00
Jumlah		38.454.743.104,05	1.752.558.087,15	36.702.185.016,90

- c. Dana Bergulir PINBUK disalurkan masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 kepada 11 (sebelas) Baitul Qiradh, dikelola selama lima tahun dan telah berakhir atau jatuh tempo pada 31 Desember 2014.

Tabel 5.77. Saldo Dana PINBUK

No.	Nama BQ	Alamat	Penyertaan Modal (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Amanah Nanggroe	Banda Aceh	100.000.000,00	100.000.000,00	-
2.	Cut Nyak Dhien	Banda Aceh	100.000.000,00	-	100.000.000,00
3.	BIMA	Banda Aceh	100.000.000,00	15.000.000,00	85.000.000,00
4.	Surya Madinah	Banda Aceh	100.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00

No.	Nama BQ	Alamat	Penyertaan Modal (Rp)	Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)
5.	Abu Indrapuri	Aceh Besar	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00
6.	Ar-Rahmah	Pidie Jaya	100.000.000,00	-	100.000.000,00
7.	Dewantara	Aceh Utara	100.000.000,00	100.000.000,00	-
8.	Surya Melati	Lhokseumawe	100.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00
9.	Arafah	Aceh Utara	100.000.000,00	100.000.000,00	-
10.	Al-Muslim	Aceh Tamiang	100.000.000,00	100.000.000,00	-
11.	Al-Ikhwah	Meulaboh	100.000.000,00	21.000.000,00	79.000.000,00
Jumlah			1.100.000.000,00	546.000.000,00	554.000.000,00

BQ Amanah Nanggroe, BQ Dewantara, BQ Arafah, dan BQ Al-Muslim telah mengembalikan dana masing-masing sebesar Rp100.000.000,00. Saldo dana pada BQ Bina Insan Mandiri dan BQ Abu Indrapuri masih dalam pembiayaan UKM masing-masing sebesar Rp85.000.000,00 dan Rp75.000.000,00. BQ Surya Madinah dan BQ Surya Melati mengalami musibah tercurinya angunan nasabah dan belum dapat mengembalikan sisa dana masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 dan Rp75.000.000,00. BQ Cut Nyak Dhien dan BQ Ar-Rahmah dilaporkan telah tutup dan belum mengembalikan seluruh dana yang diterima masing-masing sebesar Rp100.000.000,00, demikian pula BQ LKMS Al-Ikhwah yang telah tutup dengan sisa dana yang belum dikembalikan Rp79.000.000,00.

Dana PINBUK telah dikembalikan ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp546.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78. Pengembalian Dana PINBUK

No.	Nama BQ	Jumlah Pengembalian	Penyetor	Keterangan
1	Amanah Nanggroe	100.000.000,00	PINBUK Aceh	Telah disetor ke Rekening Kas Daerah tanggal 03 Juni 2015
2	BIMA	15.000.000,00		
3	Surya Madinah	60.000.000,00		
4	Abu Indrapuri	25.000.000,00		
5	Dewantara	100.000.000,00		
6	Surya Melati	25.000.000,00		
7	Arafah	100.000.000,00		
8	Al-Muslim	100.000.000,00		
9	Al-Ikhwah	21.000.000,00		
Jumlah		546.000.000,00		

- d. Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sebesar Rp10.576.377.068,00 merupakan pinjaman Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dalam rangka mendanai Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan. Penagihan dana bergulir LUEP sudah diserahkan kepada KPKNL sebanyak 62 orang penerima bantuan. Dana Bergulir tahun 2020 berkurang sebesar Rp202.556.863,00, dengan rincian pada *Lampiran 11 dan 11a*.

5.3.2.1.2. Penyisihan Dana Bergulir

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2020 dan 2019.	(90.081.023.084,90)	(92.038.202.935,05)

Penyisihan Dana Bergulir TA 2020 sebesar (Rp90.081.023.084,90) mengalami penurunan sebesar Rp1.957.179.850,15 atau 2,13% dari TA 2019 sebesar (Rp92.038.202.935,05) terdiri dari:

Tabel 5.79 Penyisihan Dana Bergulir

No	Keterangan	Saldo Awal	Kualitas dan Persentasi Penyisihan		Beban Penyisihan	Saldo Akhir
1	Investasi Dana Bergulir Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	(42.251.461.000,00)	100%	macet	-	(42.251.461.000,00)
2	Investasi Dana Bergulir PER	(38.454.743.104,05)	100%	macet	1.755.558.087,15	(36.699.185.016,90)
3	Investasi Dana Bergulir PINBUK	(554.000.000,00)	100%	macet	-	(554.000.000,00)
4	Investasi Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP)	(10.777.998.831,00)	100%	macet	201.621.763,00	(10.576.377.068,00)
Jumlah		(92.038.202.935,05)			1.957.179.850,15	(90.081.023.084,90)

5.3.2.2. Investasi Permanen

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 dan 2019.	1.592.869.162.510,55	1.588.251.026.918,74

Investasi permanen TA 2020 sebesar Rp1.592.869.162.510,55 mengalami kenaikan sebesar Rp4.618.135.591,81 atau 0,29% dari TA 2019 sebesar Rp1.588.251.026.918,74 terdiri dari:

Tabel 5.80. Investasi Permanen

No	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Investasi dalam Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah			
1	PT Bank Aceh	1.522.404.936.513,55	1.512.459.633.181,74
2	PD. BPR Mustaqim	67.600.198.407,00	69.554.374.298,00
3	PT Pembangunan Aceh	2.864.027.590,00	6.237.019.439,00
Jumlah		1.592.869.162.510,55	1.588.251.026.918,74

Penyertaan modal Pemerintah Aceh pada perusahaan daerah yaitu sebagai berikut:

5.3.2.2.1. PT Bank Aceh

Penyertaan Modal pada PT Bank Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81. Penyertaan Modal Bank Aceh

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Investasi Awal / Nilai Terakhir di Neraca 31 Des 2019	1.512.459.633.181,74	1.383.705.866.023,48
Penambahan Tahun 2020 :		
Pengumuman - Laba/Rugi Bank Aceh Tahun 2020 (58.89 % x Rp325.430.637.405,00)	191.646.102.367,81	310.040.518.583,26
Pembagian Dividen Tahun Anggaran 2020	(158.284.954.748,00)	(158.314.541.104,00)
Dana Pembangunan Tahun Anggaran 2020	(23.415.844.288,00)	(22.972.210.321,00)
Jumlah Tahun 2020	9.945.303.331,80	128.753.767.158,26
Jumlah Investasi s.d. Tahun 2020	1.522.404.936.513,55	1.512.459.633.181,74

Nilai Ekuitas Awal sebesar Rp1.512.459.633.181,74. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Bank Aceh Tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Tanggal 11 Februari 2021, Nilai Ekuitas sebesar Rp2.481.831.396.866,00, Penghasilan Komprehensif Rp325.430.637.405,00, persentase kepemilikan Pemerintah Aceh sebesar 58,89 persen dan mendapat Opini Wajar tanpa Pengecualian. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Aceh Tanggal 16 Juni 2020, Pembagian Dividen kepada Pemerintah Aceh sebesar Rp158.284.954.748,00, Dana Pembangunan Daerah sebesar Rp23.415.844.288,00 dengan jumlah saham 63.577.594 lembar saham. Sehingga nilai Investasi Akhir sebesar Rp1.522.404.936.513,55.

5.3.2.2.2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur

Penyertaan Modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mustaqim Sukamakmur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82. Penyertaan Modal BPR Mustaqim Sukamakmur

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Investasi Awal / Nilai Terakhir di Neraca 31 Des 2019	69.554.374.298,00	70.939.974.000,00
Penambahan Tahun 2020 :		
Pengurangan Ekuitas PD BPR Mustaqim Per 31 Desember 2020	(1.954.175.891,00)	(1.385.599.702,00)
Jumlah s.d. Tahun 2020	(1.954.175.891,00)	(1.385.599.702,00)
Jumlah Investasi s.d. Tahun 2020	67.600.198.407,00	69.554.374.298,00

Nilai Ekuitas Awal sebesar Rp69.554.374.298,00. Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Mustaqim Sukamakmur (Perseroda) Tahun 2020 Audited, Nilai Ekuitas sebesar Rp67.600.198.407, persentase kepemilikan Pemerintah Aceh sebesar 99,999 persen dan jumlah saham 71.734.504 lembar saham. Sehingga nilai Investasi Akhir PT Pembangunan Aceh sebesar Rp67.600.198.407,00.

5.3.2.2.3. PD Pembangunan Aceh

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada PD Pembangunan Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83. Penyertaan Modal PD Pembangunan Aceh

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Investasi Awal / Nilai Terakhir di Neraca 31 Des 2019	6.237.019.439,00	3.562.800.000,00
Penambahan Tahun 2020 :		
Koreksi atas Kesalahan Pencatatan Tahun Sebelumnya	(845.585.451,00)	2.674.219.439,00
Laba Tahun Berjalan	(2.527.406.398,00)	-
Jumlah s.d. Tahun 2020	(3.372.991.849,00)	2.674.219.439,00
Jumlah Investasi s.d. Tahun 2020	2.864.027.590,00	6.237.019.439,00

Nilai Ekuitas Awal sebesar Rp 6.237.019.439,00. Berdasarkan Laporan Keuangan PT Pembangunan Aceh Tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johannes dan Rekan Tanggal 13 April 2021, Nilai Ekuitas sebesar Rp2.864.027.590,00, persentase kepemilikan Pemerintah Aceh sebesar 100 persen dengan Opini Tidak Wajar (*Adverse*). Sehingga nilai Investasi Akhir PT Pembangunan Aceh sebesar Rp Rp2.864.027.590,00.

5.3.3. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.726.684.476.673,40 mengalami kenaikan sebesar Rp1.558.398.009.873,08 atau 5,53% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp28.168.286.466.800,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84. Mutasi Aset Tetap

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Tanah	2.847.946.851.175,79	194.060.855.395,00	105.821.774.818,00	2.936.185.931.752,79
2	Peralatan Dan Mesin	3.840.630.661.923,83	782.614.684.162,49	286.030.205.027,31	4.337.215.141.059,02
3	Gedung Dan Bangunan	6.117.420.114.518,06	1.167.224.384.876,04	494.658.372.838,75	6.789.986.126.555,35
4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	12.932.126.342.817,80	1.026.585.395.840,90	499.605.047.436,10	13.459.106.691.222,60
5	Aset Tetap Lainnya	1.218.969.898.679,71	128.404.610.535,37	507.499.451.400,37	839.875.057.814,71
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.211.192.597.685,17	487.391.473.147,20	334.268.542.563,40	1.364.315.528.268,97
	Jumlah	28.168.286.466.800,40	3.786.281.403.957,00	2.227.883.394.083,93	29.726.684.476.673,40

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

5.3.3.1. Tanah

Saldo Aset Tanah pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.936.185.931.752,79 mengalami kenaikan sebesar Rp88.239.080.577,00 atau 3,10% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.847.946.851.175,79 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85. Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	Nilai
Saldo Awal	2.847.946.851.175,79
Mutasi Tambah	194.060.855.395,00
Belanja Modal	71.123.465.326,00
Barang dan Jasa	558.344.812,00
Hibah Masuk	1.620.208.642,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	6.798.000,00
Reklasifikasi Selain dari Aset tetap	43.369.315.100,00
Koreksi	77.382.723.515,00
Mutasi Kurang	105.821.774.818,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	371.495.158,00
Reklasifikasi Selain dari Aset tetap	59.166.014.553,00
Koreksi	46.284.265.107,00
Total	2.936.185.931.752,79

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.936.185.931.752,79. Terjadi penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp71.123.465.326,00; dari Barang Jasa sebesar Rp558.344.812,00; dari Hibah sebesar Rp1.620.208.642,00 yang terdapat pada Dinas Perhubungan Aceh senilai Rp301.160.002,00, Dinas Pendidikan Dayah Aceh senilai Rp1.319.048.640,00; dan adanya penambahan dari koreksi sebesar Rp77.382.723.515,00 yang diantaranya terdapat koreksi nilai Rp1,00. Pada Tahun 2020 dilakukan Reklasifikasi atas saldo Aset Tetap Tanah bertambah sebesar Rp6.798.000,00 dan berkurang sebesar Rp371.495.158,00. Reklasifikasi selain dari Aset Tetap Tanah bertambah sebesar Rp43.369.315.100,00 terdapat pada Sekretariat Baitul Mal Aceh senilai Rp17.304.479.000,00; Dinas Komunikasi dan Persandian Aceh senilai Rp312.000.000,00; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh senilai Rp12.339.010.000,00; dan Dinas Pangan Aceh senilai Rp13.413.826.100,00 yang berkurang dari PPKA serta Reklasifikasi selain dari Aset Tetap Tanah berkurang sebesar Rp59.166.014.553,00.

5.3.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.337.215.141.058,98 mengalami kenaikan sebesar Rp496.584.479.135,15 atau 12,93% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.840.630.661.923,83 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai
Saldo Awal	3.840.630.661.923,82
Mutasi Tambah	782.614.684.162,49
Belanja Modal	431.982.690.923,32
Barang dan Jasa	4.235.455.763,00
Hibah Masuk	24.948.302.463,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	219.217.221.225,50
Reklasifikasi selain dari Aset Tetap	80.195.145.265,30
Utang	7.511.113.092,00
Koreksi	14.524.755.430,37

Uraian	Nilai
Mutasi Kurang	286.030.205.027,34
Hibah Keluar	12.910.181.260,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	59.302.678.261,89
Reklasifikasi selain dari Aset Tetap	183.284.514.404,37
Koreksi	30.532.831.101,08
Total	4.337.215.141.058,98

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.337.215.141.058,98. Terjadi penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp431.982.690.923,32; dari Barang Jasa sebesar Rp4.235.455.763,00 dan dari Hibah sebesar Rp24.948.302.463; Terdapat penambahan dari reklasifikasi antar Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp219.217.221.225,50 dan penambahan reklasifikasi selain dari Aset Tetap Rp80.195.145.265,00; ada penambahan Aset Tetap dari utang sebesar Rp7.511.113.092,00; dan koreksi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.524.755.430,00. Mutasi kurang pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari hibah keluar sebesar Rp12.910.181.260,00; pengurangan reklasifikasi antar Aset Tetap Rp59.302.678.261,89; pengurangan selain dari reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp183.284.514.404,37 dan terdapat koreksi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp30.532.831.101,08.

5.3.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.789.986.126.555,35 mengalami kenaikan sebesar Rp672.566.012.037,29 atau 10,99% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.117.420.114.518,06 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai
Saldo Awal	6.117.420.114.518,06
Mutasi Tambah	1.167.224.384.876,04
Belanja Modal	557.764.049.460,01
Barang dan Jasa	22.727.578.578,87
Hibah Masuk	7.281.794.207,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	42.124.248.686,16
Reklasifikasi selain dari Aset Tetap	529.226.828.472,00
Utang	628.646.700,00
Koreksi	7.471.238.772,00
Mutasi Kurang	494.658.372.838,75
Hibah Keluar	19.133.292.800,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	314.999.903.490,75
Reklasifikasi selain dari Aset Tetap	148.215.409.905,00
Koreksi	12.309.766.643,00
Total	6.789.986.126.555,35

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.789.986.126.555,35. Terjadi penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp557.764.049.460,01; dari Barang Jasa sebesar Rp22.727.578.578,87; dari Hibah sebesar Rp7.281.794.207,00 yang terdapat pada Dinas Perhubungan

Aceh senilai Rp2.596.104.707,00; Dinas Syariat Islam Aceh senilai Rp4.685.689.500,00; Reklas dari Aset Tetap Rp42.124.248.686,16; Reklas selain dari Aset Tetap Rp529.226.828.472,00; dari Utang Rp628.646.700,00; dan adanya penambahan dari Koreksi sebesar Rp7.471.238.772,00. Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp494.658.372.838,75 terdiri dari Hibah keluar sebesar Rp19.133.292.800,00; Reklas dari Aset Tetap Rp314.999.903.490,75; dari Reklas selain Aset Tetap Rp148.215.409.905,00 dan dari Koreksi sebesar Rp12.309.766.643,00.

5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.459.106.691.222,60 mengalami kenaikan sebesar Rp526.980.348.404,80 atau 4,07% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.932.126.342.817,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Nilai
Saldo Awal	12.932.126.342.817,80
Mutasi Tambah	1.026.585.395.840,90
Belanja Modal	572.796.578.764,78
Barang dan Jasa	9.708.695.741,68
Reklasifikasi antar Aset Tetap	380.714.599.276,44
Reklasifikasi selain dari Aset Tetap	8.087.018.410,00
Utang	24.150.943.835,00
Koreksi	31.127.559.813,00
Mutasi Kurang	499.605.047.436,10
Hibah Keluar	1.777.787.200,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	279.939.445.571,30
Reklasifikasi selain dari Aset Tetap	175.338.767.248,00
Koreksi	42.549.047.416,80
Total	13.459.106.691.222,60

Saldo awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp12.932.126.342.817,80, terjadi penambahan sebesar Rp1.026.585.395.840,90 yang bersumber dari Belanja Modal Rp572.796.578.764,78; Belanja Barang dan Jasa Rp9.708.695.741,68; Reklasifikasi dari Aset Tetap Rp380.714.599.276,44; Reklasifikasi selain dari Aset Tetap Rp8.087.018.410,00; Utang Rp24.150.943.835,00; dan Koreksi tambah Rp31.127.559.813,00. Selanjutnya mutasi kurang sebesar Rp499.605.047.436,10 yang diakibatkan oleh adanya Hibah kepada Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp1.777.787.200,00 berupa objek barang jalan dan jembatan. Pengurangan juga disebabkan oleh reklasifikasi dari Aset Tetap Rp279.939.445.571,30; reklasifikasi selain dari Aset Tetap Rp175.338.767.248,00; dan terdapat Koreksi kurang aset sebesar Rp42.549.047.416,80. Sehingga saldo akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp13.459.106.691.222,60.

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 sebesar Rp839.875.057.814,71 mengalami penurunan sebesar Rp379.094.840.865,00 atau 31,10% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.218.969.898.679,71 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89. Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.218.969.898.679,71
Mutasi Tambah	128.404.610.535,36
Belanja Modal	4.450.065.147,36
Barang dan Jasa	31.551.938.626,00
Hibah Masuk	713.762.500,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	74.486.280.845,00
Reklasifikasi selain dari Aset Tetap	16.709.230.595,00
Koreksi	493.332.822,00
Mutasi Kurang	507.499.451.400,36
Hibah Keluar	3.050.764.195,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	2.228.907.182,36
Reklasifikasi selain dari Aset Tetap	501.784.784.338,00
Koreksi	434.995.685,00
Total	839.875.057.814,71

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 sebesar Rp839.875.057.814,71. Terjadi penambahan dari Belanja Modal sebesar Rp4.450.065.147,36; dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp31.551.938.626,00; serta Hibah sebesar Rp713.762.500,00 yang terdapat pada Dinas Perhubungan Aceh. Reklasifikasi bertambah dari Aset Tetap sebesar Rp74.486.280.845,00; dan berkurang sebesar Rp2.228.907.182,36. Reklasifikasi bertambah selain dari Aset Tetap sebesar Rp16.709.230.595,00; berkurang sebesar Rp501.784.784.338,00 terdiri dari Aset Tetap dalam Renovasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh senilai Rp454.602.381.737,00; dan Dinas Perhubungan Aceh senilai Rp1.708.200.000,00.

5.3.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.364.315.528.268,97 mengalami kenaikan sebesar Rp153.122.930.583,80 atau 12,64% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.211.192.597.685,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	251.620.000,00	-	-	251.620.000,00
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	183.095.670.925,54	36.250.173.100,00	80.349.123.266,00	138.996.720.759,54
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	477.200.062.244,63	-	-	477.200.062.244,63

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	550.645.244.515,00	451.317.443.047,20	254.095.562.297,40	747.867.125.264,80
Jumlah		1.211.192.597.685,17	487.567.616.147,20	334.444.685.563,40	1.364.315.528.268,97

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.364.15.528.268,97. Terjadi penambahan pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp177.939.420.650,20 terdiri dari Dinas Kesehatan Aceh senilai Rp97.187.421.781,20; RSUZA sebesar Rp54.618.183.769,00; dan Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp26.133.815.100,00. Penambahan pada Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebesar Rp196.848.170.079,00. Penambahan pada Bangunan Air (Irigasi) di Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp10.116.358.000,00. Pengurangan di Tahun 2020 Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Peralatan dan Mesin di Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp80.349.123.266,00; Gedung dan Bangunan terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp1.907.948.273,40; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebesar Rp2.968.378.225,00; serta pengurangan pada Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebesar Rp249.043.092.799,00.

Dari total nilai perolehan Aset Tetap sebesar Rp29.726.684.476.673,40 terdiri dari Aset Tetap dalam kondisi baik sebesar Rp29.717.717.004.579,40; Aset Tetap yang belum memiliki nilai sebanyak 108.545 unit dan Aset Tetap yang dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp8.967.363.548,00. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 12*.

Aset *Extracomtable* adalah aset yang tidak memenuhi kriteria aset tetap namun masih dicatat dalam Laporan Barang Milik Aceh sampai dengan akhir Tahun 2020 tercatat sebesar Rp150.180.922.452,21. Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 13*.

5.3.3.7. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Aceh per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.280.179.473.953,50; mengalami kenaikan sebesar Rp319.267.070.062,68 atau 2,91% dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.960.912.403.890,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91. Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.154.312.179.311,32)	(1.089.356.385.586,35)	(271.136.215.064,12)	(2.972.532.349.833,55)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.133.813.380.876,49)	(273.563.605.349,48)	(126.911.940.281,28)	(1.280.465.045.944,69)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(7.255.961.542.926,19)	(1.006.447.619.211,38)	(1.236.013.978.881,56)	(7.026.395.183.256,01)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(416.825.300.776,76)	(13.272.001.504,67)	(429.310.407.362,20)	(786.894.919,23)
Saldo akhir setelah penyesuaian		(10.960.912.403.890,80)	(2.382.639.611.651,88)	(2.063.372.541.589,16)	(11.280.179.473.953,50)

1. Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.972.532.349.833,55 dari saldo awal sebesar Rp2.154.312.179.311,32. Terjadi mutasi tambah sebesar Rp1.089.356.385.586,35 terdiri dari beban sebesar Rp488.650.676.069,24; Akumulasi karena Reklas Aset Tetap sebesar Rp1.119.025.916,00; Akumulasi selain Reklas Aset Tetap sebesar Rp10.438.753.899,82; Koreksi tambah Akumulasi sebesar Rp589.141.905.199,28; dan mutasi kurang sebesar Rp271.136.215.064,12 terdiri dari Akumulasi karena Reklas Aset Tetap sebesar Rp1.509.358.250,00; Akumulasi selain Reklas Aset Tetap sebesar Rp140.848.952.442,54; dan Koreksi tambah Akumulasi sebesar Rp128.771.879.869,59.
2. Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.280.465.045.944,69 dari saldo awal sebesar Rp1.133.813.380.876,49. Terjadi mutasi tambah sebesar Rp273.563.605.349,48 terdiri dari Beban sebesar Rp139.675.920.143,92; Akumulasi karena Reklas Aset Tetap sebesar Rp3.743.699.091,96; Akumulasi selain Reklas Aset Tetap sebesar Rp4.719.956.561,54; Koreksi tambah Akumulasi sebesar Rp125.424.029.552,06; dan mutasi kurang sebesar Rp126.911.940.281,28 terdiri dari Akumulasi karena Reklas Aset Tetap sebesar Rp8.317.708.154,80; Akumulasi selain Reklas Aset Tetap sebesar Rp11.886.601.443,42; dan Koreksi tambah Akumulasi sebesar Rp106.598.182.543,06.
3. Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.026.395.183.256,01 dari saldo awal sebesar Rp7.255.961.542.926,19. Terjadi mutasi tambah sebesar Rp1.006.447.619.211,38 terdiri dari Beban sebesar Rp598.939.114.974,31; Akumulasi karena Reklas Aset Tetap sebesar Rp5.916.885.077,55; Akumulasi selain Reklas Aset Tetap sebesar Rp2.969.413.155,20; Koreksi tambah Akumulasi sebesar Rp398.617.963.020,32; dan mutasi kurang sebesar Rp1.236.013.978.881,56 terdiri dari Akumulasi karena Reklas Aset Tetap sebesar Rp1.077.489.366,67; Akumulasi selain Reklas Aset Tetap sebesar Rp129.451.546.344,80; Koreksi tambah Akumulasi sebesar Rp1.105.480.700.186,09.
4. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp786.894.919,23 dari saldo awal sebesar Rp416.825.300.776,76. Terjadi mutasi tambah sebesar Rp13.272.001.504,67 terdiri dari Beban sebesar Rp1.074.750.546,93; Akumulasi karena Reklas Aset Tetap sebesar Rp344.610.956,00; Koreksi tambah Akumulasi sebesar Rp11.852.640.001,74; dan mutasi kurang dari Akumulasi selain Reklas Aset Tetap sebesar Rp429.310.407.362,20.

5.3.4. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. Dalam Tahun 2020 tidak dilakukan penyisihan Dana Cadangan.

Nilai Dana Cadangan adalah saldo awal per 1 Januari 2020 sebesar Rp1.168.173.567.923,20 setelah ditambah Jasa Giro dan Bunga Deposito sebesar Rp76.187.421.357,82; sehingga saldo akhir Dana Cadangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.244.360.989.281,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92. Rincian Dana Cadangan

No	Jenis Dana Cadangan	Nama Bank	Bentuk Penempatan	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
					(Rp)	(Rp)
1	Dana Cadangan Umum	Bank Aceh Syariah	Giro	010.01.02.570482-0	42.039.620.769,93	20.680.352.159,02
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.640035-2	158.000.000.000,00	158.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	610-04.02.000001-0	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.650045-1	26.492.376.242,00	26.492.376.242,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000043-3	29.360.000.000,00	29.360.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000065-4	15.677.228.025,00	15.677.228.025,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.04.000186-0	20.641.284.392,00	20.641.284.392,00
2	Dana Abadi Pendidikan	Bank Aceh Syariah	Giro	010 01. 02 571159-1	58.794.796.924,24	29.029.692.625,25
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.650035-8	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.640036-4	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.650047-4	39.113.895.337,00	39.113.895.337,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000041-1	41.675.000.000,00	41.675.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000067-6	22.918.394.032,00	22.918.394.032,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.04.000184-5	29.483.528.146,00	29.483.528.146,00
3	Dana Cadangan Pendidikan	Bank Aceh Syariah	Giro	010 01.02.571160-6	49.581.164.778,85	24.518.116.330,93
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.640034-1	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.03.02.650046-2	29.065.352.992,00	29.065.352.992,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000042-2	34.195.000.000,00	34.195.000.000,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.03.000066-5	18.047.253.823,00	18.047.253.823,00
		Bank Aceh Syariah	Deposito	010.04.04.000187-1	24.276.093.819,00	24.276.093.819,00
JUMLAH					1.244.360.989.281,02	1.168.173.567.923,20

5.3.4.1. Dana Cadangan Umum

Dana Cadangan Umum per 31 Desember 2020 sebesar Rp347.210.509.428,93 bertambah dari saldo awal sebesar Rp325.851.240.818,02. Penambahan saldo sebesar Rp21.359.268.610,91 berasal dari Bunga Deposito dan Jasa Giro yang menambah langsung ke Rekening Dana Cadangan Umum yang ditempatkan pada Bank Aceh Syariah.

5.3.4.2. Dana Abadi Pendidikan

Dana Abadi Pendidikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp491.985.614.439,24, bertambah dari saldo awal sebesar Rp462.220.510.140,25. Penambahan saldo sebesar Rp29.765.104.298,99 berasal dari Bunga Deposito dan Jasa Giro yang menambah langsung ke Rekening Dana Abadi Pendidikan yang ditempatkan pada Bank Aceh.

Dana Abadi Pendidikan dibentuk pada Tahun 2004 yang berasal dari penyisihan Dana Pendidikan dari Pemerintah Pusat yang terakumulasi dalam

SiLPA. Pada Tahun 2005 dan 2006 dilakukan penambahan terhadap Dana Cadangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/068/2005 tanggal 22 November 2005 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2005 dan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/079/2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Dana Abadi Pendidikan Tahun 2006.

5.3.4.3. Dana Cadangan Pendidikan

Dana Cadangan Pendidikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp405.164.865.412,85; bertambah dari saldo awal sebesar Rp380.101.816.964,93. Penambahan saldo sebesar Rp25.063.048.447,92 berasal dari Bunga Deposito dan Jasa Giro yang menambah langsung ke Rekening Dana Cadangan Pendidikan yang ditempatkan pada Bank Aceh. Dana Cadangan Pendidikan dibentuk pada tahun 2005 yang berasal dari sisa Dana Pendidikan atas SiLPA TA 2003 dan 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.900/057/2005 tanggal 1 September 2005 tentang Pelaksanaan Transfer ke Rekening Khusus Dana Cadangan Pendidikan Tahun 2005.

5.3.5. Aset Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019.	4.306.927.702.335,42	4.403.721.279.872,80

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.306.927.702.335,42 terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain, dengan rincian sebagai berikut:

5.3.5.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan 2019.	717.751,00	4.753.939,50

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 sebesar Rp717.751,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan sisa tagihan ganti rugi rumah dan tanah milik Pemerintah Aceh yang timbul akibat penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran. Tagihan Penjualan Angsuran merupakan bagian tidak lancar dari sisa tagihan yang jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

5.3.5.2. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan Saldo Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019.	25.601.678.307,43	25.622.178.307,43

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp25.601.678.307,43 terdiri dari :

- a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar Rp24.945.748.329,43 terdiri dari:
 - 1) Kepada Sdr. H, selaku Kuasa Bendahara Umum Aceh sebesar Rp24.749.248.329,43. Terhadap Kerugian Daerah, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Surat Ketetapan Pembebanan Sementara Kerugian Keuangan Daerah (SKPS) sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 951/633/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara. Atas kerugian tersebut telah dilakukan penelusuran oleh Inspektorat Aceh.
 - 2) Kerugian daerah Tahun 2019 sebesar Rp217.000.000,00 kepada Sdr. IHS selaku bendahara BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak, pada Tahun 2020 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp20.500.000,00. Sehingga saldo kerugian per 31 Desember 2020 sebesar Rp196.500.000,00.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara an. Sfw per 31 Desember 2020 sebesar Rp655.929.978,00 merupakan Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

5.3.5.3. Kerjasama Pemanfaatan

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo dari Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2020 dan 2019.	188.012.963.600,00	30.364.856.046,00

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp188.012.963.600,00, terjadi penambahan kerjasama pemanfaatan Tahun 2020 antara lain pada:

1. Yayasan Tgk. Fakinah

Kemitraan dengan Yayasan Tgk. Fakinah adalah sebesar Rp31.408.385.547,00 merupakan kerjasama pemanfaatan tanah dan

bangunan milik Pemerintah Aceh untuk Rumah Sakit Swasta, berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan Yayasan Tgk. Fakinah No.17/PKS/2010 addendum No.78/PKS/Add/2012 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.93. Aset Kerjasama Dengan Yayasan Tgk. Fakinah

No	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah seluas 11.337 M ²	11.337.000.000,00	11.337.000.000,00
2	Bangunan bidang permanen seluas 7.280,86 M ²	19.027.856.046,00	19.027.856.046,00
3	Bangunan Gudang Sampah B3	37.273.000,00	-
4	Bangunan Semi Permanen (Kantin)	1,00	-
5	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	521.698.500,00	-
6	Ramp/Jalan Pasien	484.558.000,00	-
Jumlah		31.408.385.547,00	30.364.856.046,00

Perhitungan besaran sewa sebesar Rp670.475.000,00 per tahunnya dengan total besaran sewa untuk 5 (lima) tahun sebesar Rp3.352.375.000,00. Penyetoran uang sewa tahap pertama sebesar Rp2.000.000.000,00 dilakukan sebelum ditandatanganinya perjanjian kerjasama pemanfaatan dan sisanya sebesar Rp1.352.375.000,00 dibayarkan paling lambat tanggal 30 November 2021.

2. PT. Pembangunan Aceh (PEMA) - Ladong

Kemitraan berbentuk kerja sama pemanfaatan Tanah dan Bangunan beserta fasilitas pendukung di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, yang terletak dikampung Ladong kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar adalah sebesar Rp59.816.234.353,00, berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT. Pembangunan Aceh (PEMA) No.47/PKS/2020 tanggal 12 Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94. PT. Pembangunan Aceh (PEMA) - Ladong

No	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah seluas 656.800 M ²	47.469.239.553,00	-
2	Peralatan dan Mesin	90.615.000,00	-
3	Gedung dan Bangunan	7.553.687.072,00	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.646.362.477,00	-
5	Aset Tetap Lainnya	56.330.251,00	-
Jumlah		59.816.234.353,00	-

Perjanjian kerjasama berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama di tandatangani. PT. Pembangunan Aceh (PEMA) berkewajiban memberikan pembagian laba hasil keuntungan

atau laba bersih sebesar 15% (lima belas perseratus) dan /atau deviden setelah dipotong pajak berdasarkan hasil Audit dari Akuntan Publik.

Keterlambatan pembagian hasil keuntungan yang tidak sesuai dengan jadwal dalam perjanjian kerjasama akan dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) perhari maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender, kecuali dalam keadaan kahar.

3. PT. Pembangunan Aceh (PEMA) – KEK Arun

Kemitraan berbentuk kerja sama pemanfaatan Barang Milik Aceh berupa Gas Turbine Generator (GTG) beserta aksesoris yang terletak di komplek eks PT. Arun Lhokseumawe berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan PT. Pembangunan Aceh (PEMA) No.73/PKS/2020 tanggal 04 Mei 2020, dengan nilai Aset sebagai berikut:

Tabel 5.95. PT. Pembangunan Aceh (PEMA) – KEK Arun

No	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Tanah seluas 66.400 M ²	6.115.440.000,00	
2	Stationary Generating Set	64.246.300.000,00	-
Jumlah		70.361.740.000,00	-

Kerjasama pemanfaatan dilakukan dengan pembagian laba hasil keuntungan atau laba bersih kepada Pemerintah Aceh sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan/atau deviden setelah di potong pajak berdasarkan dari akuntan publik. Jangka waktu kerjasama berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian di tanda tangani.

4. PT. ASDP Indonesia Ferry

Kemitraan berbentuk kerja sama pemanfaatan Barang Milik Aceh dalam bentuk sewa berupa Kapal KMP. BRR 1000 GT dengan nilai aset kapal sebesar Rp26.426.603.700,00. Berdasarkan perjanjian sewa antara Pemerintah Aceh dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor 28/PKS/2019 dan Nomor Sperj. 11/UM.201/ASDP-BNA/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019.

5.3.5.5. Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo dari Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2020 dan 2019.	(78.536.124.236,20)	(5.786.466.915,10)

Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp78.536.124.236,20) merupakan perhitungan Penyusutan kerjasama pemanfaatan Pemerintah Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96. Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama

No	Uraian	Per 31 Desember 2020	Tahun	Akumulasi Penyusutan Kerjasama Pemanfaatan
		(Rp)		
1	PT. Pembangunan Aceh (PEMA) Ladong	59.816.234.353,00	-	(2.777.446.807,75)
2	Yayasan TGK Fakinah	31.408.385.547,00	-	(6.227.056.688,45)
3	PT. Pembangunan Aceh (PEMA) KEK ARUN	70.361.740.000,00	-	(64.246.300.000,00)
4	PT. ASDP INDONESIA FERRY	26.426.603.700,00	-	(5.285.320.740,00)
Jumlah		188.012.963.600,00		(78.536.124.236,20)

5.3.5.6. Aset Tak Berwujud

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo dari Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019.	30.397.239.283,00	42.652.221.448,00

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini merupakan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaaan dari luar entitas. Pemerintah Aceh telah mengeluarkan sumber daya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh, mengembangkan, memelihara, dan memperkuat sumber daya tak berwujud, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, rancangan dan implementasi suatu sistem atau proses yang baru, dan kekayaan intelektual. Entitas berupaya untuk melakukan riset dan pengembangan. Terlebih bagi entitas yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan riset dan pengembangan. Namun tidak semua hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut merupakan Aset Tak Berwujud.

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 Sebesar Rp30.397.239.283,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.97. Lisensi dan Hak Cipta

No	Keterangan	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
Lisensi dan frenchise			
1	Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin	24.750.000,00	24.750.000,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandian Aceh	104.450.000,00	104.450.000,00
Hak Cipta			
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	19.767.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	99.500.000,00	-
Jumlah		228.700.000,00	148.967.000,00

5.3.5.6.1. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo dari Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019.	30.168.539.283,00	42.503.254.448,00

Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.168.539.283,00 merupakan *software*, dokumen rancangan pembangunan, kajian-kajian survei dan tata ruang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98. Rincian Aset Tak Berwujud Lainnya

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
Software			
1	Dinas Pendidikan Aceh	1.265.775.610,00	1.808.464.810,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	632.498.000,00	632.498.000,00
3	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	3.943.403.379,00	3.943.403.379,00
4	BLUD Rumah Sakit Jiwa	1.422.259.725,00	1.422.259.725,00
5	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	308.204.245,00	308.204.245,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	-	98.945.000,00
7	Dinas Pengairan Aceh	106.607.600,00	106.607.600,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	76.500.000,00	76.500.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	5.575.185,00	5.575.185,00
10	Dinas Sosial Aceh	211.980.000,00	211.980.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	25.850.000,00	25.850.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	47.480.000,00	47.480.000,00
13	Dinas Pangan Aceh	101.500.000,00	101.500.000,00
14	Dinas Pertanahan Aceh	61.325.000,00	61.325.000,00
15	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	647.866.000,00	666.866.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	59.705.000,00	59.705.000,00
17	Dinas Perhubungan Aceh	4.727.472.900,00	4.727.472.900,00
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	2.772.174.700,00	2.772.174.700,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	38.280.000,00	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	434.415.625,00	454.215.625,00
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	283.925.000,00	283.925.000,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	4.980.000,00	4.980.000,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	388.844.000,00	388.844.000,00
24	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	243.349.000,00	243.349.000,00
25	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	48.480.000,00	48.480.000,00
26	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	172.535.000,00	104.995.000,00
27	Sekretariat Majelis Adat Aceh	44.500.000,00	44.500.000,00
28	Dinas Syariat Islam Aceh	39.160.000,00	39.160.000,00
29	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	146.800.000,00	146.800.000,00
30	Sekretariat Baitul Mal Aceh	263.350.000,00	263.350.000,00
31	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	114.567.000,00	114.567.000,00

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
32	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	285.295.000,00	126.510.000,00
33	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	634.731.000,00	634.731.000,00
34	Dinas Peternakan Aceh	84.250.000,00	84.250.000,00
35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	8.830.001,00	8.830.001,00
36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	183.015.000,00	183.015.000,00
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	55.449.000,00	55.449.000,00
38	Inspektorat Aceh	21.000.000,00	21.000.000,00
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	1.109.935.000,00	1.109.935.000,00
40	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	5.651.857.000,00	1.520.038.000,00
41	Badan Kepegawaian Aceh	406.301.113,00	248.099.763,00
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	103.580.000,00	261.781.350,00
43	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	60.500.000,00	60.500.000,00
44	Sekretariat Daerah Aceh	860.258.700,00	844.308.700,00
45	Sekretariat DPRD	273.281.000,00	254.281.000,00
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	59.310.000,00	59.310.000,00
Kajian			
1	Dinas Perhubungan Aceh	268.400.000,00	7.636.944.000,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandian Aceh	674.660.000,00	674.660.000,00
3	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	-	408.399.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	8.308.711.965,00
Karya Seni			
1	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	730.873.500,00	730.873.500,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Sandian Aceh	57.650.000,00	57.650.000,00
Jumlah		30.168.539.283,00	42.503.254.448,00

5.3.5.7. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo dari Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019.	(26.280.429.623,50)	(26.108.635.680,71)

Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 5.99. Amortisasi Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya			
1	Dinas Pendidikan Aceh	(1.210.613.310,00)	(1.584.806.100,00)
2	Dinas Kesehatan Aceh	(519.363.000,00)	(405.623.000,00)
3	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	(2.872.483.302,00)	(1.984.148.263,50)
4	BLUD Rumah Sakit Jiwa	(1.373.634.725,00)	(1.157.867.293,75)
5	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	(306.801.183,75)	(268.018.872,50)
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	-	(98.945.000,00)
7	Dinas Pengairan Aceh	(57.052.600,00)	(32.275.100,00)
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	(76.500.000,00)	(70.250.000,00)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
		(Rp)	(Rp)
9	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	(4.181.388,75)	(2.787.592,50)
10	Dinas Sosial Aceh	(199.555.000,00)	(187.130.000,00)
11	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	(25.850.000,00)	(25.850.000,00)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	(47.480.000,00)	(47.480.000,00)
13	Dinas Pangan Aceh	(79.375.000,00)	(57.250.000,00)
14	Dinas Pertanahan Aceh	(30.662.500,00)	(15.331.250,00)
15	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	(579.769.900,00)	(534.507.400,00)
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	(59.705.000,00)	(59.705.000,00)
17	Dinas Perhubungan Aceh	(4.792.093.450,00)	(4.994.404.225,00)
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	(2.772.174.700,00)	(2.760.212.200,00)
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	(38.280.000,00)	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	(415.915.625,00)	(411.765.625,00)
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	(227.918.750,00)	(173.087.500,00)
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	(4.980.000,00)	(4.980.000,00)
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	(356.435.250,00)	(324.026.500,00)
24	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	(188.970.500,00)	(152.933.250,00)
25	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	(48.480.000,00)	(48.480.000,00)
26	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	(172.535.000,00)	(80.621.250,00)
27	Sekretariat Majelis Adat Aceh	(44.500.000,00)	(44.500.000,00)
28	Dinas Syariat Islam Aceh	(39.160.000,00)	(39.160.000,00)
29	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	(146.800.000,00)	(146.800.000,00)
30	Sekretariat Baitul Mal Aceh	(218.800.000,00)	(190.275.000,00)
31	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	(98.400.250,00)	(61.008.500,00)
32	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	(127.926.250,00)	(126.510.000,00)
33	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	(634.731.000,00)	(634.731.000,00)
34	Dinas Peternakan Aceh	(75.562.500,00)	(66.875.000,00)
35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	(8.830.001,00)	(8.830.001,00)
36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	(170.992.500,00)	(124.338.750,00)
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	(55.449.000,00)	(55.449.000,00)
38	Inspektorat Aceh	(21.000.000,00)	(21.000.000,00)
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	(1.091.872.500,00)	(5.868.427.394,46)
40	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	(5.391.802.125,00)	(1.420.538.000,00)
41	Badan Kepegawaian Aceh	(406.301.113,00)	(220.757.888,00)
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	(92.635.000,00)	(227.568.125,00)
43	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	(60.500.000,00)	(60.500.000,00)
44	Sekretariat Daerah Aceh	(801.766.200,00)	(752.238.700,00)
45	Sekretariat DPRA	(273.281.000,00)	(252.293.500,00)
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	(59.310.000,00)	(59.310.000,00)
Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise			
1	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	-	(245.039.400,00)
Jumlah		(26.280.429.623,50)	(26.108.635.680,71)

Sehingga nilai Aset Tak Berwujud Netto sebesar Rp4.116.809.659,50 yang diperoleh dari nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp30.397.239.283,00 dikurangi nilai Amortisasi sebesar (Rp26.280.429.623,50). Rincian Aset Tak Berwujud dan Amortisasi dapat dilihat pada *Lampiran 14*.

5.3.5.8. Aset Lain-lain

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo dari Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019.	4.167.731.657.253,69	4.336.972.372.727,68

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.167.731.657.253,69, yaitu sebagai berikut:

1. Aset tetap lainnya yang direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang tidak digunakan langsung oleh Pemerintah Aceh karena masih dalam penguasaan pihak lain serta menunggu proses pemindahtanganan dengan rincian sebagai berikut:
2. Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.391.175.039.842,98 dengan nilai perolehan sebesar Rp2.595.656.213.568,00 terdiri dari:

Tabel 5.100. Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional

No	SKPA	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Dinas Kesehatan Aceh	729.798.000,00	(729.798.000,00)	-
2	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	1.161.098.000,00	(492.075.333,34)	669.022.666,66
3	Dinas Pengairan Aceh	324.367.121.509,00	(158.430.110.239,27)	165.937.011.269,73
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	90.169.654.279,00	(17.415.970.639,50)	72.753.683.639,50
5	Dinas Pangan Aceh	6.417.241.902,00	(4.509.293.782,00)	1.907.948.120,00
6	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	3.843.776.100,00	(3.843.776.100,00)	-
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	12.213.811.500,00	(2.232.013.340,00)	9.981.798.160,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	1.443.703.000,00	(1.443.703.000,00)	-
9	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	41.540.977.000,00	-	41.540.977.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	10.966.380.000,00	-	10.966.380.000,00
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	776.460.000,00	(413.521.646,33)	362.938.353,67
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1.526.954.000,00	(41.289.280,00)	1.485.664.720,00
13	PPKA	2.107.516.900.938,00	(9.607.315.974,58)	2.097.909.584.963,42
14	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	8.533.694.700,00	(4.579.866.390,00)	3.953.828.310,00
15	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1.237.400.000,00	(742.440.000,00)	494.960.000,00
Jumlah		2.612.444.970.928,00	(204.481.173.725,02)	2.407.963.797.202,98

Dari Total Aset Lain-lain sebesar Rp2.107.516.900.938,00 pada PPKA diantaranya merupakan Aset Lain-lain pada KIP, BPKS dan BPKapet dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101. Aset Tetap pada KIP, BPKS dan BPKapet

NO	SKPA	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan,, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	KIP	717.800.000,00	3.818.367.160,00	2.120.895.000,00	-	441.705.000,00	7.098.767.160,00
2	BPKS	-	3.316.940.000,00	5.526.431.000,00	74.445.000,00	-	8.917.816.000,00
3	BPKapet	-	757.357.000,00	-	14.817.200,00	-	772.174.200,00
Jumlah		717.800.000,00	7.892.664.160,00	7.647.326.000,00	89.262.200,00	441.705.000,00	16.788.757.360,00

3. Aset Rusak Berat per 31 Desember 2020 sebesar Rp419.634.085.663,08 merupakan aset tetap yang telah dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah yang telah di reklasifikasi ke kelompok Aset Lainnya dengan jenis Aset Lain-lain dikarenakan rusak berat, rincian dapat dilihat pada *Lampiran 15*.
4. Aset Penelusuran Hilang per 31 Desember 2020 sebesar Rp130.011.712.821,53, rincian dapat dilihat pada *Lampiran 16*.
5. Aset Hibah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.210.122.061.566,10 dari hasil verifikasi bidang penatausahaan aset terhadap 19 (sembilan belas) Satuan Kerja Perangkat Aceh dengan nilai perolehan sebesar Rp2.421.021.071.919,09 Rincian dapat dilihat pada *Lampiran 17*.

5.3.6. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu dan muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban dapat diklasifikasikan kedalam:

- a. Kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan, seperti utang transfer pemerintah, bunga pinjaman, bagian lancar utang jangka panjang dan utang jangka pendek lainnya.
- b. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.3.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo dari Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019.	3.037.487.998.856,06	2.721.184.402.566,07

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.037.487.998.856,06 terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp337.725.258,00 terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp310.839.653,00 berupa potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara oleh bendahara BOS.
 - b. Dinas Syariat Islam Aceh sebesar Rp26.885.605,00 berupa pajak zakat dan infaq yang belum disetor.

2. Pendapatan diterima dimuka TA 2020 sebesar Rp2.595.633.905.910,65 mengalami kenaikan sebesar Rp342.826.935.627,58 atau 15,22% dari TA 2019 sebesar Rp2.252.806.970.283,07.

Tabel 5.102. Pendapatan Diterima Di Muka

No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.904.109,59	3.866.120,22
2	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk	398.087,43	949.840,72
3	Dinas Pertanahan Aceh	2.047.506,85	-
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	10.158.904,11	10.180.327,87
5	Sekretariat Daerah	24.763.149,18	24.838.797,81
6	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	16.151.456,72	31.190.692,29
7	Sekretariat DPRA	5.753.923,36	10.382.354,01
8	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	11.726.027,40	-
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	4.541.096,00	-
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	2.959.809,26	3.743.169,40
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	843.023.892,15	913.559.995,07
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	1.454.794,52	1.475.409,84
13	Dinas Perhubungan Aceh	1.440.875.513,00	3.764.049.247,61
14	PPKA :		
	- Sisa Otsus s.d 2019	1.382.904.617.657,00	2.234.873.962.535,89
	- Otsus 2020	1.178.724.353.898,23	-
	- Sisa Dana DAK Fisik	15.084.326.427,38	10.345.527.366,38
	Sisa Dana DAK Non Fisik	15.184.893.503,36	-
	- 'Bantuan Operasional Kesehatan	13.371.606.357,00	1.907.105.295,00
	- 'Peningkatan kapasitas koperasi usaha kecil dan menengah	1.353.278.021,00	190.427.884,00
	- Pelayanan Administrasi Kependudukan	16.455.932,00	-
	- DAK Non Fisik Bidang Pariwisata	443.553.193,36	-
	Jumlah I	2.594.265.949.755,54	2.252.081.259.036,11
	Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya BLUD		
1	Rumah Sakit Umum DR. Zainoel Abidin	1.323.515.059,22	683.572.604,58
2	Rumah Sakit Jiwa	-	6.205.479,00
3	Rumah Sakit Ibu dan Anak	44.441.095,89	35.933.163,38
	Jumlah II	1.367.956.155,11	725.711.246,96
	Jumlah I+II	2.595.633.905.910,65	2.252.806.970.283,07

Rincian Pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada *Lampiran 18*.

3. Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp435.662.487.189,41, terdiri dari:

Tabel 5.103. Rincian Utang Belanja

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Utang Belanja Pegawai	196.628.061,00	940.504.752,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	124.692.711.111,00	132.503.434.759,00
3	Utang Belanja Modal	63.063.174.747,41	2.550.839.000,00
4	Utang Belanja Hibah	179.870.000	-
5	Utang Belanja Bantuan Sosial	399.848.950,00	399.848.950,00
6	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak	114.932.144.968,00	207.528.254.229,00

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
7	Utang transfer Dana Otonomi Khusus	111.255.076.970,00	111.255.076.970,00
8	Utang Dana Sertifikasi	20.943.032.382,00	7.345.593.125,00
	Jumlah	435.662.487.189,41	462.523.551.785,00

Rincian Utang Belanja dapat dilihat pada *Lampiran 19*.

a. Utang Belanja Pegawai sebesar Rp196.628.061,00 yang terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp 169.717.459,00 berupa utang gaji atas nama dokter A. Halim yang tidak dibayarkan akibat tindakan tidak disiplin PNS mulai 2015 s.d 2018
- 2) Utang Belanja Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh sebesar Rp610.602,00 berupa Utang Rapel Pengabdian Pegawai Pensiun an. Cut Sunaryana, Rusyam dan Afifullah.
- 3) Utang Belanja Pegawai pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebesar Rp6.700.000,00 berupa Utang Tunjangan Iuran JKM Anggota DPRA TA 2020.

b. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp124.692.711.111,00 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Utang Belanja Jasa	9.178.719.402,00	220.377.855,00
2	Utang Belanja Pemeliharaan	1.012.764.386,00	463.867.235,00
3	Utang Belanja Barang Hibah	229.635.450,00	-
4	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	109.975.636.218,00	127.740.862.278,00
5	Utang Belanja Telepon	271.536.226,00	240.123.987,00
6	Utang Belanja Air	517.235.324,00	445.653.433,00
7	Utang Belanja Listrik	3.256.414.344,00	3.202.778.564,00
8	Utang Belanja Kawat/Internet	153.201.287,00	189.771.407,00
9	Utang Sewa Gedung Kantor/Tempat	97.568.474,00	-
	Jumlah	124.692.711.111,00	132.503.434.759,00

c. Utang Belanja Modal sebesar Rp63.063.174.747,41 terdiri dari:

- 1) Dinas Perhubungan Aceh sebesar Rp4.562.872.499,00 merupakan kegiatan pembangunan Kapal Ro-Ro untuk Lintasan Pantai Barat Simeulue.
- 2) Dinas Kesehatan Aceh sebesar Rp2.777.681.218,00 berupa utang Pembangunan Gedung Asrama dan Kelas baru Badan Pelayanan Kesehatan Aceh.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh sebesar Rp23.962.943.835,00 berupa utang atas 8 (delapan) paket pekerjaan TA 2018 yang belum dilakukan pembayaran dan telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2021

- 4) Dinas Pengairan Aceh sebesar Rp27.845.889.902,41 berupa incraht dari Mahkamah Agung atas 12 (dua belas) paket pekerjaan tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pembayaran dan telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2021.
- d. Utang Belanja Hibah sebesar Rp179.870.000 pada Dinas Pemuda dan Olahraga berupa pembangunan lapangan voli yang akan diserahkan ke Kabupaten Aceh Besar.
- e. Utang Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp399.848.950,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh berupa Pembangunan Rumah Layak Huni Aceh Tengah pada program Pengembangan perumahan/pengembangan rumah sehat sederhana.
- f. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak yang sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 973/205/2021 2021 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan bulan Oktober s.d Desember 2020 sebesar Rp114.932.144.968,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 20**.
- g. Utang transfer Dana Otonomi Khusus di PPKA sebesar Rp111.255.076.970,00.
- h. Utang Dana Sertifikasi sebesar Rp20.943.032.382,00. terdiri dari:

Tabel 5.104. Rincian Utang Dana Sertifikasi

No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dana Tunjangan Profesi Guru	17.581.892.740,00	-
2	Dana Tambahan Penghasilan guru	1.090.889.500,00	7.345.593.125,00
3	Dana Tunjangan Khusus Guru	2.270.250.142,00	-
Jumlah		20.943.032.382,00	7.345.593.125,00

4. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.853.880.498,00 terdiri dari
- a. Utang jangka pendek lainnya berdasarkan SKTJM kekurangan kas atas GU Nihil TA 2015 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang belum dibayar kepada penerima sebesar Rp210.480.520,00 dan baru dibayar pada tahun 2016 sebesar Rp8.770.022,00, sehingga saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp201.710.498,00.
- b. Utang Dana BOS di PPKA sebesar Rp5.652.170.000,00.

5.3.6.2. Kewajiban Jangka Panjang

Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Merupakan saldo dari Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019.	-	23.833.926.048,22

Kewajiban Jangka Panjang merupakan Utang Dalam Negeri pada Pemerintah Pusat yang berasal dari hutang Rekening Dana Investasi. Pada Laporan Keuangan Tahun 2020, hutang dimaksud tidak lagi disajikan dalam neraca Pemerintah Aceh karena hutang tersebut sudah ada persetujuan Presiden atas permohonan penghapusan piutang negara secara bersyarat.

Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Sistem Manajemen Investasi melalui surat Nomor; S-102/PB.4/2020 tanggal 27 Mei 2020 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKBUN Tahun 2019 BA 999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman, yang intinya menyatakan Pemerintah Pusat telah melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI tersebut dengan menghapusbukukan piutang kepada 1 (satu) PDAM dan 10 Pemda (Pemerintah Aceh termasuk salah satunya) dari neraca Pemerintah Pusat dan mencantumkannya dalam Calk bahwa piutang bersyarat yang telah dihapus namun masih memiliki hak tagih kepada negara hingga diterbitkannya Penghapusan Piutang Mutlak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau sesuai kewenangan dalam PP Nomor 14 Tahun 2005.

5.3.7. Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Aceh merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Awal sebesar Rp25.709.483.208.840,60, Surplus/Defisit-LO sebesar Rp1.074.541.704.541,89, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar minus sebesar Rp472.324.115.084,73, sehingga jumlah ekuitas akhir sebesar Rp27.256.349.028.467,20. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

5.4. Penjelasan atas Akun dalam Laporan Operasional (LO)

5.4.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO TA 2020 sebesar Rp14.187.497.367.536,20 dan TA 2019 sebesar Rp19.126.788.168.742,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105. Kenaikan/Penurunan Pendapatan-LO

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Aceh-LO	2.537.786.848.666,90	2.811.004.644.992,33	(273.217.796.325,43)	(9,72)
2.	Pendapatan Transfer-LO	11.457.448.444.405,30	13.455.359.350.812,80	(1.997.910.906.407,55)	(14,85)
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah-LO	192.262.074.464,00	2.860.424.172.937,69	(2.668.162.098.473,69)	(93,28)
Jumlah		14.187.497.367.536,20	19.126.788.168.742,92	(4.939.290.801.206,67)	(25,82)

5.4.1.1. Pendapatan Asli Aceh-LO

Pendapatan Asli Aceh-LO TA 2020 sebesar Rp2.537.786.848.666,90 dan TA 2019 sebesar Rp2.811.004.644.992,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.106. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Asli Aceh-LO

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Aceh	1.477.180.062.811,65	1.410.261.350.614,60	66.918.712.197,05	4,75
2	Pendapatan Retribusi Aceh	8.551.442.364,80	17.090.985.530,27	(8.539.543.165,47)	(49,97)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	249.290.944.300,35	313.813.537.045,26	(64.522.592.744,91)	(20,56)
4	Lain-lain PAA yang Sah	802.764.399.190,10	1.069.838.771.802,20	(267.074.372.612,10)	(24,96)
Jumlah Pendapatan Asli Aceh		2.537.786.848.666,90	2.811.004.644.992,33	(273.217.796.325,43)	(9,72)

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Aceh – LO

Pendapatan Pajak Aceh – LO TA 2020 sebesar Rp1.477.180.062.811,65 dan TA 2019 sebesar Rp1.410.261.350.614,60 terdiri dari:

Tabel 5.107. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Aceh-LO

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	484.694.888.039,50	445.991.339.667,00	38.703.548.372,50	8,68
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	290.706.133.250,00	326.820.065.362,00	(36.113.932.112,00)	(11,05)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	318.492.714.032,00	335.184.025.046,80	(16.691.311.014,80)	(4,98)
4	Pajak Air Permukaan - LO	1.919.006.301,15	1.665.371.507,80	253.634.793,35	15,23
5	Pajak Rokok - LO	381.367.321.189,00	300.600.549.031,00	80.766.772.158,00	26,87
Jumlah		1.477.180.062.811,65	1.410.261.350.614,60	66.918.712.197,05	4,75

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Aceh – LO

Pendapatan Retribusi Aceh – LO TA 2020 sebesar Rp8.551.442.364,80 dan TA 2019 sebesar Rp17.090.985.530,27 terdiri dari :

Tabel 5.108. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Aceh-LO

No	Rincian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	930.267.000,00	986.256.000,00	(55.989.000,00)	(5,68)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	1.130.393.030,00	876.307.380	254.085.650,00	29,00
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO	523.000.000,00	352.000.000	171.000.000,00	48,58
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	-	5.064.570.000	(5.064.570.000,00)	(100,00)
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	1.849.713.334,80	2.651.733.680,27	(802.020.345,47)	(30,25)
6	Retribusi Terminal - LO	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	32.000,00	889.000,00	(857.000,00)	(96,40)
8	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	466.813.000,00	1.424.311.500,00	(957.498.500,00)	(67,23)
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	225.650.000,00	377.504.000,00	(151.854.000,00)	(40,23)
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	285.792.000,00	1.557.020.000,00	(1.271.228.000,00)	(81,64)
11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	2.478.979.000,00	3.181.207.970,00	(702.228.970,00)	(22,07)
12	Retribusi Izin Trayek - LO	45.828.000,00	42.461.000,00	3.367.000,00	7,93
13	Retribusi Izin Perikanan - LO	612.475.000,00	576.725.000,00	35.750.000,00	6,20
Jumlah		8.551.442.364,80	17.090.985.530,27	(8.539.543.165,47)	(49,97)

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO TA 2020 sebesar Rp249.290.944.300,35 mengalami penurunan sebesar Rp64.522.592.744,91 atau 20,56% dari TA 2019 sebesar Rp313.813.537.045,26.

Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Aceh (Deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdiri dari:

Tabel 5.109. Setoran Deviden TA 2020

No	Uraian	Tahun 2020
1	Setoran Deviden Tahun 2020 Bank Aceh Syariah	158.284.954.748,00
2	Setoran Dana Pembangunan Bank Aceh Syariah	23.415.844.288,00
3	Kenaikan Nilai Investasi pada Bank Aceh Syariah	67.590.145.264,35
Jumlah		249.290.944.300,35

5.4.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah - LO

Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah - LO TA 2020 sebesar Rp802.764.399.190,10 dan TA 2019 sebesar Rp1.069.838.771.802,20 terdiri dari:

Tabel 5.110. Kenaikan/Penurunan Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah – LO

No	Rincian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penerimaan Jasa Giro - LO	24.292.087.607,39	34.502.985.882,82	(10.210.898.275)	(29,59)
2	Pendapatan Bunga - LO	137.133.682.120,45	135.856.302.610,06	1.277.379.510,39	0,94
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	518.570.811,47	852.486.989,09	(333.916.177,62)	(39,17)
4	Pendapatan Denda Pajak - LO	7.417.052.203,24	13.946.793.880,20	(6.529.741.676,96)	(46,82)
5	Pendapatan dari Pengembalian -LO	12.696.069.370,74	51.801.294.134,11	(39.105.224.763,37)	(75,49)
6	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	9.452.813.818,35	13.767.906.632,58	(4.315.092.814,23)	(31,34)
7	Pendapatan Zakat - LO	82.538.693.511,08	248.893.222.882,63	(166.354.529.371,55)	(66,84)
8	Pendapatan BLUD - LO	528.039.163.358,38	570.192.778.790,71	(42.153.615.432,33)	(7,39)
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	676.266.389,00	25.000.000,00	651.266.389,00	2.605,07
Jumlah		802.764.399.190,10	1.069.838.771.802,20	(267.074.372.612,10)	(24,96)

5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer - LO TA 2020 sebesar Rp11.457.448.444.405,30 dan TA 2019 sebesar Rp13.455.359.350.812,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.111. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	3.854.479.591.348,64	4.369.869.632.652,74	(515.390.041.304,10)	(11,79)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	7.602.968.853.056,66	9.085.489.718.160,11	(1.482.520.865.103,45)	(16,32)
Jumlah Pendapatan Transfer		11.457.448.444.405,30	13.455.359.350.812,85	(1.997.910.906.407,55)	(14,85)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO TA 2020 sebesar Rp3.854.479.591.348,64 dan TA 2019 sebesar Rp4.369.869.632.652,74 dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak– LO

Dana Bagi Hasil Pajak– LO TA 2020 sebesar Rp127.272.935.167,00 dan TA 2019 sebesar Rp136.084.736.864,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak - LO sebagai berikut:

Tabel 5.112. Kenaikan/Penurunan Dana Bagi Hasil Pajak-LO

No	Rincian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO	42.169.041.997,00	54.049.090.917,00	(11.880.048.920,00)	(21,98)

No	Rincian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO	2.111.495.600,00	5.396.199.710,00	(3.284.704.110,00)	(60,87)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO	236.774.264,00	212.454.450,00	24.319.814,00	11,45
4	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	75.568.737.953,00	68.543.707.840,00	7.025.030.113,00	10,25
5	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	5.299.261.920,00	7.883.283.947,00	(2.584.022.027,00)	(32,78)
6	Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO	1.887.623.433,00	-	1.887.623.433,00	-
Jumlah		127.272.935.167,00	136.084.736.864,00	(8.811.801.697,00)	(6,48)

5.4.1.2.2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam – LO TA 2020 sebesar Rp39.867.057.258,00 dan TA 2019 sebesar Rp102.954.069.723,00. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.113. Kenaikan/Penurunan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO

No	Rincian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	63.472.400,00	6.952.875.739	(6.889.403.339,00)	(99,09)
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO	574.359.133,00	81.982.477,00	492.376.656,00	600,59
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	7.322.401.024,00	2.035.321.234,00	5.287.079.790,00	259,77
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	12.854.831.090,00	71.019.409.812,00	(58.164.578.722,00)	(81,90)
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	18.752.796.558,00	22.841.131.961,00	(4.088.335.403,00)	(17,90)
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	299.197.053,00	23.348.500,00	275.848.553,00	1.181,44
Jumlah		39.867.057.258,00	102.954.069.723,00	(63.087.012.465,00)	(61,28)

5.4.1.2.3. Dana Alokasi Umum-LO

Dana Alokasi Umum-LO TA 2020 sebesar Rp1.956.492.796.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp365.773.710.000,00 atau 15,75% dari TA 2019 sebesar Rp2.322.266.506.000,00.

5.4.1.2.4. Dana Alokasi Khusus-LO

Dana Alokasi Khusus-LO TA 2020 sebesar Rp1.730.846.802.923,64 dan TA 2019 sebesar Rp1.808.564.320.065,74. Rincian Dana Alokasi Khusus-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.114. Kenaikan/Penurunan Dana Alokasi Khusus-LO

No	Rincian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) - LO					
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	-	60.470.899.300,00	(60.470.899.300,00)	(100,00)
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO	-	4.971.826.000,00	(4.971.826.000,00)	(100,00)
3	DAK Bidang Kehutanan - LO	-	6.100.076.234,29	(6.100.076.234,29)	(100,00)
4	DAK Bidang Kesehatan - LO	14.714.991.127,00	74.994.869.032,79	(60.279.877.905,79)	(80,38)
5	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	-	6.153.410.800,00	(6.153.410.800,00)	(100,00)
7	DAK Bidang Pertanian - LO	1.019.669.000,00	12.302.429.821,66	(11.282.760.821,66)	(91,71)
8	DAK Bidang Pendidikan	232.458.387.594,00	208.800.595.163,00	23.657.792.431,00	11,33
9	DAK Bidang Pariwisata	-	275.814.000,00	(275.814.000,00)	(100,00)
Jumlah		248.193.047.721,00	374.069.920.351,74	(125.876.872.630,74)	(33,65)
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) - LO					
1	BOS Satuan Pendidikan Provinsi	1.101.261.800.000,00	1.058.984.060.000,00	42.277.740.000,00	3,99
2	Tunjangan Profesi Guru PNSD	353.087.276.260,00	352.458.253.301,00	629.022.959,00	0,18
3	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	9.061.110.625,00	2.991.600.000,00	6.069.510.625,00	202,89
4	Tunjangan Khusus Guru	8.697.690.858,00	6.106.819.000,00	2.590.871.858,00	42,43
5	Bantuan Operasional Kesehatan - LO	5.438.482.483,00	2.540.655.480,00	2.897.827.003,00	114,06
6	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	946.721.979,00	4.530.436.116,00	(3.583.714.137,00)	(79,10)
7	Pelayanan Administrasi Kependudukan	198.191.962,00	1.955.575.817,00	(1.757.383.855,00)	(89,87)
8	DAK Non Fisik Bidang Pariwisata - LO	3.962.481.035,64	4.927.000.000,00	(964.518.964,36)	(19,58)
Jumlah		1.482.653.755.202,64	1.434.494.399.714,00	48.159.355.488,64	3,36
Total		1.730.846.802.923,64	1.808.564.320.065,74	(77.717.517.142,10)	(4,30)

5.4.1.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO TA 2020 sebesar Rp7.602.968.853.056,66 dan TA 2019 sebesar Rp9.085.489.718.160,11 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.115. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO

No	Rincian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Dana Otonomi Khusus - LO	7.228.523.338.980,66	8.629.976.025.131,11	(1.401.452.686.150,45)	(16,24)
2	Dana Penyesuaian - LO	374.445.514.076,00	455.513.693.029,00	(81.068.178.953,00)	(17,80)
Jumlah		7.602.968.853.056,66	9.085.489.718.160,11	(1.482.520.865.103,45)	(16,32)

5.4.1.4. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO TA 2020 sebesar Rp192.262.074.464,00 dan TA 2019 sebesar Rp2.860.424.172.937,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116. Kenaikan/Penurunan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah - LO	181.871.439.464,00	2.860.424.172.937,69	(2.678.552.733.473,69)	(93,64)
2	Pendapatan Lainnya - LO	10.390.635.000,00	-	10.390.635.000,00	-
Jumlah		192.262.074.464,00	2.860.424.172.937,69	(2.668.162.098.473,69)	(93,28)

5.4.1.4.1. Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah - LO TA 2020 sebesar Rp181.871.439.464,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.678.552.733.473,69 atau 93,64% dari TA 2019 sebesar Rp2.860.424.172.937,69 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117. Kenaikan/Penurunan Pendapatan Hibah - LO

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	173.186.752.373,00	7.346.357.487,00	165.840.394.886,00	2.257,45
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	5.254.405.208,00	2.852.223.986.521,69	(2.846.969.581.313,69)	(99,82)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	2.135.129.500,00	79.195.000,00	2.055.934.500,00	2.596,04
4	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	1.295.152.383,00	774.633.929,00	520.518.454,00	67,20
Jumlah		181.871.439.464,00	2.860.424.172.937,69	(2.678.552.733.473,69)	(93,64)

5.4.1.4.2. Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya - LO TA 2020 sebesar Rp10.390.635.000,00 berupa Dana Insentif Daerah pada PPKA.

5.4.2. Beban Operasi - LO

Beban Operasi TA 2020 mencapai Rp12.980.594.096.287,58 dan TA 2019 sebesar Rp14.084.312.496.816,94 Rincian beban dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.118. Kenaikan/Penurunan Beban Operasi-LO

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Pegawai	2.437.166.511.656,00	2.399.935.582.204,00	37.230.929.452,00	1,55
2	Beban Persediaan	818.172.618.627,15	794.003.319.436,65	24.169.299.190,50	3,04
3	Beban Jasa	2.837.727.089.270,71	3.250.298.693.210,38	(412.571.603.939,67)	(12,69)
4	Beban Pemeliharaan	115.090.923.976,51	108.669.115.138,81	6.421.808.837,70	5,91

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan /Penurunan	%
5	Beban Perjalanan Dinas	165.634.702.617,00	354.565.581.552,00	(188.930.878.935,00)	(53,29)
6	Beban Hibah	1.917.738.076.850,38	2.693.334.493.805,10	(775.596.416.954,72)	(28,80)
7	Beban Bantuan Sosial	17.921.460.000,00	6.961.815.500,00	10.959.644.500,00	157,43
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.321.286.298.304,52	1.170.378.198.548,69	150.908.099.755,83	12,89
9	Beban Penyisihan Piutang	741.186.030,09	722.960.705,36	18.225.324,73	2,52
10	Beban Lain-lain	68.912.735.971,12	39.492.705.425,03	29.420.030.546,09	74,49
11	Beban Transfer	3.280.202.492.984,00	3.265.950.031.290,92	14.252.461.693,08	0,44
Jumlah Beban Operasi		12.980.594.096.287,58	14.084.312.496.816,94	(1.103.718.400.529,46)	(7,84)

5.4.2.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai - LO merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRA serta gaji tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur. Beban Pegawai - LO TA 2020 mencapai Rp2.437.166.511.656,00 dan TA 2019 sebesar Rp2.399.935.582.204,00.

Tabel 5.119. Kenaikan/Penurunan Beban Pegawai-LO

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1.849.323.597.586,00	1.851.239.674.180,00	(1.916.076.594)	(0,10)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	513.687.671.221,00	484.465.353.032,00	29.222.318.189,00	6,03
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	20.571.952.638,00	18.423.972.000,00	2.147.980.638,00	11,66
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	29.934.335.769,00	31.254.283.666,00	(1.319.947.897,00)	(4,22)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	38.030.000,00	388.540.000,00	(350.510.000,00)	(90,21)
6	Uang Lembur - LO	9.791.655.916,00	10.606.373.076,00	(814.717.160,00)	(7,68)
7	Beban Pegawai BLUD	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-
8	Beban Pegawai Dana BOS	13.643.968.526,00	3.400.586.250,00	10.243.382.276,00	301,22
9	Beban Honorarium Pengelolaan Dana BOS.	172.800.000,00	156.800.000,00	16.000.000,00	10,20
Jumlah		2.437.166.511.656,00	2.399.935.582.204,00	37.230.929.452,00	1,55

Dari nilai beban pegawai tersebut, diantaranya terdapat beban pegawai dari Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Covid 19 sebesar Rp4.188.000.000,00 berupa Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

5.4.2.2. Beban Persediaan - LO

Beban Persediaan adalah pengeluaran Pemerintah Aceh atas penggunaan barang-barang persediaan dalam masa satu TA operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Persediaan TA 2020 mencapai Rp818.172.618.627,15 dan TA 2019 sebesar Rp794.003.319.436,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.120. Kenaikan/Penurunan Beban Persediaan-LO

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
A.	Beban Bahan Pakai Habis	271.267.985.924,88	239.023.095.936,05	32.244.889.988,83	13,49
1	Beban Persediaan alat tulis kantor	48.361.497.441,86	56.033.317.650,26	(7.671.820.208,40)	(13,69)
2	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender	35.804.000,00	41.150.000,00	(5.346.000,00)	(12,99)
3	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.187.144.341,29	9.755.427.425,00	431.716.916,29	4,43
4	Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya	1.802.807.264,00	1.667.876.187,00	134.931.077,00	8,09
5	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	17.919.255.368,50	13.089.831.340,00	4.829.424.028,50	36,89
6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	2.886.205.815,00	5.853.654.239,00	(2.967.448.424,00)	(50,69)
7	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	512.728.593,00	428.195.103,00	84.533.490,00	19,74
8	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	498.515.200,00	990.431.600,00	(491.916.400,00)	(49,67)
9	Beban Persediaan perlengkapan/bahan keperluan pasien	189.064.027.901,23	151.163.212.391,79	37.900.815.509,44	25,07
B.	Beban Persediaan Bahan/ Material	546.904.632.702,27	554.980.223.500,60	(8.075.590.798,33)	(1,46)
1	Beban Persediaan bahan baku bangunan	16.767.071.396,33	7.779.444.472,00	8.987.626.924,33	115,53
2	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman	81.007.752.041,00	46.466.708.538,00	34.541.043.503,00	74,34
3	Beban Persediaan bibit ternak	42.444.172.768,00	6.665.685.644,00	35.778.487.124,00	536,76
4	Beban Persediaan bahan obat-obatan	124.364.942.899,29	125.762.287.200,76	(1.397.344.301,47)	(1,11)
5	Beban Persediaan bahan kimia	8.025.716.080,00	2.421.925.515,00	5.603.790.565,00	231,38
6	Beban Persediaan Makanan Pokok	21.566.796.413,00	22.857.250.699,00	(1.290.454.286,00)	(5,65)
7	Beban Persediaan Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	6.077.317.120,00	19.277.789.766,00	(13.200.472.646,00)	(68,48)
8	Beban Persediaan bahan logistik rumah tangga	51.020.817.610,02	30.079.731.367,99	20.941.086.242,03	69,62
9	Beban Persediaan cinderamata	2.913.048.093,00	7.906.524.062,00	(4.993.475.969,00)	(63,16)
10	Beban Persediaan dekorasi	3.606.142.241,00	8.760.089.377,00	(5.153.947.136,00)	(58,83)
11	Beban Persediaan dokumentasi	5.022.852.212,00	5.828.832.184,00	(805.979.972,00)	(13,83)
12	Beban Persediaan bahan arsip	370.208.900,00	1.019.169.500,00	(648.960.600,00)	(63,68)
13	Beban Persediaan olahraga	9.029.481.372,00	21.655.434.450,00	(12.625.953.078,00)	(58,30)
14	Beban Persediaan Specimen	225.506.024,00	20.446.500,00	205.059.524,00	1.002,91
15	Beban Persediaan Inseminasi Buatan	-	567.183.000,00	(567.183.000,00)	(100,00)
16	Beban Persediaan bahan pakan ternak	16.757.919.077,00	8.452.477.330,00	8.305.441.747,00	98,26
17	Beban Persediaan Publikasi	5.438.014.496,50	11.753.153.898,50	(6.315.139.402,00)	(53,73)
18	Beban Persediaan bahan alat-alat kesehatan	18.799.301.893,00	19.809.072.736,27	(1.009.770.843,27)	(5,10)
19	Beban Persediaan bahan percontohan	29.415.138.503,00	31.855.768.726,00	(2.440.630.223,00)	(7,66)
20	Beban Persediaan bahan pangan	741.834.255,00	21.735.417.576,75	(20.993.583.321,75)	(96,59)
21	Beban Persediaan bahan kelengkapan lapangan	80.781.049.682,13	77.457.466.545,51	3.323.583.136,62	4,29
22	Beban Persediaan bahan kelengkapan sarana peribadatan	130.130.050,00	539.689.500,00	(409.559.450,00)	(75,89)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
23	Beban Persediaan bahan klinik	-	262.783.122,00	(262.783.122,00)	(100,00)
24	Beban Persediaan Bahan Laboratorium	22.399.419.576,00	2.399.797.515,00	19.999.622.061,00	833,39
25	Beban Persediaan Barang yang diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	-	73.646.094.274,82	(73.646.094.274,82)	(100,00)
Total Beban Persediaan		818.172.618.627,15	794.003.319.436,65	24.169.299.190,50	3,04

Dari total Beban Persediaan sebesar Rp818.172.618.627,15 yang menjadi beban persediaan untuk penanganan *Covid 19* dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp35.059.563.416,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.121. Beban Persediaan dari Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Covid 19*

No	Uraian	Tahun 2020
		(Rp)
1	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	11.745.000,00
2	Beban Perlengkapan/Bahan Keperluan Pasien	3.267.784.940,00
3	Beban Persediaan Bahan Alat-Alat Kesehatan	2.984.862.374,00
4	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	81.337.820,00
5	Beban Persediaan Bahan Kelengkapan Lapangan	5.748.885.008,00
6	Beban Persediaan Bahan Laboratorium	12.237.681.400,00
7	Beban Persediaan Bahan Logistik Rumah Tangga	48.889.600,00
8	Beban Persediaan bahan obat-obatan	10.678.377.274,00
Jumlah		35.059.563.416,00

5.4.2.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pengadaan jasa yang digunakan dalam masa satu TA operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Jasa TA 2020 mencapai Rp2.837.727.089.270,71 dan TA 2019 sebesar Rp3.250.298.693.210,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.122. Kenaikan/Penurunan Beban Jasa

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Jasa Kantor	447.335.267.263,72	612.303.852.943,34	(164.968.585.679,62)	(26,94)
2	Beban Premi Asuransi	879.158.283.084,71	781.265.718.043,51	97.892.565.041,20	12,53
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	46.024.474.650,00	43.399.100.097,10	2.625.374.552,90	6,05
4	Beban Cetak dan Penggandaan	44.789.384.453,00	73.657.023.697,00	(28.867.639.244,00)	(39,19)
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	35.815.308.454,30	136.574.718.600,89	(100.759.410.146,59)	(73,78)
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	13.291.690.817,00	20.998.026.681,00	(7.706.335.864,00)	(36,70)
7	Beban Sewa Alat Berat	-	205.946.000,00	(205.946.000,00)	(100,00)
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.165.210.350,00	12.657.223.390,00	(10.492.013.040,00)	(82,89)
9	Beban Makanan dan Minuman	86.571.529.026,00	127.886.688.459,00	(41.315.159.433,00)	(32,31)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan /Penurunan	%
10	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	8.543.157.307,00	9.646.373.790,00	(1.103.216.483,00)	(11,44)
11	Belanja Pakaian Kerja	4.053.786.028,00	4.388.017.000,00	(334.230.972,00)	(7,62)
12	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.160.573.000,00	8.671.456.050,00	(4.510.883.050,00)	(52,02)
13	Belanja Jasa Konsultasi	32.980.480.722,30	52.793.816.155,00	(19.813.335.432,70)	(37,53)
14	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	3.442.097.464,00	3.513.890.039,00	(71.792.575,00)	(2,04)
15	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.765.782.036,00	47.794.975.997,00	(44.029.193.961,00)	(92,12)
16	Beban Honorarium Non Pegawai	39.531.184.277,00	108.637.587.101,00	(69.106.402.824,00)	(63,61)
17	Beban Honorarium PNS	181.700.041.603,50	176.767.723.691,00	4.932.317.912,50	2,79
18	Beban Honorarium Non PNS	550.039.416.654,00	521.398.413.165,87	28.641.003.488,13	5,49
19	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	175.855.447.311,18	241.943.598.549,33	(66.088.151.238,15)	(27,32)
20	Beban Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq	62.792.935.769,00	47.252.969.560,34	15.539.966.208,66	32,89
21	Beban Jasa Pelayanan Medical Check Up	222.239.000,00	107.374.200,00	114.864.800,00	106,98
22	Beban Beasiswa Anak Yatim Piatu (OTSUS)	215.488.800.000,00	218.434.200.000,00	(2.945.400.000,00)	(1,35)
Jumlah		2.837.727.089.270,71	3.250.298.693.210,38	(413.369.513.439,67)	(12,69)

Dari total Beban Jasa sebesar Rp2.837.727.089.270,71 yang menjadi beban jasa untuk penanganan *Covid 19* dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp13.190.058.142,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.123. Beban Jasa dari Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan *Covid 19*

No	Uraian	Tahun 2020
		(Rp)
1	Beban Cetak	765.561.681,00
2	Beban Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan	484.700.000,00
3	Beban Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	341.354.000,00
4	Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.406.165.000,00
5	Beban Jasa Cleaning Service	668.773.385,00
6	Beban Jasa paket/pengiriman	1.090.295.576,00
7	Beban Makan dan Minum Pelatihan	4.614.456.000,00
8	Beban makanan dan minuman rapat	39.165.000,00
9	Beban pakaian kerja lapangan	772.087.500,00
10	Beban Penggandaan	7.500.000,00
Jumlah		13.190.058.142,00

5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk pemeliharaan aset tetap yang digunakan dalam masa satu TA operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Pemeliharaan TA 2020 mencapai Rp115.090.923.976,51 dan TA 2019 sebesar Rp108.669.115.138,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.124. Kenaikan/Penurunan Beban Pemeliharaan

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	4.980.000,00	20.000.000,00	(15.020.000,00)	(75,10)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.184.767.889,00	20.002.015.445,00	6.182.752.444,00	30,91
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62.705.307.319,51	55.413.173.157,20	7.292.134.162,31	13,16
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.874.425.262,00	31.137.433.172,00	(12.263.007.910,00)	(39,38)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.910.256.501,00	600.758.000,00	2.309.498.501,00	384,43
6	Beban Pemeliharaan peralatan gedung kantor	4.411.187.005,00	1.495.735.364,61	2.915.451.640,39	194,92
	Jumlah	115.090.923.976,51	108.669.115.138,81	6.421.808.837,70	5,91

5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah pengeluaran Pemerintah Aceh untuk perjalanan dinas dalam masa satu TA operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Beban Perjalanan Dinas TA 2020 mencapai Rp165.634.702.617,00 dan TA 2019 sebesar Rp354.565.581.552,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.125. Kenaikan/Penurunan Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	127.715.299.923,00	203.923.532.019,00	(76.208.232.096,00)	(37,37)
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	36.647.663.660,00	135.456.583.760,00	(98.808.920.100,00)	(72,95)
3	Beban perjalanan dinas luar negeri	1.271.739.034,00	15.185.465.773,00	(13.913.726.739,00)	(91,63)
	Jumlah	165.634.702.617,00	354.565.581.552,00	(188.930.878.935,00)	(53,29)

Dari total Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp165.634.702.617,00 menjadi Beban Perjalanan Dinas Covid 19 dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp320.079.911,00 berupa Beban perjalanan dinas dalam daerah.

5.4.2.6. Beban Hibah

Beban Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Aceh kepada Badan/Lembaga/Organisasi, kelompok/anggota masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan sifatnya tidak mengikat secara terus menerus. Beban Hibah TA 2020 mencapai Rp1.917.738.076.850,38 dan TA 2019 sebesar Rp2.693.334.493.805,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.126. Kenaikan/Penurunan Beban Hibah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	Kenaikan /Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	-	5.828.052.451,89	(5.828.052.451,89)	(100,00)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	-	18.100.408.009,00	(18.100.408.009,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	63.340.106.968,00	34.502.856.391,00	28.837.250.577,00	83,58
4	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	226.277.383,00	-	226.277.383,00	-
5	Beban Hibah Kepada Partai Politik	2.917.334.400,00	-	2.917.334.400,00	-
6	Beban Hibah Dana BOS	834.136.511.028,00	763.522.400.000,00	70.614.111.028,00	9,25
7	Beban Hibah Barang yang akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	533.856.683.115,84	1.148.095.013.852,54	(614.238.330.736,70)	(53,50)
8	Beban bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	384.677.907.042,20	353.867.712.069,00	30.810.194.973,20	8,71
9	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Kabupaten/Kota (Yang Pendanaannya Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Dan Dana Otonomi Khusus)	7.413.028.929,36	104.814.332.283,65	(97.401.303.354,29)	(92,93)
10	Beban Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari DOKA	8.956.016.165,91	170.570.545.039,00	(161.614.528.873,09)	(94,75)
11	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota	42.462.595.937,07	41.225.906.702,34	1.236.689.234,73	3,00
12	Belanja Bangunan Tempat Tinggal Transmigrasi	1.752.952.135,00	-	1.752.952.135,00	-
13	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Prioritas Pembangunan Aceh Bersumber Dari Otsus Aceh	37.998.663.746,00	52.807.267.006,68	(14.808.603.260,68)	(28,04)
Jumlah		1.917.738.076.850,38	2.693.334.493.805,10	(775.596.416.954,72)	(28,80)

Dari total Beban Hibah sebesar Rp1.917.738.076.850,38 yang menjadi beban hibah untuk penanganan *Covid 19* dari Belanja Tidak Terduga sebesar Rp24.217.055.713,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.127. Beban Hibah dari Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Covid 19

No	Uraian	Tahun 2020
		(Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	18.644.214.030,00
2	Beban Hibah Barang atau Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	5.572.841.683,00
Jumlah		24.217.055.713,00

5.4.2.7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Beban Bantuan Sosial pada TA 2020 sebesar Rp17.921.460.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.959.644.500,00 atau 157,43% dari TA 2019 sebesar Rp6.961.815.500,00.

5.4.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam TA 2020 mencapai Rp1.321.286.298.304,52 dan TA 2019 sebesar Rp1.170.378.198.548,69 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.128. Kenaikan/Penurunan Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	487.507.613.662,07	369.217.533.925,57	118.290.079.736,50	32,04
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	140.009.409.559,17	124.233.259.972,10	15.776.149.587,07	12,70
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	639.902.979.334,77	666.813.206.874,64	(26.910.227.539,87)	(4,04)
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.155.409.877,25	4.040.485.330,48	(1.885.075.453,23)	(46,65)
5	Beban Penyusutan Aset Lain-lain.	51.434.170.243,79	401.086.388,34	51.033.083.855,45	12.723,71
6	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	276.715.627,47	5.672.626.057,56	(5.395.910.430,09)	(95,12)
Jumlah		1.321.286.298.304,52	1.170.378.198.548,69	150.908.099.755,83	12,89

5.4.2.9. Beban Penyisihan piutang

Beban Penyisihan piutang dalam TA 2020 mencapai Rp741.186.030,09 dan TA 2019 sebesar Rp722.960.705,36 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.129. Kenaikan/Penurunan Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	539.560.617,15	298.186.530,42	241.374.086,73	80,95
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	2.266.635,00	-	2.266.635,00	-
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	15.000,00	-	15.000,00	-
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	347.443.450,88	(347.443.450,88)	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang BLUD	165.720.345,80	77.223.567,49	88.496.778,31	114,60

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
6	Beban Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan dan Kekayaan Daerah	4.283.903,35	36.670,00	4.247.233,35	11.582,31
7	Beban Penyisihan Piutang lainnya	29.339.528,79	70.486,57	29.269.042,22	41.524,28
Jumlah		741.186.030,09	722.960.705,36	18.225.324,73	2,52

5.4.2.10. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Beban Transfer TA 2020 sebesar Rp3.280.202.492.984,00 dan TA 2019 sebesar Rp3.265.950.031.290,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130. Kenaikan/Penurunan Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan /Penurunan	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	710.340.906.153,00	613.917.895.176,00	96.423.010.977,00	15,71
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	2.539.361.586.831,00	2.644.482.604.204,00	(105.121.017.373,00)	(3,98)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	30.500.000.000,00	7.549.531.910,92	22.950.468.089,08	304,00
Jumlah		3.280.202.492.984,00	3.265.950.031.290,92	14.252.461.693,08	0,44

5.4.2.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain dalam TA 2020 sebesar Rp68.912.735.971,12 mengalami kenaikan sebesar Rp29.420.030.546,09 atau 74,49% dari TA 2019 Rp39.492.705.425,03.

Beban Lain-lain ini terdiri dari beban atas realisasi belanja modal tahun 2020 yang tidak memenuhi batasan minimal kapitalisasi atau aset extracomtable sebesar Rp1.089.614.199,54, Beban Lain-lain atas Persediaan sebesar Rp7.844.674,00, Penyesuaian Utang Belanja Pemeliharaan Paket Pekerjaan Overhaul Pesawat Pemerintah Aceh sebesar Rp548.897.151,00, Reklas dari barang jasa sebesar Rp641.839.210,00, Beban Lain-lain atas BOS sebesar Rp2.032.020.227,03, disamping itu beban lain-lain juga terdiri dari beban penurunan nilai investasi sebesar Rp62.126.424.221,55 penyesuaian nilai sebesar Rp2.466.096.288,00.

5.4.3. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasi

Berdasarkan Pendapatan - LO sebesar Rp14.187.497.367.536,20 dan Beban - LO sebesar Rp12.980.594.096.287,58 maka Laporan Operasional mengalami surplus dari kegiatan operasi sebesar Rp1.206.903.271.248,72.

5.4.4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pada TA 2020 Pemerintah Aceh mengalami defisit dari Kegiatan Non Operasional mencapai Rp132.361.566.706,83 dan TA 2019 sebesar Rp159.320.877.343,65.

5.4.5. Pos Luar Biasa

Pada TA 2020 Pemerintah Aceh tidak mempunyai Pos Luar Biasa.

5.4.6. Surplus/Defisit-LO

Berdasarkan Surplus dari Operasi sebesar Rp1.206.903.271.248,72, Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp132.361.566.706,83 maka Laporan Operasional mengalami surplus sebesar Rp1.074.541.704.541,89.

5.5. Penjelasan atas Akun dalam Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan pada akhir periode akuntansi. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dan Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Aceh selama tahun 2020 sebesar Rp2.797.082.403.283,53 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1.1. Arus Kas Masuk

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi s.d 31 Desember 2020 dan 2019	12.720.731.147.497,63	15.168.584.022.365,41

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.131. Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Pajak Aceh	1.477.991.066.969,65	1.409.251.915.060,80
2	Pendapatan Retibusi Aceh	8.271.131.958,92	17.772.544.263,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan	181.700.799.036,00	182.385.561.355,60
4	Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah	284.885.269.695,06	505.285.571.178,01
5	Dana Bagi Hasil Pajak	127.272.935.167,00	113.615.982.457,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	39.867.057.258,00	98.332.701.261,00
7	Dana Alokasi Umum	1.956.492.796.000,00	2.322.266.506.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	661.008.601.566,00	1.744.873.155.047,00
9	Dana Otonomi Khusus	7.555.278.348.000,00	8.357.471.654.000,00
10	Dana Penyesuaian	384.836.149.076,00	413.115.125.722,00
11	Hibah	43.126.992.771,00	4.213.306.021,00
Jumlah Arus Kas Masuk		12.720.731.147.497,63	15.168.584.022.365,43

Arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2020 dari Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah berbeda dengan realisasi Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah pada LRA sebesar Rp618.240.360.338,53 yang merupakan Pendapatan BLUD yang tidak mempengaruhi aktivitas operasi secara langsung.

5.5.1.2. Arus Kas Keluar

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi s.d 31 Desember 2020 dan 2019	9.923.648.744.214,10	12.062.789.499.376,98

Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.132. Arus Kas Dari Keluar Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja Pegawai	2.419.712.419.221,00	2.423.723.758.055,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.992.920.704.867,99	3.989.110.688.101,50
3	Belanja Hibah	632.753.349.408,91	1.946.365.153.669,91
4	Belanja Bantuan Sosial	377.503.593.012,20	360.489.078.519,00
5	Belanja Bantuan Keuangan	2.539.361.586.831,00	2.644.482.604.204,00
6	Belanja Tidak Terduga	158.460.075.459,00	4.838.896.610,92
7	Belanja Transfer ke Kab/Kota	802.937.015.414,00	693.779.320.215,65
Jumlah Arus Kas Keluar		9.923.648.744.214,10	12.062.789.499.376,98

Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2020 pada arus kas keluar Belanja Pegawai berbeda dengan realisasi Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp42.606.598.400,00 dan Belanja Barang dan Jasa berbeda dengan realisasi Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp493.513.447.898,00. Perbedaan tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasional pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Pemerintah Aceh selama Tahun 2020 sebesar (Rp1.738.315.161.276,39)

5.5.2.1. Arus Kas Masuk

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan s.d 31 Desember 2020 dan 2019	-	12.437.300.000,00

Arus Masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.133. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	12.051.700.000,00
2.	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	385.600.000,00
Jumlah		-	12.437.300.000,00

5.5.2.2. Arus Kas Keluar

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi non keuangan s.d 31 Desember 2020 dan 2019	1.738.315.161.276,39	3.208.902.356.258,36

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.134. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	76.187.421.357,82	75.314.463.702,32
2	Belanja Modal Tanah	71.123.465.326,00	86.773.892.473,00
3	Peralatan dan Mesin	421.332.296.912,80	841.812.882.309,00
4	Belanja Gedung dan Bangunan	567.190.383.202,63	820.034.893.478,62
5	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	572.579.779.264,78	1.320.184.310.775,42
6	Belanja Aset Tetap Lainnya	29.901.815.212,36	64.781.913.520,00
Jumlah		1.738.315.161.276,39	3.208.902.356.258,36

Arus kas keluar dari aktivitas investasi aset non keuangan tahun 2020 pada arus kas keluar Belanja Aset Tetap Lainnya berbeda dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya pada LRA sebesar Rp19.548.801.262,90 yang merupakan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya BLUD.

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto sehubungan dengan surplus/defisit anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Pemerintah Aceh tahun 2020 sebesar Rp1.955.114.950,15.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran APBA. Pada tahun 2020, arus kas masuk dari penerimaan perhitungan fihak ketiga sebesar Rp610.822.205.136,06 dan arus kas keluar dari pengeluaran perhitungan fihak ketiga sebesar Rp610.822.205.136,06 sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah nihil.

5.5.4.1. Arus Kas Masuk

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas transitoris/non anggaran s.d 31 Desember 2020 dan 2019	610.822.205.136,06	831.483.014.080,09

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.135. Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran Tahun 2020 dan 2019

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
1	PPN	218.822.504.010,00	401.161.484.729,00
2	PPH Pasal 21	100.361.988.806,00	100.877.693.422,00
3	PPH Pasal 22 , 23, 25, 4 (2)	53.793.380.236,00	94.613.442.054,00
4	IWP	84.140.478.253,00	106.554.474.979,00
5	Taperum/Taspen	12.985.984.428,00	2.065.195.918,00
6	Infaq	19.594.959.142,00	30.509.387.391,00
7	Zakat	52.516.566.183,00	53.748.153.387,00
8	JKK	2.327.397.428,00	2.321.084.008,00
9	JKM	7.008.634.706,00	6.910.815.161,00
10	Sewa Rumah	1.222.110,00	1.495.092,00
11	BPJS	58.764.264.692,00	31.856.350.256,00
12	Denda	472.979.818,06	833.227.989,09
13	Penerimaan Lain-lain	-	-
14	Lain-lain	31.845.324,00	30.209.694,00
Jumlah		610.822.205.136,06	831.483.014.080,09

5.5.4.2. Arus Kas Keluar

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Merupakan jumlah arus kas keluar dari aktivitas transitoris/non anggaran sd. 31 Desember 2020 dan 2019	610.822.205.136,06	831.483.014.080,09

Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
1	PPN	218.822.504.010,00	401.161.484.729,00
2	PPH Pasal 21	100.361.988.806,00	100.877.693.422,00
3	PPH Pasal 22 , 23, 25, 4 (2)	53.793.380.236,00	94.613.442.054,00
4	IWP	84.140.478.253,00	106.554.474.979,00
5	Taperum/Taspen	12.985.984.428,00	2.065.195.918,00
6	Infaq	19.594.959.142,00	30.509.387.391,00
7	Zakat	52.516.566.183,00	53.748.153.387,00
8	JKK	2.327.397.428,00	2.321.084.008,00
9	JKM	7.008.634.706,00	6.910.815.161,00

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
10	Sewa Rumah	1.222.110,00	1.495.092,00
11	BPJS	58.764.264.692,00	31.856.350.256,00
12	Denda	472.979.818,06	833.227.989,09
13	Penerimaan Lain-lain	-	-
14	Lain-lain	31.845.324,00	30.209.694,00
Jumlah		610.822.205.136,06	831.483.014.080,09

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Dari arus kas bersih keempat aktivitas di atas terjadi Kenaikan Kas sebesar Rp1.060.275.673.507,29 ditambah dengan Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.830.183.823.590,60 maka Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp3.890.906.180.547,89. Selanjutnya ditambah dengan Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp258.029.046,35, Saldo Akhir Kas BLUD sebesar Rp77.958.725.389,05, dan Saldo Akhir Kas di BOS sebesar Rp494.419.799,00 maka Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.969.617.354.782,29.

5.6. Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.6.1. Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Saldo Ekuitas Awal 2020 dan 2019	25.709.483.208.840,60	20.692.861.279.778,40

Ekuitas Awal per 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp25.709.483.208.840,60. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2019 di Neraca (*Audited*).

5.6.2. Surplus/Defisit – LO

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Saldo Surplus/Defisit – LO sd. 31 Desember 2020 dan 2019	1.074.541.704.541,89	4.913.320.153.573,13

Surplus/Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.074.541.704.541,89. Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp472.324.115.084,73 merupakan koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terdiri dari:

Tabel 5.136. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Koreksi Atas Kas	-	(17.887.103,17)
Koreksi Atas Piutang	(69.992.800.220,55)	16.516.375,75
Koreksi Nilai Persediaan	(38.755.472.221,00)	(22.118.495.484,24)
Koreksi Atas Investasi	(845.585.451,00)	2.651.241,00
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	55.621.320.815,67	115.101.982.910,25
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	240.555.245.249,91	664.392.242.497,16
Koreksi Aset Tak Berwujud Baru Ditemukan	(562.456.200,00)	2.372.961.896,00
Koreksi Atas Penyisihan Piutang	3.004.450.049,83	2.500.000,00
Koreksi Aset Lainnya	(16.831.239.537,64)	(731.098.512.377,54)
Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.838.053.434,46	(1.966.439.309,30)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	270.455.312.318,83	(13.736.970.952,85)
Koreksi Utang	23.837.286.846,22	90.351.225.796,00
Jumlah	472.324.115.084,73	103.301.775.489,06

5.6.4. Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Saldo Ekuitas Akhir sd. 31 Desember 2020 dan 2019	27.256.349.028.467,20	25.709.483.208.840,60

Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Aceh untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp27.256.349.028.467,20 yang terdiri dari penambahan Ekuitas Awal atau Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp25.709.483.208.840,60, Surplus/Defisit-LO sebesar Rp1.074.541.704.541,89. dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan sebesar Rp472.324.115.084,73.

BAB VI INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN

Dalam penyajian laporan keuangan, Pemerintah Aceh berupaya mengungkapkan seluruh informasi penting yang diperlukan. Banyak peristiwa yang terjadi serta kebijakan-kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Kewajiban kontinjensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang, peristiwa tersebut meliputi:

6.1. Penetapan APBA Tahun Anggaran 2020

Salah satu peristiwa yang mempengaruhi laporan keuangan adalah penetapan APBA. Penetapan APBA Tahun Anggaran 2020 ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2019, dengan tahapan yang dilakukan sebagaimana Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 - Tahapan Penetapan APBA 2020

No	Uraian	Tanggal Penetapan	Dasar Pendukung
1.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS dari Kepala Daerah kepada DPRA	12 Juli 2019	Surat Gubernur Aceh Nomor 903/10440 perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS-APBA Tahun Anggaran 2020
2.	KUA disepakati antara Gubernur Aceh dengan DPRA	10 September 2019	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan DPRA Nomor 903/2189/2019 dan 903/15268/2019 tentang Kebijakan Umum APBA Tahun Anggaran 2020
3.	PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRA	10 September 2019	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan DPRA Nomor 903/2190/2019 dan 903/15269/2019 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020
4.	Penetapan Pedoman penyusunan RKA-SKPA oleh Kepala Daerah	10 September 2019	Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 9031/14656 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPA Tahun Anggaran 2020
5.	Pengambilan keputusan bersama DPRA dan Kepala Daerah terhadap RAPBA	25 September 2020	Berita Acara Nomor 903/6132/2019 dan 903/2361/DPRA/2019 Tentang Persetujuan Bersama Gubernur Aceh dan DPRA tentang Rancangan Qanun Aceh tentang Penjabaran TA 2020
6.	Penetapan Qanun APBA	23 Oktober 2019	Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tahun Anggaran 2020

6.2. Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Undang-Undang tersebut selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Dana Otsus diterima sejak Tahun Anggaran 2008, dan sampai dengan Tahun Anggaran 2020 jumlah dana yang telah diterima adalah sebesar Rp80.881.511.097.500,00 dengan rincian sebagaimana Tabel 6.2.

Tabel 6.2-Penerimaan Dana Otsus Tahun Anggaran 2008-2020

Tahun Anggaran	PMK Nomor	Tanggal	Alokasi Anggaran Dana Otsus (Rp)	Realisasi Penerimaan Dana Otsus (Rp)
2008	56/PMK.07/2008	22 April 2008	3.590.142.897.000,00	3.590.142.897.000,00
2009	204/PMK.07/2008	10 Desember 2008	3.728.282.000.000,00	3.728.282.000.000,00
2010	160/PMK.07/2009	04 Nopember 2009	3.849.806.840.000,00	3.849.806.840.000,00
2011	231/PMK.07/2010	20 Desember 2010	4.510.656.496.500,00	4.510.656.496.500,00
2012	239/PMK.07/2011	27 Desember 2011	5.476.288.764.000,00	5.476.288.764.000,00
2013	195/PMK.07/2012	10 Desember 2012	6.222.785.783.000,00	6.222.785.783.000,00
2014	195/PMK.07/2013	17 Desember 2013	6.824.386.514.000,00	6.824.386.514.000,00
2015	PP Nomor 36 Tahun 2015	17 April 2015	7.057.756.971.000,00	7.057.756.971.000,00
2016	PP Nomor 137 Tahun 2015	27 Nopember 2015	7.707.216.942.000,00	7.707.216.942.000,00
2017	PP Nomor 86 Tahun 2017	30 Agustus 2017	7.971.646.295.000,00	7.971.646.295.000,00
2018	PMK 50 Tahun 2017	04 April 2017	8.029.791.593.000,00	8.029.791.593.000,00
2019	139/PMK.07/2019	08 Oktober 2019	8.357.471.654.000,00	8.357.471.654.000,00
2020	233/PMK.07/2020	30 Desember 2020	7.555.278.348.000,00	7.555.278.348.000,00
Jumlah			80.881.511.097.500,00	80.881.511.097.500,00

Pelaksanaan Otsus di Provinsi Aceh didasarkan pada Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan Otsus dialokasikan sebagaimana *Lampiran 21*.

Pada Tahun 2020 diterbitkan PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dalam PMK tersebut ditetapkan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.555.278.348.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp818.879.652.000,00 dari alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp8.374.158.000.000,00. Berdasarkan PMK tersebut juga mengatur bahwa jumlah alokasi sebesar Rp7.555.278.348.000,00 akan disalurkan dengan memperhitungkan sisa Dana Otonomi Khusus di RKUD pada akhir tahun anggaran sebelumnya.

6.3. Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)

Pelaksanaan JKRA didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan. Peserta JKRA adalah seluruh penduduk Aceh, tidak termasuk peserta Askes Sosial, pejabat negara yang iurannya dibayar pemerintah dan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek.

Pelayanan kesehatan yang ditanggung meliputi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan tambahan yang difasilitasi dalam program JKRA untuk penduduk Aceh berupa pelayanan Transportasi. Pelayanan kesehatan tersebut disediakan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero)/BPJS.

Realisasi penggunaan dana JKA/JKRA sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 yang telah disalurkan kepada PT Askes/BPJS sebagaimana Tabel 6.4.

Tabel 6.3 - Realisasi JKRA Tahun 2010-2020

Tahun Anggaran	Realisasi JKA (Rp)
2010	241.965.073.000,00
2011	399.530.559.122,00
2012	419.000.000.000,00
2013	419.124.502.998,00
2014	364.327.519.598,00
2015	438.308.664.518,00
2016	532.511.267.125,00
2017	555.692.673.000,00
2018	515.747.055.000,00
2019	611.557.484.950,00
2020	888.634.436.616,00
Jumlah	5.386.399.235.927,00

6.4. Aset Helicopter M1-2

Permasalahan yang juga berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi adalah aset Helicopter M1-2. Aset Helicopter M1-2 semula merupakan aset milik Pemerintah Aceh yang pengadaannya dilakukan pada masa Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si. Aset tersebut kemudian dikeluarkan dari daftar aset Pemerintah Aceh ketika Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si., menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena disita menjadi barang bukti. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pid/2005 tidak disebutkan secara jelas mengenai status Helicopter M1-2 tersebut. Helicopter M1-2 tersebut saat ini berada di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda.

6.5. PD. Genap Mupakat

PD. Genap Mupakat (PDGM) adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1986 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 539/21/069 tanggal 31 Januari 1987. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pondok Gajah, Bener Meriah. PDGM menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan kopi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1986, modal dasar yang ditetapkan adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Para pemegang saham PDGM terdiri dari:

1. Pemerintah Prov. DI Aceh : 50% atau Rp.1.250.000.000,00
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah : 30% atau Rp. 750.000.000,00
3. Koperasi Petani Kopi Intan Pase : 20% atau Rp. 500.000.000,00

Setoran modal yang dilakukan pada tahun pendirian belum sesuai dengan Perda tersebut di atas dan selisihnya diperlakukan sebagai piutang saham. Pada periode 2006, pemegang saham Pemerintah Aceh menambah modal Rp3.450.000.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan melunasi piutang saham Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Belum ada berita acara atau perubahan akta notaris yang menyatakan komposisi saham setelah adanya tambahan modal ini. Komposisi saham baru yang seharusnya menjadi:

Tabel 6.4. Komposisi Saham Baru PD. Genap Mupakat

No.	Keterangan	Persentase	Komitmen Saham	Setoran Saham	Piutang Saham
1.	Pemerintah Aceh	79,00%	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	-
2.	Kabupaten Aceh Tengah	12,60%	750.000.000,00	450.000.000,00	300.000.000,00
3.	Koperasi Petani Intan Pase	8,40%	500.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
	Total Modal Saham disetor	100%	5.950.000.000,00	5.450.000.000,00	500.000.000,00

Tambahan modal sebesar Rp3.950.000.000,00 merupakan tambahan modal kerja yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 29 Juni 2006 untuk pembelian kopi. Namun dalam pelaksanaannya pihak

manajemen PDGM meminjamkan kepada pihak ketiga untuk pembelian kopi petani dan mengharapkan *fee*-nya saja.

Pada tahun 1997, PDGM melakukan kerjasama operasi dengan Holland Coffee BV melalui anak perusahaannya di Indonesia PT. Indonesian Specialty Coffee. Latar belakang dilakukannya kerjasama operasi adalah PDGM mengalami kesulitan likuiditas dan tanggungan hutang. Pada tahun 1998, PDGM dan Holland Coffee BV meningkatkan kerjasama operasi menjadi Joint Venture dengan nama PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (PT. GMGSC).

Modal ditempatkan dan disetor PT. GMGSC sebesar Rp.7.321.900.000,00 dengan komposisi 70% saham milik PT. Indonesian Specialty Coffee atau sebesar Rp.5.125.500.000,00 (6.030 lembar saham seri A) dan 30% saham milik PDGM atau sebesar Rp.2.196.400.000,00 (2.584 lembar saham seri B).

Sejak tahun 2000 PDGM tidak melakukan kegiatan pembelian, pengolahan dan penjualan kopi. PD Genap Mupakat hanya memberikan dana talangan pembelian kopi petani kepada PT. GMGSC dan pihak ketiga lainnya. Sejak tahun 2000 PT. GMGSC mengalami kerugian terus menerus.

Gubernur Aceh telah membentuk Tim Revitalisasi dengan SK Nomor 539/586/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang bertugas antara lain menginventarisir permasalahan dan memediasi/memfasilitasi penyelesaian permasalahan PDGM dengan PT. GMGSC dan pihak terkait lainnya, tim tersebut belum pernah bertemu dengan Direksi PT. GMGSC karena berdomisili di Belanda, sehingga pada pelaksanaannya tidak diperoleh data-data keuangan terakhir dari operasional kedua perusahaan tersebut.

Kondisi selanjutnya setelah tahun 2000 sampai dengan sekarang perusahaan ISCBV tidak berminat lagi untuk melaksanakan/joint venture dengan PDGM (melalui PT. GMGSC) pihak ISCB V menawarkan bahwa jika PDGM bersedia membayar hutang yang ada selama operasional perusahaan (PT. GMGSC) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka PT. ISCBV bersedia menyerahkan seluruh sahamnya (sebesar 70%) kepada PDGM, komitmen tanggal 28 September 2012 melalui kuasa hukum PT. GMGSC Ilya Sumuno bertempat di Gedung UOB-24 FL Suite 240i Jalan M. H. Thamrin Kav. 8-9 Jakarta.

Opini Laporan Auditor Independen yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Laporan Keuangan PD Genap Mupakat per 31 Desember 2008 Nomor LHA-649/PW.01/4/2009 tanggal 26 Nopember 2009 adalah “tidak menyatakan pendapat”. Selain itu BPKP juga telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Penyimpangan Pemberian Pinjaman Dana Talangan Pembelian Kopi kepada Pihak Ketiga pada PDGM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006-2009 Nomor LAP-128/PW.01/5/2010 tanggal 19 April 2010 dan memberikan informasi bahwa telah terjadi penyimpangan oleh Direksi PDGM tahun 2006 sd. 2009.

Saat ini PDGM sudah tidak beroperasi lagi, tidak memiliki manajemen. Kevakuman ini membawa *implikasi* luar biasa terhadap kelangsungan usaha dan keamanan aset perusahaan. Berdasarkan surat Gubernur Aceh kepada

Bupati Bener Meriah Nomor 510/68117 tanggal 24 Nopember 2010, Gubernur Aceh telah mempercayakan aset PDGM kepada Bupati Bener Meriah untuk dijaga dari tindakan penjarahan sementara menunggu hasil keputusan RUPS terhadap pengelolaan PDGM yang akan datang.

Selanjutnya pada tahun 2014 dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PDGM per 31 Desember 2013, auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Dilaporkan saldo rugi sebesar Rp.(5.644.534.505,00) merupakan akumulasi kerugian dari awal aktivitas perusahaan sampai dengan 31 Desember 2013. Berdasarkan hasil Laporan Audit tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan kembali atas nilai penyertaan modal Pemerintah Aceh dengan menggunakan *equity method*.

6.6. Penghapusbukuan Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2007 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

Penghapusbukuan Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2007 Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sebesar Rp429.400.000,00 merupakan Sisa Kas Bon di BPM Aceh yang berasal dari kegiatan Identifikasi Potensi Masyarakat Miskin.

Berdasarkan beberapa rangkaian tindak lanjut diantaranya telah dilakukan audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya kasus tersebut telah diserahkan kepada pihak hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 370/Pid.B/2010/PN-BNA tanggal 15 Maret 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 74/PID/2011/PB.BNA tanggal 17 Juni 2011, terakhir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1923K/PID.SUS/2011 tanggal 16 Nopember 2011 telah mengadili dan menetapkan penahanan terhadap PPTK terkait dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Sisa Kas Bon tersebut telah akan dihapusbukukan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/289/2015 tentang Penghapusbukuan Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2007 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

6.7. Pencatatan Kas Yang Belum Dipertanggungjawabkan Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh

Pencatatan kas yang belum dipertanggungjawabkan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebesar Rp338.530.636,00 merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran BPBA pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2012 yang belum dipertanggungjawabkan. Saat ini Sdr.Apl, Bendahara Pengeluaran BPBA Tahun Anggaran 2012 telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/282/XII/2012/Sat.Reskrim tanggal 05 Nopember 2012 dengan pelanggaran tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah dilakukan proses pembebanan oleh MPTGR.

Kas yang belum dipertanggungjawabkan tersebut dikeluarkan dari administrasi pembukuan dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan ditemukan akan dilakukan penagihan.

Berdasarkan Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Nomor : 862.1/183 tanggal 12 April 2013 tentang Usul Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Aplizwardi, SH, NIP. 19710417 200604 1 002, Penata Muda Tk.I, III/b yang bersangkutan telah meninggalkan tugas kedinasan sejak tanggal 1 November 2012 s/d Desember 2013, Surat Panggilan menghadap terhadap Sdr. Aplizwardi, SH, NIP. 19710417 200604 1 002, Penata Muda Tk.I, III/b Nomor 474.2/48/2014 tanggal 10 Januari 2014 dan Nomor 474.2/59/2014 Januari 2014, dan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksaan Pemerintah Aceh tanggal 21 Januari dan 17 Februari 2014 sesuai Surat Perintah Gubernur Aceh Nomor 860/507/2013 tanggal 26 Agustus 2013, telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/004/2015, menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS. Gaji yang bersangkutan sejak Februari 2013 s/d Agustus 2015 sebesar Rp93.783.247,00 yang ditahan oleh Bendaharawan telah disetor ke rekening Kas Daerah pada tanggal 20 Oktober 2015.

6.8. Tunggakan pembayaran atas paket pengadaan pada Dinas Pendidikan Aceh sebesar Rp95.347.907.960,00

Dinas Pendidikan Aceh masih belum menyajikan kewajiban (Utang) pada Laporan Keuangan terkait adanya paket-paket pekerjaan tahun 2019 yang masih belum dilakukan pembayaran sebanyak 378 paket pekerjaan dengan nilai sebesar Rp95.347.907.960,00. Terhadap paket pekerjaan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Aceh yang di tuangkan dalam Laporan Nomor 900/A.I/039/IA tanggal 14 Januari 2021.

6.9. Tiga Puluh Satu Paket Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang harus dibayarkan sebesar Rp126.951.309.424,08,-

Dinas Pengairan Aceh saat ini terdapat 31 (tiga puluh satu) paket penanganan darurat (bencana alam) yang sudah selesai dikerkerjakan pada tahun 2009 dan 2010 serta sudah dilakukan audit administrasi, nilai/fisik pekerjaan serta manfaat pekerjaan tersebut oleh Inspektorat Aceh pada tahun 2013, namun Pemerintah Aceh belum melakukan pembayaran terhadap pekerjaan dimaksud, sehingga para rekanan pelaksana melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan pada saat ini gugatan dimaksud sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2020 dilakukan inventarisasi ulang oleh Dinas Pengairan Aceh terhadap paket penanganan darurat (bencana alam), Adapun hasil inventarisasi dari paket 42 (empat puluh dua) paket menjadi 48 paket yang belum dibayarkan dan adanya pembayaran lunas terhadap paket pekerjaan yang ada pada Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tahun 2019 terdiri dari: pada tahun 2010 satu paket sebesar Rp4.940.525.000,00 pada tahun 2011 satu paket sebesar Rp731.250.000,00 pada tahun 2013 empat belas paket sebesar Rp17.159.782.000,00 pada tahun 2018 satu paket

sebesar Rp1.200.000.000,00. perkiraan nilai pokok terhadap sisa 31 paket pekerjaan yang menjadi kewajiban Pemerintah Aceh dimaksud sebesar Rp126.951.309.424,08 tidak termasuk perhitungan kerugian materil pertahun berjalan, dengan rincian pada **Lampiran 22**.

6.10. Utang Belanja Jasa pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Pada Tahun 2019, Dinas Pemuda dan Olah Raga melaksanakan kegiatan Turnamen Bola Kaki se-Kabupaten Aceh Jaya, namun terdapat pembayaran honor berupa jasa panitia pelaksana, jasa keamanan, jasa tim wasit, jasa petugas kesehatan, jasa anak gawang, dan jasa petugas kebersihan sebesar Rp110.400.000,00 yang tidak dapat dibayarkan karena tidak pernah dianggarkan pada DPA Dinas Pemuda dan Olah Raga TA 2019. Pada TA 2021 dalam DPA Dinas Pemuda dan Olahraga dianggarkan pembayaran utang untuk kegiatan yang belum dibayarkan tersebut.

6.11. Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat

Tabel 6.5. Rekonsiliasi Utang Jangka Panjang

Penarikan (Rp)	Pembayaran Pokok (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Non Pokok (Rp)	Belum Jatuh Tempo (Rp)	Hak Tagih (Rp)
*16.915.000.000,00 **0,00 ***0,00	*6.343.125.000,00 **10.571.875.000,00 ***0,00	10.571.875.000,00	*13.626.051.048,22 ***0,00	0,00	23.833.926.048,22
*Penarikan Kas **Penarikan Reorganisasi ***Penarikan Kapitalis	*Pembayaran **Reorganisasi ***Mutasi Kurang Lainnya		*Non Pokok **Lainnya Prorata		

Kewajiban ini timbul dalam rangka pembiayaan tambahan penyertaan modal Pemerintah Aceh ke dalam modal PT. Bank BPD Aceh pada tahun 1999, dengan perjanjian pinjaman Nomor RDI-352/DP3/1999 tanggal 7 Mei 1999. Pinjaman berasal dari Rekening Dana Investasi sebesar Rp16.915.000.000,00 yang selanjutnya dilakukan amandemen terhadap naskah pinjaman tersebut dengan Nomor Amandemen: AMA-171/RDI-352/DSMI/2013 tanggal 30 Agustus 2013.

Terhadap seluruh kewajiban pinjaman tersebut akan dilakukan penghapusan melalui mekanisme Debt Swap dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (pembangunan fasilitas yang dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat). Rencana pelaksanaan *Debt Swap* telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktur Manajemen Investasi untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.6. Rencana Debt Swap

No	SKPA	2010 (Rp)	2012 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	3.560.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	439.991.000,00	3.628.022.000,00	-

No	SKPA	2010 (Rp)	2012 (Rp)	2014 (Rp)
3	Dinas Pengairan	2.403.613.000,00	-	-
4	Dinas Cipta Karya	-	9.651.917.000,00	23.908.900.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika Aceh	3.605.205.000,00	-	11.060.000.000,00
Jumlah		6.448.809.000,00	13.279.939.000,00	38.528.900.000,00
Total Usulan				58.257.648.000,00

Sedangkan Realisasi kegiatan *Debt Swap* adalah sebagai berikut:

Tabel 6.7. Realisasi Kegiatan Debt Swap

No	SKPA	2010 (Rp)	2012 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	2.421.786.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	439.991.000,00	3.628.022.000,00	-
3	Dinas Pengairan	2.403.613.000,00	-	-
4	Dinas Cipta Karya	-	9.651.917.000,00	21.219.525.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komitel Aceh	3.605.205.000,00	-	9.889.747.000,00
Jumlah		6.448.809.000,00	13.279.939.000,00	33.531.058.000,00
Total Realisasi				53.259.806.000,00

Terhadap usulan realisasi kegiatan *debt swap* pada tahun 2014, setelah dilakukan verifikasi ulang pada tahun 2017, realisasi kegiatan *debt swap* adalah sebagai berikut:

Tabel 6.8. Hasil Verifikasi Ulang Realisasi Kegiatan Debt Swap

No	SKPA	2010 (Rp)	2012 (Rp)	2014 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	2.929.719.000,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	430.921.000,00	3.628.022.000,00	-
3	Dinas Pengairan	2.403.613.000,00	-	-
4	Dinas Cipta Karya	-	9.651.917.000,00	21.186.445.000,00
5	Dinas Perhubungan, Komitel Aceh	3.605.182.040,00	-	9.946.412.000,00
Jumlah		6.439.716.040,00	13.279.939.000,00	34.062.576.000,00
Total Realisasi				53.782.231.040,00

Tindak lanjut dari pelaksanaan *debt swap*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, membentuk Tim Verifikasi pelaksanaan *debt swap* dengan Surat Tugas Nomor ST-158/D3-01/2017 tanggal 5 Juli 2017.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan suratnya nomor S/202/PB/2018 perihal Tindak lanjut penyampaian laporan hasil verifikasi *debt swap* dalam rangka penyelesaian piutang negara pada pemerintah daerah, menerangkan bahwa hasil

verifikasi atas pelaksanaan debt swap pada Pemerintah Aceh telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 176/PMK.05/2016, disampaikan bahwa penyesaian restrukturisasi pinjaman akan diproses lebih lanjut. Rincian hasil verifikasi pelaksanaan *debt swap* sebagai berikut:

Tabel 6.9. Rincian Hasil Verifikasi Pelaksanaan Debt Swap

No	Nama Pemerintah Daerah	Kewajiban Pelaksanaan Debt Swap (Rp)	Realisasi Kegiatan			Pemenuhan Debt Swap (Rp)	Sisa Tunggakan Debt Swap (Rp)
			Sesuai Kriteria Debt Swap (Rp)	Tidak Sesuai Kriteria Debt Swap (Rp)	Total (Rp)		
1	Aceh	23.833.926.048,23	48.507.301.040,00	5.274.930.000,00	53.782.231.040,00	23.883.926.048,23	-
Jumlah		23.833.926.048,23	48.507.301.040,00	5.274.930.000,00	53.782.231.040,00	23.883.926.048,23	-

Terhadap Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat tersebut sudah mendapat persetujuan presiden atas permohonan penghapusan piutang negara secara bertahap, hal ini sesuai dengan penyampaian Tindaklanjut pemeriksaan BPK atas LKBUN Tahun 2019 BA 999.04 Pengelolaan Pemberian Pinjaman. Pemerintah Daerah yang telah memperoleh penghapus bersyarat dimaksud masih memiliki hak tagih kepada negara hingga terbitnya penghapusan mutlak yang ditetapkan Menteri Keuangan atau Presiden sesuai kewenangan dalam PP Nomor 14 Tahun 2005.

BAB VII

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

7.1. Gambaran Umum Provinsi Aceh

Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

Aceh terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera dengan Ibukota Banda Aceh yang memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan nasional dan internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat. Secara geografis Aceh terletak pada 01o58'37,2"-06o04'33,6" Lintang Utara dan 94o57'57,6"- 98o17'13,2" Bujur Timur. Batas wilayah Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman
Sebelah Selatan	:	berbatasan dengan Sumatera Utara dan Samudera Hindia
Sebelah Timur	:	berbatasan dengan Sumatera Utara
Sebelah Barat	:	berbatasan dengan Samudera Hindia

Aceh memiliki luas wilayah darat 58.880,87 km², wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.478,80 km² dan garis pantai sepanjang 2.698,89 km atau 1.677,01 mil. Secara administratif pada tahun 2011, Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 805 mukim dan 6.497 gampong/desa (Surat Gubernur Aceh Nomor: 140/632/2017).

Aceh memiliki mekanisme dan aturan adat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Mekanisme dan aturan itu tertuang dalam aturan Lembaga Adat, sesuai Pasal 98 ayat (3) UUPA antara lain seperti Panglima Laot, Pawang Glee, dan Kejreun Blang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Luas kawasan lindung sebesar 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya sebesar 2.949.506,83 Ha (50,09%). Untuk mengurangi perubahan fungsi baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya perlu dilakukan penegasan dan penataan batas masing-masing kawasan sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih dan konversi lahan yang menyalahi aturan ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan persentase rekomendasi kesesuaian tata ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh dengan permohonan pemanfaatan ruang oleh pihak ketiga.

7.1.1. WILAYAH RAWAN BENCANA

Aceh berada di jalur penunjaman dari pertemuan lempeng Asia dan Australia, serta berada di bagian ujung patahan besar Sumatera yang membelah pulau Sumatera dari Aceh sampai Selat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, Aceh pernah mengalami bencana gempa dan tsunami yang cukup besar pada tahun

1797, 1891, 1907 dan 2004. Bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004, mengakibatkan 126.915 jiwa meninggal, 37.063 jiwa hilang, lebih kurang 100.000 jiwa luka berat maupun ringan serta 517.000 unit rumah rusak terutama di wilayah pesisir pantai barat Aceh. Selain bencana-bencana berskala besar yang pernah tercatat dalam sejarah, Aceh juga tidak lepas dari bencana yang terjadi hampir setiap tahun yang menimbulkan kerugian tidak sedikit.

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti kekeringan, banjir genangan dengan durasi yang semakin cenderung meningkat, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliung, longsor, dan kebakaran lahan dan hutan. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBA menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dilaporkan sebanyak 682 kejadian bencana atau rata-rata 136 kejadian bencana per tahun.

Terdapat dua tipe gunung api di Aceh, yaitu gunung api tipe A dan tipe C. Gunung api tipe A yaitu Gunung Api Seulawah Agam di Aceh Besar, Gunung Api Puet Sagoe di Pidie dan Pidie Jaya, dan Gunung Api Burni Telong di Bener Meriah, sedangkan gunung api tipe C yaitu Gunung Api Jaboi di Sabang.

7.1.2. DEMOGRAFI

Berdasarkan data BPS Aceh, jumlah penduduk Aceh terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Aceh mengalami penambahan sebanyak 780.461 jiwa. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk Aceh sebesar 1,56% per tahun. Terdapat penambahan laju pertumbuhan penduduk 1,39% jika dibandingkan dengan periode 1971-1980 yang sebesar 2,95%. Sebaran penduduk Aceh masih terkonsentrasi di wilayah Pantai Timur Aceh. Sebaran penduduk tertinggi di Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara, mencapai angka 11,4%, diikuti dengan Kabupaten Bireuen, Pidie, Aceh Timur dan Aceh Besar. Sebaran penduduk paling sedikit berada di Kota Sabang dengan persentase penduduk sebesar 0,8%.

Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Aceh didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi X sebanyak 19,20% dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 26,29% dari total populasi Aceh. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat dari bentuk piramida penduduknya, penduduk Aceh pada Tahun 2020 tergolong tipe ekspansif yaitu komposisi penduduk Aceh berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 67,5%. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa rasio beban ketergantungan Aceh semakin kecil. Namun disisi lain, seiring dengan

peningkatan angka harapan hidup, persentase penduduk usia lanjut 60 tahun ke atas juga mengalami peningkatan. Persentase penduduk lansia Aceh meningkat menjadi 7,8% di tahun 2020 dari 4,8 persen pada 2000 berdasarkan hasil SP2000. Karena persentase penduduk lansia belum mencapai 10%, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 Aceh belum memasuki era ageing population.

7.1.3. SOSIOLOGI

Kearifan adat budaya ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kedudukan Wali Nanggroe merupakan pemimpin adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.

Masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang religius (Dinul Islam), dinamis dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan interaksi yang dibangun dalam masyarakat Aceh didasarkan pada norma-norma/kaidah-kaidah islami, yang ciri-ciri perilaku/karakternya harus terlihat di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Berkaitan dengan hal itu maka fungsi ulama dan tokoh adat memegang peran penting untuk ikut serta dalam pembangunan, ciri-ciri perilaku/karakternya dalam kehidupan masyarakat Aceh bertaqwa, beradat, berbudaya islami, berketauladanan, kesehajaan, kebijaksanaan, kesabaran dan kejuangan.

Suasana kehidupan masyarakat Aceh bersendikan hukum Syariat Islam, kondisi ini digambarkan melalui sebuah Hadih Maja (peribahasa), “Hukom ngoen Adat Lagee Zat Ngoen Sifeut”, yang bermakna bahwa syariat dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sendi kehidupan masyarakat Aceh. Penerapan Syariat Islam di Aceh bukanlah hal yang baru, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri, tepatnya sejak masa kesultanan, syariat Islam sudah meresap ke dalam diri masyarakat Aceh.

Budaya Aceh juga memiliki kearifan di bidang pemerintahan dimana kekuasaan pemerintahan tertinggi dilaksanakan oleh Sultan, hukum diserahkan kepada Ulama sedangkan adat-istiadat sepenuhnya berada di bawah permaisuri serta kekuatan militer menjadi tanggung jawab panglima. Hal ini tercermin dalam sebuah Hadih Maja lainnya, yaitu “Adat Bak Po Teumeureuhom Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang Reusam Bak Laksamana”. Dalam konteks kekinian Hadih Maja tersebut mencerminkan pemilahan kekuasaan yang berarti budaya Aceh menolak prinsip-prinsip otorianisme.

Disamping itu pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Aceh. Hal ini tergambar dari beberapa institusi budaya yang mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat

Aceh, seperti Panglima Laut yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, Panglima Uteun yang mengatur tentang sumber daya hutan, Keujruen Blang yang mengatur tentang irigasi dan pertanian serta kearifan lokal lainnya.

7.1.4. PEMERINTAHAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Aceh menyelenggarakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, meliputi DPRD sebagai lembaga legeslatif dan Pemerintah Provinsi Aceh sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang Gubernur dan seorang Wakil Gubernur.

Selanjutnya berdasarkan MoU Helsinki telah melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai lembaga legislatif dan Pemerintah Daerah Aceh sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan tersebut mengharuskan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang efisien, efektif dan sesuai dengan kebutuhan di seluruh pemerintahan provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Dan terbitnya Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh membentuk perangkat daerah Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh, Dinas, Badan dan Kantor yang masing-masing disebut sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Sekretariat Daerah Aceh dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Aceh dan 3 (tiga) orang Asisten yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi, serta Asisten Administrasi Umum. Pemerintah Aceh menyusun dan menata kembali SOTK yang baru perangkat Aceh.

Beberapa SKPA yang berubah adalah Dinas Keuangan dan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh yang kemudian menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Sementara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh dipecah menjadi Badan Kepegawaian Aceh serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur Aceh. Selanjutnya adalah Kantor Penghubung Pemerintah Aceh yang menjadi Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Dinas Bina Marga Aceh menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh. Sementara Dinas Cipta Karya Aceh menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh.

Selanjutnya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh yang kemudian menjadi Dinas Pangan Aceh. Sementara itu Dinas Kehutanan Aceh dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

Untuk selanjutnya adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika dipecah menjadi Dinas Perhubungan serta Dinas Informatika dan Persandian Aceh. Sementara Badan Investasi dan Promosi Aceh dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Aceh dilebur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh untuk kemudian menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan dilebur menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Sementara Dinas Kesehatan Hewan dan Perternakan Aceh berubah menjadi Dinas Peternakan Aceh. Selanjutnya adalah Dinas Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Pembinaan dan Pendidikan Dayah kemudian menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Aceh berubah untuk kemudian Dinas Pertanahan Aceh. Pemerintah kemudian juga membentuk Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh dan meniadakan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Aceh. Selanjutnya adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh yang menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

Tabel 7.1 – Susunan Satuan Kerja Pemerintah Aceh

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN
1	Dinas Pendidikan Aceh
2	Dinas Kesehatan Aceh
3	Blud Rumah Sakit Umum Zainal Abidin
4	Blud Rumah Sakit Jiwa
5	Blud Rumah Sakit Ibu Dan Anak
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh
7	Dinas Pengairan Aceh
8	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh
9	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh
10	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
11	Dinas Sosial Aceh
12	Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh
14	Dinas Pangan Aceh
15	Dinas Pertanahan Aceh
16	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh
18	Dinas Perhubungan Aceh
19	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Aceh
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
22	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN
23	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh
25	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
26	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
27	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh
28	Sekretariat Majelis Adat Aceh
29	Dinas Syariat Islam Aceh
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
31	Sekretariat Baitul Mal Aceh
32	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
33	Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh
34	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh
35	Dinas Peternakan Aceh
36	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh
37	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh
38	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh
39	Inspektorat Aceh
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
41	PPKA
42	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
43	Badan Kepegawaian Aceh
44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
45	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
46	Sekretariat Daerah Aceh
47	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
48	Sekretariat DPRA
49	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
50	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh

7.2 Visi Dan Misi Pemerintah Aceh

Visi Aceh Hebat tahun 2017-2022 adalah terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani. Berdasarkan kondisi kekinian Aceh, Prioritas pembangunan untuk Provinsi Aceh dijabarkan dalam 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Visi Misi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022, kesepuluh prioritas pembangunan tersebut yaitu:

- Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang adil, bersih dan melayani
- Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan itikad Ahlulsunnah WalJamaah yang bersumber hukum mazhab Syafiiiah dengan tetap menghormati mazhab lainnya
- Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan Perdamaian berdasarkan Mou Helsinki
- Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional maupun regional

- e. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan terintegrasi
- f. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan
- g. Menyediakan sumber listrik yang bersih dan terbarukan
- h. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif
- i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan
- j. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Adapun program unggulan yang akan diciptakan pada 5 tahun ke depan adalah:

- a. Aceh Sejahtera (JKA Plus)
- b. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu)
- c. Aceh Caroeng (Cerdas)
- d. Aceh Energi
- e. Aceh Meugoe dan Meulaot
- f. Aceh Troe (Kenyang)
- g. Aceh Kreatif
- h. Aceh Kaya
- i. Aceh Peumulia
- j. Aceh Damee (Damai)
- k. Aceh Meudadab (Beradab)
- l. Aceh Teuga (Kuat)
- m. Aceh Green
- n. Aceh Seuniya
- o. Aceh Seumeugot

Mengacu pada beberapa indikator sosial ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk dan kebijakan pemerintah pusat, prioritas pembangunan Aceh diarahkan kepada sektor investasi dan produksi dengan penguatan pada fungsi ekonomi. Maka penetapan prioritas pada pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, reformasi birokrasi dan sistem informasi yang terintegrasi dengan sumber APBN, APBA, APBK, Pendanaan Luar Negeri, dan Investasi merupakan pilihan yang tepat untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Aceh menuju Aceh Hebat.



Disamping prioritas di atas, dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah terus memprioritaskan pembangunan dalam bidang keagamaan, baik program-program penguatan akidah maupun program-program penguatan kapasitas keilmuan syariah. Hal tersebut juga melanjutkan keberlangsungan perdamaian pasca konflik dengan mengimplementasikan amanat MoU Helsinki.

BAB VIII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Aceh dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2020 pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Oprasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

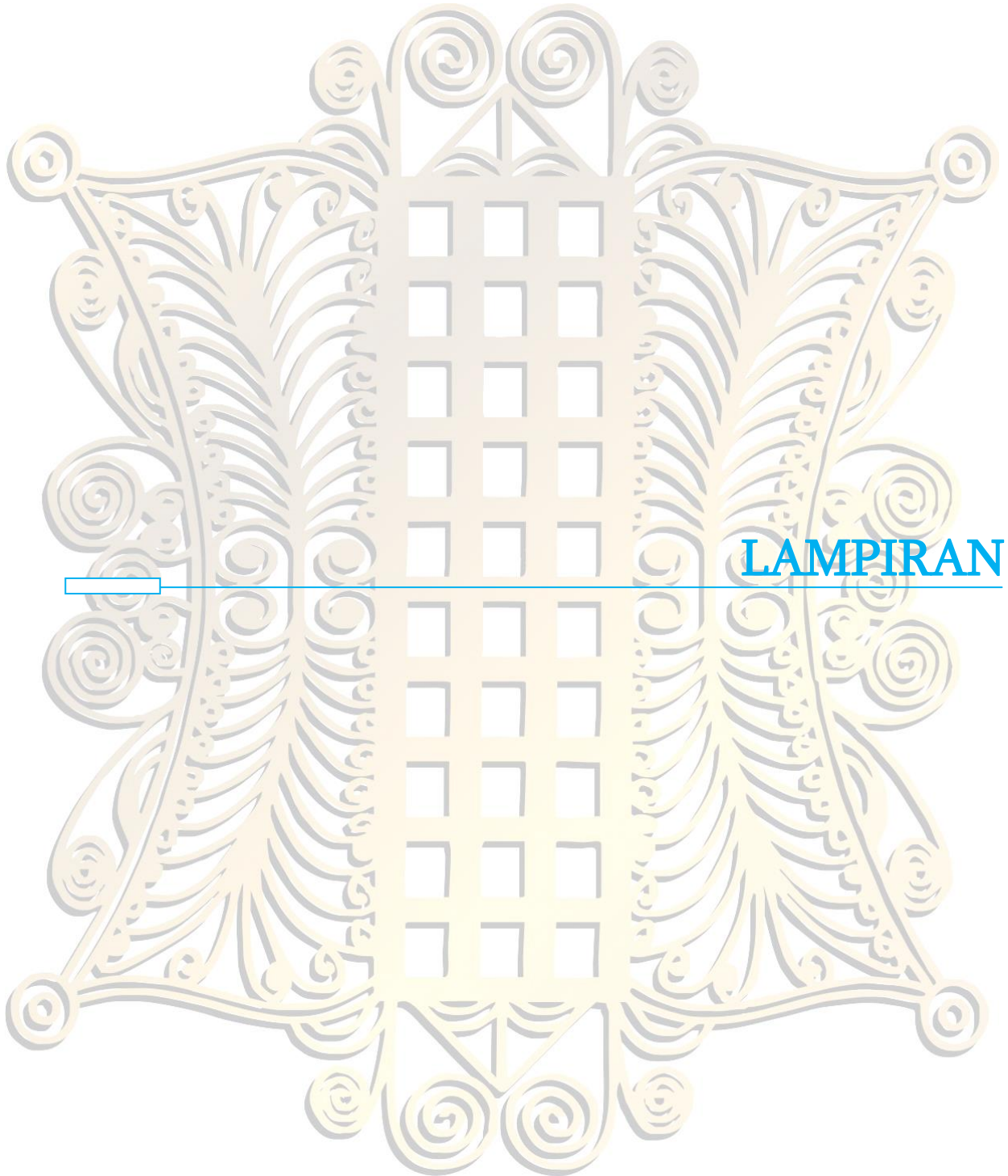
Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 atas pengelolaan keuangan daerah.

Banda Aceh, Mei 2021
GUBERNUR ACEH


Ir. NOVA IRIANSYAH, MT



PEMERINTAH ACEH



LAMPIRAN

**Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Aceh	599.535.200,00	-
2	Dinas Kesehatan Aceh	-	1.160.798.512,07
3	Dinas Pangan Aceh	-	1.555.390.310,15
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh	-	370.000.000,00
5	Dinas Pendidikan Aceh	-	20.308.889.466,00
6	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	248.416.948.336,00	456.765.788.000,00
7	Dinas Sosial Aceh	335.461.800,00	-
8	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh	-	255.299.000,00
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	2.841.572.100,00	-
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh	2.361.052.920,00	14.663.805.023,70
11	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	210.106.500,00	48.467.696.400,00
12	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	254.977.340.571,93	367.769.973.171,93
13	Dinas Peternakan Aceh	-	11.509.866.073,00
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh	1.752.952.135,00	6.887.455.069,39
15	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	-	5.857.369.348,00
	Jumlah	511.494.969.562,93	935.572.330.374,24

**Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Hasil Migas
Kabupaten/Kota (yang Pendanaannya Bersumber dari Tambahan Dana Bagi
dan Dana Otonomi Khusus) Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-	1.485.000.000,00
2	Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh	-	3.723.502.281,32
3	Dinas Kesehatan Aceh	7.411.068.300,00	47.066.924.579,68
4	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Aceh	-	792.251.435,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	1.777.796.912,55	-
6	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	2.669.620.879,49	-
7	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Aceh	1.122.000.000,00	1.139.427.924,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh	-	33.395.154.771,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh	6.160.677.500,00	1.480.000.000,00
10	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Aceh	309.681.000,00	40.925.769.087,42
11	Dinas Pendidikan Aceh	-	15.202.427.694,00
12	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	500.000.000,00	291.575.500,00
13	Dinas Pengairan Aceh	7.241.583.000,00	37.084.255.800,00
14	Dinas Perhubungan Aceh	-	1.021.182.600,00
15	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh	9.852.606.152,43	10.970.876.536,92
16	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh	676.287.824,00	935.000.000,00
17	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh	3.228.857.756,00	1.527.410.183,36
18	Dinas Sosial Aceh	-	1.165.518.000,00
19	Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh	14.050.759.153,51	5.836.876.611,97
20	Sekretariat Majelis Adat Aceh	-	8.724.413.900,00
Jumlah		55.000.938.477,98	212.767.566.904,67

**Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020
dan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	TA 2020 (Rp)	TA 2019 (Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	2.012.934.000,00	1.754.305.500,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	1.213.255.900,00	3.578.041.250,00
3	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	57.872.936.835,30	136.473.676.916,00
4	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	16.950.723,00	494.500.000,00
5	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	88.381.327.501,00	87.552.823.266,00
6	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	-	11.483.316.464,00
7	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	16.280.000,00	13.950.750,00
8	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	66.108.000,00	13.479.235.310,00
9	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	412.740.512,00	3.500.640.000,00
10	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	4.640.297.776,50	24.328.214.434,00
11	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	617.617.800,00	14.649.558.439,00
12	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	15.439.560.663,00	14.771.138.839,00
13	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	75.312.739.628,00	77.920.148.137,00
14	Belanja modal Pengadaan Komputer	61.930.538.040,00	95.116.365.381,00
15	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.130.224.795,00	4.622.378.760,00
16	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	12.677.242.186,00	12.023.110.332,00
17	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	1.111.340.700,00	1.488.611.200,00
18	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	-	49.150.000,00
19	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	15.319.926.419,00	232.996.843.149,00
20	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	439.851.816,00	1.465.615.538,00
21	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	4.899.900.871,00	3.461.489.590,00
22	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	74.746.773.367,00	93.835.065.854,00
23	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	-	-
24	Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	763.642.000,00	-
25	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	33.418.000,00	1.088.951.000,00
26	Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	276.689.380,00	15.840.000,00
27	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	5.649.912.200,00
Jumlah		421.332.296.912,80	841.812.882.309,00

**Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020
dan Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Jalan	256.467.965.463,83	612.761.515.777,00
2	Belanja modal Pengadaan Jembatan	88.140.588.558,00	165.277.920.055,19
3	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	136.625.367.687,08	214.737.348.951,00
4	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	36.677.449.900,00	149.891.833.690,00
5	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	74.383.801,00
6	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	6.798.000,00	5.603.138.779,95
7	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	167.365.645,52	-
8	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	39.525.051.000,00	122.242.706.680,00
9	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	7.452.481.860,05	28.749.201.874,41
10	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	4.660.000,00	-
11	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	-	489.962.000,00
12	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	697.961.704,40	7.759.415.775,99
13	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	305.452.700,00
14	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	6.814.089.445,90	10.804.921.690,88
15	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	-	1.486.509.000,00
	Jumlah	572.579.779.264,78	1.320.184.310.775,42

Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dan Dana Otonomi Khusus Aceh

No	Uraian	Realisasi
		Tahun 2020
Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus		
1	Kabupaten Aceh Selatan	10.000.000.000,00
2	Kabupaten Aceh Tenggara	10.000.000.000,00
3	Kabupaten Aceh Timur	10.000.000.000,00
4	Kabupaten Aceh Tengah	10.000.000.000,00
5	Kabupaten Aceh Barat	10.000.000.000,00
6	Kabupaten Aceh Besar	10.000.000.000,00
7	Kabupaten Pidie	10.000.000.000,00
8	Kabupaten Aceh Utara	10.000.000.000,00
9	Kabupaten Simeulue	10.000.000.000,00
10	Kabupaten Aceh Singkil	15.000.000.000,00
11	Kabupaten Bireuen	15.000.000.000,00
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	20.000.000.000,00
13	Kabupaten Gayo Lues	15.000.000.000,00
14	Kabupaten Aceh Jaya	15.000.000.000,00
15	Kabupaten Nagan Raya	20.000.000.000,00
16	Kabupaten Aceh Tamiang	15.000.000.000,00
17	Kabupaten Bener Meriah	10.000.000.000,00
18	Kabupaten Pidie Jaya	20.000.000.000,00
19	Kota Banda Aceh	10.000.000.000,00
20	Kota Sabang	10.000.000.000,00
21	Kota Lhokseumawe	15.000.000.000,00
22	Kota Langsa	20.000.000.000,00
23	Kota Subulussalam	10.000.000.000,00
Jumlah		300.000.000.000,00
Dana Otonomi Khusus Aceh		
1	Kabupaten Aceh Selatan	104.510.075.485,00
2	Kabupaten Aceh Tenggara	102.095.040.286,00
3	Kabupaten Aceh Timur	127.030.171.761,00
4	Kabupaten Aceh Tengah	97.310.057.913,00
5	Kabupaten Aceh Barat	74.324.170.320,00
6	Kabupaten Aceh Besar	94.558.733.789,00
7	Kabupaten Pidie	101.314.840.707,00

No	Uraian	Realisasi
		Tahun 2020
8	Kabupaten Aceh Utara	124.980.601.676,00
9	Kabupaten Simeulue	67.433.146.749,00
10	Kabupaten Aceh Singkil	78.183.315.384,00
11	Kabupaten Bireuen	102.211.815.035,00
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	83.427.389.141,00
13	Kabupaten Gayo Lues	92.360.343.077,00
14	Kabupaten Aceh Jaya	81.547.053.280,00
15	Kabupaten Nagan Raya	92.511.283.451,00
16	Kabupaten Aceh Tamiang	92.072.358.433,00
17	Kabupaten Bener Meriah	80.400.273.677,00
18	Kabupaten Pidie Jaya	76.830.499.781,00
19	Kota Banda Aceh	104.640.232.516,00
20	Kota Sabang	61.410.740.324,00
21	Kota Lhokseumawe	72.678.056.143,00
22	Kota Langsa	72.649.287.349,00
23	Kota Subulussalam	54.882.100.554,00
Jumlah		2.039.361.586.831,00
Total		2.339.361.586.831,00

Piutang Pajak Air Permukaan

No.	Wajib Pajak	Masa pajak terutang	Nilai
1	PT. Energi Alam Raya Semesta	Mei 2016-Desember 2018	2.646.000,00
2	Bahari Dwi Kencana Lestari	Mei 2016-Februari 2017	9.090.360,00
3	Lafarge Cement Indonesia	Desember 2020	3.714.120,00
4	PDAM Tirta Montala	Desember 2020	4.726.530,00
5	PDAM Tirta Mon Pasee	2007-Juni 2014	557.715.625,00
6	PDAM Tirta Mon Pasee	Desember 2020	3.003.830,00
7	PDAM Tirta Meulaboh	2009-2012	176.814.075,00
8	PDAM Tirta Meulaboh	Desember 2020	650.820,00
9	PDAM Tirta Peusada	2012-Agustus 2017	93.563.030,00
10	PDAM Tirta Peusada	Desember 2020	2.185.440,00
11	PDAM Tirta Keumuneung	2012-Agustus 2017	121.841.200,00
12	PDAM Tirta Keumuneung	Agustus 2018-November 2018	10.019.020,00
13	PDAM Tirta Keumuneung	Nov-20	2.593.050,00
14	PDAM Tirta Keumuneung	Desember 2020	2.733.750,00
15	PT. PIM	Nov-20	32.511.060,00
16	PT. PIM	Desember 2020	31.839.600,00
17	PT. Pertamina EP Field Rantau	Maret 2018-Juli 2018	13.182.000,00
18	PT. Pertamina EP Field Rantau	September 2020 - November 2020	6.426.480,00
19	PT. Pertamina EP Field Rantau	Desember 2020	2.178.480,00
20	PT. Perta Arun Gas	Nov-18	14.994.540,00
21	PT. Perta Arun Gas	Juli 2020	18.100.020,00
22	PT. Perkebunan Lembah Bhakti I	April 2018 - September 2018	3.358.452,00
23	PT. Perkebunan Lembah Bhakti I	Desember 2020	481.920,00
24	PT. Perkebunan Lembah Bhakti II	Nov 2020-Desember 2020	2.878.620,00
25	PT. Nafasindo	Desember 2020	162.060,00
26	PDAM Tirta Mon Mata Aceh Jaya	Januari 18 - Desember 18	12.957.880,00
27	PDAM Tirta Mon Mata Aceh Jaya	Januari 19 - Desember 19	10.329.130,00
28	PDAM Tirta Daroy	Desember 2020	11.208.410,00
29	PT. Ika Bina Agro Wisesa	Desember 2020	1.172.700,00
30	PT. Global Sawit Semesta	November-Desember 2020	2.001.000,00
31	PT. Pertamina EP Hulu Migas	Januari 19 - Desember 19	370.010,00
32	PDAM Tirta Krueng Meuredue	Januari 18 - Desember 18	10.019.460,00
33	PDAM Tirta Krueng Meuredue	Januari 19 - Desember 19	9.363.230,00
34	PDAM Tirta Krueng Meuredue	Januari 2020- September 2020	7.832.090,00
35	PDAM Tirta Mon Krueng Baro	Desember 2020	1.076.850,00
36	PDAM Tirta Agara	Desember 2019-September 2020	12.728.500,00
37	PDAM Tirta Agara	Desember 2020	393.750,00
38	PTPN-I Kb. Cot Girek	Nov-20	1.168.980,00
39	PDAM Tirta Peusangan	Desember 2020	4.086.600,00
40	PT. PP Pati Sari	Desember 2020	1.492.200,00
41	Socfin Sei Liput	Desember 2020	347.820,00
42	PT. Sp. Kiri Plant Indonesia	Desember 2020	319.410,00
43	PT. Parasawita	September 20 - November 2020	1.423.080,00
44	PT. Parasawita	Desember 2020	360.300,00
45	PT. Tri Agro Palma Tamiang	Desember 2020	283.800,00
46	PTPN- I Kb. Aceh Tamiang	Nov-20	1.709.100,00

No.	Wajib Pajak	Masa pajak terutang	Nilai
47	PTPN- I Kb. Aceh Tamiang	Desember 2020	1.936.800,00
48	PDAM Tirta Tamiang	September 2020-Desember 2020	14.335.920,00
49	Sisirau	Desember 2020	374.760,00
50	PT. Bumi Sama Ganda	Desember 2020	567.420,00
51	PLTA Peusangan I & II	Desember 2020	115.560,00
52	PDAM Tirta Tawar	Desember 2020	1.098.270,00
53	PT. Enseme Lestari Jaya	Desember 2020	729.780,00
54	PT. Surya Panen Subur	Desember 2020	1.019.820,00
55	PT. Kalista Alam	Desember 2020	855.840,00
56	PT. Beurata Subur Persada	Desember 2020	760.740,00
57	PT. Seunagan Energi	Desember 2020	31.193.936,00
58	Socfin Seunagan	Desember 2020	442.480,00
59	PT. Fajar Baizuri & Brothers	Desember 2020	948.480,00
60	PT. Ujong Neubok Dalam	Desember 2020	230.820,00
61	PT. Sawit Nagan Raya Makmur	Desember 2020	877.980,00
62	PT. Raja Marga	Desember 2020	649.860,00
63	PT. Kharisma Iskandar Muda	Desember 2020	1.087.680,00
64	PDAM Tirta Naga Tapaktuan	Desember 2020	439.880,00
65	PDAM Tirta Naga (Unit KK Pasie Raja)	Desember 2020	29.380,00
66	PT. Bangun Sempurna Lestari	Desember 2020	780.030,00
67	PT. Samudera Sawit Nabati	Desember 2020	423.360,00
68	Koperasi Prima Jasa	Desember 2020	642.420,00
69	PT. Perkasa Subur Sakti	Desember 2020	986.400,00
70	PT. Anugerah Fajar Rezeki	Desember 2020	79.380,00
71	PT. Runding Putra Persada	Desember 2020	873.960,00
72	PT. Delima Makmur	Desember 2020	956.340,00
73	PDAM Tirta Aneuk Laot	Desember 2020	1.408.550,00
74	PT. Karya Tanah Subur	Nov-20	885.360,00
75	PT. Agro Energi Nusantara	Desember 2020	824.460,00
76	PDAM Tirta Sejuk	September 2020 - November 2020	2.410.030,00
77	PDAM Tirta Fulawan	Oktober 2020	866.760,00
78	Socfin Seumanyam	Agustus 2018-November 2018	598.400,00
79	PT. PLN	Desember 2020	2.900,00
	Jumlah		1.277.488.138,00

Rincian Piutang BLUD

No	Nama BLUD	Nilai (Rp)
1	RSUD dr. Zainoel Abidin - Piutang Tahun 2019 - Piutang BPJS Kesehatan 2020 per 31 des 2020 - Piutang Jasa Raharja 2020 per 31 des 2020 - Piutang Dinas Kesehatan Aceh 2020 per 31 Des 2020 - Piutang BPJS Ketenagakerjaan 2020 per 31 Des 2020 - Piutang MIFA 2020 per 31 Des 2020 - Piutang Nayaka 2020 per 31 Des 2020 - Piutang Kesdam 2020 per 31 Des 2020 - Piutang Telkom 2020 per 31 Des 2020 - Piutang Medika Plaza 2020 per 31 Des 2020 - Piutang PT. PLN 2020 per 31 Des 2020 - Piutang Polda 2020 per 31 Des 2020 - Piutang LPSK 2020 per 31 Des 2020 - Piutang Tak Tertagih Pasien Umum 2020 Per 31 Des 2020 - Piutang BRI Life 2020 per 31 Des 2020 - Piutang Angkasa Pura 2020 per 31 Des 2020 - Piutang YKKBI ADMEDIKA 2020 per 31 Des 2020 - Piutang Mandiri Inhealth 2020 Per 31 Des 2020 - Piutang KEMENKES 2020 Per 31 Des 2020	82.936.520.375,00 5.085.656.329,00 39.685.309.753,00 705.901.227,00 326.777.366,00 42.280.887,00 6.642.222,00 20.362.496,00 680.000,00 2.116.808,00 5.060.621,00 236.606.170,00 4.585.000,00 6.285.000,00 767.560.202,00 32.728.804,00 2.141.140,00 7.685.479,00 30.872.971,00 35.967.267.900,00
2	RS Jiwa - Piutang BRA (2008) - Piutang Pasien Umum (2010) - Piutang Pasien Umum (2011) - Piutang Pasien Umum (2012) - Piutang Pasien Umum (2013) - Piutang Pasien Umum (2014) - Piutang Pasien Umum (2015) - Piutang Pasien Umum (2016) - Piutang Pasien Umum (2017) - Piutang Pasien Umum (2018) - Piutang Pasien Umum (2019) - Piutang Pasien Umum (2020) - IPWL Juni (2019) - IPWL Juli (2019) - IPWL Agustus (2019) - IPWL September (2019) - IPWL Oktober (2019) - IPWL Juli (2020) - IPWL Agustus (2020) - IPWL September (2020) - IPWL Oktober (2020) - Susulan BPJS Agustus 2020	3.564.429.425,00 12.487.000,00 4.744.000,00 8.925.000,00 26.048.000,00 31.741.500,00 18.927.500,00 3.030.000,00 14.126.747,00 138.250.822,00 82.656.248,00 9.303.982,00 355.362.305,00 131.248.856,00 143.746.056,00 157.265.486,00 145.443.023,00 152.310.770,00 154.686.636,00 157.224.402,00 197.628.601,00 130.685.278,00 4.496.700,00

No	Nama BLUD	Nilai (Rp)
	<ul style="list-style-type: none"> - Susulan BPJS September 2020 - Susulan BPJS Oktober 2020 - Obat Penyakit Kronis November 2020 - Susulan BPJS Desember 2020 - Obat Penyakit Kronis Desember 2020 - Pending Obat Penyakit Kronis Desember 2020 - IPWL Desember 2020 	<ul style="list-style-type: none"> 63.363.900,00 114.830.800,00 2.666.886,00 1.012.696.300,00 130.354.996,00 3.364.976,00 156.812.655,00
3	RS Ibu dan Anak <ul style="list-style-type: none"> - BPJS - Jasa Raharja - Ambulance - Obat Kemo dan Kronis 	<ul style="list-style-type: none"> 1.774.812.732,00 1.708.411.800,00 18.116.600,00 15.946.000,00 32.338.332,00
	Jumlah 1 + 2 + 3	88.275.762.532,00

**Rincian Persediaan Barang Habis Pakai
Pemerintah Aceh**

No.	SKPA	Persediaan Barang Habis Pakai											Jumlah
		Persediaan Alat Tulis Kantor	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	Persediaan Isi tabung gas	Persediaan Bahan Cetakan	Persediaan Peralatan Olah Raga	Persediaan Perlengkapan Medis	Persediaan Perlengkapan Pakaian/Perlengkapan Pasien	
1	Dinas Pendidikan Aceh	275.426.253,00	87.763.158,00	-	50.738.078,00	-	8.423.388,00	-	29.510.150,00	122.648.532,00	-	-	574.509.559,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	97.029.037,00	14.614.229,86	240.000,00	-	-	22.054.900,00	-	82.025.518,00	-	26.852.733.246,56	-	27.068.696.931,42
3	Blud Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	759.131.420,00	67.676.500,00	-	491.273.240,00	289.754.326,00	15.000.000,00	-	711.215.960,00	-	-	-	2.334.051.446,00
4	Blud Rumah Sakit Jiwa	32.349.136,83	27.475.759,35	-	69.177.000,00	53.643.668,90	-	-	2.395.000,00	-	336.605.879,85	46.005.865,00	567.652.309,93
5	Blud Rumah Sakit Ibu dan Anak	11.245.800,00	14.322.264,00	-	4.335.300,00	114.864.380,00	-	8.489.800,00	3.408.250,00	-	-	19.955.000,00	176.620.794,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	580.898,00	-	-	-	-	4.500.000,00	-	183.805,00	-	-	-	5.264.703,00
7	Dinas Pengairan Aceh	3.208.257,00	-	-	-	-	13.040.786,00	-	88.276,00	-	-	-	16.337.319,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	11.825.087,00	362.907,00	450.000,00	-	-	4.550.000,00	-	309.020,00	-	-	-	17.497.014,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	815.608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	815.608,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	2.058.668,00	-	120.000,00	-	-	-	-	225.650.000,00	-	-	-	227.828.668,00
11	Dinas Sosial Aceh	70.216.612,00	16.866.010,00	-	75.454.696,00	-	12.320.000,00	-	4.014.400,00	-	-	-	178.871.718,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	1.186.000,00	-	-	-	-	5.209.000,00	-	2.140.400,00	-	-	-	8.535.400,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	7.183.977,00	-	-	17.669.674,00	-	5.170.000,00	-	842.538,00	-	-	-	30.866.189,00
14	Dinas Pangan Aceh	-	-	-	-	-	6.510.000,00	-	-	-	-	-	6.510.000,00
15	Dinas Pertanahan Aceh	6.530.650,00	302.000,00	-	4.866.992,00	-	2.468.000,00	-	-	-	-	-	14.167.642,00
16	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	48.436.445,00	-	-	-	-	-	-	140.724.090,00	-	-	-	189.160.535,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	15.011.900,00	3.350.454,00	300.000,00	6.566.450,00	-	10.516.000,00	-	3.763.500,00	-	-	-	39.508.304,00
18	Dinas Perhubungan Aceh	35.824.698,00	9.008.450,00	-	23.313.345,00	-	29.757.000,00	-	20.397.700,00	-	-	-	118.301.193,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	138.245.930,00	8.326.004,00	-	13.710.358,00	-	18.738.440,00	-	46.055.000,00	-	-	-	225.075.732,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	9.166.360,00	-	960.000,00	-	-	3.984.750,00	-	-	-	-	-	14.111.110,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	7.758.160,00	2.587.000,00	1.400.000,00	4.712.100,00	-	9.000.000,00	-	41.817.125,00	-	-	-	67.274.385,00
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	472.700,00	14.311.900,00	-	-	-	-	-	228.250,00	3.984.431.550,00	-	-	3.999.444.400,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	46.552.150,10	82.224.665,00	-	93.979.556,50	-	-	-	3.865.000,00	-	-	-	226.621.371,60
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	55.772.675,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.772.675,00
25	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	2.433.420,00	2.253.240,00	-	6.206.979,00	-	3.404.000,00	-	4.067.250,00	-	-	-	18.364.889,00

No.	SKPA	Persediaan Barang Habis Pakai											Jumlah
		Persediaan Alat Tulis Kantor	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran	Persediaan Isi tabung gas	Persediaan Bahan Cetakan	Persediaan Peralatan Olah Raga	Persediaan Perlengkapan Medis	Persediaan Perlengkapan Pakaian/Perlengkapan Pasien	
26	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	4.491.600,00	906.000,00	-	2.260.900,00	-	2.070.000,00	-	1.703.000,00	-	-	-	11.431.500,00
27	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	11.505.600,00	46.105.300,00	-	12.660.510,00	-	-	-	-	-	-	-	70.271.410,00
28	Sekretariat Majelis Adat Aceh	8.424.668,00	-	-	1.646.564,00	-	70.000,00	2.000.000,00	6.261.080,00	-	-	-	18.402.312,00
29	Dinas Syariat Islam Aceh	34.291.710,20	-	300.000,00	-	-	6.616.500,00	-	3.191.650,00	-	-	-	44.399.860,20
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	-	-	-	-	-	-	-	10.190.200,00	-	-	-	10.190.200,00
31	Sekretariat Baitul Mal Aceh	1.132.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.132.200,00
32	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	805.208,00	-	-	180.000,00	-	2.750.000,00	-	-	-	-	-	3.735.208,00
33	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	5.553.355,00	-	-	-	-	2.176.000,00	-	-	-	-	-	7.729.355,00
34	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	12.710.500,00	-	-	13.849.400,00	-	12.420.000,00	-	4.380.000,00	-	-	-	43.359.900,00
35	Dinas Peternakan Aceh	42.672.216,91	23.268.250,00	-	-	-	14.000.000,00	-	307.200,00	-	-	-	80.247.666,91
36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1.173.855,00	733.704,00	438.000,00	1.004.481,00	-	-	-	-	-	-	-	3.350.040,00
37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	76.548.580,00	-	-	-	-	17.330.000,00	-	-	-	-	-	93.878.580,00
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	-	-	-	-	-	9.012.000,00	-	-	-	-	-	9.012.000,00
39	Inspektorat Aceh	55.943.200,00	-	-	-	-	7.163.262,00	-	3.272.000,00	-	-	-	66.378.462,00
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	29.288.200,00	12.099.500,00	93.000,00	3.842.000,00	1.500.000,00	13.687.000,00	-	4.288.000,00	-	-	-	64.797.700,00
41	PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	820.137.275,00	14.176.682,00	4.830.000,00	195.080.685,00	-	15.400.000,00	-	1.133.863.782,00	-	-	-	2.183.488.424,00
43	Badan Kepegawaian Aceh	35.687.000,00	9.726.800,00	-	11.980.700,00	-	16.104.000,00	-	16.280.000,00	-	-	-	89.778.500,00
44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	136.442.160,00	33.796.000,00	-	83.383.400,00	-	-	-	17.463.000,00	-	-	-	271.084.560,00
45	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	3.824.400,00	-	-	2.563.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.387.400,00
46	Sekretariat Daerah Aceh	90.742.162,00	6.276.000,00	850.000,00	12.952.000,00	47.280.000,00	101.354.000,00	-	9.512.560,00	-	-	-	268.966.722,00
47	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Sekretariat DPR/DPRA	30.601.050,00	18.820.800,00	234.000,00	1.558.100,00	-	77.050.000,00	-	18.278.150,00	-	-	-	146.542.100,00
49	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	3.919.712,00	-	600.000,00	-	1.076.820,00	-	-	617.019,00	-	-	-	6.213.551,00
Jumlah		3.044.356.494,04	517.353.577,21	10.815.000,00	1.204.965.508,50	508.119.194,90	471.849.026,00	10.489.800,00	2.552.308.873,00	4.107.080.082,00	27.189.339.126,41	65.960.865,00	39.682.637.547,06

**Rincian Persediaan Bahan/Material
Pemerintah Aceh**

No.	SKPA	Persediaan Bahan dan Material															Jumlah	
		Persediaan Bahan baku bananen	Persediaan Bahan/bibit tanaman	Persediaan Bibit ternak	Persediaan Bahan obat-obatan	Persediaan Bahan kimia	Persediaan Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	Persediaan Bahan Logistik Rumah Ternak	Persediaan Bahan Pakan Ternak	Persediaan Bahan Publikasi	Persediaan Bahan Alat-alat Kesehatan	Persediaan Bahan Pangan	Persediaan Bahan Kelengkapan Laksanakan	Persediaan Bahan Klinik	Persediaan Bahan Laboratorium	Persediaan Bahan Jaringan Atr		Persediaan Peralatan Rumah Tangga
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.160.700,00	140.160.700,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	-	-	-	11.762.739.390,97	-	-	10.532.500,00	-	-	3.894.000,00	-	-	-	-	2.690.212.463,00	-	14.467.378.333,97
3	Blood Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	21.129.000,00	-	-	27.242.183.540,00	-	-	913.365.465,00	-	-	-	-	-	26.785.866.680,60	-	-	-	54.962.544.685,60
4	Blood Rumah Sakit Jwa	2.503.541,67	-	-	1.208.439.067,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318.180.667,00	23.553.979,56	-	1.552.677.255,78
5	Blood Rumah Sakit Ibu dan Anak	9.361.480,00	-	-	1.031.977.718,00	51.890.000,00	-	250.500,00	-	-	4.361.528.626,00	-	-	-	63.560.000,00	-	10.785.180,00	5.529.353.504,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Pengairan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hibah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-	-	-	-	-	77.803.890,00	-	-	-	-	-	9.907.610.666,00	-	-	-	-	9.985.414.556,00
11	Dinas Sosial Aceh	-	-	-	15.975.578,00	-	-	918.921.136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	117.067.616,00	1.051.964.330,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.053.550,00	-	-	-	-	-	3.053.550,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.944.903.189,95	-	-	-	-	-	-	3.944.903.189,95
15	Dinas Pertahanan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.400.000,00	13.400.000,00
16	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Perhubungan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.100.000,00	-	-	14.100.000,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.246.500,00	10.246.500,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	-	-	-	-	-	-	-	337.225.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	337.225.700,00
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	-	-	-	-	34.011.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.011.000,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.440.180,00	29.440.180,00
26	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Keurukon Katibul Wali Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	-	-	-	10.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.898.000,00	23.748.000,00
28	Sekretariat Majelis Adat Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Syariat Islam Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.213.500,00	63.213.500,00
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.059.513,00	-	54.235.000,00	-	58.294.513,00
31	Sekretariat Baitul Mal Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	-	746.368.774,00	-	1.248.092.972,00	-	-	-	-	-	-	226.653.500,00	-	-	-	-	-	2.221.115.246,00
35	Dinas Peternakan Aceh	-	-	5.655.785.506,00	1.788.317.057,90	-	-	-	6.007.757.424,00	-	-	-	201.512.772,00	-	199.489.658,00	-	15.000.000,00	13.867.862.417,90
36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.587.500,00	-	-	-	5.587.500,00
37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Inspektorat Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Kependidikan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.125.000,00	37.125.000,00
45	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Sekretariat Daerah Aceh	-	-	-	143.604.226,00	-	-	-	-	-	-	800.000,00	-	-	-	-	-	144.404.226,00
47	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.635.000,00	-	-	-	-	-	82.635.000,00
49	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	32.994.021,67	746.368.774,00	5.655.785.506,00	44.452.179.550,42	85.901.000,00	77.803.890,00	1.843.069.601,00	6.007.757.424,00	337.225.700,00	4.365.422.626,00	3.944.903.189,95	10.422.265.488,00	26.785.866.680,60	3.295.189.801,00	23.553.979,56	503.571.676,00	108.579.858.908,20

DAFTAR OBAT KADALUARSA TAHUN 2020

No	Nama Obat	Jumlah	Sediaan	Tanggal Kadaluarsa	Harga	Total (Rp)
1. RUMAH SAKIT JIWA						4.842.923,74
-	Acyclovir 400 mg	400	-	Agustus 2020	415,00	166.000,00
-	Allopurinol 100 mg	700	-	April 2020	99,00	69.300,00
-	Betahistin Mesylat 6 mg	390	-	Agustus 2020	150,99	58.887,37
-	Carbamazepine 200 mg	8.400	-	Juli 2020	234,00	1.965.624,97
-	Chlorpheniramin 4 mg	100	-	Agustus 2020	45,00	4.500,00
-	Cotrimoxazole 480 mg	700	-	Mei 2020	125,00	87.500,00
-	Haloperidol 0,5 mg	500	-	Juni 2020	92,63	46.315,50
-	Haloperidol 0,5 mg	3.800	-	Juli 2020	278,03	1.056.495,00
-	Haloperidol 1,5 mg	1.100	-	Juli 2020	65,00	71.498,90
-	Ibuprofen 200 mg	100	-	Maret 2020	121,00	12.100,00
-	KSR 600 mg	200	-	April 2020	3.492,50	698.500,00
-	Piroxicam 10 mg	600	-	April 2020	147,40	88.440,00
-	Salbutamol 4 mg	100	-	Maret 2020	91,00	9.100,00
-	Epinephrine (Adreanalin) Injeksi	49	-	Desember 2020	1.518,00	74.382,00
-	Dextrose 5% Infus	40	-	November 2020	7.363,00	294.520,00
-	Blood Set	10	-	Oktober 2020	13.976,00	139.760,00
2. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK						140.531.662,11
-	Aminofluid L-500	60	Bag	2020	70.188,80	4.211.328,00
-	Antasida Tab	1.500	Tablet	2020	148,50	222.750,00
-	Anti Hemoroid Supp	150	Supp	2020	3.641,99	546.298,50
-	Asam Folat 1 mg	8.000	Tablet	2020	81,00	648.000,32
-	Asam Mefenamit 500 mg Tab	42.500	Tablet	2020	102,90	4.373.250,00
-	Atorvastatin 20 mg Tab	1.200	Tablet	2020	908,00	1.089.600,16
-	Atorvastatin 20 mg Tab	120	Tablet	2020	2.433,38	292.006,00
-	Atropine Sulfat Injeksi	100	Ampul	2020	1.815,00	181.500,00
-	Benzatin Benzil Penicillin	20	Vial	2020	19.437,50	388.750,00
-	Bisolvon 4 mg/2 ml Injeksi	70	Ampul	2020	57.069,32	3.994.852,40
-	Budesonide + Formoterol (Symbicort) Tl	27	Box	2020	149.266,00	4.030.182,00
-	Captopril 25 mg Tab	3.000	Tablet	2020	123,85	371.547,00
-	Carvedilol (V-bloc) 6,25mg	150	Tablet	2020	1.793,90	269.085,00
-	Ceftazidime 1 gr inj	250	Vial	2020	20.002,50	5.000.625,00
-	Cefuroxime 750 mg	100	Vial	2020	29.975,00	2.997.500,00
-	Cendo Carpine 2%	1	Strip	2020	17.448,75	17.448,75
-	Cendo Glaupen 0,6 ml	19	Strip	2020	89.347,50	1.697.602,50
-	Clopidogrel 75 mg Tab	5.400	Tablet	2020	1.317,70	7.115.580,00
-	Domperidone Suspensi / Syrup 60 ML	93	Botol	2020	7.400,25	688.223,25
-	Epinephrine Inj	300	Ampul	2020	1.518,00	455.400,00
-	Erdostein Tab 300 mg (Vectrin)	3.600	Tablet	2020	3.520,00	12.672.000,00
-	Eritromicine 250 mg Tab	1.000	Tablet	2020	971,00	971.000,00
-	Fenoterol HBr 100 mcg (Berotec inhaler)	30	Box	2020	83.186,20	2.495.586,14
-	Gabapentin 300 mg Kap	3.200	Kapsul	2020	1.055,00	3.375.996,80
-	Gentamicin 40 mg/ml Inj	717	Ampul	2020	4.036,00	2.893.811,28
-	Ibuprofen 400 mg Tab	6.000	Tablet	2020	438,00	2.628.000,00
-	Insulin Aspart (Novomix) 30 Flexpen	1	Pen	2020	110.968,00	110.968,00
-	Insulin Detemir (Levemir) Flexpen	10	Pen	2020	83.950,00	839.500,00
-	Kalium Aspartat (Aspar K) Tab	100	Tablet	2020	2.473,90	247.390,00
-	Lansoprazole Kapsul	1.760	Kapsul	2020	330,00	580.800,00
-	Levofloxacin 500 mg Tab	600	Tablet	2020	1.001,00	600.600,00
-	Meropenem 1 g Inj	50	Vial	2020	33.994,90	1.699.745,00
-	Momethasone 10 gr Cream	600	Tube	2020	7.912,00	4.747.200,00
-	Momethasone 10 gr Cream	144	Tube	2020	11.000,00	1.584.000,00
-	Moxifloxacin (Vigamox) tts mata	12	Botol	2020	81.000,00	972.000,00
-	Ofloxacin (Tarivid) Otic	30	Botol	2020	36.899,50	1.106.985,00
-	Ondansetron 4 mg Tab	800	Tablet	2020	643,50	514.800,00
-	Ondansetron 8 mg Tab	6.816	Tablet	2020	605,90	4.129.814,40
-	Oralit	2.900	Sachet	2020	273,00	791.700,00
-	Oxaliplatin (Rexta) 50 mg Inj	5	Vial	2020	250.000,00	1.250.000,00
-	Oxymethazoline HCl 0,05% (Iliadin) Dr	20	Botol	2020	37.433,00	748.660,00
-	Oxymethazoline HCl 0,05% (Iliadin) Sp	20	Botol	2020	39.468,00	789.360,00
-	Oxytetrasiklin Salep Kulit	50	Tube	2020	1.649,34	82.467,00
-	Oxytocin 10 IU Inj	1.100	Ampul	2020	1.232,00	1.355.200,00

No	Nama Obat	Jumlah	Sediaan	Tanggal Kadaluarsa	Harga	Total (Rp)
-	Prednison 5 mg Tab (Lupred)	500	Tablet	2020	107,00	53.500,00
-	Ranitidine 50 mg/2ml Inj	26.000	Ampul	2020	1.155,00	30.030.000,00
-	Rosuvastatin 10 mg Tab	1.260	Tablet	2020	1.650,00	2.079.000,00
-	Salmeterol + Fluticasone (Seretide) 250 r	168	Box	2020	116.686,90	19.603.399,20
-	Suplemen : Alinamin Tablet	800	Tablet	2020	486,61	389.285,60
-	Thiamphenicol 500 mg Tab (Thiamex)	306	Kapsul	2020	984,00	301.104,00
-	Tramadol Inj	460	Ampul	2020	1.764,00	811.440,00
-	Tramadol inj	20	Ampul	2020	9.350,00	187.000,00
-	Tramadol Kap	158	Kapsul	2020	329,60	52.076,80
-	Ulsidex 500 mg	137	Tablet	2020	368,00	50.416,00
-	Vit B 12 / Sianokobalamin (Zyfort) Inj	80	Vial	2020	5.376,00	430.080,00
-	Zinc Pro Drop	80	botol	2020	6.281,00	502.480,00
-	Zink Syrup 20 mg/5 ml	80	Botol	2020	3.284,60	262.768,00
3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN						210.195.968,00
-	Aminofusin Paed	1	fls	1-Jan-20	52.000,00	52.000,00
-	Oxyneo 10 mg	10	tablet	1-Jan-20	34.304,00	343.040,00
-	Clopidogrel 75 mg	12	tablet	1-Jan-20	1.318,00	15.816,00
-	Parasetamol infus	2	botol	1-Jan-20	11.990,00	23.980,00
-	Wida 2 A	5	fls	1-Jan-20	9.118,00	45.590,00
-	Ibuprofen syrup	5	botol	1-Jan-20	3.814,00	19.070,00
-	Vigamox tetes mata	1	botol	1-Jan-20	81.000,00	81.000,00
-	Prednison	50	tablet	1-Jan-20	74,00	3.700,00
-	Leucogen	13	vial	Des 2019	183.350,00	2.383.550,00
-	Tarceva	30	tablet	1-Jan-20	590.000,00	17.700.000,00
-	Lipofundin inf	14	botol	1-Feb-20	66.501,00	931.014,00
-	Domperidon syrup	2	botol	1-Feb-20	2.862,00	5.724,00
-	Vitamin C inj	57	ampul	1-Feb-20	5.772,00	329.004,00
-	Norepinephrine inj	7	ampul	1-Feb-20	46.002,00	322.014,00
-	Cedocard inj	9	ampul	1-Feb-20	31.000,00	279.000,00
-	Clinoleic	6	fls	1-Feb-20	169.125,00	1.014.750,00
-	Humalog Mix 50	1	pen	1-Feb-20	110.000,00	110.000,00
-	Salofalk 500 mg	88	tablet	1-Feb-20	11.253,00	990.264,00
-	Dacin 150 mg	21	tablet	1-Feb-20	704,00	14.784,00
-	Ramipril 2.5 mg	21	tablet	1-Feb-20	295,00	6.195,00
-	Glicazide 80 mg	215	tablet	1-Feb-20	220,00	47.300,00
-	Polidemisin ED	1	botol	1-Feb-20	10.301,00	10.301,00
-	Arimidex	1.214	tablet	1-Feb-20	7.300,00	8.862.200,00
-	Oxyneo 15 mg	8	tablet	20-Feb-20	48.025,00	384.200,00
-	Serum Bio save	4	vial	20-Feb-20	473.000,00	1.892.000,00
-	Gentamicin salp kulit	3	tube	20-Feb-20	1.755,00	5.265,00
-	Clozapin 100 mg	404	tablet	20-Feb-20	5.000,00	2.020.000,00
-	Udopa injeksi	9	ampul	maret 2020	9.849,00	88.641,00
-	Epinefrin injeksi	12	ampul	maret 2020	1.848,00	22.176,00
-	Dumin 250 mg supp	26	supp	maret 2020	19.698,00	512.148,00
-	Binecap	978	tablet	maret 2020	20.000,00	19.560.000,00
-	Dexyr syrup	4	botol	maret 2020	3.937,00	15.748,00
-	Difenhidramin injeksi	4	ampul	maret 2020	1.262,00	5.048,00
-	Miloz 5 mg injeksi	1	ampul	maret 2020	4.400,00	4.400,00
-	Vitamin C injeksi	3	ampul	Februari 2020	5.772,00	17.316,00
-	Nicardipin injeksi	1	ampul	Februari 2020	34.979,00	34.979,00
-	Otsu Dex 40 %	13	fls	maret 2020	8.690,00	112.970,00
-	Meptin Swinghaler	133	botol	maret 2020	81.999,00	10.905.867,00
-	Cendo Noncort	1	strip	maret 2020	41.827,00	41.827,00
-	Reco ED	1	botol	maret 2020	5.714,00	5.714,00
-	Spirolacton 100 mg	171	tablet	maret 2020	878,00	150.138,00
-	Cotrimoxazole	270	tablet	maret 2020	344,00	92.880,00
-	Pyrazinamide 500 mg	15	tablet	maret 2020	239,00	3.585,00
-	Cyclo progynova	10	tablet	maret 2020	6.105,00	61.050,00
-	Bioprexum	62	tablet	maret 2020	2.640,00	163.680,00
-	Meylon	2	ampul	maret 2020	6.201,00	12.402,00
-	Nerilon	10	tube	maret 2020	24.750,00	247.500,00
-	Bisolvon injeksi	158	ampul	1-Apr-20	35.026,00	5.534.108,00
-	Otsu Kcl	76	ampul	20-Apr-20	3.223,00	244.948,00
-	Carbamazepin 200 mg	63	tablet	1-Apr-20	234,00	14.742,00
-	Tenace 5 mg	141	tablet	1-Apr-20	2.924,00	412.284,00
-	Levopar	37	tablet	1-Apr-20	1.035,00	38.295,00
-	Vitamin B1	73	tablet	1-Apr-20	30,00	2.190,00

No	Nama Obat	Jumlah	Sediaan	Tanggal Kadaluarsa	Harga	Total (Rp)
-	Diamicon MR 60	34	tablet	1-Apr-20	2.992,00	101.728,00
-	Durogesic 25 UI	30	lembar	1-Apr-20	195.520,00	5.865.600,00
-	Urinter	18	tablet	1-Apr-20	1.400,00	25.200,00
-	Pro TB 2	109	tablet	1-Apr-20	4.194,00	457.146,00
-	Combiven nebule	5	nebule	1-Apr-20	4.550,00	22.750,00
-	Dexamethasone injeksi	1	ampul	1-Apr-20	1.210,00	1.210,00
-	Simvastatin 10 mg	300	tablet	1-Apr-20	200,00	60.000,00
-	Omeprazole injeksi	108	vial	1-Apr-20	11.123,00	1.201.284,00
-	Ventolin nebule	1	nebule	1-Apr-20	4.000,00	4.000,00
-	Norepinefrin	2	ampul	1-Apr-20	46.002,00	92.004,00
-	Isosorbid Dinitrat 5 mg	5	tablet	1-Apr-20	98,00	490,00
-	Procain benzil penicillin	28	vial	mei 2020	16.720,00	468.160,00
-	Piracetam 1 gram injeksi	26	ampul	mei 2020	4.422,00	114.972,00
-	Epinefrin injeksi	30	ampul	mei 2020	1.848,00	55.440,00
-	Deksamethason	498	tablet	mei 2020	30,00	14.940,00
-	Lovenox 0.4	18	vial	mei 2020	85.000,00	1.530.000,00
-	Ar-Gout	182	tablet	mei 2020	2.567,00	467.194,00
-	Cetadop injeksi	76	ampul	mei 2020	7.480,00	568.480,00
-	Metformin 500 mg	167	tablet	mei 2020	125,00	20.875,00
-	Ranitidin	180	tablet	mei 2020	114,00	20.520,00
-	Candesartan 16 mg	11	tablet	mei 2020	998,00	10.978,00
-	Amikasin 250 mg	16	vial	mei 2020	35.500,00	568.000,00
-	Cendo Noncort	12	strip	mei 2020	41.827,00	501.924,00
-	Sharox 500 mg	4	tablet	mei 2020	20.790,00	83.160,00
-	Meptin swinghaler	38	botol	mei 2020	81.999,00	3.115.962,00
-	Amikasin 500 mg	4	vial	mei 2020	33.475,00	133.900,00
-	Roculax injeksi	9	ampul	mei 2020	65.000,00	585.000,00
-	Primaquin	87	tablet	mei 2020	119,00	10.353,00
-	Vitamin K	110	tablet	mei 2020	800,00	88.000,00
-	Pegasy 180	57	vial	mei 2020	1.248.221,00	71.148.597,00
-	Cendo Carpine 2%	8	botol	juni 2020	18.810,00	150.480,00
-	Furosemid injeksi	2	ampul	juni 2020	1.830,00	3.660,00
-	Norepinefrin injeksi	2	ampul	juni 2020	46.002,00	92.004,00
-	Trental 400 mg	103	tablet	juni 2020	8.727,00	898.881,00
-	Sukralfat Syrup	2	botol	juni 2020	9.192,00	18.384,00
-	Tarivid tetes mata	3	botol	juni 2020	51.892,00	155.676,00
-	Artesunate	15	vial	juni 2020	33.792,00	506.880,00
-	Terastach	25	fls	juni 2020	89.100,00	2.227.500,00
-	Sodium Valproat	6	botol	juni 2020	26.987,00	161.922,00
-	Citicholin 250 mg injeksi	13	ampul	juni 2020	5.320,00	69.160,00
-	Dumin 125 mg	3	supp	juni 2020	14.108,00	42.324,00
-	Rifampicin 300 mg	9	kapsul	juni 2020	671,00	6.039,00
-	Zinnat 500 mg	20	tablet	juni 2020	4.500,00	90.000,00
-	Illiadin 0.05%	8	botol	juni 2020	39.468,00	315.744,00
-	Dialifer injeksi	21	ampul	juni 2020	30.067,00	631.407,00
-	Berotec inhaler	5	botol	juni 2020	83.190,00	415.950,00
-	Vitamin B kompleks	473	tablet	juni 2020	25,00	11.825,00
-	Pamol 250 mg	12	supp	juni 2020	10.450,00	125.400,00
-	Vigamox	2	botol	juni 2020	81.000,00	162.000,00
-	Simvastatin 20 mg	112	tablet	juni 2020	250,00	28.000,00
-	Diazepam injeksi	2	ampul	juni 2020	1.913,00	3.826,00
-	Otsu MgSo4 40%	6	fls	juli 2020	2.700,00	16.200,00
-	Furosemid injeksi	1	ampul	juli 2020	1.830,00	1.830,00
-	Atropin sulfas injeksi	187	ampul	juli 2020	1.672,00	312.664,00
-	Bisacodil	288	tablet	juli 2020	317,00	91.296,00
-	Otsu Dextrose 5 %	5	fls	juli 2020	6.899,00	34.495,00
-	Metoclopramide injeksi	21	ampul	juli 2020	3.904,00	81.984,00
-	Ketoprofen	611	tablet	juli 2020	800,00	488.800,00
-	Venofer injeksi	16	ampul	juli 2020	172.040,00	2.752.640,00
-	Primperan injeksi	20	ampul	juli 2020	4.092,00	81.840,00
-	Illiadin 0.05%	6	botol	juli 2020	39.468,00	236.808,00
-	Oralit	4	sachet	juli 2020	274,00	1.096,00
-	V bloc 6.25 mg	44	tablet	juli 2020	1.914,00	84.216,00
-	Pradaxa 110 mg	12	tablet	juli 2020	14.800,00	177.600,00
-	Depakote ER 250 mg	205	tablet	juli 2020	2.900,00	594.500,00
-	Coditam	28	tablet	juli 2020	4.510,00	126.280,00
-	Renaquil	56	tablet	juli 2020	715,00	40.040,00
-	Harnal D 0.2	181	tablet	juli 2020	7.788,00	1.409.628,00

No	Nama Obat	Jumlah	Sediaan	Tanggal Kadaluarsa	Harga	Total (Rp)
-	Cefepim injeksi	6	vial	juli 2020	25.025,00	150.150,00
-	Plavix	12	tablet	juli 2020	20.724,00	248.688,00
-	Diamicron MR 60 mg	19	tablet	juli 2020	2.992,00	56.848,00
-	Euthyrox 50	63	tablet	juli 2020	771,00	48.573,00
-	Oxytetracyclin	15	tube	juli 2020	2.772,00	41.580,00
-	Hervis salap	37	tube	juli 2020	36.018,00	1.332.666,00
-	Progynova	69	tablet	juli 2020	8.044,00	555.036,00
-	Bricasma nebule	54	nebule	juli 2020	7.124,00	384.696,00
-	Berotec inhaler	10	botol	juli 2020	83.190,00	831.900,00
-	Betahistin	8	tablet	juli 2020	154,00	1.232,00
-	Serum PPDT	2	vial	juli 2020	684.684,00	1.369.368,00
-	Zinnat 500 mg	437	tablet	agustus 2020	4.500,00	1.966.500,00
-	Cotrimoxazole 960 mg	208	tablet	agustus 2020	344,00	71.552,00
-	Cripsa	10	tablet	agustus 2020	8.234,00	82.340,00
-	Isotic adretor 0.25 %	10	botol	agustus 2020	10.665,00	106.650,00
-	Glikuidon	495	tablet	agustus 2020	1.050,00	519.750,00
-	Otopain	9	botol	agustus 2020	40.260,00	362.340,00
-	Ecosol Dex 10 %	1	botol	agustus 2020	7.150,00	7.150,00
-	Omeprazole injeksi	1	vial	agustus 2020	11.123,00	11.123,00
-	Acetosal 100 mg	37	tablet	agustus 2020	154,00	5.698,00
-	Euthyrox 50	50	tablet	agustus 2020	771,00	38.550,00
-	Vertikaf	397	tablet	agustus 2020	1.640,00	651.080,00
-	Furosemid injeksi	34	ampul	agustus 2020	1.830,00	62.220,00
-	Candesartan 8 mg	5	tablet	agustus 2020	519,00	2.595,00
-	Cefepim injeksi	32	vial	agustus 2020	25.025,00	800.800,00
-	KA EN 1 B	2	botol	agustus 2020	10.000,00	20.000,00
-	Difenhidramin injeksi	4	ampul	agustus 2020	1.262,00	5.048,00
-	Zinnat 500 mg	830	tablet	1-Sep-20	4.500,00	3.735.000,00
-	Phytomenadion	800	tablet	1-Sep-20	800,00	640.000,00
-	Herbesser injeksi	12	ampul	1-Sep-20	144.500,00	1.734.000,00
-	Cetadop injeksi	80	ampul	1-Sep-20	7.480,00	598.400,00
-	Bisolvon injeksi	150	ampul	1-Sep-20	35.026,00	5.253.900,00
-	Cefuroxime injeksi	5	ampul	1-Sep-20	31.997,00	159.985,00
-	Aspilet	14	tablet	1-Sep-20	110,00	1.540,00
-	Atropin Sulfas	10	ampul	1-Sep-20	1.672,00	16.720,00
-	Amiodaron injeksi	1	ampul	1-Sep-20	12.355,00	12.355,00
-	Otsu Mgso4 20 %	7	ampul	1-Sep-20	2.700,00	18.900,00
-	Roculax	9	ampul	1-Sep-20	65.000,00	585.000,00
-	Catapres injeksi	21	ampul	1-Sep-20	33.900,00	711.900,00
-	Otsu Dex 40 %	12	ampul	1-Sep-20	8.690,00	104.280,00
-	Pantocain 0.5 %	9	botol	1-Sep-20	13.204,00	118.836,00
-	Hydrocortison 1 %	5	tube	1-Sep-20	3.513,00	17.565,00
-	Procaïn penicillin injeksi	14	vial	1-Sep-20	16.720,00	234.080,00
-	Polidemisin ED	5	botol	1-Sep-20	10.301,00	51.505,00
-	Illiadin 0.05%	1	botol	1-Sep-20	39.648,00	39.648,00
-	Meylon	104	ampul	okt 2020	6.201,00	644.904,00
-	Isoprinosine	14	tablet	okt 2020	11.663,00	163.282,00
-	Aminoleban	1	fls	okt 2020	74.655,00	74.655,00
-	Cetadop injeksi	52	ampul	okt 2020	7.480,00	388.960,00
-	Rosuvastatin 10 mg	30	tablet	oktober 2020	1.650,00	49.500,00
-	Miniaspi	85	tablet	oktober 2020	99,00	8.415,00
-	Acetosal	26	tablet	oktober 2020	154,00	4.004,00
-	Pro TB 2	41	tablet	oktober 2020	4.194,00	171.954,00
-	Cendo catarlent	2	botol	oktober 2020	22.398,00	44.796,00
-	Hydrocortison 2.5 %	10	tube	oktober 2020	2.712,00	27.120,00
-	Acyclovir cream	10	tube	oktober 2020	2.697,00	26.970,00
-	Dipenhidramin injeksi	29	ampul	oktober 2020	1.262,00	36.598,00
-	Novorapid	2	pen	oktober 2020	87.000,00	174.000,00
-	Methylergometrin injeksi	186	ampul	1-Nov-20	2.750,00	511.500,00
-	Focyn 2 gram	45	vial	1-Nov-20	118.800,00	5.346.000,00
-	Ambroxol	74	tablet	1-Nov-20	120,00	8.880,00
-	Humalog kwikpen	2	pen	1-Nov-20	87.000,00	174.000,00
-	Citicholin 250 mg injeksi	4	ampul	1-Nov-20	5.320,00	21.280,00
-	Cendo mydriatil 0.5 %	1	botol	1-Nov-20	28.586,00	28.586,00
-	Pro TB 2	40	tablet	1-Nov-20	4.194,00	167.760,00
-	Aminoleban	9	botol	1-Nov-20	74.655,00	671.895,00
-	Glaopen	10	tablet	Desember 2020	89.348,00	893.480,00
-	Epinefrin ijeksi	146	ampul	Desember 2020	1.848,00	269.808,00

No	Nama Obat	Jumlah	Sediaan	Tanggal Kadaluarsa	Harga	Total (Rp)
-	Aminoleban	1	botol	Desember 2020	74.655,00	74.655,00
-	Humalog kwikpen	3	pen	Desember 2020	87.000,00	261.000,00
-	Vitamin B6	61	tablet	Desember 2020	16,00	976,00
3. DINAS KESEHATAN ACEH						4.653.576.593,00
-	Oxytocin Injeksi	19400	Box/100 ampul	Nov-20	1.232,00	23.900.800,00
-	Methilergometrin Injeksi	49900	Box/100 ampul	Jul-20	3.399,00	169.610.100,00
-	Ampicillin Injeksi 1000 mg	520	Box/100 ampul	Nov-20	9.473,00	4.925.960,00
-	Evafirenz 600 mg	1192	Botol	Feb-20	228.750,00	272.670.000,00
-	Tenofovir 300 mg	210	Botol	Feb-20	290.640,00	61.034.400,00
-	Zidovudin 100 mg	17	Botol	Jun-20	102.000,00	1.734.000,00
-	Rilpivirine 25 mg (EDURANT)	12	Botol	May-20	92.730,00	1.112.760,00
-	Lamivudin, Nevirapin, Zidovudin (30 mg)	18	Botol	Nov-20	42.000,00	756.000,00
-	Tenofovir 300 mg + Emtricitabin 200 mg	180	Botol	Nov-19	303.461,00	54.622.980,00
-	Evafirenz 600 mg + Lamivudine 300 mg	2	Botol	Jul-17	366.300,00	732.600,00
-	Evafirenz 600 mg + Lamivudine 300 mg	1	Botol	Aug-19	366.300,00	366.300,00
-	Carbamazepine 200 mg	99	100 Tablet / Kotak	Jul-20	23.400,00	2.316.600,00
-	Diazepam injeksi	611	10 Ampul / Kotak	Jul-20	19.130,00	11.688.430,00
-	Fenobarbital injeksi 50 mg/ml	38	30 Ampul / Kotak	Aug-20	57.750,00	2.194.500,00
-	Fitomenadion (vit. K1) injeksi 10 mg/ml	670	30 Ampul / Kotak	Oct-20	125.010,00	83.756.700,00
-	Antihemoroid	40	10 Supp / Kotak	Sep-20	36.420,00	1.456.800,00
-	Clindamycin 150 mg	1723	50 Tablet / Kotak	Aug-20	37.700,00	64.957.100,00
-	Setirizin sirup	12	Botol	Jul-20	2.993,00	35.916,00
-	Fitomenadion inj	965	30 ampul/kotak	Aug-18	122.490,00	118.202.850,00
-	MgSO4 40%	7100	Vial	Oct-18	3.650,00	25.915.000,00
-	Fenoterol Hbr Aerosol (Berotec)	200	Kotak	Dec-19	83.190,00	16.638.000,00
-	Diazepam injeksi	408	10 ampul/kotak	Feb-20	19.130,00	7.805.040,00
-	Tablet Tambah Darah	3039	30 tablet/kotak	Mar-20	12.270,00	37.288.530,00
-	Azitromicin sirup	100	Botol	Sep-19	23.448,00	2.344.800,00
-	Metil Ergometrin inj	531	100 ampul/kotak	Aug-19	268.400,00	142.520.400,00
-	Oksitosin inj	91	100 ampul/kotak	Aug-19	190.000,00	17.290.000,00
-	Retinol (Vitamin A) kapsul 100.000IU	160	50 kapsul/botol	Mar-20	16.350,00	2.616.000,00
-	Kasa Hidrofil steril 16x16 cm	200	Kotak	May-21	6.800,00	1.360.000,00
-	Gloves M	143	100 pcs/kotak	Aug-22	53.130,00	7.597.590,00
-	Gloves L	41	100 pcs/kotak	Jul-22	53.130,00	2.178.330,00
-	Retinol (Vitamin A) kapsul 100.000IU	1981	50 kapsul/botol	Sep-20	16.550,00	32.785.550,00
-	Mineral Mix	174	40 saset/kotak	Sep-20	116.800,00	20.323.200,00
-	Retinol (Vitamin A) kapsul 200.000IU	2560	50 kapsul/botol	Aug-20	29.800,00	76.288.000,00
-	Klobazam 10 mg	5	Tablet	Feb-22	776,00	3.880,00
-	GLUKOSA 10 %	1980	BOTOL	Aug-20	6.270,00	12.414.600,00
-	Iodine Test	2939	Botol	Apr-20	5.833,00	17.143.187,00
-	Glass Ionomer Cement / Fuji IX	18	Botol	Oct-20	481.250,00	8.662.500,00
-	GC Gold Label 9 Extra 1-1 PKG a 3,5	8	Botol	Jan-21	720.500,00	5.764.000,00
-	Retinol (Vitamin A) kapsul 100.000IU	11497	50 kapsul/botol	Mar-20	16.350,00	187.975.950,00
-	Pehacain Inj	1084	20 Ampul/kotak	Oct-20	62.260,00	67.489.840,00
-	Campak Rubella (MR) 10ds	19800	Vial	Des - 2019	155.813,00	3.085.097.400,00
TOTAL 1 + 2 + 3 + 4						5.009.147.146,85

DAFTAR BAHAN MEDIS HABIS PAKAI TAHUN 2019

NO	Nama Barang / Uraian Pemeriksaan / Jenis Menu	Volume	Satuan	Tahun Kadaluarsa	Harga Satuan	Total (Rp)
1. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK						55.697.165,35
-	Bronoderm	25	-	2020	130.000,20	3.250.005,00
-	Catgut Plain 2/0 Cutting	36	-	2020	28.583,50	1.029.006,00
-	Catgut plain 3/0 Tapper	2	-	2020	1.444.410,00	2.888.820,00
-	ETT Malinckrodt 4.0 cuff	15	-	2020	36.000,00	540.000,00
-	ETT Malinckrodt 5.0 Uncuff	15	-	2020	21.440,10	321.601,50
-	ETT Malinckrodt 5.5 cuff	20	-	2020	34.999,00	699.980,00
-	ETT Malinckrodt 6.5 Cuff	5	-	2020	35.439,91	177.199,55
-	ETT NO.3,0 Cuff	1	-	2020	20.900,00	20.900,00
-	ETT Non Cuff 4,0	10	-	2020	93.555,00	935.550,00
-	Ez Cleanser Mindray	2	-	2020	880.000,00	1.760.000,00
-	Fluid Diamond	2	-	2020	3.300.000,00	6.600.000,00
-	Gelang Anak Putih Alexa	100	-	2020	1.153,46	115.346,00
-	Hand Scund Steril 8	50	-	2020	6.156,15	307.807,50
-	Kasa Hidrofyl 16x16 Alexa	106	-	2020	6.930,00	734.580,00
-	Masker Non Rebreating Anak	35	-	2020	30.492,00	1.067.220,00
-	Masker Non Rebreating Dewasa	55	-	2020	30.492,00	1.677.060,00
-	Mede Blue	5	-	2020	50.840,00	254.200,00
-	Peep 5cm H2O Intersurgical	5	-	2020	498.069,00	2.490.345,00
-	Perhidrol 3% (H2O2)	9	-	2020	27.720,00	249.480,00
-	Rectal Tube No.22	3	-	2020	8.316,00	24.948,00
-	Rinse Mindray	1	-	2020	570.900,00	570.900,00
-	Slide Superfrost Plus	5	-	2020	654.500,00	3.272.500,00
-	S spuit 1 cc 26 g x 1/2 APL	241	-	2020	995,50	239.915,50
-	Suction Cateter No 16	42	-	2020	3.777,40	158.650,80
-	Suction Cateter no 16	1	-	2020	7.100,00	7.100,00
-	Surgicryl 2/0 HR 36	18	-	2020	21.582,00	388.476,00
-	Surplug inj	250	-	2020	17.580,20	4.395.050,00
-	Tegaderm 9x25cm	50	-	2020	28.504,93	1.425.246,50
-	Three Way Tubing /Buntut	13	-	2020	14.322,00	186.186,00
-	Tracheostomy 7	1	-	2020	483.792,00	483.792,00
-	Transparan Dressing 10x12 cm	915	-	2020	11.400,00	10.431.000,00
-	Vacubest No EDTA	20	-	2020	198.000,00	3.960.000,00
-	Vygon Neohelp S	10	-	2020	148.500,00	1.485.000,00
-	Xylene 3,8L	3	-	2020	955.900,00	2.867.700,00
-	Xylocain Spray	4	-	2020	170.400,00	681.600,00
2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ZAINOEL ABIDIN						15.727.153,00
-	Wing needle G 25	2	pcs	Apr-20	5.643,00	11.286,00
-	Wing G 27	100	pcs	Apr-20	5.667,00	566.700,00
-	Surgipro 7-0	32	pcs	Apr-20	100.600,00	3.219.200,00
-	Polysorb 0	10	pcs	mei 2020	130.380,00	1.303.800,00
-	Suction no.16	4	pcs	mei 2020	5.547,00	22.188,00
-	Suction no.06	2	pcs	mei 2020	5.547,00	11.094,00
-	Folley Catheter no.08	1	pcs	mei 2020	11.880,00	11.880,00
-	Guedel	1	pcs	mei 2020	13.125,00	13.125,00
-	Wing G 27	100	pcs	Apr-20	5.667,00	566.700,00

NO	Nama Barang / Uraian Pemeriksaan / Jenis Menu	Volume	Satuan	Tahun Kadaluarsa	Harga Satuan	Total (Rp)
-	Surgipro 7-0	32	pcs	Apr-20	100.600,00	3.219.200,00
-	Suction FR 6	4	pcs	mei 2020	5.547,00	22.188,00
-	Folley Catheter no.20	23	pcs	mei 2020	11.880,00	273.240,00
-	Manometer Line Hitam	18	pcs	mei 2020	42.000,00	756.000,00
-	NGT FR 3.5 cm	1	pcs	juni 2020	5.941,00	5.941,00
-	Suction catheter	2	pcs	juni 2020	5.547,00	11.094,00
-	ETT KK 7.5	4	pcs	juni 2020	40.000,00	160.000,00
-	Feeding Tube	50	pcs	juni 2020	14.399,00	719.950,00
-	NGT FR 5 100 CM	10	pcs	juni 2020	14.399,00	143.990,00
-	Trocard	1	pcs	juni 2020	79.707,00	79.707,00
-	Condom catheter	53	pcs	agustus 2020	1.500,00	79.500,00
-	Wing G 27	80	pcs	agustus 2020	5.667,00	453.360,00
-	Bloodset PL3	8	pcs	agustus 2020	325.000,00	2.600.000,00
-	Tracheostomy 5	1	pcs	Sep-20	616.165,00	616.165,00
-	Tracheostomy 6	1	pcs	Sep-20	594.418,00	594.418,00
-	Gypsona 6 inc	3	pcs	Nov-20	48.677,00	146.031,00
-	Gypsona 4 inc	5	pcs	Nov-20	22.891,00	114.455,00
-	NGT FR 3.5	1	pcs	Nov-20	5.941,00	5.941,00
TOTAL 1 + 2						71.424.318,35

**Rincian Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Masyarakat/Kabupaten/Kota
Pemerintah Aceh**

No.	SKPA	Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya Kepada Masyarakat/Kabupaten/Kota												Jumlah			
		Persediaan Pihak Ketiga Tanah	Persediaan Pihak Ketiga Alat-alat Angkutan	Persediaan Pihak Ketiga Pertanahan/Peternakan	Persediaan Pihak Ketiga Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Persediaan Pihak Ketiga Studio dan Komunikasi	Persediaan Pihak Ketiga Alat-alat Kedokteran	Persediaan Pihak Ketiga Alat-alat Laboratorium	Persediaan Pihak Ketiga Bangunan Gedung	Persediaan Pihak Ketiga Jalan dan Jembatan	Persediaan Pihak Ketiga Bangunan dan Air/irigasi	Persediaan Pihak Ketiga Buku Perpustakaan	Persediaan Pihak Ketiga Barang Bercorak		Persediaan Pihak Ketiga Bahan Makanan		
1	Dinas Pendidikan Aceh	-	-	-	25.456.226.000,00	8.903.461.500,00	-	7.635.009.090,00	93.401.978.033,00	-	-	-	9.470.341.850,00	1.245.154.000,00	-	-	146.112.170.473,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	-	627.000.000,00	-	-	-	4.172.361.900,00	-	18.542.653.000,00	-	-	-	-	-	-	-	23.342.014.900,00
3	Blud Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Blud Rumah Sakit Jiwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Blud Rumah Sakit Ibu dan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Pengairan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.301.890.425,00	-	-	-	-	26.301.890.425,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	-	-	-	-	-	-	102.120.632.147,00	96.092.763.247,00	-	-	-	-	-	-	198.213.395.394,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-	-	-	768.460.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.614.000,00	-	944.074.000,00
11	Dinas Sosial Aceh	-	-	-	5.751.010.628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.751.010.628,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	-	-	-	-	-	-	-	8.640.407.204,39	902.060.185,00	172.460.392,00	-	-	-	-	-	9.714.927.781,39
13	Dinas Pemberdayaan Perempuasn dan Perlindungan Anak Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Pertanahan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Perhubungan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	10.760.823.300,00	-	-	-	-	-	-	22.813.992.953,00	-	-	-	-	55.127.195,00	-	-	33.629.943.448,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	-	-	-	-	-	-	-	9.052.071.103,50	-	-	-	-	-	-	-	9.052.071.103,50
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Keumikon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Sekretariat Majelis Adat Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Syariah Islam Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391.864.200,00	-	-	-	-	391.864.200,00
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Sekretariat Baitul Mal Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	-	-	9.920.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.920.000,00
34	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	-	-	295.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.600.000,00
35	Dinas Peternakan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	259.620.000,00	-	-	-	-	-	-	-	259.620.000,00
39	Inspektorat Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PPKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Badan Kepegawaian Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Sekretariat Daerah Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Sekretariat DPRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	10.760.823.300,00	627.000.000,00	305.520.000,00	31.975.696.628,00	8.903.461.500,00	4.172.361.900,00	7.635.009.090,00	254.831.354.440,89	96.994.823.432,00	26.474.350.817,00	9.862.206.050,00	1.300.281.195,00	175.614.000,00			454.018.502.352,89

REKAPITULASI PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN DANA LUEP APBA
Periode 2020

No	Nama LUEP	Saldo per 31 Desember 2019		Setoran Januari			Sisa Piutang		Jumlah Tunggakan	Klasifikasi
		Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	(Jumlah Pokok + Denda) (Rp)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	(Sisa Pinjaman + Denda) (Rp)	
1	KP. Sulaiman Hamid	118.080.000,00	5.904.000,00	-	-	-	118.080.000,00	5.904.000,00	123.984.000,00	Macet
2	KP. Harap Beuna	39.920.000,00	3.496.000,00	-	-	-	39.920.000,00	3.496.000,00	43.416.000,00	Cukup Lancar
3	KUD. Geutanyo	29.999.000,00	1.499.950,00	-	-	-	29.999.000,00	1.499.950,00	31.498.950,00	Cukup Lancar
4	KP. Muka Blang Jaya	23.566.000,00	1.178.300,00	-	-	-	23.566.000,00	1.178.300,00	24.744.300,00	Cukup Lancar
5	UD. Bersama	58.040.000,00	2.952.000,00	-	-	-	58.040.000,00	2.952.000,00	60.992.000,00	Tidak Lancar
6	KP. Usaha Rajin	300.580.000,00	15.029.000,00	-	-	-	300.580.000,00	15.029.000,00	315.609.000,00	Macet
7	KP. Maha Terasa	201.420.000,00	11.571.000,00	-	-	-	201.420.000,00	11.571.000,00	212.991.000,00	Tidak Lancar
8	KP. Meutuah Baro	842.720.773,00	49.999.500,00	36.360.735,00	-	36.360.735,00	806.360.038,00	49.999.500,00	856.359.538,00	Tidak Lancar
9	KP. Beujaya	299.997.000,00	14.999.850,00	181.818,00	-	181.818,00	299.815.182,00	14.999.850,00	314.815.032,00	Macet
10	Koptan Putra Anak Bar	399.200.000,00	24.960.000,00	-	-	-	399.200.000,00	24.960.000,00	424.160.000,00	Tidak Lancar
11	CV. Tabah Mandiri	487.500.000,00	24.375.000,00	109.088.009,00	-	109.088.009,00	378.411.991,00	24.375.000,00	402.786.991,00	Macet
12	UD. Rahmad Tani	226.409.091,00	16.875.000,00	-	-	-	226.409.091,00	16.875.000,00	243.284.091,00	Cukup Lancar
13	KUD. Tupah	280.181.818,00	15.000.000,00	-	-	-	280.181.818,00	15.000.000,00	295.181.818,00	Macet
14	UD. Rizky	188.936.363,00	19.765.000,00	-	-	-	188.936.363,00	19.765.000,00	208.701.363,00	Tidak Lancar
15	UD. Makmur Jaya	439.200.000,00	24.960.000,00	-	-	-	439.200.000,00	24.960.000,00	464.160.000,00	Tidak Lancar
16	UD. Kawan Kita	443.690.909,00	22.230.000,00	-	-	-	443.690.909,00	22.230.000,00	465.920.909,00	Macet
17	UD. HMY Baru	327.600.000,00	16.380.000,00	-	-	-	327.600.000,00	16.380.000,00	343.980.000,00	Macet
18	UD. Mekar Tani	123.563.636,00	9.360.000,00	-	-	-	123.563.636,00	9.360.000,00	132.923.636,00	Macet
19	KP. Karya Warisan	90.909.090,00	5.000.000,00	-	-	-	90.909.090,00	5.000.000,00	95.909.090,00	Macet
20	KP. Hasrad Jaya	130.000.000,00	12.500.000,00	-	-	-	130.000.000,00	12.500.000,00	142.500.000,00	Tidak Lancar
21	KP. Berkat Tani	293.181.818,00	15.000.000,00	1.814.682,00	-	1.814.682,00	291.367.136,00	15.000.000,00	306.367.136,00	Macet
22	UD. Berkat Baru	68.727.273,00	17.550.000,00	-	-	-	68.727.273,00	17.550.000,00	86.277.273,00	Cukup Lancar
23	UD. Bina Tani	39.465.907,00	14.625.000,00	16.885.291,00	-	16.885.291,00	22.580.616,00	14.625.000,00	37.205.616,00	Cukup Lancar
24	UD. Jasa Bersama	5.000.000,00	9.750.000,00	-	-	-	5.000.000,00	9.750.000,00	14.750.000,00	Cukup Lancar
25	UD. Inti Tani	138.909.091,00	11.250.000,00	-	-	-	138.909.091,00	11.250.000,00	150.159.091,00	Tidak Lancar
26	UD. Usaha Tani	25.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	Cukup Lancar
27	UD. Oya	105.454.545,00	9.750.000,00	-	-	-	105.454.545,00	9.750.000,00	115.204.545,00	Tidak Lancar
28	UD. Makmur Tani	41.363.636,00	8.750.000,00	-	-	-	41.363.636,00	8.750.000,00	50.113.636,00	Cukup Lancar
29	UD. Hamida Tani	241.022.727,00	12.187.500,00	-	-	-	241.022.727,00	12.187.500,00	253.210.227,00	Macet
30	UD. Tani Makmur	183.750.000,00	12.187.500,00	-	-	-	183.750.000,00	12.187.500,00	195.937.500,00	Tidak Lancar
31	UD. Berkat	97.045.455,00	14.625.000,00	-	-	-	97.045.455,00	14.625.000,00	111.670.455,00	Tidak Lancar
32	KP. Magfirah	48.186.819,00	5.000.000,00	-	-	-	48.186.819,00	5.000.000,00	53.186.819,00	Tidak Lancar
33	KP. Kuta Sirong	96.398.636,00	5.000.000,00	269.827,00	-	269.827,00	96.128.809,00	5.000.000,00	101.128.809,00	Tidak Lancar
34	CV. Babah Dua	222.780.766,00	15.000.000,00	-	-	-	222.780.766,00	15.000.000,00	237.780.766,00	Tidak Lancar
35	Breeh Nanggroe	408.191.816,00	22.500.000,00	-	-	-	408.191.816,00	22.500.000,00	430.691.816,00	Tidak Lancar
36	KP. Sinar Tani	99.657.963,00	10.000.000,00	2.724.373,00	-	2.724.373,00	96.933.590,00	10.000.000,00	106.933.590,00	Tidak Lancar
37	KP. Kuta Jari	135.916.091,00	10.000.000,00	19.988.402,00	-	19.988.402,00	115.927.689,00	10.000.000,00	125.927.689,00	Tidak Lancar
38	KP. Indah Burma	29.707.971,00	3.000.000,00	-	-	-	29.707.971,00	3.000.000,00	32.707.971,00	Tidak Lancar
39	Usaha Baroe	19.707.971,00	3.500.000,00	-	-	-	19.707.971,00	3.500.000,00	23.207.971,00	Cukup Lancar
40	KP. UD Sentosa	200.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	200.000.000,00	10.000.000,00	210.000.000,00	Macet

No	Nama LUEP	Saldo per 31 Desember 2019		Setoran Januari			Sisa Piutang		Jumlah Tunggakan	Klasifikasi
		Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	(Jumlah Pokok + Denda) (Rp)	Pokok (Rp)	Denda (Rp)	(Sisa Pinjaman + Denda) (Rp)	
41	UD. Saboh Hate	258.636.364,00	13.750.000,00	-	-	-	258.636.364,00	13.750.000,00	272.386.364,00	Macet
42	KP. Usaha Tabina	116.754.545,00	9.240.000,00	-	-	-	116.754.545,00	9.240.000,00	125.994.545,00	Tidak Lancar
43	KP. Setia	167.200.000,00	8.360.000,00	-	-	-	167.200.000,00	8.360.000,00	175.560.000,00	Macet
44	KP. Tiga H	106.999.999,00	8.250.000,00	-	-	-	106.999.999,00	8.250.000,00	115.249.999,00	Tidak Lancar
45	KP. Karya Subur	40.954.544,00	9.680.000,00	-	-	-	40.954.544,00	9.680.000,00	50.634.544,00	Tidak Lancar
46	KP. Irma	136.781.815,00	9.680.000,00	9.085.110,00	-	9.085.110,00	127.696.705,00	9.680.000,00	137.376.705,00	Tidak Lancar
47	KP. Sumber Tani	166.909.091,00	8.800.000,00	-	-	-	166.909.091,00	8.800.000,00	175.709.091,00	Macet
48	KP. Sumber Rezeki	176.000.000,00	8.800.000,00	-	-	-	176.000.000,00	8.800.000,00	184.800.000,00	Macet
49	CV. Tunggal Mandiri	55.000.000,00	2.750.000,00	-	-	-	55.000.000,00	2.750.000,00	57.750.000,00	Macet
50	KP. Nida Makmur	70.325.202,00	3.740.000,00	-	-	-	70.325.202,00	3.740.000,00	74.065.202,00	Tidak Lancar
51	KP. Oriza Sativa	6.343.116,00	4.510.000,00	542.555,00	-	542.555,00	5.800.561,00	4.510.000,00	10.310.561,00	Cukup Lancar
52	KP. Takana Juo	63.487.632,00	3.740.000,00	1.985.498,00	-	1.985.498,00	61.502.134,00	3.740.000,00	65.242.134,00	Tidak Lancar
53	UD. Hanafi	103.128.790,00	5.390.000,00	-	-	-	103.128.790,00	5.390.000,00	108.518.790,00	Tidak Lancar
54	KP. Sumber Rezeki	264.000.000,00	13.200.000,00	-	-	-	264.000.000,00	13.200.000,00	277.200.000,00	Macet
55	KP. Sari Alam	-	9.900.000,00	-	-	-	-	9.900.000,00	9.900.000,00	Macet
56	KP. UD. Edi	40.700.000,00	2.035.000,00	-	-	-	40.700.000,00	2.035.000,00	42.735.000,00	Macet
57	KP. Syukri Yunus	169.508.348,00	15.300.000,00	903.290,00	-	903.290,00	168.605.058,00	15.300.000,00	183.905.058,00	Tidak Lancar
58	KP. Sapeu Pakat	164.174.267,00	9.498.000,00	909.091,00	-	909.091,00	163.265.176,00	9.498.000,00	172.763.176,00	Tidak Lancar
59	KP. UD Sumber Tani	117.581.818,00	6.720.000,00	1.818.182,00	-	1.818.182,00	115.763.636,00	6.720.000,00	122.483.636,00	Tidak Lancar
60	KP. UD Dua Saudara	180.200.000,00	11.760.000,00	-	-	-	180.200.000,00	11.760.000,00	191.960.000,00	Tidak Lancar
61	KP. Makmur Jaya	99.800.000,00	5.490.000,00	-	-	-	99.800.000,00	5.490.000,00	105.290.000,00	Tidak Lancar
62	KP. Tunas Muda	37.363.636,00	7.800.000,00	-	-	-	37.363.636,00	7.800.000,00	45.163.636,00	Macet
	Setoran Jasa	(5.000.000,00)	(1,00)	-	-	-	(5.000.000,00)	(1,00)	(5.000.001,00)	
	T O T A L	10.087.831.332,00	691.102.599,00	202.556.863,00	-	202.556.863,00	9.885.274.469,00	691.102.599,00	10.576.377.068,00	

RESUME PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG LUEP TAHUN 2020

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
1	Ir. Bahrul Walidin Pimpinan LUEP KP. Beujaya Desa Baro Jaman Kecamatan Mutiara, Kab. Pidie	Usaha Bangkrut	Nomor : 050/37/2005	299.815.182,00	14.999.850,00	314.815.032,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : - No.521/724, 21 November 2005 - No.050/102, 21 Februari 2006 - No.050/138, 3 Maret 2006 - No.521/121/3/2011, 31 Januari 2011 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - No. 526/1833/12/2014, 15 Desember 2014	
2	Muslim Pimpinan LUEP Makmur Jaya Desa Keude Linteung Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Rava	Usaha Tidak Jelas	Nomor : 050/1095/2009	99.800.000,00	5.490.000,00	105.290.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : - No.256/536/2009, 15 Juni 2010 - No.526/807/3/2010, 28 September 2010 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - No.526/1125/04/2015, 24 April 2015	
3	Abd. Majid Pimpinan LUEP KP. UD. Dua Saudara Desa Suak Bili, Kecamatan Suka Makmue, Kab. Nagan Raya	Usaha Bangkrut	Nomor : 050/956/2009	180.200.000,00	11.760.000,00	191.960.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : - No.256/536/2009, 15 Juni 2010 - No.526/807/3/2010, 28 September 2010 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - No.526/1125/04/2015, 24 April 2015	
4	Adam Sani Pimpinan LUEP KP. UD. Sumber Tani, Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/955/2009	115.763.636	6.720.000	122.483.636,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : - No.256/534/2009, 15 Juni 2010 - No.526/805/3/2010, 28 September 2010 - No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 - No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 - No.526/1123/04/2015, 24 April 2015	
5	Mukhtar Saleh	Usaha Macet	Nomor : 050/1329/2009	40.700.000,00	2.035.000,00	42.735.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012.	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
	Pimpinan LUEP KP. UD. Edi Desa Blang Seuneung Kec. Beutong Kab. Nagan Raya						-Penagihan melalui surat : -No.526/465.5/2009, 12 Juni 2009 -No.521/74/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013,26Nopember 2013 -No.526/1854/12/204, 15 Desember 2014	
6	Tamaniah Pimpinan LUEP KP. Sumber Rezeki, Desa Teruntung Payung Hilir Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara	Usaha Bangkrut	Nomor : 050/1295/2008	264.000.000	13.200.000	277.200.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.526/465.4/2009, 12 Juni 2009 -No.521/74/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013,26Nopember 2013 -No.526/1854/12/204, 15 Desember 2014	
7	H. Hanafi Pimpinan LUEP UD. Hanafi Desa Ujung Padang Kec. Labuhan Haji Barat Kab.Aceh Selatan	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1239/2008	103.128.790	5.390.000	108.518.790,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.256/692/2009, 16 Juli 2009 -No.256/1467.6/2009, 28 Desember 2009 -No.521/82/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1120/04/2015, 24 April 2015	
8	Bakhtiar Aly Pimpinan LUEP KP. Takana Joo Desa Keumumu Hilir Kec Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1292/2008	61.502.134	3.740.000	65.242.134,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.256/692/2009, 16 Juli 2009 -No.256/1467.8/2009, 28 Desember 2009 -No.521/81/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1119/04/2015, 24 April 2015	
9	Muslimah Pimpinan LUEP KP. Oriza Sativa Desa Ie Dingen Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1290/2008	5.800.561	4.510.000	10.310.561,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat :	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
10	H. Mahyuddin Pimpinan LUEP KP. Nida Makmur Desa Limau Saring Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan	Usaha Macet	Nomor : 050/1287/2008	70.325.202	3.740.000	74.065.202,00	- No. 526/465.7/2009, 12 Juli 2009 □ - Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.256/465.7/2009, 12 Juni 2009 -No.256/692/2009, 16 Juli 2009 -No.256/1467.4/2009, 28 Desember 2009 -No.521/77/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/1852/2014, 15 Desember 2014	
11	Hj. Mariam Pimpinan LUEP KP. Sumber Rezeki Gampong Kulam Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1278/2008	176.000.000,00	8.800.000,00	184.800.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No. 256/1467.1/2009, 28 Desember 2009 -No. 521/142/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1850/12/2014, 15 Desember 2014	
12	Izul Azhar Pimpinan LUEP KP. Sumber Tani Rumoh Blang Keude Simpang Jalan Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara	Usaha Bangkrut	Nomor : 050/1277/2008	166.909.091	8.800.000	175.709.091,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No. 256/1467.10/2009, 28 Desember 2009 -No. 521/143/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1849/12/2014, 15 Desember 2014	
13	Ibnu Hasan Main Pimpinan LUEP KP. Irma Desa Kamban Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/1276/2008	127.696.705	9.680.000	137.376.705,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No.526/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No.256/1467.11/2009, 28 Desember 2009 -No.521/144/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
14	Baharuddin Pimpinan LUEP KP. Karya Subur Desa Kubu Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Usaha Kurang lancar	Nomor : 050/1275/2008	40.954.544,00	9.680.000,00	50.634.544,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No.256/1467.12/2009,28 Desember 2009 -No.521/145/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013	
15	Budiman Pimpinan LUEP KP. Tiga H Desa Tanjong Putoh Kec. Nibong Kab. Aceh Utara	Usaha Macet	Nomor : 050/1271/2008	106.999.999	8.250.000	115.249.999,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No.256/1467.19/2009, 28 Desember 2009 -No.521/146/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1116/04/2015, 24 April 2015	
16	M. Thaib. AR Pimpinan LUEP KP. Setia Desa Meunasah Panton Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara	Usaha Macet	Nomor : 050/1270/2008	167.200.000,00	8.360.000,00	175.560.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No. 256/1467.9/2009, 28 Desember 2009 -No. 521/153.1/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1848/12/2014, 15 Desember 2014	
17	Saridin Hasan Pimpinan LUEP KP. Usaha Tabina Desa Blang Dalam Genteng Kec. Nisam Kab. Aceh Utara	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/1269/2008	116.754.545,00	9.240.000,00	125.994.545,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.256/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No.512/147/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1115/04/2015, 24 April 2015	
18	Nasir Nafi Pimpinan LUEP KP. Saboh Hate Desa Panigah Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara	Usaha macet	Nomor : 050/1268/2009	258.636.364,00	13.750.000,00	272.386.364,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 256/465.3/2009, 12 Juni 2009 -No. 256/1467.13/2009, 28 Desember 2009 -No. 521/148/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1847/12/2014, 15 Desember 2014	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
19	Said Bustami Pimpinan LUEP UD. Sentosa Desa Gelanggang Gajah Keude Tanjong Kec. Peusangan Kab. Aceh Barat Daya	Usaha tidak jelas	Nomor : 050/733/2007	200.000.000,00	10.000.000,00	210.000.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 521/430/2008, 28 Juli 2008 -No. 521/844/2008, 13 Oktober 2008 -No. 521/350.1/2009, 1 September 2008 -No. 526/351/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/154/3/2009, 21 Februari 2010 -No. 521/65/3/2011, 27 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1846/12/2014, 15 Desember 2014	
20	Nazi Mudin. B Pimpinan LUEP KP. Usaha Baroe Desa Jambo Papeun Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan	Usaha Kurang lancar	Nomor : 050/735/2007	19.707.971,00	3.500.000,00	23.207.971,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/329/2009, 13 Mei 2009 -No.256/156/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/76/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1138/04/2015, 24 April 2015	
21	Nazi Mudin. B Pimpinan LUEP KP. Indah Burma Desa Seuleukat Kec. Bakongan Timur Kab. Aceh Selatan	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/748/2007	29.707.971,00	3.000.000,00	32.707.971,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/330/2009, 13 Mei 2009 -No.256/155/3/2009, 21 Februari 2010 -No.521/75/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1114/4/2015, 24 April 2015	
22	Ahmad Yamani Pimpinan LUEP UD. Berkat Desa Peureupok Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/860/2007	97.045.455,00	14.625.000,00	111.670.455,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/335/2009, 13 Mei 2009 -No.256/180/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/149/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1110/04/2015, 24 April 2015	
23	Saiful Bahri Pimpinan LUEP UD. Tani Makmur Keude Simpang Empat Kec. Simpang Keramat Kab. Aceh Utara	Usaha bangkrut	Nomor : 050/859/2007	183.750.000,00	12.187.500,00	195.937.500,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/331/2009, 13 Mei 2009 -No.256/176/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/99/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
							-No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1109/04/2015, 24 April 2015	
24	Hamdani, HS Pimpinan LUEP UD. Hamida Tani Desa Teumpeun Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara	Usaha macet	Nomor : 050/858/2007	241.022.727,00	12.187.500,00	253.210.227,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 521/835/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/334/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/179/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/100/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1842/12/2014, 15 Desember 2014	
25	Saifuddin Pimpinan LUEP UD. Makmu Tani Desa Teupin Banja Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara	Usaha bangkrut	Nomor : 050/857/2007	41.363.636,00	8.750.000,00	50.113.636,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/342/2009, 13 Mei 2009 -No.256/187/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/101/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1135/04/2015, 24 April 2015	
26	Syafruddin Pimpinan LUEP UD. Oya Desa Meunasah Mancang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara	Usaha macet	Nomor : 050/856/2007	105.454.545,00	9.750.000,00	115.204.545,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/339/2009, 13 Mei 2009 -No.256/184/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/102/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1108/04/2015, 24 April 2015	
27	Abdul Munir Pimpinan LUEP Usaha Tani Jalan Pasan Inpres 3 Geudong Kec. Samudera Kabupaten Aceh Utara	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/855/2007	25.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/336/2009, 13 Mei 2009 -No.256/181/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/103/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 November 2013 -No.526/1134/04/2015, 24 April 2015	
28	Zulfikar Pimpinan LUEP Inti Tani Desa Geulumpang Sulu Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara	Usaha bangkrut	Nomor : 050/854/2007	138.909.091,00	11.250.000,00	150.159.091,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/337/2009, 13 Mei 2009 -No.256/182/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/104/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1107/04/2015, 24 April 2015	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
29	M. Yacob Ali Pimpinan LUEP UD. Jasa Bersama Desa Tanjung Dalam Selatan Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara	usaha kurang lancar	Nomor : 050/809/2007	5.000.000,00	9.750.000,00	14.750.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.256/175/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/105/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 November 2013 -No.526/1133/04/2015, 24 April 2015	
30	Nuridin M. Ali Pimpinan LUEP UD. Bina Tani Desa Lagang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara	Usaha Kurang lancar	Nomor : 050/808 /2007	22.580.616	14.625.000	37.205.616,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/338/2009, 13 Mei 2009 -No.256/183/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/106/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1132/04/2015, 24 April 2015	
31	M. Nuridin Mahmud Pimpinan LUEP UD. Berkat Baru Desa Meunasah Kumbang Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/807/2007	68.727.273,00	17.550.000,00	86.277.273,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/341/2009, 13 Mei 2009 -No.256/186/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/106.1/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1131/04/2015, 24 April 2015	
32	Saiful Muddin Pimpinan LUEP KP. Berkat Tani Gampong Mee Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara	Usaha Macet	Nomor : 050/795/2007	291.367.136	15.000.000	306.367.136,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1841/12/2014, 15 Desember 2014	
33	H. Hasanuddin Pimpinan LUEP KP. Hasrat Jaya Desa Rangkilah Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/791/2007	130.000.000,00	12.500.000,00	142.500.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/332/2009, 13 Mei 2009 -No.256/177/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/108/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1106/04/2015, 24 April 2015	
34	Said Hamid Pimpinan LUEP KP. Karya Warisan Desa Pucok Alue Dua Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur	Usaha bangkrut	Nomor : 050/851/2007	90.909.090,00	5.000.000,00	95.909.090,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 521/952/2008, 30 Oktober 2008 -No. 526/326/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/191/3/2010, 21 Februari 2010	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
							-No. 521/111/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1840/12/2014, 15 Desember 2014	
35	Dahlan ZA Pimpinan LUEP UD. Mekar Tani Desa Blang Me Timu Kec. Jeunib Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/995/2007	123.563.636,00	9.360.000,00	132.923.636,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 521/430/2008, 28 Juli 2008 -No. 521/832/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/310/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/171/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/124/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1839/12/2014, 15 Desember 2014	
36	Iskandar Pimpinan LUEP UD. MHY Baru Desa Cot Ara Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/987/2007	327.600.000,00	16.380.000,00	343.980.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 521/831/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/315/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/166/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/87/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1838/12/2014, 15 Desember 2014	
37	Ibrahim Ramli Pimpinan LUEP UD. Kawan Kita Jalan Tgk. Chik Ditiro Meunasah Capa Kota Juang Kabupaten Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/985/2007	443.690.909,00	22.230.000,00	465.920.909,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 521/829/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/365/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/164/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/98/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 November 2013 -No. 526/1836/12/2014,15 Desember 2014	
38	Mukhlis, ST Pimpinan LUEP UD. Makmur Jaya Desa Meunasah Dayah Kec. Glumpang Dua Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/791/2007	439.200.000,00	24.960.000,00	464.160.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 526/316/2009, 13 Mei 2009. -No. 521/828/2008, 13 Oktober 2008	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
39	Hasbi Yacob Pimpinan LUEP UD. Rizky Desa Meunasah Timur Kec. Peusangan Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/784/2007	188.936.363	19.765.000	208.701.363,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/306/2009, 13 Mei 2009 -No.256/174/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/30/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 November 2013 -No.526/1102/04/2015, 24 April 2015	
40	Saifullah AB Pimpinan LUEP KUD. Tufah Desa Blang Me Timu Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/783/2007	280.181.818	15.000.000	295.181.818,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 521/827/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/314/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/167/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/131/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1835/12/2014, 15 Desember 2014	
41	M. Yunus Ali Pimpinan LUEP UD. Rahmad Tani Desa Darul Aman Darussalam Kec. Samalanga Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/782/2007	226.409.091,00	16.875.000,00	243.284.091,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/307/2009, 13 Mei 2009 -No.256/173/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/135/1/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1101/04/2015, 24 April 2015	
42	Khalidin Ismail Pimpinan LUEP CV. Tabah Mandiri Desa Teuping Kupula Kecamatan Jeunib Kabupaten Bireuen	Usaha KurangLlancar	Nomor : 050/781/2007	378.411.991,00	24.375.000,00	402.786.991,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 521/826/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/308/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/172/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/93/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1834/12/2014, 15 Desember 2014	
43	Marzuki Ibrahim Pimpinan LUEP Koptan Putra Anak Bangsa Desa Juli Cot Meurak Kec. Kota Juang Kab. Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/779/2007	399.200.000,00	24.960.000,00	424.160.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/313/2009, 13 Mei 2009 -No.256/168/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/94/3/2011, 31 Januari 2011	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
							-No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1100/04/2015, 24 April 2015	
44	Drs. Ibnu Sakdan Pimpinan LUEP KP. Maha Terasa Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya	Usaha Macet	Nomor : 050/437/2005	201.420.000,00	11.571.000,00	212.991.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.050/102, 21 Februari 2006 -No.521/4971, 7 Maret 2007 -No.521/73/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1099/04/2015, 24 April 2015	
45	Zahrul Fudhni Pimpinan LUEP KP. Meutuah Baro Desa Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar	Kurang Lancar	Nomor : 050/08/2005	806.360.038,00	49.999.500,00	856.359.538,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.050/102, 21 Februari 2006 -No.050/138, 3 Maret 2006 -No.050/424, 6 Juli 2006 -No.521/4967, 7 Maret 2007 -No. Ku.900/355/2007, 18 Desember 2007 -No.521/60/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1098/04/2015, 24 April 2015	
46	T. Nyak Mawardi Pimpinan LUEP UD. Bersama Desa Tokoh Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya	Kurang Lancar	Nomor : 050/523/2004	58.040.000,00	2.952.000,00	60.992.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 050/22, 11 Februari 2005. -No. 050/91, 15 Maret 2005. -No. 050/804, 8 Desember 2005. -No. 521/4969, 7 Maret 2007.	
47	Idrus Harun Pimpinan LUEP UD. Muka Blang Jaya Desa Muka Blang Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya	Kurang Lancar	Nomor : 050/514/2004	23.566.000,00	1.178.300,00	24.744.300,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 050/22, 11 Februari 2005. -No. 050/91, 15 Maret 2005. -No. 050/804, 8 Desember 2005. -No. 521/4969, 7 Maret 2007.	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
48	Ilyas Cut Ali Pimpinan LUEP KP. Geutanyo Desa Ulee Ateung Kec. Madat Kab. Aceh Timur	Usaha Macet	Nomor : 050/483/2004	29.999.000,00	1.499.950,00	31.498.950,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 050/22, 11 Februari 2005. -No. 050/804, 8 Desember 2005. -No. 521/4969, 7 Maret 2007.	
49	Herman Ahmad Pimpinan LUEP KP. Sulaiman Hamid Desa Lhok Awe-Awe Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen	Usaha Macet	Nomor : 050/452/2003	118.080.000,00	5.904.000,00	123.984.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No. 518/22581, 8 September 2004 -No. 521/4968, 7 Maret 2007 -No. 521/136/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1831/12/2014, 15 Desember 2014	
50	Zamzami Pimpinan LUEP KP. Sapeu Pakat Desa Data Makmur Kec. Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar	Usaha Kurang Lancar	Nomor : 050/950/2009	163.265.176	9.498.000	172.763.176,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.256/531/2010, 15 Juni 2010 -No.526/802/3/2010, 28 September 2010 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1122/4/2015, 24 April 2015	
51	Syukri Yunus Pimpinan LUEP KP. Syukri Yunus Desa Leupung Ulee Alue Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar	Masih Berjalan Lancar	Nomor : 050/949/2009	168.605.058	15.300.000	183.905.058,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat : -No.526/801/3/2010, 28 September 2010 -No.256/530/2009, 15 Juni 2010 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1121/04/2015, 24 April 2015	
52	H. Rusli Pimpinan LUEP KP. Usaha Rajin Desa Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar	Usaha Tidak Jelas	Nomor : 050/584/2005	300.580.000,00	15.029.000,00	315.609.000,00	- Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. - Penagihan melalui surat :	
							-No. 050/102, 21 Februari 2006 -No. 050/138, 3 Maret 2006	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
							-No. 521/4967, 7 Maret 2007 -No. 521/69/3/2011, 27 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1832/12/2014, 15 Desember 2014	
53	Amiruddin Pimpinan LUEP KP. Sinar Tani Desa Lamnga Kec. Montasik Kab. Aceh Besar	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/950/2007	96.933.590	10.000.000	106.933.590,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012 -Penagihan melalui surat : -No.521/430/2008, 28 Juli 2008 -No.521/1882/2008, 20 Oktober 2008 -No.526/320/2009, 13 Mei 2009 -No.256/197/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/67/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1112/4/2015, 24 April 2015	
54	Rusydi Pimpinan LUEP KP. Kuta Jari Desa Lambaro Samahani Kec. Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar	Masih berjalan lancar	Nomor : 050/954/2007	115.927.689	10.000.000	125.927.689,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012 -Penagihan melalui surat : -No.521/843/2008, 13 Oktober 2008 -No.526/323/2009, 13 Mei 2009 -No.521/665/2009, 26 Agustus 2009 -No.256/194/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/64/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1113/04/2015, 24 April 2015	
55	Mauridatun RL Pimpinan LUEP CV. Tunggal Mandiri Desa Lambunot Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar	Usaha kurang lancar	Nomor : 050/1281/2008	55.000.000,00	2.750.000,00	57.750.000,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012. -Penagihan melalui surat : -No.256/465.6/2009, 12 Juni 2009 -No.256/1467.15/2009, 28 Desember 2009 -No.521/70/3/2011, 27 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1851/12/2014, 15 Desember 2014	
56	Sayid Chalid Pimpinan LUEP KP. Magfirah Desa Pulo Batee Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie	Usaha Macet	Nomor : 050/841/2007	48.186.818,00	5.000.000,00	53.186.818,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012 -Penagihan melalui surat : -No.521/836/2008, 13 Oktober 2008 -No.521/933/2008, 29 Oktober 2008	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
							-No.526/344/2009, 13 Mei 2009 -No.256/162/3/2010, 21 Februari 2010 -No.521/1210/3/2011, 31 Januari 2011 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No.526/1111/4/2015, 24 April 2015	
57	Zakiah H. Manyak Pimpinan LUEP KP. Kuta Sirong Desa Lhok Keutapang Kec. Pidie Kab. Pidie	Usaha macet	Nomor : 050/844/2007	96.128.809	5.000.000	101.128.809,00	Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September tahun 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 521/838/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/345/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/16/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/120/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1843/12/2014, 15 Desember 2014	
58	Abdul Wahed Thaleb Pimpinan LUEP CV. Babah Dua Desa Karieng Kec. Grong-Grong Kab. Pidie	Usaha bangkrut	Nomor : 050/845/2007	222.780.766	15.000.000	237.780.766,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012 -Penagihan melalui surat : -No. 521/839/2008, 13 Oktober 2008. -No. 526/346/2009, 13 Mei 2009. -No. 256/160/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/119/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013, 26 Nopember 2013 -No. 526/1844/12/2014, 15 Desember 2014	
59	Munaidi Yasin Pimpinan LUEP UD. Breuh Nanggroe Desa Jeumpa Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie	Usaha tidak jelas	Nomor : 050/1087/2007	408.191.816	22.500.000	430.691.816,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012. -Penagihan melalui surat : -No. 521/841/2008, 13 Oktober 2008 -No. 526/343/2009, 13 Mei 2009 -No. 256/163/3/2010, 21 Februari 2010 -No. 521/140/3/2011, 31 Januari 2011 -No. 526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No. 526/1785/11/2013,26 Nopember 2013 -No. 526/1845/12/2014, 15 Desember 2014	
60	Ismail A. Rahman Pimpinan LUEP KP. Sari Alam Desa Meurah Dua Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya	Masih berjalan lancar	Nomor : 050/1296/2008	-	9.900.000,00	9.900.000,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan. -Penagihan melalui surat : -No. 526/729/2009, 22 Juli 2009.	

No	Identitas Penanggung Hutang	Keadaan usaha penanggung hutang pada saat diserahkan	Surat Perjanjian	Jumlah Dana			Upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah di lakukan oleh penyerah piutang	Ket
				Pokok (Rp)	Denda (Rp)	Sisa Utang (Rp)		
61	Afdhal M. Daud Pimpinan LUEP KP. Tunas Muda Desa Matang Mesjid Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen	Usaha macet	Nomor : 050/1329/2009	37.363.636,00	7.800.000,00	45.163.636,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012. -Penagihan melalui surat : -No.256/527/2010, 15 Juni 2009 -No.526/799/3/2010, 28 September 2010 -No.526/507/5/2013, 7 Mei 2013 -No.526/1785/11/2013,26Nopember 2013 -No.526/1855/12/2014,15 Desember 2014	
62	Pimpinan LUEP KP. Harap Beuna	Usaha Cukup Lancar	-	39.920.000,00	3.496.000,00	43.416.000,00	-Telah menagih langsung kepada LUEP yang bersangkutan pada bulan September 2012	
	Setoran Jasa	-	-	(5.000.000)	-	(5.000.000,00)		
TOTAL				9.885.274.468,00	691.102.600,00	10.576.377.068,00		

ASET TETAP BERDASARKAN KONDISI BARANG

URAIAN	BAIK	BELUM MEMILIKI NILAI	DIKUASAI PIHAK LAIN	TOTAL ASET TETAP
ASET TETAP				
TANAH	2.928.785.831.593,79	159,00	7.400.100.000,00	2.936.185.931.752,79
Tanah	2.928.785.831.594	159	7.400.100.000	2.936.185.931.752,79
PERALATAN DAN MESIN	4.335.828.904.707,00	7.804,00	1.386.228.548,00	4.337.215.141.059,00
a. Alat Besar	156.381.405.736,49	11,00	-	156.381.405.747,49
b. Alat Angkutan	841.155.805.722,80	21,00	1.203.372.850,00	842.359.178.593,80
c. Alat Bengkel dan Ukur	73.082.686.856,42	310,00	-	73.082.687.166,42
d. Alat Pertanian	152.479.535.879,12	33,00	-	152.479.535.912,12
e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	935.963.771.504,35	5.133,00	29.690.000,00	935.993.466.637,35
f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	107.716.650.856,23	65,00	3.966.000,00	107.720.616.921,23
g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	660.172.338.230,91	138,00	-	660.172.338.368,91
h. Alat Laboratorium	465.260.185.151,08	1.700,00	-	465.260.186.851,08
i. Alat Persenjataan	3.788.127.170,00	-	-	3.788.127.170,00
j. Komputer	742.585.052.242,14	368,00	149.199.698,00	742.734.252.308,14
k. Alat Eksplorasi	271.622.800,00	4,00	-	271.622.804,00
l. Alat Pengeboran	22.150.000,00	1,00	-	22.150.001,00
m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	2.942.682.081,00	-	-	2.942.682.081,00
n. Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
o. Alat Keselamatan Kerja	12.406.899.663,00	9,00	-	12.406.899.672,00
p. Alat Peraga	562.220.200,00	-	-	562.220.200,00
q. Peralatan Proses/ Produksi	2.194.468.363,00	1,00	-	2.194.468.364,00
r. Rambu - Rambu	171.414.353.132,19	-	-	171.414.353.132,19
s. Peralatan Olah Raga	7.428.949.118,27	10,00	-	7.428.949.128,27
GEDUNG DAN BANGUNAN	6.789.807.091.089,35	466,00	179.035.000,00	6.789.986.126.555,35
a. Bangunan Gedung	6.513.549.985.732,71	455,00	179.035.000,00	6.513.729.021.187,71
b. Monumen	33.925.410.951,09	-	-	33.925.410.951,09
c. Bangunan Menara	15.071.779.537,94	-	-	15.071.779.537,94
d. Tugu Titik Kontrol / Pasti	227.259.914.867,62	11,00	-	227.259.914.878,62

URAIAN	BAIK	BELUM MEMILIKI NILAI	DIKUASAI PIHAK LAIN	TOTAL ASET TETAP
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	13.459.104.691.165,50	57,00	2.000.000,00	13.459.106.691.222,50
a. Jalan dan Jembatan	8.663.715.479.523,62	-	-	8.663.715.479.523,62
b. Bangunan Air	4.678.149.990.866,88	28,00	-	4.678.149.990.894,88
c. Instalasi	94.180.980.876,05	21,00	2.000.000,00	94.182.980.897,05
d. Jaringan	23.058.239.899,00	8,00	-	23.058.239.907,00
ASET TETAP LAINNYA	839.874.957.754,71	100.060,00	-	839.875.057.814,71
a. Bahan Perpustakaan	802.418.616.093,41	100.049,00	-	802.418.716.142,41
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	23.785.072.900,31	11,00	-	23.785.072.911,31
c. Hewan	5.103.006.000,00	-	-	5.103.006.000,00
d. Biota Perairan	2.600.000,00	-	-	2.600.000,00
e. Tanaman	1.437.894.411,00	-	-	1.437.894.411,00
f. Barang Koleksi Non Budaya	48.221.600,00	-	-	48.221.600,00
g. Aset Tetap dalam Renovasi	7.079.546.750,00	-	-	7.079.546.750,00
h. Belanja Modal BLUD	-	-	-	-
i. Belanja Modal BOS	-	-	-	-
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1.364.315.528.268,97	-	-	1.364.315.528.268,97
a. Kontruksi dalam Pengerjaan	1.364.315.528.268,97	-	-	1.364.315.528.268,97
JUMLAH ASET TETAP	29.717.717.004.579,40	108.546,00	8.967.363.548,00	29.726.684.476.673,40

EXTRACOMTABLE

No	Nama	Aset Tetap
1	SEKRETARIAT DAERAH ACEH	1.181.764.224,60
2	SEKRETARIAT DPRA	1.484.124.025,00
3	INSPEKTORAT ACEH	54.143.000,00
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH	41.224.727,00
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH	1.837.005.070,00
6	BADAN KEPEGAWAIAN ACEH	226.023.743,00
7	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH	866.234.000,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH	83.904.000,00
9	BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH	115.787.840,00
10	DINAS PENDIDIKAN ACEH	69.334.144.499,92
11	DINAS KESEHATAN ACEH	619.544.688,00
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH	1.683.326.239,00
13	DINAS PENGAIRAN ACEH	45.990.277.337,00
14	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH	218.285.130,00
15	DINAS SOSIAL ACEH	1.762.846.973,00
16	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH	598.929.599,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH	47.300.400,00
18	DINAS PANGAN ACEH	1.374.783.800,00
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH	4.108.798.460,30
20	DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH	19.872.080,00
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH	162.934.000,00
22	DINAS PERHUBUNGAN ACEH	940.364.534,21
23	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH	817.449.991,00
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH	189.460.288,00
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH	133.105.300,00
26	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA ACEH	665.791.000,00
27	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH	575.023.594,00
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH	1.045.643.520,00
29	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH	2.473.276.359,00
30	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	2.817.618.445,00
31	DINAS PETERNAKAN ACEH	1.660.476.119,91
32	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH	2.389.603.494,00
33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH	590.816.884,00
34	KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH	101.179.500,00
35	DINAS SYARI'AT ISLAM ACEH	97.638.500,00
36	DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH	1.208.453.186,80
37	DINAS PERTANAHAN ACEH	15.769.906,00
38	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH	104.411.000,00
39	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	100.699.000,00
40	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	68.877.000,00
41	SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH	89.282.291,77
42	SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH	181.660.600,00
43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH	163.087.780,00
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN	1.310.536.202,70
45	RUMAH SAKIT JIWA	157.486.650,00
46	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK	393.824.170,00
47	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH	78.133.300,00
48	PENGELOLA BARANG	-
	Jumlah	150.180.922.452,21

Daftar Aset Tak Berwujud

SOFTWARE

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	BEBAN AMORTISASI 2020	AKM AMORTISASI 2020	NILAI BUKU 2020
LISENSI DAN FRENCHISE							
1	RUMAH SAKIT UMUM dr ZAINOEL ABIDIN			24.750.000,00	-	-	24.750.000,00
	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00
	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00
	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00
	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00
	Cal (Client Acces License) Microsoft SQL Server (IT) (BLUD UTG)	2016		4.950.000,00			4.950.000,00
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH			104.450.000,00	-	-	104.450.000,00
1	Exchange CAL Hibah UNDP	2006		25.000.000,00			25.000.000,00
2	Exchange CAL. Hibah UNDP	2006		25.000.000,00			25.000.000,00
3	Turbo Colding Lisensi For DMD	2009		27.225.000,00			27.225.000,00
4	Turbo Colding Lisensi For DMD	2009		27.225.000,00			27.225.000,00
	TOTAL LISENSI DAN FRENCHISE			129.200.000,00	-	-	129.200.000,00
HAK CIPTA							
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH			99.500.000,00	-	-	99.500.000,00
1	Film Cetak			99.500.000,00			99.500.000,00
SOFWARE							
1	DINAS PENDIDIKAN ACEH			1.265.775.610,00	51.756.150,00	1.210.613.310,00	55.162.300,00
1	Software modernisasi sistem Kearsipan (akan dihibahkan)	2007	4	105.800.000,00	-	105.800.000,00	-
2	Software/Program	2008	4	78.500.000,00	-	78.500.000,00	-
3	Software Aplikasi Keuangan	2012	4	91.179.000,00	-	91.179.000,00	-
4	OSS e-Learning untuk SMP Binaan Tekkomdik Aceh	2012	4	44.100.000,00	-	44.100.000,00	-
5	Digital library SMP Binaan Tekkomdik Aceh	2012	4	75.555.000,00	-	75.555.000,00	-
6	OSS E-Learning SMA Binaan Tekkomdik Aceh	2012	4	66.200.000,00	-	66.200.000,00	-
7	Pembuatan Aplikasi Database	2012	4	39.457.000,00	-	39.457.000,00	-
8	Website Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe	2013	4	99.935.000,00	-	99.935.000,00	-
9	Software/program pengelolaan web.	2013	4	22.500.000,00	-	22.500.000,00	-
10	Software	2013	4	97.790.000,00	-	97.790.000,00	-
11	Pembuatan Aplikasi Monev Disdik Aceh	2014	4	99.440.000,00	-	99.440.000,00	-
12	System Aplikasi Pendataan	2014	4	36.850.000,00	-	36.850.000,00	-

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	BEBAN AMORTISASI 2020	AKM AMORTISASI 2020	NILAI BUKU 2020
13	Software	2018	4	193.400.000,00	48.350.000,00	145.050.000,00	48.350.000,00
14	Pembuatan Aplikasi (Perangkat Radio Streaming)	2019	4	13.624.600,00	3.406.150,00	6.812.300,00	6.812.300,00
15	Software.....	2008	4	295.009,00	-	295.009,00	-
16	Software.....	2009	4	7.650.000,00	-	7.650.000,00	-
17	Software.....	2012	4	42.240.000,00	-	42.240.000,00	-
18	Software.....	2013	4	1.500.001,00	-	1.500.001,00	-
19	Software.....	2015	4	30.800.000,00	-	30.800.000,00	-
20	Software IDlearn / Software IDlearn(Indonesia Learning)SMA	2016	4	118.960.000,00	-	118.960.000,00	-
2	DINAS KESEHATAN ACEH			632.498.000,00	113.740.000,00	519.363.000,00	113.135.000,00
1	Operating System (CD+Box)	2010	4	12.000.000	-	12.000.000,00	-
2	Aplikasi Program (CD+Box)	2010	4	8.810.000	-	8.810.000,00	-
3	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000	-	955.000,00	-
4	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000	-	955.000,00	-
5	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000	-	955.000,00	-
6	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000	-	955.000,00	-
7	Anti Virus Original (CD+Box)	2010	4	955.000	-	955.000,00	-
8	CD Anti Virus Kaperski	2013	4	1.250.000	-	1.250.000,00	-
9	CD Anti Virus Kaperski	2013	4	1.250.000	-	1.250.000,00	-
10	CD Anti Virus Server 2008	2013	4	7.500.000	-	7.500.000,00	-
11	SOFTWARE SISITEM AKADEMIK DAN ABSENSI PEGAWAI PADA AKPER	2015	4	29.953.000,00	-	29.953.000,00	-
12	SOFTWARE PROGRAM/PROGRAM UNTUK PERALATAN PENUNJANG DATIN DINKES	2015	4	112.000.000,00	-	112.000.000,00	-
13	SOFTWARE APLIKASI ANDROID UPTD P2KK PSC 119	2017	4	69.520.000,00	17.380.000,00	69.520.000,00	-
14	APLIKASI PENDAFTARAN PELATIHAN ONLINE UPTD BAPELKES	2017	4	31.680.000,00	7.920.000,00	31.680.000,00	-
15	Software RS Kab/Kota	2018	4	199.980.000,00	49.995.000,00	149.985.000,00	49.995.000,00
16	Software Absensi 2018	2018	4	55.000.000,00	13.750.000,00	41.250.000,00	13.750.000,00
17	PENGEMBANGAN SIM RS PROVINSI & KAB/KOTA	2019	4	98.780.000,00	24.695.000,00	49.390.000,00	49.390.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM dr ZAINOEL ABIDIN			3.943.403.379,00	888.335.038,50	2.872.483.302,00	1.070.920.077,00
1	SOFTWARE CATATAN MEDIK	2006	4	193.098.225,00	-	193.098.225,00	-
2	SOFTWARE PROGRAM	2013	4	37.190.000,00	-	37.190.000,00	-
3	Software perencanaan	2014	4	55.000.000,00	-	55.000.000,00	-
4	Software / Program Microsoft visual Studio (4 Unit) IT (BLUD UTG)	2015	4	43.505.000,00	-	43.505.000,00	-
5	Software / Program Microsoft SQL Server IT (4 Unit) (BLUD UTG)	2016	4	9.570.000,00	-	9.570.000,00	-
6	Software / Program Microsoft Windows Server IT (4 Unit) (BLUD UTG)	2016	4	17.380.000,00	-	17.380.000,00	-

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	BEBAN AMORTISASI 2020	AKM AMORTISASI 2020	NILAI BUKU 2020
7	Software / Program Microsoft Windows Server IT (4 Unit) (BLUD UTG)	2016	4	17.160.000,00	-	17.160.000,00	-
8	Software	2016	4	17.160.000,00	-	17.160.000,00	-
9	Software	2018	4	2.823.000.000,00	705.750.000,00	2.117.250.000,00	705.750.000,00
10	Software.....(Aplikasi Sistem Informasi Radiologi (Ris) Unlimited User)	2019	4	730.340.154,00	182.585.038,50	365.170.077,00	365.170.077,00
4	RUMAH SAKIT JIWA			1.422.259.725,00	218.567.431,25	1.373.634.725,00	48.625.000,00
1	PC Program MIMPI/Psikotes (APBN)...Pindahan dari KIB B Baik, Dst... (1.3.2.07.01.01.169) ke KIB ATB Thn.2019	2006	4	164.340.000,00	-	164.340.000,00	-
2	TDF Aplikasi Websete RSJ	2008	4	54.500.000,00	-	54.500.000,00	-
3	Software/Aplikasi Stock Obat	2009	4	14.900.000,00	-	14.900.000,00	-
4	TDF Sofwere MMPI (APBA)	2011	4	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
5	TDF Pendampingan Sofwer (BLUD) Program	2012	4	24.750.000,00	-	24.750.000,00	-
6	TDF Sofwere/Program (APBA)	2012	4	92.000.000,00	-	92.000.000,00	-
7	TDF Sofwere (APBA) Int.Catatan Medik	2013	4	180.000.000,00	-	180.000.000,00	-
8	Software Aplikasi Persediaan Gudang	2015	4	16.500.000,00	-	16.500.000,00	-
9	Software Sistem Informasi Rumah Sakit (BLUD)	2017	4	512.349.725,00	128.087.431,25	512.349.725,00	-
10	Software MMPI	2017	4	167.420.000,00	41.855.000,00	167.420.000,00	-
11	Pengadaan Aplikasi SIPKD BLUD	2018	4	194.500.000,00	48.625.000,00	145.875.000,00	48.625.000,00
5	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK			308.204.245,00	38.782.311,25	306.801.183,75	1.403.061,25
1	software/program sim rs	2012	4	98.440.000,00	-	98.440.000,00	-
2	SOFTWARE REMUNERASI (BLUD)	2015	4	39.875.000,00	-	39.875.000,00	-
3	Software Program BLUD	2016	4	14.760.000,00	-	14.760.000,00	-
4	Software SIM BLUD	2017	4	149.517.000,00	37.379.250,00	149.517.000,00	-
5	Aplikasi SISMADAK Versi Enterprise	2018	4	5.612.245,00	1.403.061,25	4.209.183,75	1.403.061,25
6	PENGAIRAN			106.607.600,00	24.777.500,00	57.052.600,00	49.555.000,00
1	Pembuatan Sistem Integrasi Data Monitoring Telemetry (Early warning system) (Pusat)	2019	4	99.110.000,00	24.777.500,00	49.555.000,00	49.555.000,00
2	Software	2007	4	7.497.600,00	-	7.497.600,00	-
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH			76.500.000,00	6.250.000,00	76.500.000,00	-
1	Website SATPOL PP	2013	4	49.500.000,00	-	49.500.000,00	-
2	OS / Linux	2013	4	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
3	Software Barcode Register Barang	2017	4	25.000.000,00	6.250.000,00	25.000.000,00	-
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH			5.575.185,00	1.393.796,25	4.181.388,75	1.393.796,25
1	Software Microsoft Office	2018	4	5.575.185,00	1.393.796,25	4.181.388,75	1.393.796,25
9	DINAS SOSIAL ACEH			211.980.000,00	24.850.000,00	199.555.000,00	12.425.000,00
1	Soft Ware Window Server 2003 - BRA Pusat	2008	4	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-
2	Program Website - Perencanaan & Pelaporan	2009	4	48.880.000,00	-	48.880.000,00	-
3	Software	2016	4	59.200.000,00	-	59.200.000,00	-
4	System Penerima Manfaat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2018	4	49.700.000,00	12.425.000,00	37.275.000,00	12.425.000,00
5	Software	2017	4	49.700.000,00	12.425.000,00	49.700.000,00	-
10	DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK			25.850.000,00	-	25.850.000,00	-

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	BEBAN AMORTISASI 2020	AKM AMORTISASI 2020	NILAI BUKU 2020
1	Program Aplikasi Perhitungan Upah Lembur	2012	4	9.850.000,00		9.850.000,00	-
2	Software Aplikasi	2013	4	16.000.000,00		16.000.000,00	-
11	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK			47.480.000,00	-	47.480.000,00	-
1	Software Sistem Aplikasi Data SIGA	2014	4	47.480.000,00	-	47.480.000,00	-
12	DINAS PANGAN			101.500.000,00	22.125.000,00	79.375.000,00	22.125.000,00
1	Software dan training	2014	4	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-
2	Software	2018	4	88.500.000,00	22.125.000,00	66.375.000,00	22.125.000,00
13	DINAS PERTANAHAN			61.325.000,00	15.331.250,00	30.662.500,00	30.662.500,00
1	Software	2019	4	61.325.000,00	15.331.250,00	30.662.500,00	30.662.500,00
14	DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH			647.866.000,00	64.262.500,00	579.769.900,00	68.096.100,00
1	Aplikasi Dokumen Surat	2012	4	30.066.000,00	-	30.066.000,00	-
2	Antivirus server	2012	4	11.330.000,00	-	11.330.000,00	-
3	Antivirus server	2012	4	11.330.000,00	-	11.330.000,00	-
4	Anti Virus	2013	4	8.800.000,00	-	8.800.000,00	-
5	Aplikasi Database	2013	4	199.600.000,00	-	199.600.000,00	-
7	Software	2016	4	129.690.000,00	-	129.690.000,00	-
8	- Windows Server 2012 Standar R2 (bagian dari Server) - Microsoft Windows 10 Profesional (PC) - Anti Virus Kaspersky Small Office Security (PC & Server)	2017	4	62.765.600,00	15.691.400,00	62.765.600,00	-
9	Aplikasi Data Agregat (Aplikasi Sinergitas Data dan Informasi/SIDASI)	2018	4	49.500.000,00	12.375.000,00	37.125.000,00	12.375.000,00
10	Aplikasi E-Profil Kependudukan	2018	4	49.500.000,00	12.375.000,00	37.125.000,00	12.375.000,00
12	MICROSOFT Windows Server 2016 CAL-Gov Merk MICROSOFT	2018	4	16.733.900,00	4.183.475,00	12.550.425,00	4.183.475,00
13	Antivirus Client merk SYMANTEC	2018	4	450.500,00	112.625,00	337.875,00	112.625,00
14	Software	2019	4	78.100.000,00	19.525.000,00	39.050.000,00	39.050.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN ACEH			4.727.472.900,00	103.889.725,00	4.523.693.450,00	203.779.450,00
1	Pengembangan Aplikasi SIMDA	2011	4	97.000.000,00	-	97.000.000,00	-
2	Pembangunan Aplikasi Tiketing SIM Sarana Publik Perhubungan Komintel Aceh Berbasis GIS	2011	4	196.500.000,00	-	196.500.000,00	-
3	Pembangunan Aplikasi Tiketing Pengaduan Jaringan	2011	4	97.000.000,00	-	97.000.000,00	-
4	Pembangunan Website Bank Data Dishubkomintel	2011	4	49.841.000,00	-	49.841.000,00	-
5	Pengembangan Sistem Email berbasis LDAP	2011	4	96.000.000,00	-	96.000.000,00	-
6	Aplikasi Pengarsipan secara Digital	2011	4	193.900.000,00	-	193.900.000,00	-
7	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi	2011	4	193.000.000,00	-	193.000.000,00	-
8	Aplikasi Kepemerintahan	2012	4	297.000.000,00	-	297.000.000,00	-
9	Aplikasi Perizinan Terpadu (BP2T) Berbasis WEB dan SMS	2012	4	296.000.000,00	-	296.000.000,00	-
10	Aplikasi SIM Sarana Publik Hubkomintel Aceh Berbasis GIS	2012	4	147.000.000,00	-	147.000.000,00	-
11	Aplikasi Integrasi Autentifikasi Akses Internet	2012	4	98.000.000,00	-	98.000.000,00	-
12	Software / program	2007	4	58.410.000,00	-	58.410.000,00	-
13	Aplikasi Wabase Peternakan	2007	4	84.535.000,00	-	84.535.000,00	-

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	BEBAN AMORTISASI 2020	AKM AMORTISASI 2020	NILAI BUKU 2020
14	Aplikasi P2TSP Versi WEB	2007	4	84.725.000,00	-	84.725.000,00	-
15	Aplikasi P2TSP Versi LAN	2007	4	84.975.000,00	-	84.975.000,00	-
16	Aplikasi Database Transmigrasi	2007	4	84.000.000,00	-	84.000.000,00	-
17	Aplikasi Database Pendapatan Daerah	2007	4	84.122.000,00	-	84.122.000,00	-
18	Aplikasi Database Sosial	2007	4	84.700.000,00	-	84.700.000,00	-
19	Aplikasi Webbase Kependudukan	2007	4	84.700.000,00	-	84.700.000,00	-
20	Aplikasi Database Kehutanan	2007	4	84.150.000,00	-	84.150.000,00	-
21	Aplikasi Database Perkebunan	2007	4	84.150.000,00	-	84.150.000,00	-
22	Aplikasi Database Tenaga Kerja	2007	4	84.000.000,00	-	84.000.000,00	-
23	Aplikasi Persuratan	2008	4	48.488.000,00	-	48.488.000,00	-
24	Aplikasi Absensi	2013	4	7.260.000,00	-	7.260.000,00	-
25	Webcore (Aceh CMS)	2015	4	195.068.000,00	-	195.068.000,00	-
26	Pengembangan Aplikasi E-Perijinan Aceh	2015	4	187.330.000,00	-	187.330.000,00	-
27	Software	2016	4	17.500.000,00	-	17.500.000,00	-
28	Software	2016	4	1.192.560.000,00	-	1.192.560.000,00	-
29	Software	2017	4	8.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	-
30	Aplikasi Call Center	2019	4	19.800.000,00	4.950.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
31	Pek. Pengadaan Aplikasi Perkantoran	2019	4	39.847.000,00	9.961.750,00	19.923.500,00	19.923.500,00
32	Pek. Peningkatan Web Dinas Perhubungan Aceh	2019	4	24.970.000,00	6.242.500,00	12.485.000,00	12.485.000,00
33	Aplikasi Brodcasting, Pek. Display Sistem Informasi Intra Dinas (Pendukung Germas)	2019	4	47.898.900,00	11.974.725,00	23.949.450,00	23.949.450,00
34	Pek. Rancang Bangun Sistem Informasi Kepegawaian Intra Dinas Perhubungan Aceh	2019	4	129.379.000,00	32.344.750,00	64.689.500,00	64.689.500,00
35	Pek. Rancang Bangun Sistem Informasi Program dan Pelaporan kegiatan Intra Dinas Perhubungan Aceh	2019	4	145.664.000,00	36.416.000,00	72.832.000,00	72.832.000,00
16	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH			2.772.174.700,00	-	2.772.174.700,00	-
1	Perangkat Lunak	2002	4	128.220.000,00	-	128.220.000,00	-
2	Aplikasi Data Base (SIPUP),SIMKAP On Line,Macromedia,Anti Virus untu	2005	4	166.030.000,00	-	166.030.000,00	-
3	Aplikasi Simpeg, Website/Hosting Dinas Infokom,Windows XP Profesional	2006	4	621.126.000,00	-	621.126.000,00	-
4	Blue Print 5 Tahunan BPDE	2007	4	49.445.000,00	-	49.445.000,00	-
5	Data Base RAPI Dan ORARI dan Setup dan Instalasi	2008	4	212.813.700,00	-	212.813.700,00	-
7	CD Aplikasi Untuk Penyusunan Program dan Aplikasi Network/Manajemen System	2010	4	82.925.000,00	-	82.925.000,00	-
8	Server Aplikasi Underweb	2011	4	29.480.000,00	-	29.480.000,00	-
9	Aplikasi Pengelolaan Dokumen Digital,Standar Web Engine,Aplikasi Menev dan Digital Library	2013	4	580.835.000,00	-	580.835.000,00	-
10	Traffic Analizer dan Aplikasi Konfigurasi Sistem Log Managemen - Bid PSITT	2014	4	238.150.000,00	-	238.150.000,00	-
11	Software Audit Acunetix - Bid. PSITT	2014	4	173.800.000,00	-	173.800.000,00	-
12	Aplikasi Server Management Virtual dan Hypervisor - Bid. PSITT	2014	4	148.500.000,00	-	148.500.000,00	-

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	BEBAN AMORTISASI 2020	AKM AMORTISASI 2020	NILAI BUKU 2020
13	Web Core Engine - Bid. PSITT	2014	4	188.000.000,00	-	188.000.000,00	-
14	Pengembangan Aplikasi PPID - Bid. PSITT	2014	4	96.000.000,00	-	96.000.000,00	-
15	Software/Program - Bidang PSITT	2014	4	9.000.000,00	-	9.000.000,00	-
16	Software	2017	4	47.850.000,00	-	47.850.000,00	-
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ACEH			38.280.000,00	-	38.280.000,00	-
1	Aplikasi database monitoring evaluasi KUMKN	2014	4	38.280.000,00	-	38.280.000,00	-
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU			434.415.625,00	23.950.000,00	415.915.625,00	18.500.000,00
1	Software	2007	4	49.475.000,00		49.475.000,00	-
2	Shoftware Multimedia Elektronik Investasi Aceh	2011	4	4.500.000,00		4.500.000,00	-
3	Software Aplikasi Database Pusdatin Aceh	2013	4	199.940.625,00		199.940.625,00	-
4	Peralatan Jaringan Komputer (Software SMS)	2013	4	44.890.000,00		44.890.000,00	-
5	Software Website	2017	4	21.800.000,00	5.450.000,00	21.800.000,00	-
6	(Software) Pengembangan Database Informasi Penanaman modal dan Perizinan yang terintegrasi	2018	4	50.000.000,00	12.500.000,00	37.500.000,00	12.500.000,00
7	Lisensi Aplikasi	2018	4	4.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
8	Aplikasi SKM	2018	4	20.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
9	Aplikasi pelayan data	2016	4	39.810.000,00		39.810.000,00	-
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			283.925.000,00	56.006.250,00	227.918.750,00	56.006.250,00
1	Web Hosting dan Pembuatan Website Dispora	2008	4	49.900.000,00	-	49.900.000,00	-
2	Software Lisensi Mcrotic	2008	4	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
3	Software	2018	4	131.200.000,00	32.800.000,00	98.400.000,00	32.800.000,00
4	Software	2018	4	92.825.000,00	23.206.250,00	69.618.750,00	23.206.250,00
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			4.980.000,00	-	4.980.000,00	-
1	Pengadaan Software	2008	4	4.980.000,00		4.980.000,00	-
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ACEH			388.844.000,00	32.408.750,00	356.435.250,00	32.408.750,00
1	Website Badan Perpustakaan	2008	4	49.725.000,00		49.725.000,00	-
2	jaringan internet	2013	4	9.100.000,00		9.100.000,00	-
3	Software middleware integrasi inliste dengan RFID	2015	4	118.800.000,00		118.800.000,00	-
4	Aplikasi + training	2015	4	7.084.000,00		7.084.000,00	-
5	Instalasi jaringan internet	2015	4	25.000.000,00		25.000.000,00	-
6	Software	2015	4	49.500.000,00		49.500.000,00	-
7	Aplikasi dan Jaringan Absensi	2018	4	69.025.000,00	17.256.250,00	51.768.750,00	17.256.250,00
8	Instalasi Aplikasi dan Dashboard ipustaka	2018	4	60.610.000,00	15.152.500,00	45.457.500,00	15.152.500,00
22	DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH			243.349.000,00	36.037.250,00	188.970.500,00	54.378.500,00
1	Alat Computing Lain-lain	2008	4	99.200.000,00	-	99.200.000,00	-
2	Software	2017	4	35.392.000,00	8.848.000,00	35.392.000,00	-
3	Aplikasi Lesson Organizer Bahasa untuk Dayah Perbatasan Minhajussalam	2019	4	23.626.166,67	5.906.541,67	11.813.083,33	11.813.083,33
4	Aplikasi Lesson Organizer bahasa untuk Dayah Perbatasan Safinatussalama	2019	4	23.626.166,67	5.906.541,67	11.813.083,33	11.813.083,33

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	BEBAN AMORTISASI 2020	AKM AMORTISASI 2020	NILAI BUKU 2020
5	Aplikasi Lesson Organizer bahasa untuk Dayah Perbatasan Darul Amin	2019	4	23.626.166,67	5.906.541,67	11.813.083,33	11.813.083,33
6	Aplikasi Lesson Organizer Bahasa untuk Dayah Perbatasan Minhajussalam	2019	4	12.626.166,67	3.156.541,67	6.313.083,33	6.313.083,33
7	Aplikasi Lesson Organizer bahasa untuk Dayah Perbatasan Safinatussalama	2019	4	12.626.166,67	3.156.541,67	6.313.083,33	6.313.083,33
8	Aplikasi Lesson Organizer bahasa untuk Dayah Perbatasan Darul Amin	2019	4	12.626.166,67	3.156.541,67	6.313.083,33	6.313.083,33
23	SEKRETARIS MAJELIS PENDIDIKAN ACEH			48.480.000,00	-	48.480.000,00	-
1	Software	2016	4	48.480.000,00		48.480.000,00	-
24	KEURUKON KATIBUL WALI/SEKRETARIAT LEMBAGA			172.535.000,00	24.373.750,00	172.535.000,00	-
1	Software	2015	4	7.500.000,00	-	7.500.000,00	-
2	Anti Virus, Microsoft	2017	4	97.495.000,00	24.373.750,00	97.495.000,00	-
3	Program Office	2014	4	67.540.000,00	-	67.540.000,00	-
25	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH			44.500.000,00	-	44.500.000,00	-
1	Software	2014	4	44.500.000,00		44.500.000,00	-
26	DINAS SYARIAT ISLAM			39.160.000,00	-	39.160.000,00	-
1	Pengadaan Website Dinas	2011	4	39.160.000,00		39.160.000,00	-
27	MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH			146.800.000,00	-	146.800.000,00	-
1	Website MPU	2011	4	44.800.000,00		44.800.000,00	-
2	Software/System informasi Perpustakaan	2011	4	95.000.000,00		95.000.000,00	-
3	Aplikasi	2013	4	7.000.000,00		7.000.000,00	-
28	SEKRETARIS BAITUL MAL			263.350.000,00	28.525.000,00	218.800.000,00	44.550.000,00
1	Program Software SIMZA, Bidang Sosbang	2008	4	99.500.000,00		99.500.000,00	-
2	Software	2014	4	49.750.000,00		49.750.000,00	-
3	Software	2017	4	25.000.000,00	6.250.000,00	25.000.000,00	-
4	Software	2019	4	89.100.000,00	22.275.000,00	44.550.000,00	44.550.000,00
29	SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH			114.567.000,00	37.391.750,00	98.400.250,00	16.166.750,00
1	Software	2017	4	49.900.000,00	12.475.000,00	49.900.000,00	-
2	Software	2018	4	29.667.000,00	7.416.750,00	22.250.250,00	7.416.750,00
3	Software	2019	4	35.000.000,00	17.500.000,00	26.250.000,00	8.750.000,00
30	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH			285.295.000,00	58.836.250,00	127.926.250,00	157.368.750,00
1	Software	2016	4	49.950.000,00		49.950.000,00	-
2	Software	2019	4	76.560.000,00	19.140.000,00	38.280.000,00	38.280.000,00
3	Software	2020	4	108.790.000,00	27.197.500,00	27.197.500,00	81.592.500,00
4	Software	2020	4	49.995.000,00	12.498.750,00	12.498.750,00	37.496.250,00
31	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH			634.731.000,00	-	634.731.000,00	-
1	Software Komputer (1 Unit)	2005	4	2.376.000,00		2.376.000,00	-
2	Master Booth Bahan Multiplek dilapisi Melamin SPP SPMA Saree	2011	4	3.795.000,00		3.795.000,00	-
3	Both Channer Program SPP SPMA RAEE	2011	4	315.000,00		315.000,00	-
4	Both Channer Program SPP SPMA RAEE	2011	4	315.000,00		315.000,00	-
5	Both Channer Program SPP SPMA RAEE	2011	4	315.000,00		315.000,00	-
6	Both Channer Program SPP SPMA RAEE	2011	4	315.000,00		315.000,00	-

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	BEBAN AMORTISASI 2020	AKM AMORTISASI 2020	NILAI BUKU 2020
7	Win 7 Starter Orriginal (microcsolf)SPP SPMA Saree	2011	4	575.000,00		575.000,00	-
8	Win 7 Starter Orriginal (microcsolf)SPP SPMA Saree	2011	4	575.000,00		575.000,00	-
9	Win 7 Starter Orriginal (microcsolf)SPP SPMA Saree	2011	4	575.000,00		575.000,00	-
10	Win 7 Starter Orriginal (microcsolf)SPP SPMA Saree	2011	4	575.000,00		575.000,00	-
11	Student Twin Boot Bahan Multiplek Dilapisi Melamim SPP SPMA SAREE	2011	4	1.500.000,00		1.500.000,00	-
12	Student Twin Boot Bahan Multiplek Dilapisi Melamim SPP SPMA SAREE	2011	4	1.500.000,00		1.500.000,00	-
13	Student Twin Boot Bahan Multiplek Dilapisi Melamim SPP SPMA SAREE	2011	4	1.500.000,00		1.500.000,00	-
14	Student Twin Boot Bahan Multiplek Dilapisi Melamim SPP SPMA SAREE	2011	4	1.500.000,00		1.500.000,00	-
15	ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY PERALATAN KOMPUTER PENDUKUNG PENGOLAHAN DATA SIKPD	2014	4	750.000,00		750.000,00	-
16	ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY PERALATAN KOMPUTER PENDUKUNG PENGOLAHAN DATA SIKPD	2014	4	750.000,00		750.000,00	-
17	ANTI VIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY PERALATAN KOMPUTER PENDUKUNG PENGOLAHAN DATA SIKPD	2014	4	750.000,00		750.000,00	-
18	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00		650.000,00	-
19	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00		650.000,00	-
20	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00		650.000,00	-
21	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00		650.000,00	-
22	Antivirus Internet "" (Pengadaan Kelengkapan Jaringan Internet)	2015	4	650.000,00		650.000,00	-
23	Software	2016	4	49.500.000,00		49.500.000,00	-
24	Software	2006	4	564.000.000,00		564.000.000,00	-
32	DINAS PETERNAKAN ACEH			84.250.000,00	8.687.500,00	75.562.500,00	8.687.500,00
1	Software Pemetaan Penyakit dan Produksi ternak	2012	4	49.500.000,00		49.500.000,00	-
2	Software Aplikasi Sistem Pengelolaan Telur	2018	4	34.750.000,00	8.687.500,00	26.062.500,00	8.687.500,00
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH			8.830.001,00	-	8.830.001,00	-
1	Software	2010	4	8.830.001,00		8.830.001,00	-
34	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH			183.015.000,00	12.022.500,00	170.992.500,00	12.022.500,00
1	Software	2016	4	88.000.000,00	-	88.000.000,00	-
2	Aplikasi Website Dinas (Aset Tak Berwujud)	2018	4	48.090.000,00	12.022.500,00	36.067.500,00	12.022.500,00
3	Software	2013	4	46.175.000,00	-	46.175.000,00	-
4	Software	2008	4	750.000,00	-	750.000,00	-
35	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			55.449.000,00	-	55.449.000,00	-
1	Software Batik Fraktal Jbatik, Hibah Kominfo	2013	4	5.929.000,00		5.929.000,00	-
2	Software	2015	4	49.520.000,00		49.520.000,00	-
36	INSPEKTORAT ACEH			21.000.000,00	-	21.000.000,00	-

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	BEBAN AMORTISASI 2020	AKM AMORTISASI 2020	NILAI BUKU 2020
1	Software Database Server	2011	4	21.000.000,00		21.000.000,00	-
37	BAPEDDA			1.109.935.000,00	9.031.250,00	1.091.872.500,00	18.062.500,00
1	E-Office	2016	4	48.500.000,00		48.500.000,00	-
2	Aplikasi Integrasi E-Planning dan E-Budgetting	2014	4	483.615.000,00		483.615.000,00	-
	Aplikasi Integrasi E-Planning dan E-Budgetting	2015	4	541.695.000,00		541.695.000,00	-
3	Software	2019	4	36.125.000,00	9.031.250,00	18.062.500,00	18.062.500,00
38	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH			5.651.857.000,00	119.851.625,00	5.391.802.125,00	260.054.875,00
1	software	2007	4	248.625.000,00	-	248.625.000,00	-
2	Software Finger Print (masing-masing software Rp. 72.600.000 instalasi 6 titik Rp. 37.950.000 dan training Rp. 6.050.000)	2012	4	90.000.000,00	-	90.000.000,00	-
3	aplikasi sistem informasi penatausahaan keuangan Daerah	2013	4	82.500.000,00	-	82.500.000,00	-
4	Aplikasi Penatausahaan Surat Bagian Umum	2013	4	27.500.000,00	-	27.500.000,00	-
5	Anti Virus	2013	4	33.000.000,00	-	33.000.000,00	-
6	Anti Virus	2013	4	27.500.000,00	-	27.500.000,00	-
7	Anti Virus	2013	4	27.500.000,00	-	27.500.000,00	-
8	Anti Virus	2013	4	27.500.000,00	-	27.500.000,00	-
9	Aplikasi Report (Busines Intellegence) (Kepala Dinas Report dan Gubernur Report)	2014	4	29.920.000,00	-	29.920.000,00	-
10	Aplikasi Dispenda Pusat (Aplikasi Import Data PKB1)	2015	4	1.320.000,00	-	1.320.000,00	-
11	Aplikasi Dispenda Pusat (Aplikasi Administrator)	2015	4	236.027.000,00	-	236.027.000,00	-
12	Software	2016	4	373.046.000,00	-	373.046.000,00	-
13	Software	2016	4	116.600.000,00	-	116.600.000,00	-
14	Software	2018	4	199.000.000,00	49.750.000,00	149.250.000,00	49.750.000,00
15	QR Code	2020	4	132.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	99.000.000,00
16	Aplikasi Database Aset Berbasis Android	2020	4	148.406.500,00	37.101.625,00	37.101.625,00	111.304.875,00
17	Software	2010	4	93.912.500,00	-	93.912.500,00	-
18	Software	2013	4	3.712.500.000,00	-	3.712.500.000,00	-
19	Software	2014	4	45.000.000,00	-	45.000.000,00	-
39	BADAN KEPEGAWAIAN ACEH			406.301.113,00	28.590.100,00	406.301.113,00	-
1	WEB KORPRI	2012	4	29.150.000,00		29.150.000,00	-
2	Software	2017	4	109.367.500,00	27.341.875,00	109.367.500,00	-
3	Software	2007	4	64.932.263,00		64.932.263,00	-
4	Software	2013	4	97.700.000,00		97.700.000,00	-
5	Software	2014	4	25.393.450,00		25.393.450,00	-
6	Software	2015	4	30.115.000,00		30.115.000,00	-
7	Software	2016	4	44.650.000,00		44.650.000,00	-
8	software Mythware	2017	4	4.992.900,00	1.248.225,00	4.992.900,00	-
40	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ACEH			103.580.000,00	14.820.000,00	92.635.000,00	10.945.000,00
1	Pengembangan Aplikasi Diklat	2017	4	44.300.000,00		44.300.000,00	-

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	BEBAN AMORTISASI 2020	AKM AMORTISASI 2020	NILAI BUKU 2020
2	Software Upgrade/ Expanded K1-wifi vers 3.00 Expanded koneksi	2013	4	15.500.000,00	3.875.000,00	15.500.000,00	-
3	Software 2 to 2 Users Handlow II. Peralatan dengan Mesin Absensi	2018	4	43.780.000,00	10.945.000,00	32.835.000,00	10.945.000,00
41	KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH			60.500.000,00	-	60.500.000,00	-
1	Website Kantor	2012	4	60.500.000,00		60.500.000,00	-
42	SEKRETARIAT DAERAH ACEH			860.258.700,00	33.577.500,00	801.766.200,00	58.492.500,00
1	Software Program	2008	4	130.883.500,00		130.883.500,00	-
2	Software Aplikasi SIMAPA	2008	4	200.000.000,00		200.000.000,00	-
3	Software Program Aplikasi Dana Kerja	2010	4	197.100.000,00		197.100.000,00	-
4	Design dan Rancangan Database Program Aplikasi Dana Kerja	2010	4	49.400.000,00		49.400.000,00	-
5	Software Aplikasi Arsip Digital	2011	4	19.909.200,00		19.909.200,00	-
6	Website Biro Ekonomi	2013	4	39.358.000,00		39.358.000,00	-
7	Website BPKapet	2013	4	39.358.000,00		39.358.000,00	-
8	Software Anti Virus	2016	4	4.950.000,00		4.950.000,00	-
9	Aplikasi Insilite Perpustakaan	2018	4	34.650.000,00	8.662.500,00	25.987.500,00	8.662.500,00
10	Software (BRR)	2006	4	29.040.000,00		29.040.000,00	-
11	Software (biro ekonomi)	2019	4	99.660.000,00	24.915.000,00	49.830.000,00	49.830.000,00
12	Software	2013	4	15.950.000,00		15.950.000,00	-
43	SEKRETARIAT DPRA			273.281.000,00	1.987.500,00	273.281.000,00	-
1	Software/ Program Sistem Informasi Kepustakaan pada Sekretariat DPRA	2011	4	59.884.000,00		59.884.000,00	-
2	Penambahan Modul pada Sistem Informasi Kepustakaan	2013	4	19.800.000,00		19.800.000,00	-
3	Aplikasi Pengendalian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)	2013	4	40.000.000,00		40.000.000,00	-
4	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi	2013	4	46.475.000,00		46.475.000,00	-
5	Sistem Informasi Dokumentasi dan Kearsipan Record Center	2013	4	59.772.000,00		59.772.000,00	-
6	Penambahan Modul pada Sistem Informasi Perpustakaan	2015	4	19.200.000,00		19.200.000,00	-
7	Software Database Kearsipan	2017	4	7.950.000,00	1.987.500,00	7.950.000,00	-
8	Anti virus	2014	4	20.200.000,00	-	20.200.000,00	-
44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH			59.310.000,00	-	59.310.000,00	-
1	Software	2007	4	20.760.000,00	-	20.760.000,00	-
2	Software Office Professional 2003	2008	4	23.700.000,00	-	23.700.000,00	-
3	Software	2012	4	14.850.000,00	-	14.850.000,00	-
45	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH			59.705.000,00	-	59.705.000,00	-
1	Software	2012	4	34.705.000,00		34.705.000,00	-
2	Software	2013	4	25.000.000,00		25.000.000,00	-
	TOTAL SOFTWARE			28.436.955.783,00	2.100.157.677,25	26.012.029.623,50	2.424.926.159,50
KAJIAN							
1	DINAS PERHUBUNGAN ACEH			268.400.000,00	-	268.400.000,00	-

No	Nama Barang/Jenis Barang	Tahun Pembelian	Masa Manfaat	Harga Perolehan (Rp)	BEBAN AMORTISASI 2020	AKM AMORTISASI 2020	NILAI BUKU 2020
1	Revitalisasi Operasional CIO (Chief Information Officer) Dishubkomintel Aceh	2010		268.400.000,00	-	268.400.000,00	-
2	BADAN REINTEGRASI ACEH			-	-	-	-
1	Kajian	2017	5		-	-	-
3	DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH			674.660.000,00	-	-	674.660.000,00
1	Kajian.....	2010		192.170.000,00	-	-	192.170.000,00
2	Kajian.....	2010		98.590.000,00	-	-	98.590.000,00
3	Kajian.....	2010		97.900.000,00	-	-	97.900.000,00
4	Kajian.....	2010		94.600.000,00	-	-	94.600.000,00
5	Kajian.....	2010		93.500.000,00	-	-	93.500.000,00
6	Kajian.....	2010		97.900.000,00	-	-	97.900.000,00
	TOTAL KAJIAN			943.060.000,00	-	268.400.000,00	674.660.000,00
KARYA SENI							
1	DINAS KOMUNIKASI. INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH			57.650.000,00	-	-	57.650.000,00
1	Karya Seni	2016	4	57.650.000,00	-	-	57.650.000,00
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH			730.873.500,00	-	-	730.873.500,00
1	Karya Seni/ Budaya	2019	4	168.173.500,00	-	-	168.173.500,00
2	Karya Seni/ Budaya	2019	4	403.700.000,00	-	-	403.700.000,00
3	Karya Seni/ Budaya	2019	4	159.000.000,00	-	-	159.000.000,00
	TOTAL KARYA SENI			788.523.500,00	-	-	788.523.500,00
	Jumlah			30.397.239.283,00	2.100.157.677,25	26.280.429.623,50	4.116.809.659,50

ASET RUSAK BERAT

NO	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan Aceh	162.621.101.080,58	165.189.908.278,51
2	Dinas Kesehatan Aceh	3.237.574.000,00	2.088.049.362,00
3	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	145.608.980.950,80	56.465.429.211,70
4	BLUD Rumah Sakit Jiwa	1.758.322.000,00	6.948.796.800,00
5	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	5.635.536.917,00	-
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	8.102.000.000,00	8.102.000.000,00
7	Dinas Pengairan Aceh	5.269.606.200,00	10.978.583.085,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	4.797.970.000,00	11.116.457.636,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	842.265.855,00	3.788.841.481,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	-	640.651.334,00
11	Dinas Sosial Aceh	6.148.550.875,00	7.046.750.875,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	400.744.000,00	606.441.500,00
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	-	14.411.000,00
14	Dinas Pangan Aceh	-	4.682.598.000,00
15	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	-	227.487.719,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	1.286.379.250,00	594.816.000,00
17	Dinas Perhubungan Aceh	24.881.512.360,00	24.881.512.360,00
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	10.538.466.250,00	85.525.000,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	327.343.663,00	276.835.969,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	-	970.552.020,00
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	965.345.469,00	2.224.004.369,00
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	426.300.000,00	1.932.276.935,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	1.524.577.700,00	3.397.056.688,00
24	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	219.950.000,00	2.338.183.162,00
25	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	43.446.000,00	-
26	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	-	34.790.000,00
27	Sekretariat Majelis Adat Aceh	25.010.000,00	25.010.000,00
28	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	79.100.000,00	79.100.000,00
29	Sekretariat Baitul Mal Aceh	612.515.900,00	543.337.150,00
30	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	4.502.000,00	-
31	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	6.543.013.076,00	6.543.013.076,00
32	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	1.641.347.082,00	7.379.299.432,00
33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	6.554.279.855,80	5.743.271.822,70
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	-	314.363.125,00
35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	516.361.350,00	516.361.350,00
36	Inspektorat Aceh	-	39.909.000,00
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	1.067.056.566,00	5.455.398.123,00
38	PPKA	415.429.949,00	415.429.949,00
39	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	47.812.962,00
40	Badan Kepegawaian Aceh	-	39.335.500,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	140.000.000,00	140.000.000,00
42	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	-	2.061.704.095,00
43	Sekretariat Daerah Aceh	10.777.100.431,90	6.317.405.965,00
44	Sekretariat DPRD	6.240.649.700,00	1.124.563.900,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	381.747.182,00	272.269.885,00
	JUMLAH	419.634.085.663,08	351.689.544.119,91

ASET HILANG

NO	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan Aceh	5.557.484.644,00	7.835.243.800,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	5.856.430.049,00	8.505.088.049,00
3	BLUD Rumah Sakit Jiwa	4.277.633.643,00	5.327.968.043,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	949.188.440,00	949.188.440,00
5	Dinas Pengairan Aceh	92.020.000,00	92.020.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	3.114.370.000,00	12.552.370.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	16.850.000,00	16.850.000,00
8	Dinas Sosial Aceh	1.973.496.000,00	1.973.496.000,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	-	1.559.592.508,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	-	100.994.220,00
	Dinas Pangan Aceh	-	40.000.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	128.515.000,00	128.515.000,00
10	Dinas Perhubungan Aceh	12.056.056.543,00	13.878.232.563,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	288.000.000,00	18.167.402.921,00
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	-	663.732.445,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	302.220.000,00	547.090.333,00
13	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	1.537.433.286,00	-
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	749.536.514,00	5.659.805.543,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	10.066.237.588,00	10.095.776.088,00
	Sekretariat Majelis Adat Aceh	-	13.234.000,00
16	Dinas Syariat Islam Aceh	1.315.584.560,00	2.106.334.780,00
17	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	188.306.000,00	198.156.000,00
18	Sekretariat Baitul Mal Aceh	11.000.000,00	84.657.500,00
19	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	17.240.000,00	17.240.000,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	4.827.611.100,00	4.827.611.100,00
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	1.909.754.403,00	1.603.332.354,00
	Dinas Peternakan Aceh	-	4.213.920.220,00
22	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	309.980.177,00	1.303.997.635,50
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	251.465.400,00	251.465.400,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	1.066.280.455,00	1.066.280.455,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	341.950.000,00	341.950.000,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	660.642.641,00	7.181.901.081,00
27	Badan Kepegawaian Aceh	1.678.226.400,00	1.678.226.400,00
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	52.000.000,00	1.113.469.063,00
	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	-	15.918.000,00
29	Sekretariat Daerah Aceh	69.649.120.123,53	78.584.239.129,44
30	Sekretariat DPRA	283.837.840,00	5.464.723.640,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	483.242.015,00	838.003.615,00
	JUMLAH	130.011.712.821,53	198.998.026.325,94

ASET HIBAH

NO	SKPA	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	Dinas Pendidikan Aceh	348.709.109.923,60	(230.161.215.885,78)	118.547.894.037,82
2	Dinas Kesehatan Aceh	37.656.473.552,00	(2.161.666.409,62)	35.494.807.142,38
3	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	6.912.732.917,00	(6.912.732.917,00)	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	465.375.106.587,00	(430.855.201.947,20)	34.519.904.639,80
5	Dinas Pengairan Aceh	351.047.875.957,41	(250.112.968.634,31)	100.934.907.323,10
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	637.166.437.842,00	(190.769.852.090,00)	446.396.585.752,00
7	Dinas Sosial Aceh	1.143.920.000,00	(148.184.000,00)	995.736.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	196.658.118.210,40	(11.892.378.231,27)	184.765.739.979,13
9	Dinas Pangan Aceh	1.329.787.400,00	(1.329.787.400,00)	-
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	29.841.892.800,00	(5.463.853.043,33)	24.378.039.756,67
11	Dinas Perhubungan Aceh	51.604.466.454,00	(36.706.166.015,63)	14.898.300.438,37
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	66.136.626.518,00	(7.341.672.848,16)	58.794.953.669,84
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	29.914.496.309,68	(2.965.421.177,01)	26.949.075.132,67
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	1.064.250.000,00	(106.425.000,00)	957.825.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	1.862.285.000,00	(575.723.172,86)	1.286.561.827,14
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	59.007.201.094,00	(17.611.808.281,17)	41.395.392.812,83
17	PPKA	132.456.145.354,00	(12.649.807.299,65)	119.806.338.054,35
18	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	2.566.802.000,00	(2.566.802.000,00)	-
19	Sekretariat Daerah Aceh	567.344.000,00	(567.344.000,00)	-
JUMLAH		2.421.021.071.919,09	(1.210.899.010.352,99)	1.210.122.061.566,10

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2020

No.	Uraian	Nomor Kontrak	Periode	Nilai Kontrak	Prestasi yang telah dinikmati	Prestasi yang belum dinikmati
	Pendapatan diterima dimuka					
I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Sewa Menyewa Kantin	032/880.a/2020	12 Okt 2020 s.d 10 Okt 2023	5.000.000,00	1.095.890,41	3.904.109,59
	Jumlah I			5.000.000,00	1.095.890,41	3.904.109,59
II	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk					
	Sewa Menyewa Kantin	01/49/I/2020	01 Feb 2020 s.d 31 Jan 2021	4.700.000,00	4.301.912,57	398.087,43
	Jumlah II			4.700.000,00	4.301.912,57	398.087,43
III	Dinas Pertanahan Aceh					
	Sewa Menyewa Kantin	-	22 Juni 2020 s.d 21 Juni 2021	4.345.000,00	2.297.493,15	2.047.506,85
	Jumlah III			4.345.000,00	2.297.493,15	2.047.506,85
IV	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh					
	SEWA MENYEWAWA KANTIN KANTOR	01/VII/2020	26 Juli 2020 s.d 25 Juli 2021	18.000.000,00	7.841.095,89	10.158.904,11
	Jumlah IV			18.000.000,00	7.841.095,89	10.158.904,11
V	Sekretariat Daerah					
	Sewa Menyewa Ruang Usaha Koperasi	1165.01/SP-SM/2020	21 Nov 2020 s.d 20 Nov 2021	7.000.000,00	786.301,37	6.213.698,63
	Sewa Menyewa Kantin	791.01/SP-SM/2020	1 Agt 2020 s.d 30 Agt 2021	20.000.000,00	8.406.593,41	11.593.406,59
	Sewa Ruang Kantor Bank Aceh Pembantu & ATM Bank Aceh	-	1 Agt 2020 s.d 30 Agt 2021	12.000.000,00	5.043.956,04	6.956.043,96
	Jumlah V			39.000.000,00	14.236.850,82	24.763.149,18
VI	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh					
	Sewa Menyewa Kantin	844/004/2020	1 Jan 202 s.d 31 Des 2020	16.200.000,00	16.200.000,00	-
	Sewa Menyewa Tempat Fotocopy	844/010/2020	1 Nov 2020 s.d 31 Okt 2021	6.000.000,00	1.002.739,73	4.997.254,69
	Sewa Tempat ATM Bank Aceh di Kantor BPKA	-	1 April 2019 s.d 31 Maret 2022	15.000.000,00	8.772.809,33	6.227.190,67
	Sewa Tempat ATM Bank Aceh di Kantor UPTD BATOH	-	1 Mei 2018 s.d 30 April 2021	45.000.000,00	40.072.988,64	4.927.011,36
	Jumlah VI			82.200.000,00	66.048.537,70	16.151.456,72
VII	Sekretariat DPRA					
	Sewa Menyewa Kantin	032/051/I/2020	-	15.000.000,00	-	5.753.923,36
	Jumlah VII			15.000.000,00	-	5.753.923,36
VIII	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh					
	Sewa Menyewa Kantin Kantor	-	10 agustus 2020 s.d 9 Agustus 2021	20.000.000,00	8.273.972,60	11.726.027,40
	Jumlah VIII			20.000.000,00	8.273.972,60	11.726.027,40
IX	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh					
	Sewa Menyewa Kantin Kantor	028/3391/VII/SEK/2020	10 agustus 2020 s.d 9 Agustus 2021	7.500.000,00	2.958.904,00	4.541.096,00
	Jumlah IX			7.500.000,00	2.958.904,00	4.541.096,00
X	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh					
	Sewa Kantin	051/SPK-KOP/X/2020	1 Oktober 2020 s.d 1 Oktober 2021	3.950.000,00	990.190,74	2.959.809,26
	Jumlah X			3.950.000,00	990.190,74	2.959.809,26
XI	Dinas Kelautan dan Perikanan					
	PT Muda Es Perkasa PPS Kutaraja	24/PKS/2019	22 Juli 2019 s.d 22 Juli 2024	250.050.000,00	72.440.553,12	177.609.446,88
	Daya Mitra Telekomunikasi	-	23 Agustus 2016 s.d 23 Agustus 2021	143.030.000,00	124.700.854,33	18.329.145,67
	-	NO.25/PKS/2018	27 Agustus 2018 s.d 26 Agustus 2023	655.925.000,00	308.037.027,91	347.887.972,09
	Sewa ATM	-	2 Nov 2020 s.d 31 Okt 2021	25.000.000,00	4.132.231,40	20.867.768,60

No.	Uraian	Nomor Kontrak	Periode	Nilai Kontrak	Prestasi yang telah dinikmati	Prestasi yang belum dinikmati
	PPN IDI		27 Juli 2020 s.d 27 Juli2023	37.500.000,00	5.410.958,90	32.089.041,10
	Sewa Lahan Lampulo PPS PT. Yakin		23 Nov 2017 s.d 23 Nov 2022	575.000.000,00	357.406.900,33	246.240.517,81
	Jumlah XI			1.686.505.000,00	872.128.525,99	843.023.892,15
XII	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh					
	Sewa Menyewa Kantin Kantor	1346/SP/DPMG/.	1 Maret 2020 s d 28 Feb 2021	9.000.000,00	7.520.547,95	1.454.794,52
	Jumlah XII			9.000.000,00	7.520.547,95	1.454.794,52
XIII	Dinas Perhubungan Aceh					
	Sewa Kapal KMP BRR oleh ASDP	28/PKS/2019 NOMOR:	2019	3.764.049.247,61	2.323.173.734,61	1.440.875.513,00
	Jumlah XIII			3.764.049.247,61	2.323.173.734,61	1.440.875.513,00
XIV	PPKA					
	Saldo Awal	-	-	-	-	2.247.317.023.081,27
	Silpa DAK Non Fisik TA 2020	-	-	-	-	13.087.360.324,36
	Sisa OTSUS TA 2020	-	-	-	-	326.755.009.019,34
	Silpa DAK Fisik TA 2020 Bidang Pendidikan dan Kesehatan	-	-	-	-	4.738.799.061,00
	Jumlah XIV			-	-	2.591.898.191.485,97
	TOTAL (I s.d XIV)			5.659.249.247,61	3.310.867.656,43	2.594.265.949.755,54

UTANG BELANJA

Utang Belanja Pegawai		196.628.061,00	940.504.752,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Kesehatan Aceh	169.717.459,00	169.717.459,00
2	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	-	244.191.100,00
3	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	-	2.210.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	-	69.380.774,00
5	Dinas Pertanahan Aceh	-	586.500,00
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	-	4.996.336,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	-	222.751,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	-	129.686.338,00
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	-	9.905.956,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	-	3.362.401,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	28.787.124,00
12	Sekretariat DPR	-	123.620.013,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	610.602,00	-
14	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	6.700.000,00	-
Jumlah		177.028.061,00	786.666.752,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	153.338.000,00
2	Sekretariat DPR	16.600.000,00	-
Jumlah		16.600.000,00	153.338.000,00
Utang Belanja Pegawai BLUD			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	BLUD Rumah Sakit Jiwa	3.000.000,00	500.000,00
Jumlah		3.000.000,00	500.000,00
Utang Belanja barang dan jasa		124.692.711.111,00	132.503.434.759,00
Utang Belanja Jasa			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Kesehatan Aceh	8.859.841.340,00	124.779.108,00
2	Dinas Perhubungan Aceh	-	41.413.000,00
3	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	31.185.000,00	-
4	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	25.091.880,00	54.185.747,00
5	Sekretariat Daerah	262.601.182,00	0,00
Jumlah		9.178.719.402,00	220.377.855,00
Utang Belanja Pemeliharaan			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Perhubungan Aceh	1.012.764.386,00	463.867.235,00
Jumlah		1.012.764.386,00	463.867.235,00
Utang Belanja Barang Hibah			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	229.635.450,00	-
Jumlah		229.635.450,00	-
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	103.918.030.106,00	116.505.524.408,00
2	BLUD Rumah Sakit Jiwa	1.499.109.379,00	487.618.965,00
3	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	4.068.810.733,00	10.747.718.905,00
4	Dinas Peternakan Aceh	489.686.000,00	-
Jumlah		109.975.636.218,00	127.740.862.278,00
Utang Belanja Telepon			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan Aceh	34.006.600,00	28.465.039,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	1.801.497,00	671.112,00
3	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	8.769.759,00	12.773.122,00
4	BLUD Rumah Sakit Jiwa	163.640,00	117.340,00
5	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	417.335,00	391.030,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	559.526,00	559.740,00
7	Dinas Pengairan Aceh	9.865.414,00	12.036.190,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	-	184.980,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	2.636.253,00	2.659.606,00

No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
10	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	1.551.689,00	243.631,00
11	Dinas Sosial Aceh	113.570,00	113.570,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	9.197.020,00	-
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	2.619.775,00	2.450.944,00
14	Dinas Pangan Aceh	2.272.090,00	1.533.769,00
15	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	3.422.900,00	3.608.950,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	4.289.810,00	5.784.611,00
17	Dinas Perhubungan Aceh	131.077,00	189.515,00
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	523.901,00	745.986,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	3.722.659,00	3.202.660,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	3.127.010,00	3.321.555,00
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	4.551.866,00	-
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	7.214.256,00	6.769.677,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	17.184.157,00	13.377.667,00
24	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	6.311.037,00	6.026.595,00
25	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	-	77.360,00
26	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	7.924.410,00	2.033.500,00
27	Sekretariat Majelis Adat Aceh	2.340.222,00	2.027.504,00
28	Dinas Syariat Islam Aceh	5.489.680,00	5.505.180,00
29	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	5.066.020,00	5.536.013,00
30	Sekretariat Baitul Mal Aceh	125.015,00	119.710,00
31	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	1.136.450,00	1.046.190,00
32	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	4.228.733,00	2.163.987,00
33	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	36.466.672,00	17.689.089,00
34	Dinas Peternakan Aceh	12.243.598,00	8.143.701,00
35	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	278.630,00	291.130,00
36	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	2.912.433,00	3.019.981,00
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	10.067.386,00	4.879.583,00
38	Inspektorat Aceh	2.084.529,00	1.583.878,00
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	12.237.793,00	10.052.969,00
40	Badan Kepegawaian Aceh	83.440,00	83.440,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	6.305.934,00	710.190,00
42	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	7.637.562,00	4.811.724,00
43	Sekretariat Daerah Aceh	27.010.654,00	62.721.432,00
44	Sekretariat DPR	3.444.224,00	2.400.137,00
	Jumlah	271.536.226,00	240.123.987,00

Utang Belanja Air

No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan Aceh	11.433.210,00	29.188.615,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	14.579.560,00	24.877.040,00
3	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	99.165.060,00	115.123.050,00
4	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	12.505.280,00	19.232.450,00
5	Dinas Pengairan Aceh	5.645.310,00	8.083.180,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	4.965.900,00	9.085.330,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	4.704.190,00	2.255.260,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	12.685.440,00	2.774.160,00
9	Dinas Sosial Aceh	2.037.830,00	1.813.570,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	2.837.780,00	-
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	642.550,00	1.075.940,00
12	Dinas Pangan Aceh	710.890,00	1.322.960,00
13	Dinas Pertanahan Aceh	162.990,00	282.880,00
14	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	478.990,00	1.532.260,00
15	Dinas Perhubungan Aceh	11.448.300,00	2.697.950,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	1.600.470,00	1.127.350,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	4.915.070,00	16.008.360,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	-	501.730,00
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	15.334.570,00	23.236.400,00
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	7.527.470,00	11.039.210,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	1.289.210,00	1.602.650,00
22	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	40.977.050,00	6.863.470,00
23	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	390.150,00	207.160,00
24	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	29.363.400,00	3.176.500,00
25	Sekretariat Majelis Adat Aceh	511.040,00	592.070,00
26	Dinas Syariat Islam Aceh	32.679.411,00	-
27	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	205.500,00	949.500,00
28	Sekretariat Baitul Mal Aceh	598.380,00	737.200,00

No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
29	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	1.789.900,00	-
30	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	664.700,00	3.354.780,00
31	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	5.256.140,00	2.256.150,00
32	Dinas Peternakan Aceh	4.038.570,00	3.811.410,00
33	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	1.335.100,00	1.832.070,00
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	7.784.600,00	2.383.450,00
35	Inspektorat Aceh	434.320,00	535.280,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	1.354.510,00	1.770.970,00
37	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	9.358.200,00	2.251.060,00
38	Badan Kepegawaian Aceh	105.270,00	172.030,00
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	18.000,00	32.785.690,00
40	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	19.214.553,00	3.200.628,00
41	Sekretariat Daerah Aceh	86.364.900,00	72.462.320,00
42	Sekretariat DPRA	59.983.810,00	31.864.300,00
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	137.750,00	1.587.050,00
Jumlah		517.235.324,00	445.653.433,00

Utang Belanja Listrik

No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan Aceh	98.936.569,00	99.314.159,00
2	Dinas Kesehatan Aceh	178.722.642,00	101.770.830,00
3	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	657.363.399,00	636.929.554,00
4	BLUD Rumah Sakit Jiwa	57.126.175,00	60.902.700,00
5	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	72.762.200,00	95.197.500,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	47.186.612,00	57.000.050,00
7	Dinas Pengairan Aceh	41.951.832,00	45.357.751,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	43.134.048,00	61.017.600,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	19.319.971,00	24.121.278,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	34.775.191,00	32.709.961,00
11	Dinas Sosial Aceh	27.550.232,00	32.029.502,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	30.073.912,00	-
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	7.536.550,00	8.222.718,00
14	Dinas Pangan Aceh	17.686.169,00	31.442.591,00
15	Dinas Pertanahan Aceh	9.717.716,00	9.797.421,00
16	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	21.454.195,00	16.947.397,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	15.955.376,00	23.614.054,00
18	Dinas Perhubungan Aceh	96.915.526,00	123.233.691,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	74.310.578,00	80.987.100,00
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	21.362.719,00	26.162.697,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	15.877.367,00	14.655.782,00
22	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	83.954.527,00	110.292.596,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	90.170.655,00	136.740.313,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	65.909.123,00	50.806.627,00
25	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	84.543.968,00	41.059.386,00
26	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	6.481.256,00	7.031.402,00
27	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	53.176.016,00	73.590.349,00
28	Sekretariat Majelis Adat Aceh	12.022.902,00	11.088.431,00
29	Dinas Syariat Islam Aceh	103.904.877,00	120.810.330,00
30	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	17.484.877,00	26.610.583,00
31	Sekretariat Baitul Mal Aceh	8.656.259,00	8.541.821,00
32	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	20.747.174,00	9.353.916,00
33	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	90.884.293,00	120.718.176,00
34	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	247.342.906,00	134.590.526,00
35	Dinas Peternakan Aceh	48.928.083,00	67.258.983,00
36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	28.143.065,00	44.211.639,00
37	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	18.844.665,00	23.100.053,00
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	31.230.633,00	34.004.804,00
39	Inspektorat Aceh	20.871.579,00	22.031.406,00
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	36.571.134,00	41.453.791,00
41	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	86.929,00
42	Badan Kepegawaian Aceh	23.501.043,00	29.775.905,00
43	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	51.762.099,00	59.247.741,00
44	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	54.081.911,00	61.718.920,00
45	Sekretariat Daerah Aceh	234.669.364,00	252.800.924,00
46	Sekretariat DPRA	213.219.792,00	108.718.780,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	19.593.164,00	25.719.897,00
Jumlah		3.256.414.344,00	3.202.778.564,00

No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
Utang Belanja Kawat/Internet			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Kesehatan Aceh	45.696.350,00	23.990.196,00
2	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	15.113.000,00	4.007.690,00
3	BLUD Rumah Sakit Jiwa	1.969.000,00	-
4	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	2.166.500,00	2.077.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	18.607.397,00	18.568.190,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	4.597.220,00	5.351.250,00
7	Dinas Sosial Aceh	5.783.530,00	4.092.024,00
8	Dinas Pangan Aceh	4.182.874,00	3.712.083,00
9	Dinas Pertanahan Aceh	3.970.279,00	3.820.273,00
10	Dinas Perhubungan Aceh	17.262.240,00	11.486.950,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	2.638.446,00	1.772.201,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	7.020.255,00	6.935.457,00
13	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	5.440.060,00	5.063.694,00
14	Sekretariat Baitul Mal Aceh	4.011.515,00	3.894.210,00
15	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	3.381.297,00	4.450.649,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	7.357.664,00	3.306.600,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	-	83.151.640,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	4.003.660,00	4.091.300,00
Jumlah		153.201.287,00	189.771.407,00
Utang Sewa Gedung Kantor/Tempat			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pendidikan Aceh	97.568.474,00	-
Jumlah		97.568.474,00	0,00
Utang Belanja Modal		63.063.174.747,41	2.550.839.000,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Perhubungan Aceh	4.562.872.499,00	-
Jumlah		4.562.872.499	-
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Kesehatan Aceh	2.777.681.218,00	-
Jumlah		2.777.681.218	-
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	23.962.943.835,00	-
2	Dinas Pengairan Aceh	27.845.889.902,41	-
Jumlah		51.808.833.737,41	-
Utang Belanja Modal BLUD			
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	3.881.675.293,00	2.550.839.000,00
2	BLUD Rumah Sakit Jiwa	32.112.000,00	-
Jumlah		3.913.787.293,00	2.550.839.000,00
Utang Belanja Hibah		179.870.000,00	-
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh	179.870.000,00	-
Jumlah		179.870.000,00	-
Utang Belanja Bantuan Sosial		399.848.950,00	399.848.950,00
No	SKPA	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	399.848.950,00	399.848.950,00
Jumlah		399.848.950,00	399.848.950,00
Total		188.532.232.869,41	136.394.627.461,00

Utang Transfer Bagi Hasil Pajak

No	Kab/Kota					JUMLAH (Rp)
		PKB (Rp)	BBN-KB (Rp)	PBB-KB (Rp)	PAP (Rp)	
1	Banda Aceh	2.262.118.469,00	813.396.688,00	2.631.100.347,00	21.242.988,00	5.727.858.492,00
2	Sabang	1.021.578.816,00	465.286.545,00	1.340.951.240,00	7.702.087,00	2.835.518.688,00
3	Aceh Besar	2.490.937.203,00	1.095.783.093,00	3.114.856.881,00	13.101.347,00	6.714.678.524,00
4	Pidie	2.348.019.274,00	1.072.732.120,00	2.959.174.449,00	7.600.295,00	6.387.526.138,00
5	Aceh Jaya	1.539.778.677,00	749.205.544,00	2.140.061.727,00	9.261.411,00	4.438.307.359,00
6	Bireuen	2.334.643.777,00	1.097.907.434,00	2.940.840.084,00	12.459.978,00	6.385.851.273,00
7	Pidie Jaya	1.359.263.577,00	644.842.209,00	1.875.597.966,00	6.721.267,00	3.886.425.019,00
8	Bener meriah	1.388.650.932,00	639.192.448,00	1.929.753.174,00	7.678.514,00	3.965.275.068,00
9	Lhokseumawe	1.548.014.624,00	704.952.203,00	2.072.423.418,00	31.678.140,00	4.357.068.385,00
10	Aceh Utara	2.667.566.472,00	1.392.310.139,00	3.266.387.842,00	29.832.780,00	7.356.097.233,00
11	Aceh Timur	2.536.032.159,00	1.296.423.361,00	3.516.746.272,00	18.542.075,00	7.367.743.867,00
12	Aceh Tengah	1.892.054.792,00	861.721.803,00	2.529.185.551,00	7.622.882,00	5.290.585.028,00
13	Gayo Lues	1.737.372.838,00	827.101.106,00	2.358.857.377,00	6.721.267,00	4.930.052.588,00
14	Aceh Tenggara	1.750.146.193,00	849.802.426,00	2.444.798.584,00	7.598.814,00	5.052.346.017,00
15	Langsa	1.397.395.414,00	659.145.211,00	1.931.406.987,00	8.130.379,00	3.996.077.991,00
16	Aceh Tamiang	1.822.651.602,00	825.447.145,00	2.437.248.604,00	14.962.838,00	5.100.310.189,00
17	Subulussalam	1.197.580.918,00	596.512.361,00	1.740.556.614,00	8.561.260,00	3.543.211.153,00
18	Aceh Selatan	1.860.898.246,00	893.814.842,00	2.507.722.530,00	8.083.181,00	5.270.518.799,00
19	Aceh Singkil	1.386.423.454,00	687.224.193,00	1.924.040.458,00	19.174.936,00	4.016.863.041,00
20	Simeulue	1.287.889.481,00	603.010.885,00	1.763.972.443,00	7.513.757,00	3.662.386.566,00
21	Aceh Barat	1.792.925.909,00	876.541.200,00	3.150.802.633,00	13.158.400,00	5.833.428.142,00
22	Nagan Raya	1.687.598.197,00	857.934.745,00	2.286.773.226,00	35.033.642,00	4.867.339.810,00
23	Aceh Barat Daya	1.398.503.675,00	669.586.174,00	1.871.789.713,00	6.796.036,00	3.946.675.598,00
Jumlah		40.708.044.699,00	19.179.873.875,00	54.735.048.120,00	309.178.274,00	114.932.144.968,00

Alokasi Dana Otsus Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Pergub No.50 Th. 2008	Pergub No.56 Th. 2009	SuratGub No. 903/45803 Th. 2009	SuratSekda an. Gub No. 903/25697 Th.2010	SuratGubNo. 902/2741 Th.2011	Pergub No.17 Th.2012	SuratGub No. 050/12841	Pergub No 10 Th 2015	Pergub No 19 Th 2016	Pergub No 19 Th 2017	Pergub No 19 Th 2017	Pergub No 19 Th 2017	Pergub No 26 Th 2019
	Provinsi Aceh	1.412.000.000.000	1.412.000.000.000	1.491.312.800.000	1.539.922.736.000	1.804.262.598.600	2.190.515.505.600	3.248.436.543.702	3.452.084.858.316	4.748.419.517.200	4.582.732.139.708	5.353.950.426.988	5.755.726.049.796	5.515.916.761.169
1	Kab Aceh Barat	93.590.000.000	93.590.000.000	90.890.680.684	96.846.530.789	118.179.368.304	137.811.790.756	126.032.648.587	125.447.783.438	120.027.345.386	145.172.828.135	118.934.901.324	106.185.848.936	74.324.170.320
2	Kab Aceh Besar	98.300.000.000	98.300.000.000	107.457.631.142	111.973.712.433	138.327.928.623	164.966.802.758	148.676.787.678	147.914.490.241	145.490.688.294	165.687.091.725	127.872.986.102	120.317.507.813	94.558.733.789
3	Kab Aceh Selatan	115.930.000.000	115.930.000.000	119.481.737.962	122.201.007.290	141.107.340.336	180.662.375.651	158.151.037.413	156.731.647.778	154.994.777.928	176.920.357.212	135.950.816.958	122.218.179.195	104.510.075.485
4	Kab Aceh Singkil	89.390.000.000	89.390.000.000	97.756.143.949	102.341.111.565	116.767.957.062	130.744.005.985	113.747.315.554	116.337.845.137	116.375.954.770	118.138.819.332	110.202.509.182	110.346.584.240	78.183.315.384
5	Kab Aceh Tengah	114.210.000.000	114.210.000.000	115.338.384.798	119.349.261.789	135.798.267.712	171.801.124.648	151.548.782.608	153.029.242.798	155.580.425.460	166.831.320.459	-	120.601.436.421	97.310.057.913
6	Kab Aceh Tenggara	102.220.000.000	102.220.000.000	111.850.356.683	119.631.216.398	144.032.456.686	183.285.909.131	162.405.107.409	194.829.969.574	163.800.562.878	175.095.446.154	178.898.377.582	129.419.727.670	102.095.040.286
7	Kab Aceh Timur	157.520.000.000	157.520.000.000	161.031.019.908	168.908.398.282	203.315.357.760	229.572.089.071	204.540.812.409	203.304.448.098	204.299.783.417	252.512.203.750	190.863.331.706	201.436.674.638	127.030.171.761
8	Kab Aceh Utara	100.710.000.000	100.710.000.000	127.648.390.364	123.034.524.324	138.766.784.896	177.233.160.034	136.328.668.055	132.384.928.052	129.524.653.383	178.692.371.265	130.523.243.754	123.597.532.105	124.980.601.676
9	Kab Bireuen	91.790.000.000	91.790.000.000	100.114.996.299	101.218.489.429	124.063.252.755	148.549.131.596	132.235.242.030	126.659.178.409	126.203.414.910	144.746.630.857	119.274.158.548	104.606.550.438	102.211.815.035
10	Kab Pidie	93.330.000.000	93.330.000.000	112.185.859.190	118.712.301.061	134.413.543.284	176.071.888.941	160.629.520.329	154.825.046.044	152.724.360.707	174.184.090.318	140.548.593.645	152.919.486.547	101.314.840.707
11	Kab Simeulue	89.920.000.000	89.920.000.000	86.781.751.584	92.611.954.618	106.151.786.712	123.803.304.936	105.326.444.150	108.490.033.837	106.477.927.991	129.993.185.554	106.309.441.090	98.370.423.520	67.433.146.749
12	Kota Banda Aceh	52.080.000.000	52.080.000.000	59.428.775.408	62.042.094.276	71.225.644.829	85.552.246.792	112.551.355.724	117.110.295.941	117.584.585.309	128.838.661.682	71.879.025.895	67.737.433.703	104.640.232.516
13	Kota Sabang	45.690.000.000	45.690.000.000	47.333.129.085	49.197.705.502	57.420.816.610	68.856.877.380	60.213.985.770	62.331.350.724	61.348.336.627	74.736.894.410	78.118.798.574	73.928.138.452	61.410.740.324
14	Kota Langsa	62.260.000.000	62.260.000.000	60.514.791.364	63.137.675.665	76.623.404.861	90.176.414.847	81.666.286.361	81.926.615.347	80.680.341.059	92.168.291.565	87.281.275.681	78.040.783.301	72.649.287.349
15	Kota Lhokseumawe	61.930.000.000	61.930.000.000	57.477.087.601	61.483.395.522	71.691.684.220	84.158.429.359	73.732.980.017	73.902.055.739	73.736.159.755	87.941.476.679	86.605.166.240	79.402.072.351	72.678.056.143
16	Kab Nagan Raya	118.880.000.000	118.880.000.000	104.310.101.317	110.914.506.152	136.282.859.178	146.705.576.546	145.833.596.496	145.845.274.513	140.100.960.736	183.468.756.928	163.927.648.337	128.955.146.560	92.511.283.451
17	Kab Aceh Jaya	110.060.000.000	110.060.000.000	118.117.558.841	117.762.405.634	138.679.171.139	175.261.062.131	152.474.420.522	158.425.915.563	155.557.222.303	163.831.996.389	129.907.836.447	121.610.719.314	81.547.053.280
18	Kab Aceh Barat Daya	78.300.000.000	78.300.000.000	85.673.554.517	94.471.359.985	107.873.209.046	128.140.347.483	111.022.420.534	111.439.098.930	111.681.805.860	126.398.383.430	108.009.555.427	104.242.275.217	83.427.389.141
19	Kab GayoLues	151.300.000.000	151.300.000.000	144.551.971.679	147.604.949.042	168.055.431.561	187.734.858.157	195.021.178.231	200.855.367.107	198.087.218.142	212.139.540.027	161.556.797.794	161.929.893.441	92.360.343.077
20	Kab Aceh Tamiang	94.270.000.000	94.270.000.000	99.218.010.668	91.571.509.786	107.646.469.694	146.903.529.583	133.953.744.076	126.829.640.443	133.123.671.881	149.383.161.807	119.614.281.198	108.632.715.049	92.072.358.433
21	Kab BenerMeriah	77.390.000.000	77.390.000.000	80.388.355.393	80.658.387.499	95.558.173.264	125.676.693.791	109.243.670.794	111.916.310.575	111.031.402.802	127.365.365.951	109.224.375.090	102.535.527.609	80.400.273.677
22	Kab Pidie Jaya	55.090.000.000	55.090.000.000	70.535.242.951	72.799.090.971	83.710.613.753	106.853.327.339	94.216.152.766	96.640.402.805	94.651.839.282	98.263.717.918	94.243.412.907	87.319.493.982	76.830.499.781
23	Kota Subulussalam	63.850.000.000	63.850.000.000	78.883.668.613	81.412.515.989	90.702.375.615	115.252.311.485	104.797.081.782	104.164.275.991	105.713.985.920	116.403.563.705	106.094.632.531	97.391.453.702	54.882.100.554
	Total Kab/Kota	2.118.010.000.000	2.118.010.000.000	2.236.969.200.000	2.309.884.104.001	2.706.393.897.900	3.285.773.258.400	2.974.349.239.295	3.011.341.217.084	2.958.797.424.800	3.388.914.155.252	2.675.841.166.012	2.601.745.604.204	2.039.361.586.831
	TOTAL ...	3.530.010.000.000	3.530.010.000.000	3.728.282.000.000	3.849.806.840.001	4.510.656.496.500	5.476.288.764.000	6.222.785.782.997	6.463.426.075.400	7.707.216.942.000	7.971.646.294.960	8.029.791.593.000	8.357.471.654.000	7.555.278.348.000

Paket Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang Masih Harus Dibayarkan

NO	NAMA PEKERJAAN	TAHUN PEMBAYARAN										TOTAL (SISA + BUNGA BANK)	PERUSAHAAN	KETERANGAN
		2010	No. SP2D	2011	No. SP2D	2012	No. SP2D	2013	No. SP2D	2018	No. SP2D			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pengaman Pantai Mantak Tari-III Kab. Pidie (Bencana Alam)	6.778.570.000,00	SPM	736.500.000,00	001423	745.686.000,00	0002866	938.843.000,00				3.448.713.000,00	PT. Kesayangan Perkasa	Rencana Dibayarkan TA. 2021
2	Perkuatan Tanggul Laut Gampong Geunteng Barat Kec Batee Kab. Pidie (Bencana Alam)							932.329.000,00				5.138.430.000,00	PT. Keumala Raya	Rencana Dibayarkan TA. 2021
3	Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Romeng Kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues (Bencana Alam)					1.491.618.000,00	SPM	1.000.000.000,00	Tidak Ada			5.276.312.000,00	PT. Nurtindo	Rencana Dibayarkan TA. 2021
4	Perkuatan Tebing Sungai Weih Pining Desa Pertik Kec. Pining Kab. Gayo Lues (Bencana Alam)	2.449.547.000,00	0030717			3.482.227.000,00	0001538	1.125.000.000,00	Tidak Ada			1.764.523.200,00	PT. Ayba Aceh Perdana	Rencana Dibayarkan TA. 2021
5	Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Ketukah Kec. Blangierang Kab. Gayo Lues (Bencana Alam)	4.947.063.000,00				2.346.820.000,00	0001477	1.050.000.000,00	Tidak Ada			1.053.814.000,00	PT. Alas Putra	Rencana Dibayarkan TA. 2021
6	Perkuatan Tebing Sungai Lawe Alas Desa Mbarung Kec. Babussalam (Paket-IV) Kab. Aceh Tenggara (Bencana Alam)					2.980.636.000,00	Tidak Ada	1.000.000.000,00	0036494			871.631.000,00	PT. Putra Nanggroe Aceh	Rencana Dibayarkan TA. 2021
7	Pengaman Tebing Sungai Kr. Naga Gampong Blang Baro Kec. Beutong Kab. Nagan Raya (Bencana Alam)	8.585.940.000,00	031265					750.000.000,00	SPM			792.867.452,00	PT. RPR Kontruksi	Rencana Dibayarkan TA. 2021
8	Perkuatan Tebing Sungai Kr. Jambor Aye Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara (Bencana Alam)					1.469.634.000,00	0001583	500.000.000,00	0038914			2.905.600.000,00	PT. Ketapang Jaya	Rencana Dibayarkan TA. 2021
9	Pengaman Tebing Sungai Cot Trieng (Paket II) Kota Lhokseumawe (Bencana Alam)	1.978.682.000,00	0031235	737.250.000,00	01402							6.480.000.000,00	PT. Agrawisesa Widyatama	Rencana Dibayarkan TA. 2021
10	Pengaman Tebing Sungai Kr. Meureudu Desa Meunasah Lhok Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya (Bencana Alam)							500.000.000,00	0039146			6.904.692.000,00	PT. Pondok Indah Sejahtera	Rencana Dibayarkan TA. 2021
11	Pengaman Tebing Sungai Kr. Meureudu Desa Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya (Bencana Alam)					994.846.000,00	0001840					8.726.278.200,00	PT. Syakura	Rencana Dibayarkan TA. 2021
12	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kr. Meukek Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan (Bencana Alam)	8.996.900.000,00	031116	1.964.000.000,00	01427	3.951.633.000,00	01310	750.000.000,00	042084	6.784.367.000,00	0018637	4.600.000.000,00	PT. Agrawisesa Widyatama	Rencana Dibayarkan TA. 2021
13	Pengaman Tebing Sungai Kr. Ulim Kab. Pidie (Bencana Alam)	2.496.700.000,00	0031014					500.000.000,00	0040042			588.264.000,00	PT. Citra Karsa	
14	Perkuatan Tebing Sungai Kr. Peunalom Kec. Tangse (Bencana Alam)					497.714.000,00	0001534	750.000.000,00	0040111			1.700.804.000,00	PT. Tamitana	Putusan PN/PT
15	Perkuatan Tebing Sungai Bayeun Gampong Bayeun Kec. Rantau Selamat Kab. Aceh Timur (Bencana Alam)			2.463.990.000,00	001662	496.186.000,00	0001866	750.000.000,00	0040683			1.029.077.000,00	PT. Sahabat Renceng Abadi	
16	Perkuatan Tebing Sungai Weih Tripe Desa Rerebe Kec. Tripe Jaya Kab. Gayo Lues (Bencana Alam)	3.917.931.000,00	0031029			2.483.500.000,00	0001039	1.250.000.000,00	0039573			618.683.900,00	PT. Kalkausar Prakarsa	Putusan PN/PT
17	Pengaman Tebing Sungai Kr. Meureudu Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya (Bencana Alam)					3.979.197.000,00	0002001	500.000.000,00	0040759			4.519.097.000,00	PT. Rika Jaya	
18	Pengaman Tebing Sungai dan Normalisasi Sungai Lawe Alas Desa Tualang Sembilar Kec. Bukit Tusan Kab. Aceh Tenggara (Bencana Alam)	4.541.496.000,00	0030765			968.674.000,00	0001481	750.000.000,00	0038925			2.388.377.500,00	PT. Hensa Prima	Putusan PN/PT
19	Pengaman Tebing Sungai Kr. Nagan Gampong Panteuen Bayam Kec. Beutong Kab. Nagan Raya (Bencana Alam)	6.488.000.000,00	0031264					750.000.000,00	0040119			125.583.000,00	PT. Mega Indah Selatan (Mise)	
20	Pengaman Tebing Sungai Kr. Tripa Gampong Lamie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya (Bencana Alam)					994.642.000,00	0002876	642.800.000,00	0040689			6.257.093.380,00	PT. Aceh Raja Apresindo	Putusan PN/PT
21	Pengaman Tebing Sungai Kr. Rundeng Kec. Rundeng Kota Subulussalam (Bencana Alam)							700.000.000,00	0039788			3.086.152.000,00	PT. Adi Pratama Perkasa	Putusan PN/PT
22	Pengaman Pantai Sawang Ba'u Kec. Sawang (Paket I) Kab. Aceh Selatan (Bencana Alam)					1.989.371.000,00	0001394	1.000.000.000,00	0041763			5.513.838.756,00	PT. Cibina Bersama	Putusan PN/PT
23	Pengaman Pantai Sawang Ba'u Kec. Sawang (Paket-IV) Kab. Aceh Selatan (Bencana Alam)							750.000.000,00	0039769			8.600.778.355,92	PT. Rayusi Utama	Putusan PN/PT
24	Pengaman Tebing dan Normalisasi Kr. Peuto Kab. Aceh Utara (Bencana Alam)							750.000.000,00	0039903			6.241.678.356,00	PT. Aldy Jaya Utama	Putusan PN/PT
25	Perkuatan Tebing Sungai Kr. Pase Desa Tanjong Baroh Kec. Samudera Kab. Aceh Utara (Bencana Alam)							500.000.000,00	0041090			3.008.638.000,00	PT. Masra Indah Permai	Putusan PN/PT
26	Perkuatan Tebing Kr. Leubu Kab. Bireuen (Bencana Alam)	2.395.700.000,00	0031071			983.884.000,00	0004640	750.000.000,00	0042146			5.894.111.954,59	PT. Bina Mandiri Teguh Perkasa	Putusan PN/PT
27	Perkuatan Tebing Sungai Kr. Peusangan Desa Teupin Raya Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab. Bireuen (Bencana Alam)					995.820.000,00	0002116	500.000.000,00	0039561			801.365.168,16	PT. Loeh Raya Perkasa	Putusan PN/PT

NO	NAMA PEKERJAAN	TAHUN PEMBAYARAN										TOTAL	PERUSAHAAN	KETERANGAN
		2010	No. SP2D	2011	No. SP2D	2012	No. SP2D	2013	No. SP2D	2018	No. SP2D	(SISA + BUNGA BANK)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Pembangunan Jetty TPI Desa Lamteungoh Kab. Aceh Besar (Bencana Alam)	2.924.848.000,00	0031174									19.764.389.760,21	PT. Nova Bayzuri Graha	Putusan PN/PT
29	Pembangunan Jetty Kuala Krueng Pudeng Lhoong Kab. Aceh Besar (Bencana Alam)							1.000.000.000,00	0039782			4.219.239.471,20	PT. Ricika Karya Perkasa	Putusan PN/PT
30	Pengaman Tebing Sungai Krueng Pase (Bencana Alam)	4.994.470.000,00	0030756									3.714.085.970,00	PT. Tuah Alam	Putusan PN/PT
31	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kr. Peusangan Gp. Suwak Kec. Peusangan Kab. Bireuen (Bencana Alam)	1.994.140.000,00	0031270			4.479.254.000,00	0041540 0041541					917.191.000,00	PT. Berkat Jaya Abadi	Putusan PN/PT
Jumlah		63.489.987.000		5.901.740.000,00		35.331.342.000		20.388.972.000,00				126.951.309.424,08		



PEMERINTAH ACEH



LAPORAN BUMD

*Laporan Keuangan Tahun 2020
Audited*